SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyrakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
b. bahwa dinamika pertumbuhan penduduk tidak selalu dapat diimbangi dengan penyesuaian pemanfaatan lahan kawasan perumahan dan permukiman sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
5. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
6. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
7. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk :

a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
e. merumuskan perencanaan penyediaaan tanah;
f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;

b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang;
c. Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Situbondo;
d. Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Situbondo;
e. Program Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Situbondo.

BAB II
PENYUSUNAN

Pasal 4

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh memiliki fungsi sebagai :

a. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai acuan pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi seluruh pelaku pelaksanaan penyelenggaran penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan;
b. agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Pasal 5

(1) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang mempunyai rencana untuk jangka pendek, maupun jangka menengah.
(2) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, Swasta, dan Masyarakat.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
BAB III	:	PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
BAB IV	:	PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
BAB V	:	KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
BAB VI	:	RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
BAB VII	:	RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
BAB VIII	:	RENCANA PENYEDIAAN TANAH
BAB IX	:	RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN
BAB X	:	RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

(2) Uraian secara rinci Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 06 Desember 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 06 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 92

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 06 Desember 2022
Nomor : 91 Tahun 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan permukiman saat ini yang masih menjadi masalah utama adalah munculnya permukiman kumuh di daerah perkotaan. Arus urbanisasi, taraf hidup, dan lingkungan merupakan beberapa faktor yang meyebabkan kekumuhan di perumahan dan kawasan permukiman. Disisi lain, belum terpenuhinya standart pelayanan minimal (SPM) perkotaan pada kawasan permukiman sehingga memicu timbulnya kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Bermukim di kawasan kumuh perkotaan bukan merupakan pilihan melainkan suatu keterpaksaan bagi kaum migran yang tidak terampil, sehingga harus menerima keadaan lingkungan permukiman yang tidak layak dan berada dibawah standar pelayanan minimal seperti rendahnya mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, sampah serta masalah-masalah lain seperti kepadatan dan ketidak teraturan letak bangunan yang berdampak ganda baik yang berkaitan dengan fisik misalnya bahaya kebakaran maupun dampak sosial seperti tingkat kriminal yang cenderung meningkat dari waktu kewaktu.

Masalah permukiman kumuh menjadi sarat muatan sosial, budaya ekonomi dan politik dengan serta merta mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang nyaris menjadi laten dan hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban diberbagai tatanan sosial masyarakat.

Kabupaten Situbondo juga tidak terlepas dari permasalahan permukiman kumuh tersebut, kondisi ini muncul dikarenakan perkembangan permukiman yang sangat pesat diwilayah perkotaan dengan tidak diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana permukiman yang memadai. Kondisi geografis Kabupaten Situbondo yang beragam membuat karakteristik permukiman di Kabupaten Situbondo juga beragam. Selain faktor sosial ekonomi masyarakat dan

lingkungan, karakteristik permukiman kumuh juga muncul di kawasan tepian sungai sampai dengan kawasan dataran diatasnya. Upaya penanganan permasalahan ini khususnya permukiman kumuh dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sangat diperlukan, sehingga kondisi kawasan permukiman di Kabupaten Situbondo dapat dikatakan zero kumuh.

Sebaran permukiman kumuh Situbondo tersebar yang tentunya memiliki tipologi dan pemasalahan kumuh yang berbeda-beda. Permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo terbagi menjadi kumuh perkotaan dan kumuh pedesaan. Kumuh perkotaan memiliki tipologi perkotaan yang ditandai dengan kepadatan bangunan sedang-tinggi, merupakan pusat kegiatan kota karena terdapat fasilitas – fasilitas pendukung tingkat kota/ kecamatan. Permukiman kumuh perkotaan yang ada di Kabupaten Situbondo disebabkan karena degradasi lingkungan yang diakibatkan tingginya aktivitas namun tidak didukung dengan peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Sedangkan Permasalahan Permukiman kumuh pedesaan disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar sehingga mengakibatkan ketimpangan antara kebutuhan dan juga penyediaan infrastruktur dasar masyarakat pedesaan. Secara garis besar penyebab kekumuhan di Kabupaten Situbondo antara lain :

1. Adanya permasalahan pada bangunan hunian yang tidak layak huni karena arus urbanisasi yang tinggi dihadapkan dengan kapasitas masyarakat yang tidak mampu bersaing di perkotaan mengakibatkan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu memiliki hunian yang layak bagi kehidupan mereka
2. Pemasalahan jaringan jalan yang rusak akibat aktivitas manusia yang tinggi
3. Permasalahan genangan akibat drainase rusak dan buangan sampah dan limbah mengakibatkan sedimentasi saluran, kepadatan bangunan tinggi sehingga minim resapan
4. Permasalahan buangan limbah langsung ke saluran drainase mengakibatkan pencemaran saluran diakibatkan pembangunan jamban yang tidak terhubung dengan tanki septic
5. Permasalahan proteksi kebakaran dikarenakan belum tersediannya sistem proteksi kebakaran serta kepadatan bangunan tinggi dan jalan yang sempit sehingga mengakibatkan sulitnya evakuasi bencana
6. Masih terdapat jaringan jalan yang belum terbangun sehingga tingkat kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas berkurang
7. Masih banyak drainase tidak terbangun sehingga aliran air tidak teralirkan dengan baik

8. Permasalahan sampah yang masih dikelola dengan cara di bakar di pekarangan karena belum terlayani sistem pengakutan kota
9. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban/ MCK pribadi, masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas MCK di sungai dan di pekarangan rumah

Pada umumnya kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo termasuk dalam kategori dengan kondisi status lahan yang legal, sehingga melalui pola penanganan kumuh yang dapat dilakukan untuk mengatasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo adalah dengan menggunakan Pola Pemugaran. Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh tersebut melalui SK Bupati. Situbondo. Melalui identifikasi tersebut, penanganan dilakukan sesuai Undang-undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di pasal VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman mengamanatkan :

a. Pasal 96, disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis.
b. Pasal 97 ; disebutkan bahwa peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
c. Pasal 98 ayat 2 ; disebutkan bahwa penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat

Berdasarkan UU tersebut, Menteri PUPR menetapkan Permen PUPR no 2 Tahun 2016 (mengatur 7 aspek dan 19 kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh) dan diperbarui dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (mengatur 7 aspek dan 16 kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh). Pendataan dan penilaian kekumuhan mengacu kepada Permen PUPR nomor 14 tahun 2018, dalam Permen tersebut diatur mengenai 7 aspek dan 16 kriteria perumahan dan permukiman kumuh. PEMDA melakukan

pendataan dengan melibatkan masyarakat yaitu identifikasi lokasi dan penilaian lokasi mencakup lokasi kekumuhan, legalitas tanah dan pertimbangan lain

Sejalan dengan terbitnya RPJMN 2020-2024, pendataan permukiman kumuh diharapkan dapat menyediakan data untuk keperluan mengukur kontribusi program peningkatan kualitas permukiman terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan 6 dan 11. Oleh karena itu kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh akan dilengkapi dengan penanganan terhadap akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, air minum layak dan aman, dan sanitasi layak yang metode pengukuran mengacu kepada pedoman pengukuran capaian pembangunan perumahan dan permukiman yang diterbitkan oleh kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional pada bulan Mei Tahun 2019.

Sehingga dengan disusunnya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini diharapkan mampu meningkatkan percepatan Penanagan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Kumuh yang telah ditetapkan Bupati, tersusunnya rencana dan strategi penanganan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terlaksananya keterpaduan program/ kegiatan dalam penyelesaian permasalahan kawasan kumuh, meningkatan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama pemangku kepentingan, Penguatan Pemerintah Kabupaten melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan Kawasan kumuh, peningkatan kapasitas bagi komunitas melalui pola aksi partisipatif, tercapaiannya keberlanjutan program penanganan kawasan permukiman kumuh yang diselenggarakan oleh swadaya peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah.

Secara garis besar latar belakang dari kegiatan RP2KPKPK ini dapat dilihat pada gambar berikut:

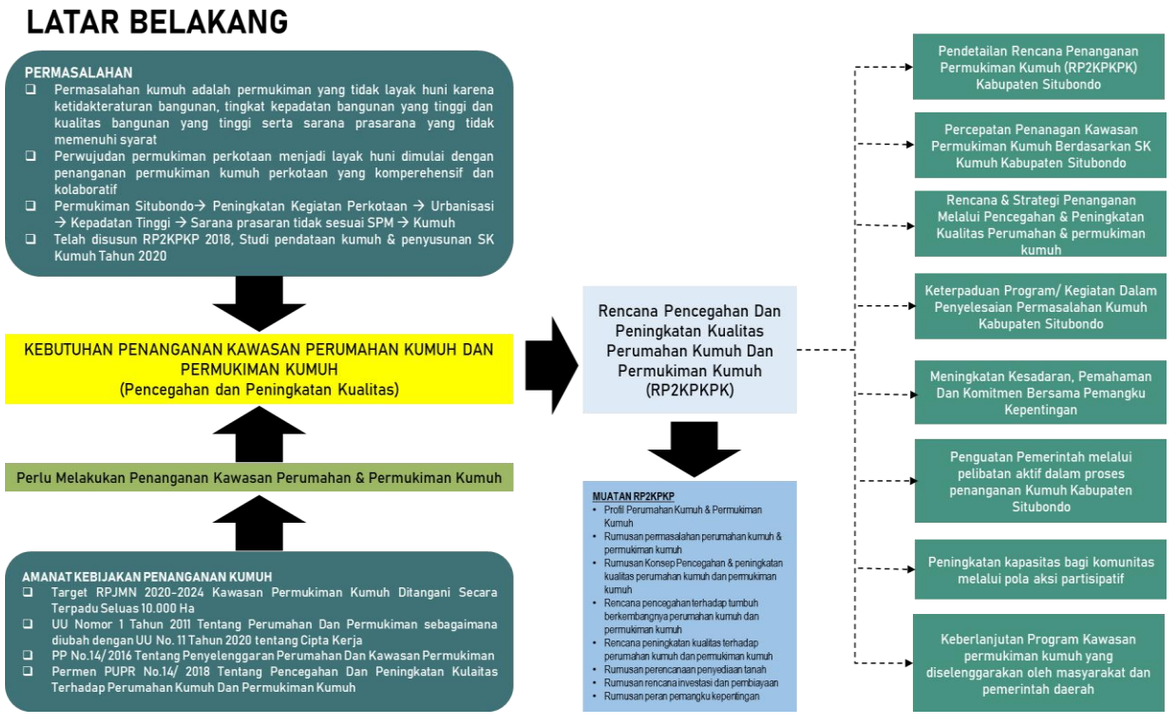

Gambar 1. 1 Latar Belakang Penyusunan RP2KPKPK

Sumber : Hasil Analisa, 2022

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan dokumen RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Situbondo tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Situbondo

Tujuan :

1) Memberikan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam perumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dalam mencapai target zero kumuh (100-0-100)
2) Memberikan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyusunan dokumen perencanaan kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, baik fisik maupun non fisik
3) Memberikan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo agar dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama pada upaya penanganan perumahan dan permukiman kumuh
4) Memberikan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo agar senantiasa mempunyai komitmen tinggi serta konsisten didalam

implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutannya

1.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang dicapai adalah :

1) Mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
2) Merumuskan konsep dan strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
3) Merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
4) Merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman kumuh;
5) Tersedianya agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
6) Merumuskan perencanaan penyediaaan tanah; Merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan Merumuskan peran pemangku kepentingan.

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 59 ayat (2) pencegahan tumbuhnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan bagian dari pengembangan lingkungan hunian perkotaan. Sesuai dengan amanat tersebut, maka lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK akan dilaksanakan pada permukiman perkotaan. Untuk wilayah yang berstatus kabupaten, maka lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK mencakup kawasan di dalam wilayah administrasi kabupaten yang didefinisikan sebagai permukiman kumuh oleh SK Bupati dan hasil verifikasinya.

Sehingga secara spasial, lokasi kegiatan Penyusunan RP2KPKPK adalah sebagaimana Keputusan Bupati Situbondo tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Situbondo.

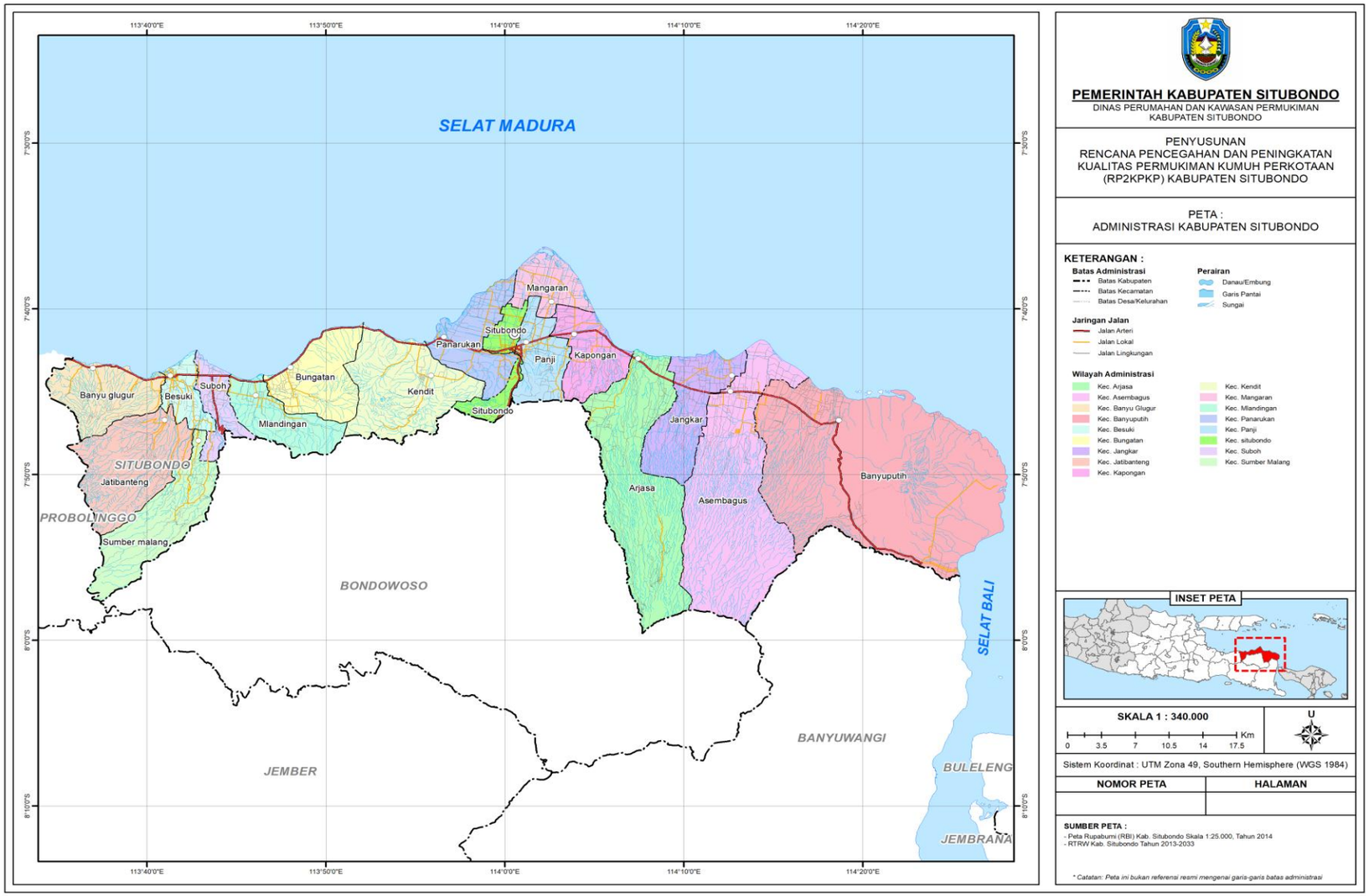

Peta 1. 1 Administrasi Kabupaten Situbondo

Sumber : RP2KPKP, 2018

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan berdasarkan SEDJCK Nomor 30/SE/DC/2020 mengenai penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Secara garis besar lingkup kegiatan penyusunan RP2KPKPK terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu :

a. Persiapan;
b. Survei;
c. Penyusunan Data dan Fakta;
d. Analisis;
e. Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
f. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
g. Legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan besar dan capaian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Keterkaitan Lingkup Kegiatan dengan Capaian dalam Kegiatan Penyusunan RP2KPKPK

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Persiapan	
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK	a. Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan RP2KPKPK b. Memperkaya dokumen RP2KPKPK dengan Konsep Pembangunan Permukiman yang Berkelanjutan
2. Melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja	a. Rencana Kerja b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistik terkait	a. Data awal profil permukiman kumuh
4. Melakukan penyiapan readiness kriteria penyusunan RP2KPKPK	a. SK Lokasi Permukiman Kumuh, SK Pokja PKP Kabupaten/Kota dan Peta Dasar b. Peta dasar skala 1:25.000 untuk kota dan 1:50.000 untuk kabupaten c. Peta skalatis untuk skala kawasan prioritas
5. Overview kebijakan daerah	a. Hasil overview dokumen

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang kabupaten/kota dan status tanah permukima	perencanaan dan kebijakan daerah b. Hasil overview dokumen status tanah dan perpetaan status tanah permukiman c. Peta kesesuaian permukiman terhadap rencana pola ruang kabupaten/kota (guna lahan permukiman)
6. Melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Provinsi	a. Berita acara dan hasil koordinasi dengan Pokja PKP Provinsi
7. Melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten/kota	a. Terbentuknya/tersiapkannya kelembagaan masyarakat (BKM/LKSM) yang terdaftar/legal secara hukum
Survey	
1. Bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder	Hasil sinkronisasi data kumuh (primer dan sekunder)
2. Menyusun desain survei	Desain survei
3. Melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Pokja PKP kabupaten/kota	a. Hasil survei berupa gambaran permukiman kumuh kabupaten/kota dan hasil pengolahan data permukiman kumuh b. Hasil kompilasi data dari hasil survei dan data baseline sesuai dengan kriteria dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018
Penusunan Data dan Fakta	
1. Verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman kumuh	a. Data hasil verifikasi lokasi (delineasi, luasan, layanan hunian dan infrastruktur) b. Indikasi justifikasi penanganan pada lokasi permukiman kumuh c. Profil permukiman kumuh yang telah terverifikasi
Analisis	
1. Melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh	Berita acara penyelenggaraan FGD (verifikasi lokasi kumuh dan kawasan prioritas dan penyepakatan justifikasi indikasi penanganan pada permukiman kumuh
2. Melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan	a. Daftar peringkat permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh	kekumuhan b. Peta justifikasi penanganan permukiman kumuh
Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
1. Merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)	Menghasilkan arahan pola kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)
2. Bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)	Pembagian peran dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas) Harmonisasi dengan rencana aksi pokja PKP provinsi untuk pembangunan permukiman kabupaten/kota
3. Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan Peningkatan kualitas)	a. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas) b. Agenda/rencana pengembangan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
4. Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
5. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten/kota yang berkelanjutan, dengan adanya added value dalam penanganan kumuh	Berita acara penyelenggaraan FGD (konsep dan strategi dan indikasi added value dalam penanganan permukiman kumuh)
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
1. Merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian	a. Skenario pencapaian kota bebas kumuh dan tindak lanjut pengendalian keberlanjutan pembangunan perkotaan b. Desain kawasan dan skenario penanganan permukiman kumuh
2. Merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten/kota, skala kawasan dan skala lingkungan	a. Rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kabupaten/kota, skala kawasan dan skala lingkungan. b. Rencana investasi dan pembiayaan permukiman kumuh c. Memorandum keterpaduan program

LINGKUP KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
	d. pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
3. Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain	Skala prioritas penanganan permukiman kumuh
4. Merumuskan konsep tematik & skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas	Konsep tematik dan skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas
5. Menyusun rencana penyediaan tanah	Rencana Penyediaan Tanah untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali
6. Menyusun rencana investasi & pembiayaan kawasa prioritas	Rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas
7. Bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas	a. Terselenggaranya perencanaan partisipatif (pelaksanaan RKM dan penyepakatan komponen DED) pada kawasan prioritas b. Disusunnya agenda tindak lanjut oleh pemangku kepentingan di kabupaten/kota
8. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan	Berita acara FGD (rencana aksi, program dan kegiatan)
Legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
1. Penyusunan legal drafting rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK	Draft Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK dan lampiran (dokumen RP2KPKPK)
2. Legalisasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK	Peraturan Walikota/Peraturan Bupati RP2KPKPK

Sumber : SEDJCK Nomor 30/SE/DC/2020

1.3.3 Ruang Lingkup Substansi

Kedalaman substansi dari RP2KPKPK sampai dengan strategi dan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kabupaten/kota menuju 0% kumuh (sampai penanganan kumuh tuntas) yang dijabarkan ke dalam rencana keterpaduan program penanganan dan penyusunan desain teknis dalam skala kawasan dan skala lingkungan. Rencana keterpaduan program penanganan permukiman kumuh merupakan penjabaran dari strategi dan program ke dalam skala kawasan dan lingkungan yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam mencapai 0% kumuh dan didetailkan pada program tahunan (jangka pendek). Untuk komponen infrastruktur permukiman pada program

tahun pertama di kawasan prioritas dilakukan penyusunan kebutuhan program penanganan RP2KPKPK dalam skala kabupaten/kota, skala kawasan, skala lingkungan, dan program pembangunan pada tahun pertama disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a. Kebijakan dan strategi yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh;
b. Strategi dan program yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku dan terkait dengan penanganan permukiman kumuh
c. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh, yang didasarkan pada isu strategis kawasan permukiman kumuh dan karakteristik permasalahan permukiman kumuh secara eksisting;
d. Target capaian dalam menuju 0% permukiman kumuh serta tindak lanjut dalam mencapai kota layak huni dan berkelanjutan;
e. Readiness Criteria yang dapat menjadi pembatas ataupun pendorong bagi terwujudnya target capaian menuju 0% permukiman kumuh dan agenda tindaklanjut pembangunan permukiman berupa :
    1) sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupeten/kota);
    2) kesiapan lahan yang tersedia untuk pembangunan;
    3) kesiapan masyarakat dalam mendukung program penanganan kumuh;
    4) kebijakaan pemerintah kabupaten/kota dan sebagainya

Fokus dari obyek yang diatur di dalam RP2KPKPK sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 adalah program dan kegiatan terkait dengan infrastruktur permukiman, yang terdiri atas:

a. kondisi fisik bangunan hunian;
b. aksesibilitas lingkungan;
c. kondisi drainase lingkungan;
d. kondisi pelayanan air minum/baku;
e. kondisi pengelolaan air limbah;
f. kondisi pengelolaan persampahan; dan
g. kondisi proteksi kebakaran;

Selain fokus pada infrastruktur permukiman kumuh, program dan kegiatan yang disusun dapat juga mencakup infrastruktur bidang lainnya yang dibutuhkan di dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses penilaian terhadap permukiman kumuh terdapat beberapa pertimbangan lain yaitu kejelasan status lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi budaya

masyarakat. Beberapa fokus objek lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum dari kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kabupaten Situbondos dilakukan berlandaskan pada :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

1.5 KEDUDUKAN DOKUMEN RP2KPKPK DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No. 12/2021, merupakan bagian dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3). Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun dikawasan perdesaan. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini:

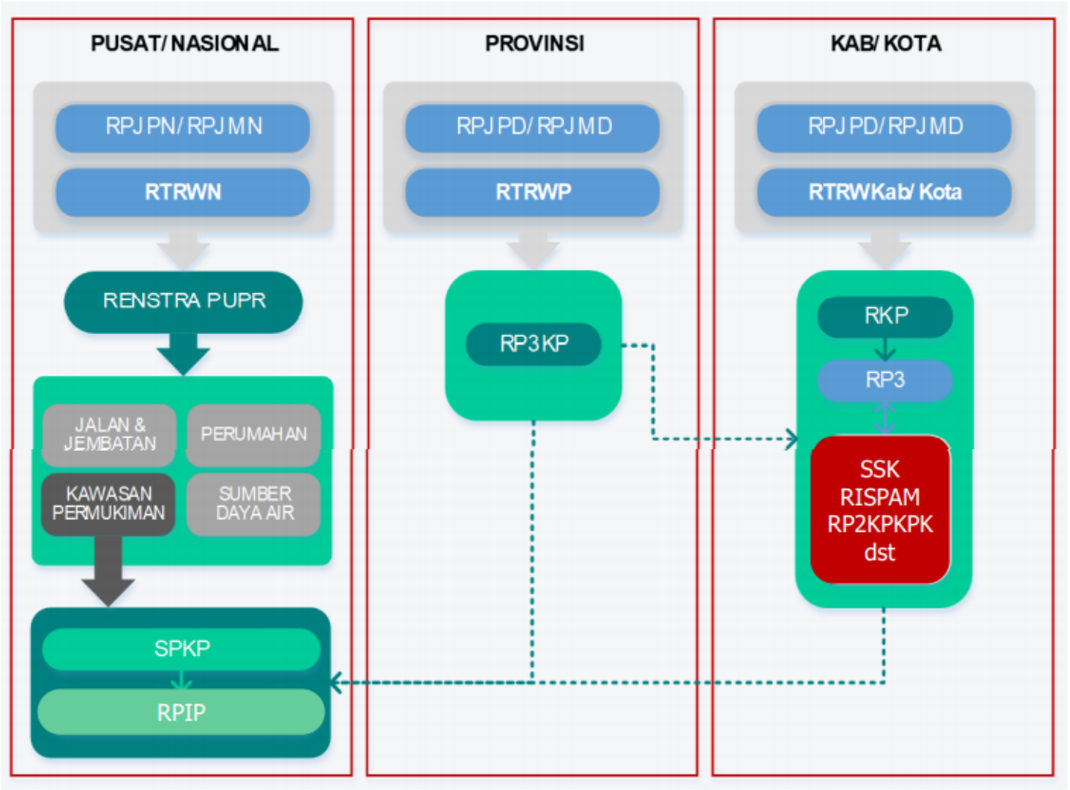

Gambar 1. 2 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumber : SE-DJCK/ 30/ 2020

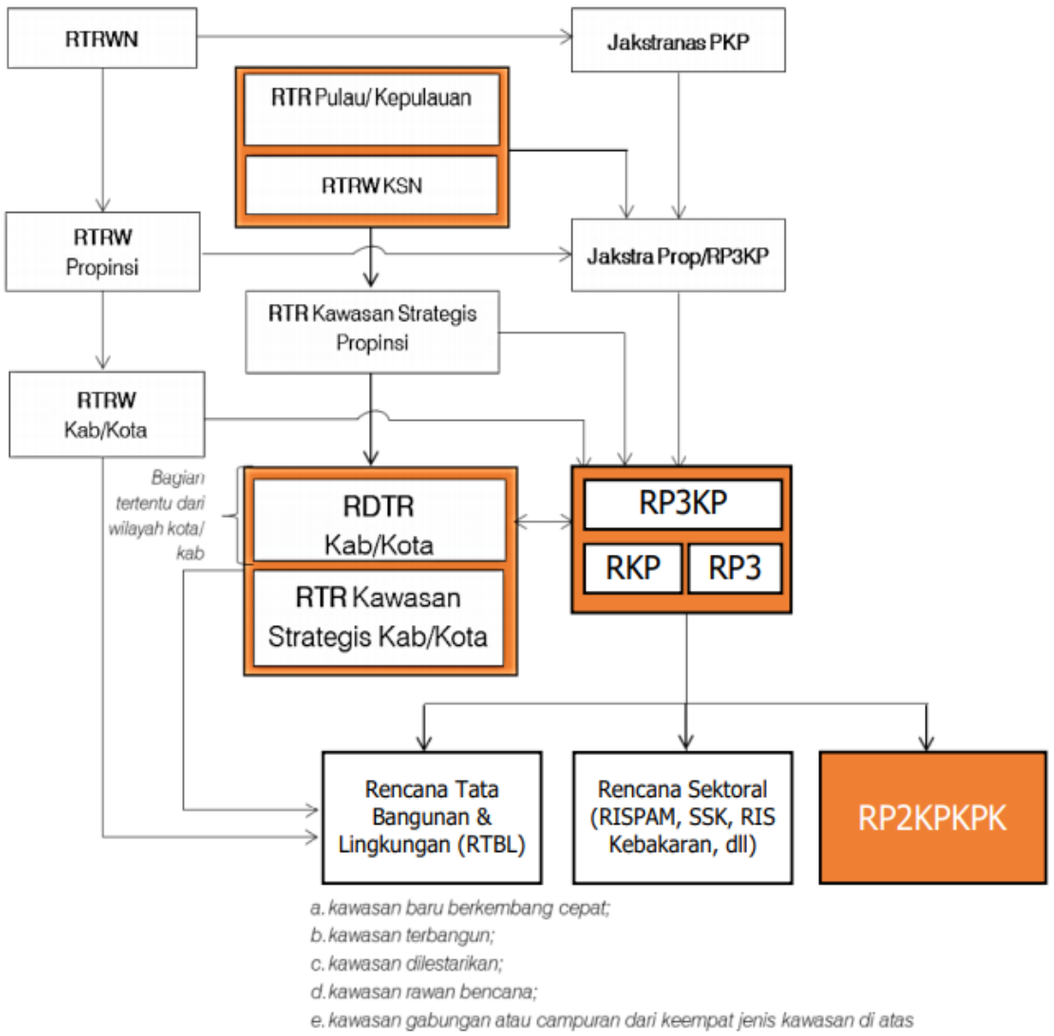

Gambar 1. 3 Kedudukan RP2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya
Sumber : SE-DJCK/ 30/ 2020

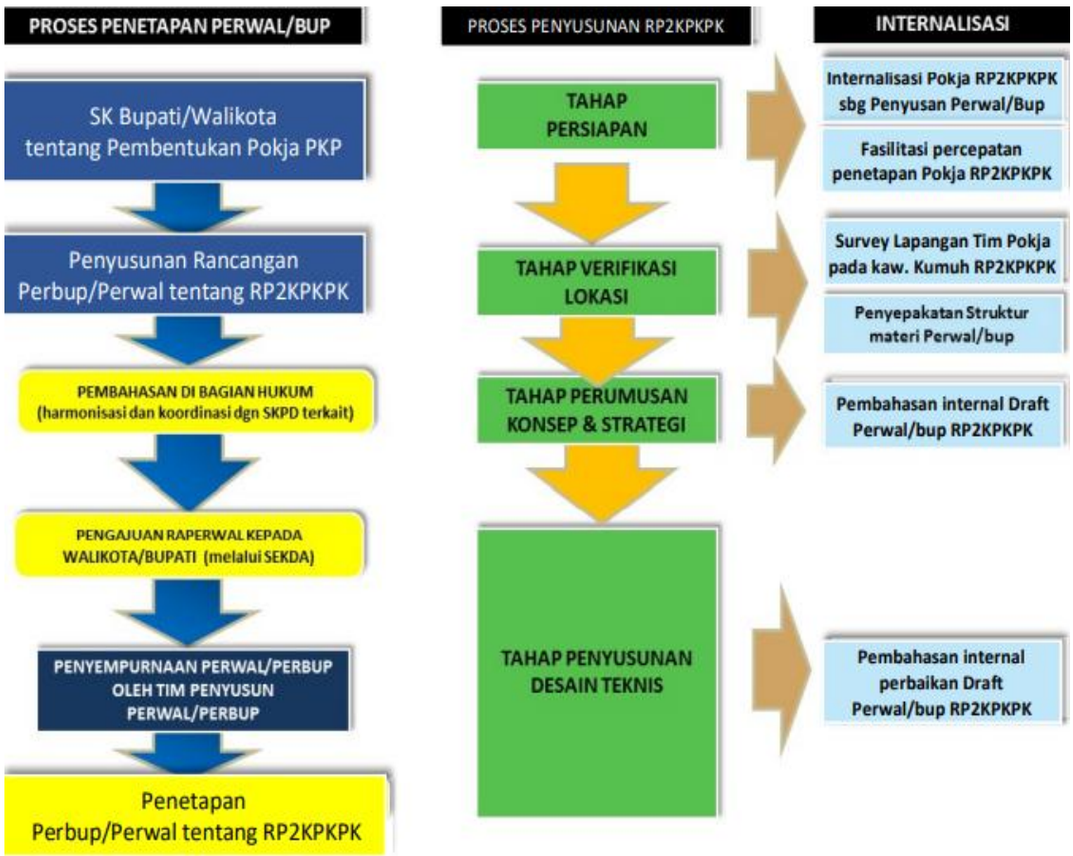

Gambar 1. 4 Kedudukan Proses Penyusunan Produk Peraturan Kepala Daerah dan Dokumen RP2KPKPK

Sumber : SE-DJCK/30/2020

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk memudahkan dalam pemahaman substansi, Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Situbondo Tahun 2022 ini dibagi kedalam 10 (sepuluh) bab, yang meliputi (i) Pendahuluan; (ii) Kajian Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman (iii) Profil Permukiman Kumuh; (iv) Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh; (v) Konsep Pencegahan & Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, (vi) Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, (vii) Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, (viii) Rencana Penyediaan Tanah, (ix) Rencana Investasi Dan Pembiayaan dan (x) Rumusan Peran Pemangku Kepentingan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup yang berisikan lokasi dan materi studi, kemudian pengertian kedudukan serta output, landasan hukum serta yang terakhir adalah sistematika penyajian dari Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Situbondo.

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pada bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Situbondo yang telah dioverview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh.

- Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman
- Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
- Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait.

- Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi
- Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM)
- Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan

BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan
- Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh

BAB V KONSEP PENCEGAHAN & PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh.

- Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota
- Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan

BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

- Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP)
- Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders.

- Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh
- Program peningkatan kualitas kawasan prioritas
- Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan
- Memorandum Program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh
- Rencana aksi masyarakat Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

BAB II
KAJIAN KEBIJAKAN

2.1 TINJAUAN KEBIJAKAN NASIONAL

2.1.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang

Tabel 2. 1 Muatan Pencegahan dan Peningkatan terhadap Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PENCEGAHAN	
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:	a) Ketidakteraturan Dan Kepadatan Bangunan Yang Tinggi; b) Ketidaklengkapan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum; c) Penurunan Kualitas Rumah, Perumahan, Dan Permukiman, Serta Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum; Dan d) Pembangunan Rumah, Perumahan, Dan Permukiman Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Pencegahan dilaksanakan melalui:	a) Pengawasan dan pengendalian; b) Pemberdayaan masyarakat
Pengawasan dan pengendalian	Dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Pemberdayaan masyarakat	Dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi
PENINGKATAN KUALITAS	
Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan	a) Pemugaran; b) Peremajaan;

permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:	c) Pemukiman kembali
Penetapan Lokasi	Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan: a) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b) kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; c) Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; d) Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; e) Kualitas bangunan; f) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempa
Pemugaran	Merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni.
Peremajaan	Merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya
Pemukiman Kembali	Dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan / lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat

Sumber : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 2. 1 Proses Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh
Sumber : SE-DJCK/30/2020

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini, masing-masing *stakeholder* memiliki peran, tugas, dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk di dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 2. 2 Struktur Pembagian Peran Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Sumber : SE-DJCK/30/2020

2.1.2 Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi sektoral dan melibatkan banyak pihak. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan *leading sector* dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah pusat akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di Kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas, dapat dilihat dalam ilustrasi pada gambar berikut ini.

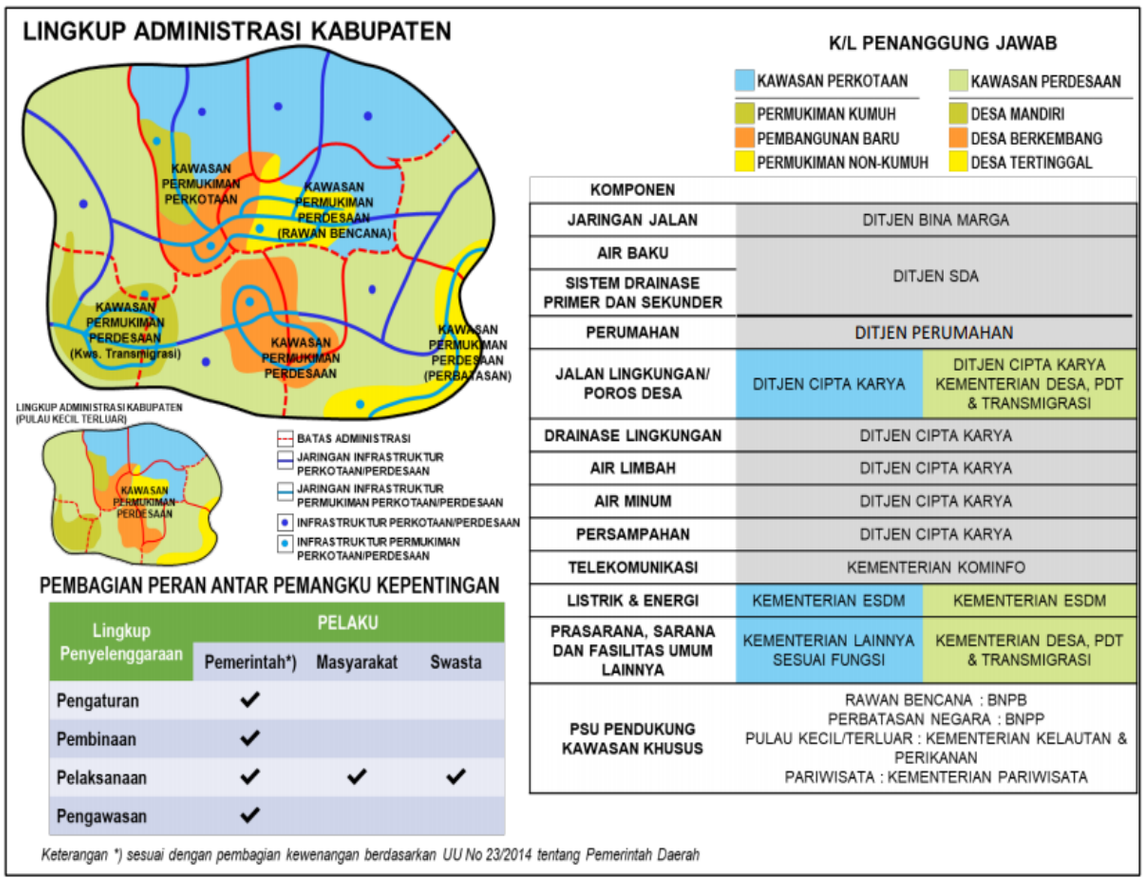

Gambar 2. 3 Peran Antar Pemangku Kepentingan dan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Sumber : SE-DJCK/30/2020

Terkait penanganan permukiman kumuh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dapat turun langsung dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan beberapa prasyarat, antara lain: a. Kawasan permukiman kumuh berada pada lingkup Kawasan Strategis Nasional (KSN); b. Kawasan permukiman kumuh memiliki luas minimal 15 Ha; dan/atau c. Kabupaten/kota yang memiliki SPM di

bawah standar rata-rata Nasional dan Provinsi. Penambahan prasyarat ke-3 berangkat dari kondisi selama ini bahwa, banyak kabupaten/kota yang berada di bawah standar rata-rata nasional dan provinsi sehingga membutuhkan dukungan Pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh. Kementerian PUPR telah menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat digunakan sebagai prasyarat dalam penanganan permukiman kumuh. Prasyarat ini digunakan dengan melihat tingkat ketersediaan infrastruktur pada masing-masing kawasan permukiman perkotaan. Prasyarat inilah yang mendorong perlunya Pemerintah untuk dapat terlibat lebih lanjut dalam penanganan permukiman kumuh.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 2 Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/ KOTA
1	Kawasan Permukiman	a) Penetapan sistem kawasan permukiman. b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha	a) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/kota.
3	Permukiman	a) Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional b) Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/ KOTA
		kawasan strategis nasional		

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencegahan, penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewenangan pemerintah daerah. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Gambar 2. 4 Substansi PP N0.14/ 2016
Sumber : PP/ 14/ 2016

2.1.4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai bagaimana penanganan berupa Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan dilakukan. Beberapa hal yang perlu dipahami sebagai muatan dalam penyusunan RP2KPKPK berkaitan dengan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Muatan Penyusunan RP2KPKPK

NO	MUATAN PENYUSUNAN RP2KPKPK
1	Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2	Rumusan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
3	Rumusan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
4	Rencana Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
5	Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
6	Rumusan Perencanaan Penyediaaan Tanah
7	Rumusan Rencana Investasi dan Pembiayaan
8	Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Dalam penyusunan dokumen RP2KPKPK terkait dengan muatan di atas perlu dipahami tentang:

a. Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

Pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat

1) Pengawasan dan pengendalian
   a) Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi
   b) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
   c) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
      - Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang teridentifikasi berpotensi menjadi kumuh. Pemantauan tidak langsung dilakukan berdasarkan a) data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman, b) pengaduan masyarakat maupun media masa.
      - Evaluasi merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.

- Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi

d) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terdapat ketidaksesuaian maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya.

2) Pemberdayaan masyarakat
   a) Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
   b) Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat
   c) Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis
      - Penyuluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
      - Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
   d) Pelayanan informasi dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

b. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
   a) Ketidakteraturan bangunan;
   b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
   c) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.
2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
   a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
   b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
   a) Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan

b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.

4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
   a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
   b) Ketidaktersediaan drainase; dan
   c) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
   a) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
   b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
   a) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan
   b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
   a) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
   b) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

c. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

1) di atas air;
2) di tepi air;
3) di dataran rendah;
4) di perbukitan; dan
5) di daerah rawan bencana.

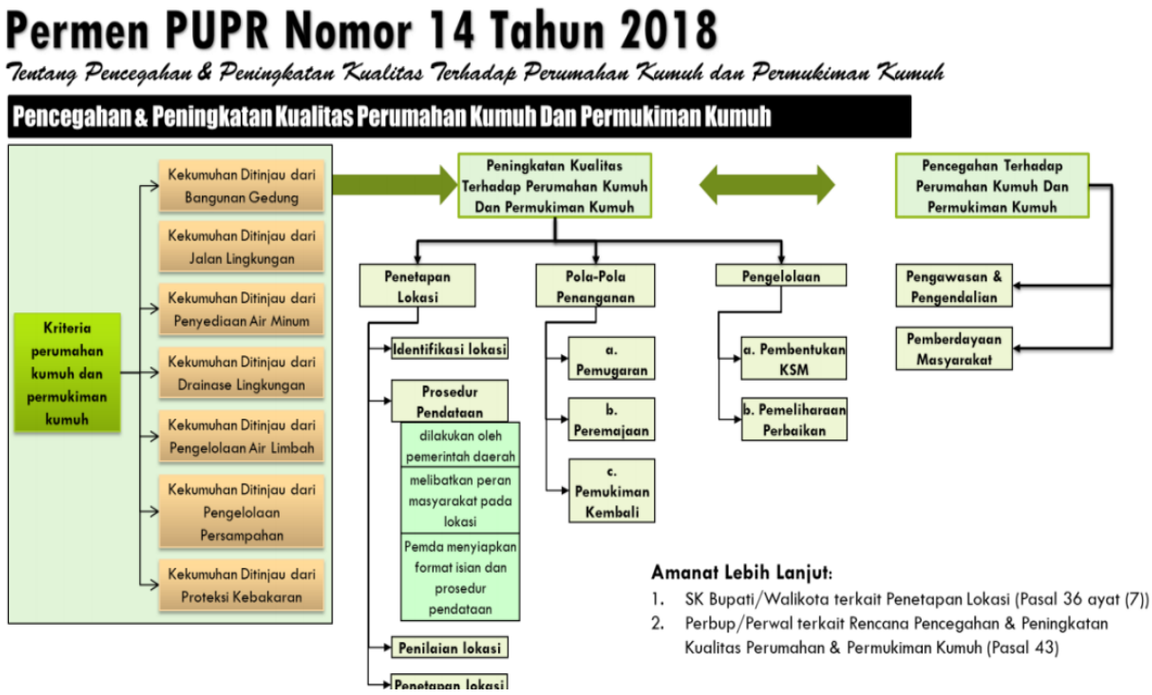

Gambar 2. 5 Muatan Permen PUPR No.14/ 2018
Sumber : Permen PUPR No.14/ 2018

2.1.5 Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukimn dalam RPJMN 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 atau RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan nasional jangka menengah hasil penjabaran tahapan keempat dari RPJPN 2005-2025 yang kemudian disandingkan dengan Visi, Misi, dan Agenda Presiden/Wakil Presiden. Terdapat 5 Visi Presiden/Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu:

a) Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
b) Pembangunan sumber daya manusia.
c) Undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan.
d) Reformasi birokrasi.
e) APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Gambar 2. 6 Visi & Misi RPJMN 2020 – 2024
Sumber : RPJMN 2020 - 2024

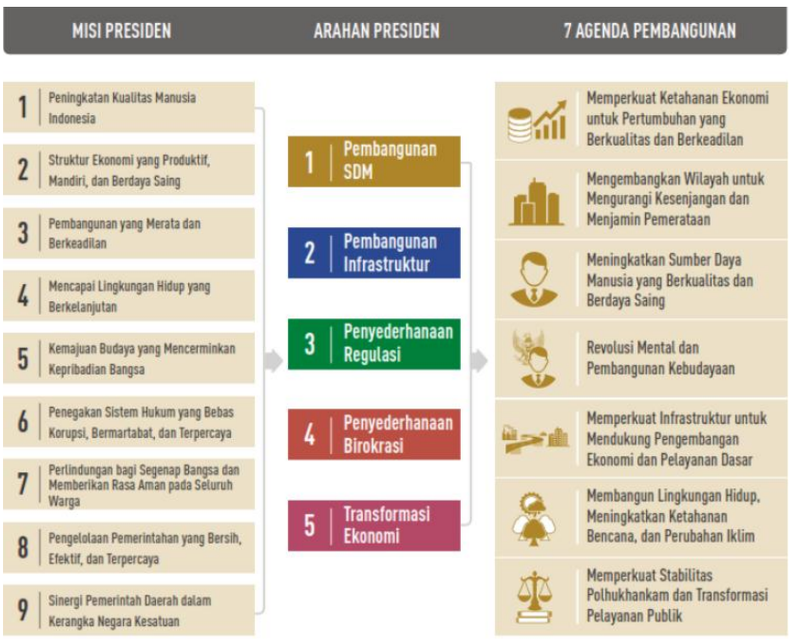

Gambar 2. 7 Visi Misi dan Arahan Presiden
Sumber : RPJMN 2020 - 2024

Infrastruktur berskala besar sudah dibangun, ke depan akan dilanjutkan dengan lebih cepat serta juga akan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar. Adapun infrastruktur-infrastruktur besar tersebut antara lain seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Infrastruktur tersebut nantinya akan disambungkan dengan kawasan-kawasan yang memiliki industri kecil. Dan juga akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan-kawasan pariwisata serta kawasan-

kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan, akan dihubungkan dengan dengan infrastruktur tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:

a) Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
c) Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
d) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
g) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman masuk dalam 5 dari 10 prioritas nasional dalam 2020-2024 yaitu PN 1,2,3,5, dan 6. Dalam penanganan permukiman kumuh terdapat 2 target besar yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan peremajaan 10 kawasan permukiman kumuh.

2.2 TINJAUAN KEBIJAKAN DAERAH

Berikut merupakan kebijakan-kebijakan daerah Kabupaten Situbondo terkait dengan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kabupaten Situbondo.

2.2.1 Isu Strategis Pembangunan Permukiman Perkotaan

Kabupaten Situbondo secara geografis merupakan kabupaten dengan letak yang strategis, menjadikannya sebagai kabupaten transit yang mana keberadaan Kabupaten Situbondo tidak lepas dari jalur utama propinsi yang mengarah ke bagian barat dan timur propinsi. Sebagai kabupaten transit atau persinggahan sementara, Kabupaten Situbondo memiliki perkembangan kawasan permukiman yang cukup signifikan dimana secara umum kawasan permukiman tersebut memiliki karakteristik permasalahan yang sama. Permasalahan kawasan permukiman yang ada di perkotaan Kabupaten Situbondo ini adalah:

a. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana permukiman
b. Keterbatasan anggaran pendanaan
c. Kecenderungan terjadinya alih fungsi lahan pertanian

Berikut ini adalah potensi dan masalah kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Situbondo dari berbagai aspek.

Tabel 2. 4 Potensi dan Masalah Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Situbondo

ASPEK	POTENSI	MASALAH
Penduduk	Tingkat pertumbuhan penduduk pertahun. Perkembangan ini secara kuantitatif merupakan potensi dalam hal penyediaan dan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Tingkat pendidikan penduduk . Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketenagakerjaan dengan secara kualitas namun cukup besar dari segi kuantitas. Kelompok penduduk usia kerja cukup besar, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada lapangan pekerjaan di bidang khusus.	Pertumbuhan penduduk yang positif menuntut untuk segera disediakannya fasilitas kebutuhan yang mendasar agar dapat tercapai standar pelayanan minimal baik di bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Distribusi fasilitas perlu pemerataan sesuai dengan daya dukung masing-masing kawasan yang disesuaikan dengan sebaran masing-masing penduduk di setiap wilayah.
Fasilitas	Fasilitas pelayanan yang terdapat di Perkotaan Situbondo pada umumnya masih dapat mendukung kebutuhan penduduk seperti fasilitas peribadatan, fasilitas umum dan jasa perdagangan. Untuk mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang perlu adanya penambahan beberapa fasilitas sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang ada.	Kebutuhan fasilitas pelayanan yang ada di Perkotaan Situbondo membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan meninjau penyebarannya, kondisi bangunan bahkan jumlahnya. Kecenderungan munculnya sebaran fasilitas yang memusat di sekitar pusat kota akan menjadi permasalahan yang berlanjut apabila tidak diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, sejalan dengan kondisi lahan terbangun yang masih tersedia, perlu adanya strategi penyebaran pusat-pusat kegiatan dan fasilitas kota secara merata dan seimbang di seluruh wilayah Perkotaan Situbondo. Keberadaan sarana yang tersebar di semua wilayah perkotaan kondisinya masih terpusat pada bagian pusat wilayah perkotaan. Beberapa pusat kegiatan di luar pusat perkotaan tidak memiliki

ASPEK	POTENSI	MASALAH
		sarana yang cukup, sehingga perjalanan dari pinggir wilayah perkotaan ke bagian pusat perkotaan cukup sering dilakukan. Masalah lain, prasarana dan sarana vital untuk wilayah perkotaan banyak yang tidak disediakan dengan baik. Mulai dari prasarana jalan di sekitar batas kota yang kondisinya jelek dan berbahaya bagi kendaraan. Kemudian prasarana drainase dan pembuangan limbah yang terbuka dan bercampur. Prasarana irigasi yang kurang baik. Sampai sarana persampahan yang masih menggunakan pembuangan terbuka dan transportasi sampahnya yang belum baik. Masalah prasarana yang paling menjadi perhatian utama adalah penyediaan air bersih. Masalah dimulai sejak awal penyediaan bahan baku air yang tidak dapat dipenuhi secara penuh. Sumber air untuk wilayah Perkotaan Situbondo tidak dapat memenuhi kebutuhan pada musim kemarau. Masalah lain juga pada penyediaan air ke rumah-rumah, yang mengalami banyak kebocoran pipa-pipa karena faktor kurangnya perawatan. Masalah ini mendorong penduduk untuk mengusahakan sendiri keperluan air bersih. Bersama-sama masalah sanitasi, kedua masalah memicu kebiasaan masyarakat untuk tidak memanfaatkan fasilitas umum secara kolektif melainkan melakukannya secara sendiri-sendiri dengan kondisi yang tidak baik. Permasalahan yang berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan adalah adanya kondisi rawan banjir yang disebabkan pendangkalan dasar sungai. Kondisi ini

ASPEK	POTENSI	MASALAH
		disebabkan oleh permasalahan utama bencana longsor di bagian sungai di wilayah lain di Kabupaten Situbondo. Rencana pengembangan sarana kesehatan di wilayah Kabupaten dan Perkotaan Situbondo Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata adalah dalam pencapaian target sasaran bidang kepariwisataan adalah : Kurangnya kesadaran insan pariwisata, seniman dan masyarakat untuk secara mandiri memberdayakan potensi yang dimiliki dalam rangka memajukan pariwisata dan budaya di Kabupaten Situbondo. Dengan kurangnya fasilitas kepariwisataan yang representatif, menyebabkan kesenian dan kepariwisataan Perkotaan / Kabupaten Situbondo tidak mampu bersaing dengan daerah lain.
Utilitas	Saat ini kebutuhan air bersih penduduk dipenuhi dari sumur-sumur penduduk dan sebagian telah dilayani oleh PDAM. Kebutuhan listrik dan telepon sudah terlayani dan sudah memiliki tempat penampungan sampah akhir. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk hingga, tentunya kebutuhan sarana utilitas akan terus berkembang.	Sistem drainase kota belum semuanya dalam bentuk permanen bahkan masih ada jalan yang tidak memiliki saluran drainase. Hal ini akan menimbulkan masalah baik dalam sistem pembuangan, kesehatan lingkungan serta estetika kota. Sistem pembuangan air rumah tangga yang dibuang di sekitar rumah akan menimbulkan masalah lingkungan (seperti bau dan kotoran karena genangan) serta masalah estetika (pandangan kurang sedap). Selain itu, penempatan tempat pembuangan akhir sampah juga butuh penanganan agar tidak mengganggu kesehatan dan estetika kota.
Sistem Transportasi	Kondisi jalan di Perkotaan Situbondo relatif masih baik dan sudah mampu menjangkau seluruh wilayah kota terutama pada jalan-jalan arteri	Pada jalan-jalan lingkungan kondisinya kurang baik dengan perkerasan dari makadam maupun tanah dan tidak dilengkapi dengan saluran drainase ditepinya. Adanya perkembangan kota,

ASPEK	POTENSI	MASALAH
	primer, kolektor primer, lokal primer serta arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder yang memiliki perkerasan aspal. Kebutuhan pergerakan penduduk pun sudah dapat terpenuhi dengan dilaluinya wilayah Perkotaan Situbondo oleh angkutan bis antar kota dan Kabupaten jurusan ke Probolinggo, dan Surabaya serta angkutan antar kota jurusan menuju ke tempat pariwisata.	menuntut untuk segera dilakukannya perencanaan jaringan jalan yang integral demi tercapainya sistem sirkulasi yang sinambung dan berkelanjutan. Disamping itu adanya rencana pembangunan Jalan Tol menuntut untuk segera ditindaklanjuti dengan rencana pembangunan jaringan jalan lainnya dan penataan sistem sirkulasinya, agar tercipta sistem konektivitas yang menyeluruh. Disamping itu, rencana pembangunan jalan lingkar perlu ditindaklanjuti agar tidak tejadi pemusatan sirkulasi di pusat kota.
Fisik Kota	Secara fisik, kawasan perkotaan Situbondo masih memiliki Kawasan lindung dan budidaya, yang tersebar sebagai suatu potensi sumberdaya yang dapat dilindungi maupun dibudidayakan di wilayah Perkotaan Situbondo. Kawasan Lindung di Perkotaan Situbondo terdiri dari : 1. Kawasan Lindung Setempat berupa : Sempadan sungai, serta kawasan resapan air. 2. Ruang Terbuka Hijau; Alun-alun, dll. 3. Lapangan-lapangan olahraga yang ada di kota sebagai Ruang Terbuka Hijau. 4. Hutan kota. Pada kawasan budidaya pertanian memiliki tingkat kesuburan lahan yang cukup tinggi dan sistem irigasi teknis yang lancar sehingga akan berdampak pada	Dengan kondisi kemiringan tanah yang ada di Perkotaan Situbondo yang relatif datar, akan menimbulkan masalah dalam sistem drainase kota (terjadi banjir pada musim hujan). Hal ini disebabkan karena sistem pengaliran air yang tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kecenderungan perkembangan kota yang terjadi secara linier akan memberikan beban yang besar terhadap jalan utama kota, terutama jalan arteri dan kolektor primer. Perkembangan fisik di kawasan perkotaan terlihat begitu cepat berkembang dibandingkan dengan beberapa kawasan pinggiran yang masih bercorak rural/pedesaan/tradisional. Masalah lain terkait dengan masalah bangunan dan lingkungan, adalah keberadaan bangunan komersial Bangunan-bangunan komersial ini berada di lokasi strategis di pusat wilayah perkotaan, dengan koefisien bangunan besar sehingga tidak memiliki ruang terbuka untuk parkir dan RTH untuk mendukung kegiatan. Masalah ini memicu

ASPEK	POTENSI	MASALAH
	produktivitas, dengan demikian maka kebutuhan pangan penduduk tetap terpenuhi. Selain itu, tingkat kemiringan tanah di Perkotaan Situbondo cukup datar, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan kota ke segala arah dan ini membantu dalam merencanakan perkembangan fisik Perkotaan Situbondo.	masalah lain yaitu kurangnya ruang parkir, sehingga menimbulkan parkir *off-street*.

Sumber: Hasil Kajian, Tahun 2022

Perkembangan ruang yang terjadi di Kabupaten Situbondo selain dipengaruhi oleh kondisi geografis, juga dipengaruhi oleh letaknya yang berada di jalur lintasan utara, serta dipengaruhi oleh keadaan sekitar perbatasannya. Karakteristik permukiman dan guna lahan di perkotaan Kabupaten Situbondo ini dapat dilihat berdasarkan empat arah mata angin. Kawasan permukiman di perkotaan Kabupaten Situbondo memiliki pola yang masih bersifat linier sepanjang jaringan jalan utama (pantai utara pulau jawa) dan sporadis di beberapa tempat. Kawasan permukiman berkembang berawal di sepanjang jalan nasional dan jalan kabupaten kemudian meluas hingga penggunaan lahan pertanian yang lokasinya masih termasuk dalam perkotaan Kabupaten Situbondo menjadi rentan akan perubahan fungsi sebagai permukiman karena pengaruh perkembangan kota. Berikut ini adalah isu strategis kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Situbondo berdasarkan kebijakan sektoral dan spasial.

Tabel 2. 5 Isu Strategis Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Situbondo

ISU STRATEGIS	KARAKTERISTIK	KEBUTUHAN PENANGANAN
Sektoral		
Penyediaan permukiman dan infrastruktur layak huni	Permukiman dan infrastruktur permukiman yang layak merupakan hak setiap warga	Perlu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman yg layak bagi setiap warga kota
Pengendalian Pembangunan	Pembangunan yang tidak terkendali akan menyebabkan pembangunan yang	Perlunya pengendalian permukiman di kawasan yang tidak diperuntukkan permukiman

ISU STRATEGIS	KARAKTERISTIK	KEBUTUHAN PENANGANAN
	tidak tentu arah	
Peningkatan Kelembagaan	Kelembagaan memiliki peran penting dalam memelihara keberlangsungan penyediaan infrastruktur	Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan permukiman
Keberlanjutan Pembangunan	Pembangunan harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga harus sesuai dengan perencanaan yang ada	Perlunya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan permukiman
Keterpaduan Antar Sektor	Perkembangan pembangunan yang tidak terpadu akan menyebabkan arah pembangunan yang tidak jelas	Perlunya mendorong perkembangan permukiman dan infrastrukturnya yg memperhatikan keterpaduan pembangunan
Keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan	Pembangunan yang tidak seimbang akan menyebabkan adanya degradasi lingkungan	perlunya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan permukiman
Keterlibatan Masyarakat dan Swasta	Swasta dan masyarakat memiliki peran penting dalam memelihara keberlangsungan penyediaan infrastruktur	perlunya pelibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan permukiman
Spasial		
Peningkatan Pelayanan Infrastruktur	Permukiman dan infrastruktur permukiman yang layak merupakan hak setiap warga	Perlu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman yg layak bagi setiap warga kota
Peningkatan Keterkaitan Pusat-Pusat Kegiatan	Infrastruktur permukiman permukiman yang tidak merata dapat mendorong kesenjangan pembangunan	Perlu arahan pembangunan pemerataan penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan
Keterpaduan Antar Sektor	Perkembangan pembangunan yang tidak terpadu akan menyebabkan arah pembangunan yang tidak jelas	Perlunya mendorong perkembangan permukiman dan infrastrukturnya yg memperhatikan keterpaduan pembangunan
Keberlanjutan dan Keseimbangan	Pembangunan yang tidak seimbang akan menyebabkan adanya	Perlunya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam

ISU STRATEGIS	KARAKTERISTIK	KEBUTUHAN PENANGANAN
Pembangunan	degradasi lingkungan	pembangunan permukiman
Pengembangan Kawasan Permukiman Baru	Arahan kepadatan yang tidak dibatasi dapat menyebabkan pembangunan yang tidak terkendali	Perlunya mendorong pengembangan oleh developer
Penanganan Permukiman Kumuh	Permukiman dan infrastruktur permukiman yang layak merupakan hak setiap warga	Perlu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman yg layak bagi setiap warga kota
Permukiman Berbasis Mitigasi Bencana	Pembangunan yang tidak terkendali akan menyebabkan pembangunan yang tidak tentu arah	Perlunya pengendalian permukiman di kawasan yang tidak diperuntukkan permukiman

Sumber: Hasil Kajian, Tahun 2022

Berikut ini adalah isu strategis kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan Kabupaten Situbondo berdasarkan kondisi eksisting sektoral dan spasial.

Tabel 2. 6 Isu Strategis Kawasan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Situbondo

ISU STRATEGIS	KARAKTERISTIK	KEBUTUHAN PENANGANAN
Sektoral		
Perumahan linier di sepanjang jaringan jalan	Kawasan permukiman berkembang tidak sesuai dengan peruntukkan sebagai akibat pergerakan kendaraan di sepanjang jaringan jalan	Mengendalikan pengembangan permukiman
Permukiman kumuh pada pusat kota	Perkembangan kawasan permukiman cenderung tidak terkendali yang ditunjukkan dengan keberadaan kawasan kumuh	Menata dan merehabilitasi kawasan permukiman kumuh
Permukiman yang bersifat sporadis di sekitar lahan pertanian	Kawasan permukiman pada di dekat lahan pertanian Penduduk yang bermukim sebagian besar merupakan petani	Menyatukan permukiman menjadi kluster-kluster pengembangan agar pelayanan infrastruktur mudah dilakukan
Perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana	Kawasan permukiman di kawasan rawan bencana banjir	Mengendalikan pengembangan permukiman

ISU STRATEGIS	KARAKTERISTIK	KEBUTUHAN PENANGANAN
Perkembangan permukiman yang berdampingan dengan kawasan perdagangan dan jasa	Kawasan permukiman yang berkembang menjadi perdagangan dan jasa karena adanya kebutuhan akibat lalul intas angkutan di sepanjang jaringan jalan	Menerapkan instrument pengendalian berupa peraturan zonasi agar pengembangannya sesuai dengan peruntukan pada rencana tata ruang
Spasial Spasial		
Penurunan kapasitas sumber daya air	Sumber air berasal dari mata air	Memanfaatkan sumber air lain diantaranya air permukaan
Timbulnya genangan/banjir akibat tidak terpeliharanya jaringan drainase	Jaringan drainase sepanjang jaringan jalan utama dan lingkungan	Merehabilitasi jaringan drainase yang ada Membangun jaringan drainase baru untuk meningkatkan pelayanan
Penanganan limbah masih belum terintegrasi dan terkoordinasi	Limbah berasal dari rumah tangga maupun industri Limbah dibuang ke saluran drainase atau ke badan air	Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan limbah industri Menyusun aturan penanganan limbah
Pelayanan persampahan yang belum mencakup seluruh kawasan	Kawasan yang jauh dari perkotaan Kesadaran masyarakat yang kurang untuk memberbaiki kebiasaannya yang buruk dalam buang sampah sembarangan	Memperluas areal pelayanan dengan meningkatkan daya tampung TPA sampah dan kemampuan pengangkutan
Pembangunan jaringan jalan baru akan mengembangkan permukiman baru	Jaringan jalan lingkar Jaringan jalan di permukiman baru atau pengembangan kegiatan baru	Merencanakan jalan sesuai dengan rencana pengembangan pola runag dan menyusun mekanisme pengaturan di sepanjang jaringan jalan

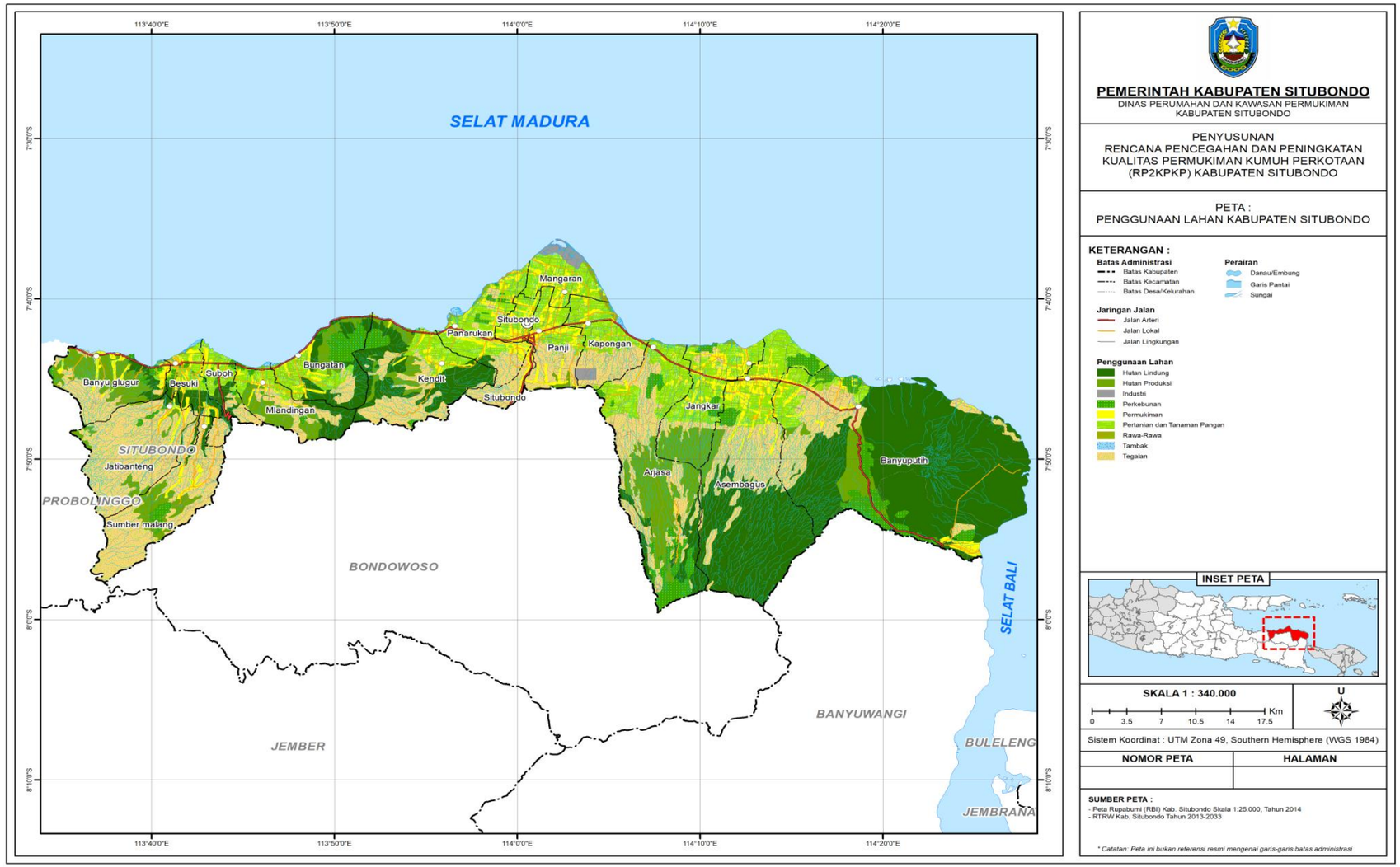

Peta 2. 1 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo

Sumber: Dokumen RP2KPKP

2.2.2 Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

Secara keseluruhan dari tiap dokumen yang berlaku tersebut dapat diidentifikasikan bahwa arah pengembangan perkotaan Kabupaten Situbondo adalah pengembangan wilayah yang berbasiskan pengembangan perdagangan dan industri berbasiskan potensi pertanian, yang diarahkan adalah:

1. Pengembangan daerah terbangun di perkotaan Kabupaten Situbondo terutama yang telah berkembang dipertahankan dan diadakan pengawasan yang ketat terutama di daerah dengan kepadatan tinggi dan di sepanjang koridor Jl. Nasional. Sedangkan di daerah dengan kepadatan rendah pengembangannya dilakukan bertahap.
2. Pusat pengembangan berada di kecamatan Situbondo dengan didukung bagian-bagian wilayah administrasi lainnya seperti desa/kelurahan.
3. Perkembangan kegiatan yang mengikuti jaringan jalan di perkotaan Kabupaten Situbondo perlu diperhatikan jenis kegiatan sehingga pengembangan di daerah tersebut terutama sekitar daerah perdagangan dilakukan dengan penyediaan tanah parkir baik di pinggir jalan untuk kegiatan yang lingkupnya kecil dan penyediaan tanah *parkir off street* untuk kegiatan dengan lingkup pelayanan luas.
4. Kegiatan utama kota yang telah berkembang di pusat perkotaan tetap dipertahankan seperti perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan, permukiman dan lain sebagainya dan dengan pengembangan kegiatan pada tiap Sub Bagian Wilayah sehingga dapat menciptakan pemerataan kegiatan dan fasilitas.

Berikut ini adalah strategi dan arah kebijakan pembangunan kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Situbondo

Gambar 2. 8 Nilai-nilai yang Termuat dalam Visi RPJMD Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2021-2026

Sumber: RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026

Tabel 2. 7 Logical Framework Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	isi Awal Kine	Target						kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
1	**Membangun Masyarakat Situbondo yang Berimandalam Keberagaman**	**Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius**	**Indeks Kesalehan Sosial**	**Indeks**	**n/a**	**65,00 - 68,44**	**68,45 - 71,88**	**71,89 - 75,33**	**75,34 - 78,74**	**78,75 - 81,19**	**81,20 - 82,64**	**81,20 - 82,64**		
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Indeks Stabilitas	Indeks	n/a	68,50 - 71,70	71,71 - 74,91	74,92 - 78,12	78,13 - 81,31	81,32 - 82,32	82,33 - 83,32	82,33 - 83,32	URUSAN KORDINASI DAN KEBIJAKAN	BAG. ADM & OTODA SEKRETARIAT DAERAH
													URUSAN KESBANGPOL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
													URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	128,39	127,39 - 126,38	126,37- 125,38	125,37- 124,38	124,37- 123,38	123,37 - 122,38	122,37 - 121,38	122,37 - 121,38	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	isi Awal Kine	Target						Kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
													(KEBENCANAAN)	DAERAH
		Meningkatnya Toleransi Sosial.	Indeks Toleransi	Indeks	n/a	70,00 - 73,19	73,20 - 76,39	76,40 - 79,59	79,60 - 82,79	82,80 - 83,79	83,80 - 84,79	83,80 - 84,79	URUSAN KORDINASI DAN KEBIJAKAN	BAG. ADM & OTODA SEKRETARIAT DAERAH
													URUSAN KESBANGPOL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat	Indeks Solidaritas Sosial	Indeks	n/a	70,00 - 72,89	72,90 - 75,79	75,80 - 78,68	78,69 - 81,58	81,59 - 82,58	82,59 - 83,58	82,59 - 83,58	URUSAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
													URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan**	**Meningkatkan Kualitas dan Kesetaraan SDM**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**67,38**	**68,07 - 68,58**	**68,59 - 69,10**	**69,11 - 69,62**	**69,63 – 70,14**	**70,15 - 70,66**	**70,67 - 71,18**	**70,67 - 71,18**		
		Meningkatnya	Indeks Pembang	Indeks	87,06	87.35-	87.49-	87.63-	87.77-	87.91-	88.05 -	88.05 -	Urusan Pemberdayaan	DINAS PEMBERDAY

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	isi Awal Kine	Target						Kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
	Meningkatkan Peran Perempuan	Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	unan Gender			87.48	87.62	87.76	87.90	88.04	88.19	88.19	Perempuan dan Perlindungan Anak	AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan.	Indeks Pendidikan	Indeks	0,580	0,586 - 0,593	0,594 - 0,601	0,602 - 0,609	0,610 - 0,617	0,618 - 0,625	0,626 - 0,633	0,626 - 0,633	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
													Urusan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
													Urusan Pemuda dan Olahraga	DINAS PARIWISATA
		Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan.	Indeks Kesehatan	Indeks	0,760	0,759 - 0,763	0,764 - 0,768	0,769 - 0,773	0,774 - 0,778	0,778 - 0,783	0,784 - 0,788	0,784 - 0,788	Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
													Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningk	Indeks	Ind	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,405	0,405	Urusan	DINAS

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	isi Awal Kine	Target						Kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
		atnya Daya Beli Masyarakat	PPP	eks	6	0 - 0,360	1 - 0,371	2 - 0,382	3 - 0,393	4 - 0,404	- 0,415	- 0,415	Perdagangan	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
													Urusan Ketahanan Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	**Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan**	**Persentase Kemiskinan**	**%**	**12,20**	**11,95-11,66**	**11,65-11,53**	**11,52-11,40**	**11,39-11,04**	**11,03-10,91**	**10,90-10,78**	**10,90 - 10,78**		
			Gini Rasio	**Rasio**	**0,305**	**0.304-0.300**	**0.300-0.296**	**0.296-0.292**	**0.292 - 0.288**	**0.288 - 0.284**	**0.284 - 0.280**	**0.284 - 0.280**		
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	**Indeks**	**80,37**	**81,84 - 82,40**	**82,41 - 83,20**	**83,21 - 83,85**	**83,86 - 84,52**	**84,52 - 85,00**	**85,01 - 85,55**	**85,01 - 85,55**		
			Pertumbuhan Ekonomi	**%**	**-2,33**	**2,00-2,89**	**2,90 - 3,78**	**3,79 - 4,66**	**4,67-5,50**	**5,51-5,55**	**5,56 - 5,60**	**5,56 - 5,60**		
		Meningkatnya Desa Maju.	Jumlah Desa Maju	Desa	39	46	53	61	69	77	85	85	Urusan Pembedayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMBEDAYAAN MASYARAKA

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	isi Awal Kine	Target						Kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
														T DAN DESA
													Urusan Kewilyahan dan Koordinasi	SELURUH KECAMATAN
		Menurunnya angka pengangguran.	Tingkat Penganggguran Terbuka	Angka	3,85	3,25-3,03	3,02 - 2,88	2,87 - 2,61	2,60-2,35	2,34-2,21	2,20-2,00	2,20-2,00	URUSAN KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA
													URUSAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.	Indeks Infrastruktur	Indeks	60,02	62,00	63,00	63,85	64,83	65,69	66,35	66,35	URUSAN PUPR	DINAS PUPR
													URUSAN PERKIM	DINAS PERKIM
													URUSAN PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
			IKLH	Indeks	72,05	72,11 - 72,14	72,15 - 72,18	72,19 - 72,22	72,23 - 72,26	72,27 - 72,30	72,31 - 72,34	72,31 - 72,34	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonom	Pertumbuhan PDRB Kategori Akomoda	%	-13,06	3,00-4,50	4,51 - 5,18	5,19 - 5,95	5,96-6,84	6,85-7,87	7,88-9,05	7,88-9,05	URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	isi Awal Kine	Target						Kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
		i yang Berdaya Saing.	si										URUSAN BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-2,09	0,15 - 0,50	0,51 - 0,87	0,88 - 1,24	1,25 - 1,61	1,62 - 1,98	1,99 - 2,35	1,99 - 2,35	URUSAN PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
														DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
													URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN	DINAS KELAUTANAN & PERIKANAN
			Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	3,18	4,00 - 5,40	5,41 - 6,81	6,82 - 7,31	7,32 - 7,81	7,82 - 8,31	8,32 - 8,81	8,32 - 8,81	URUSAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
													URUSAN KOPERASI &	DINAS KOPERASI

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	isi Awal Kine	Target						Kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
													USAHA MIKRO	USAHA KECIL DAN MENENGAH
													URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA
			Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-8,7	2,00 - 3,60	3,61 - 4,86	4,87 - 6,12	6,13 - 7,35	7,35 - 7,50	7,50 - 7,70	7,50 - 7,70	URUSAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Nilai Investasi (Dalam Juta)	Rupiah	1.445.621,00	1.467.305,32	1.489.314,89	1.533.994,34	1.564.674,23	1.595.967,71	1.627.887,07	1.627.887,07	URUSAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
4	**Membangun Pemerintahan yang**	**Mewujudkan Kualitas Layana**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Indeks**	**68,74**	**69,52 - 70,02**	**70,03 - 70,53**	**70,54 - 71,04**	**71,05 - 71,55**	**71,56 - 72,06**	**72,07 - 72,57**	**72,07 - 72,57**		

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	isi Awal Kine	Target						Kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
	Profesional, Bersih dan Tanggguh	**n dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional**												
		Meningkatnya Inovasi Layanan Berbasis Digital.	Indeks SPBE	Indeks	3,48	3,48 – 3,49	3,48 – 3,49	3,50 – 3,59	3,60 – 3,79	3,80 – 4,19	4,20 – 4,25	4,20 – 4,25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
													URUSAN STATISTIK	
													URUSAN PERSANDIAN	
													URUSAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,66	78,00 - 79,00	79,01 - 80,00	80,01 - 81,00	81,01 - 82,00	82,01 - 83,00	83,01 - 84,00	83,01 - 84,00	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
													URUSAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	isi Awal Kine	Target						Kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
													URUSAN KORDIANSI DAN KEBIJAKAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
													URUSAN KEWILATAHAN DAN KORORDINASI	SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
		Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional.	Indeks Profesional Aparatur	Indeks	56.95	59,80 - 62,64	62,65 - 65,49	65,50 - 68,34	68,35 - 71,15	71,16 - 74,00	74,01 - 76,85	74,01 - 76,85	URUSAN KEPEGAWAIAN	BKPSDM
													URUSAN KORDIANSI DAN KEBIJAKAN	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAEARAH
													URUSAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
			Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Urusan Keuangan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	isi Awal Kine	Target						Kondisi Akhir	URUSAN	PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026		
														DAN ASET DAERAH
													Urusan Kordiansi dan Kebijakan	SEKRETARIAT DAERAH
			Tingkat Maturnitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Urusan Pengawasan	INSPEKTORAT

Sumber : RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026

2.3.1 Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Secara umum kebijakan penanganan permukiman kumuh juga terdeskripsi di dalam kebijakan pembangunan permukiman seperti di dalam kebijakan 1) RPJP Prov. Jawa Timur (terutama untuk aspek bangunan, jalan lingkungan dan air bersih) ; 2) RPJMD Prov. Jawa Timur (aspek air bersih) ; 3) RTRW Prov. Jawa Timur (aspek jalan lingkungan, air bersih, drainase lingkungan, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan sampah) ; 4) RPJP Kab. Situbondo 5) RPJMD Kab. Situbondo; 6) RTRW Kab. Situbondo (aspek bangunan hunian, jalan lingkungan, air bersih, drainase lingkungan, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan sampah).

Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi:

1. Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman
2. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
3. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
4. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis Pengelolaannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil
5. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
6. Penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan Kasiba/Lisiba Berdiri Sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan Pengelolaan perumahan secara vertikal;

7. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
8. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan; serta

Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian.

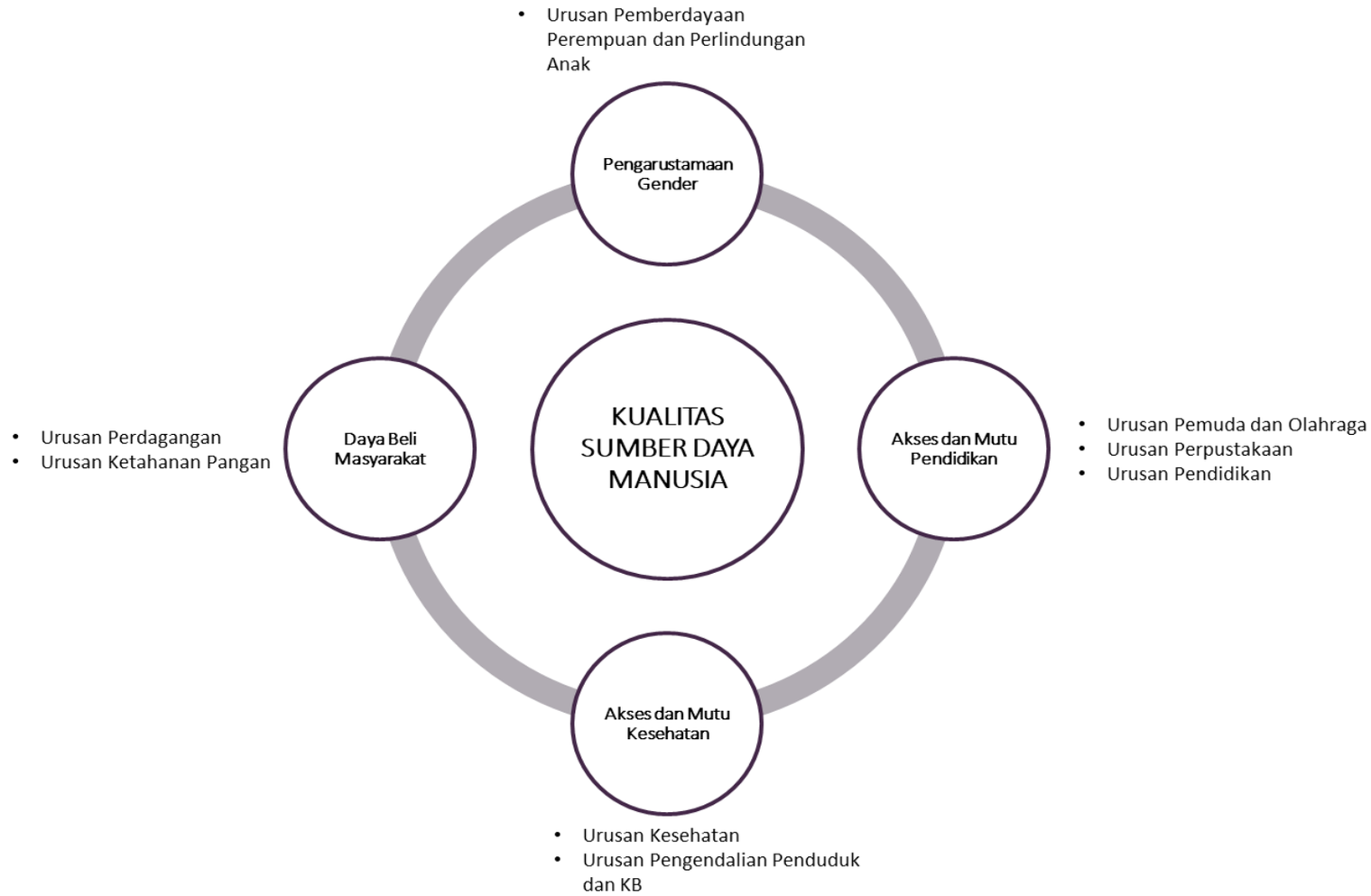

Gambar 2. 9 Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2021-2026

Sumber: RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026

2.2.1 Resume Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Resume dari kebijakan-kebijakan di atas terutama terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis kebijakan yaitu kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh, kebijakan pencegahan munculnya kawasan permukiman kumuh, kebijakan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh, dan kebijakan kelembagaan dan kerjasama dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Berikut ini adalah resume kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kabupaten Situbondo.

Tabel 2. 8 Resume Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Situbondo

NO	RESUME KEBIJAKAN	STRATEGI YANG TERKAIT DARI DOKUMEN KEBIJAKAN	ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN STRATEGI
1	Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Situbondo	• Mewujudkan permukiman yang layak, sehat dan terjangkau • Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni • Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih • Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur air limbah • Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur drainase • Melakukan penanganan kawasan rawan genanganan dan banjir • Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan • Meningkatkan kualitas jalan lingkungan dan membuka akses	• Kebutuhan permukiman yang layak semakin meningkat • Peningkatan pola penanganan persampahan melalui 3R • Kurangnya ruang sosial berupa lahan terbuka hijau	• Bantuan pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu. • Penataan dan pembangunan sarana prasarana permukiman yang baik. • Peningkatan cakupan pelayanan air bersih menjangkau keseluruh kota • Penerapan kewajiban penggunaan pengolahan setempat (*on site*) berupa tangki septic, bagi perumahan.

NO	RESUME KEBIJAKAN	STRATEGI YANG TERKAIT DARI DOKUMEN KEBIJAKAN	ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN STRATEGI
		kawasan yang belum dilayani jalan • Penyediaan RTH lingkungan sebagai ruang publik yang disetiap kawasan permukiman		• Pengolahan limbah cair domestic komunal di wilayah yang memiliki keterbatasan lahan • Ketersediaan jaringan drainase yang terpadu • Pengembangan system pengolahan sampah yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan dengan mengoptimalkan lahan TPA yang ada • Penataan jalan lingkungan bagi kawasan permukiman dan perumahan yang baru tumbuh. • Perwujudan ruang terbuka hijau kota selain sebagai fungsi keberlanjutan lingkungan juga menunjang fungsi estetika

NO	RESUME KEBIJAKAN	STRATEGI YANG TERKAIT DARI DOKUMEN KEBIJAKAN	ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN STRATEGI
2	Kebijakan terkait Pencegahan berkembangnya kawasan kumuh	• Penanganan dan penataan permukiman di kawasan rawan banjir dan genanganan • Penataan dan pengendalian permukiman pada sempadan sungai • Penataan dan pengendalian permukiman pada sempadan rel kereta api • Perbaikan kualitas lingkungan serta mencegah perluasan kawasan kumuh • Pengembangan kawasan permukiman pada kawasan strategis ekonomi kota bebas rawan kebakaran • Peningkatan prosentase pelayanan air bersih • Perbaikan Kampung dan Kualitas Lingkungan diarahkan pada usaha perbaikan lingkungan perumahan terutama yang menyangkut kualitas bangunan dan saluran air buangan • Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah system on site individual maupun komunal • Pengendalian pencemaran kualitas air • Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan	• Munculnya permukiman di lahan yang tidak sesuai peruntukannya • Peningkatan kualitas air bersih • Peningkatan kualitas sistem pembuangan air limbah • Review dan pengoptimalan sistem jarngan drainase yang sudah ada • Peningkatan sarana pelayanan persampahan • Terbangunnya aksesbilitas yang menghubungkan ke seluruh kota • Kurangnya ruang sosial berupa lahan terbuka hijau	• Pengaturan dan penataan lingkungan permukiman yang berada di DAS dan di atas air. • Penanganan kawasan permukiman di sempadan rel kereta api • Pendekatan persuasive kepada masyarakat dan sosialisasi kebijakan terkait • Membangun prasarana air bersih di wilayah yang sulit untuk dijangkau oleh PDAM • Pembangunan dan pemeliharan saluran drainase yang ada • Pembangunan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah yang mendukung pola 3R • Peningkatan aksesibilitas

NO	RESUME KEBIJAKAN	STRATEGI YANG TERKAIT DARI DOKUMEN KEBIJAKAN	ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN STRATEGI
		prasarana drainase • Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan • Perbaikan kualitas jalan yang rusak • Pembangunan vertikal (rumah susun) pada kawasan padat penduduk		dan perbaikan jalan lingkungan yang rusak • Perlunya perwujudan ruang terbuka bagi aktivitas warga • Pengembangan sarana pemadam kebarakan unit lingkungan • Perlunya alternative Pembangunan vertikal (rumah susun) pada kawasan penduduk padat
3	Kebijakan terkait Pengembangan sumber-sumber pembiayaan	• Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. • Pengembangan jenis dan mekanisme penyediaan	• Terbatasnya anggaran APBD kota untuk membiayai seluruh program penanganan permukiman kumuh • Idenifikasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan perumahan	• Perlunya alternative sumber pendanaan penanganan permukiman kumuh • Mengefektifkan program - program pendanaan terkait permukiman dan infrastruktur dari berbagai sumber untuk mempercepat

NO	RESUME KEBIJAKAN	STRATEGI YANG TERKAIT DARI DOKUMEN KEBIJAKAN	ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN STRATEGI
		perumahan bersubsidi khususnya bagi MBR • Penggalangan sumber-sumber pembiayaan pembangunan perumahan • Peningkatan dan Pengembangan Alternatif Sumber Pendanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman		penanganan permukiman kumuh • Dibutuhkan bantuan stimulan dan skema pembiayaan pemilikan perumahan untuk menyediakan perumahan yang terjangkau khususnya bagi MBR
4	Kebijakan terkait Peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan	• Kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan/pembangunan perumahan • Kerjasama kelembagaan pembangunan perumahan • pemerintah dan swasta • Pengembangan manajemen PDAM • Pemeliharaan sumber daya air • Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah permukiman • Peningkatan peran masyarakat terkait pengelolaan jaringan drainase • Peningkatan SDM dan kelembagaan • Mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat berpola hidup hijau' dalam	• Keterbatasan lahan • Pengoptimalan jaringan dan manajemen pengelolaan air bersih • Pengoptimalan IPLT yang sudah ada • Kurangnya keterpaduan kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam penanganan drainase • Peran serta masyarakat dalam meminimalisasi sampah dari sumbernya belum optimal	• Penyediaan lahan bagi pengembangan infrastruktur dan permukiman kota • Peningkatan kualitas pelayanan dan penurunan tingkat kebocoran • Peningkatan kapasitas produksi debit air • Peningkatan kinerja dan kualitas IPLT • Penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah

NO	RESUME KEBIJAKAN	STRATEGI YANG TERKAIT DARI DOKUMEN KEBIJAKAN	ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN STRATEGI
		lingkungan rumah		• Peningkatan kapasitas lembaga pengelola penanganan sanitasi • Peningkatan kapasitas lembaga pengelola penanganan drainase • Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah

Sumber: Hasil Kajian, Tahun 2022

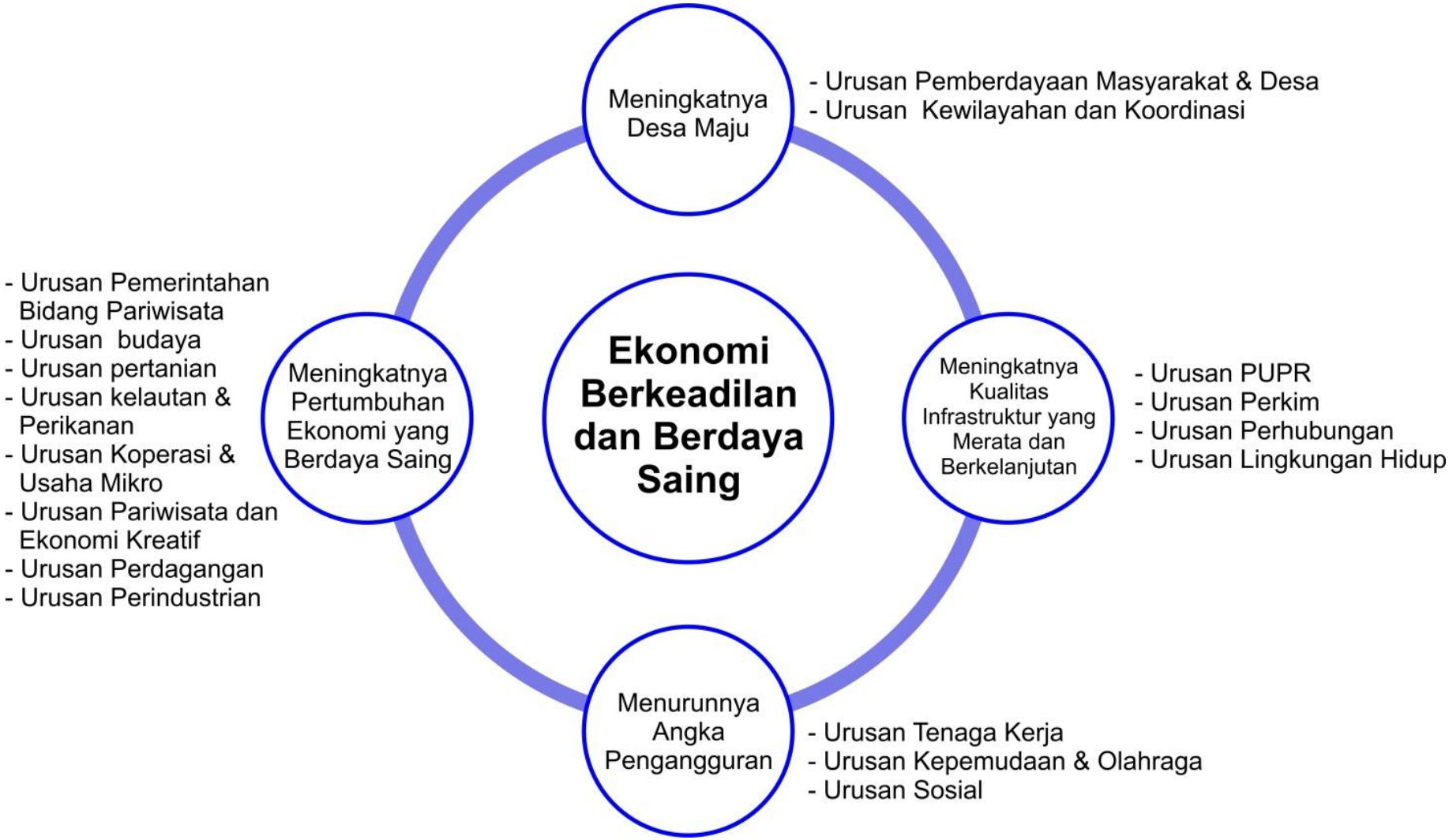

Gambar 2. 10 Perencanaan Terintegratif dalam Mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2021-2026

Sumber: RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026

BAB III
PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

3.1.1 Kondisi Fisik Dasar

Penjelasan tentang kondisi fisik dasar Kabupaten Situbondo dibagi menjadi beberapa aspek, meliputi kondisi geografis, topografi dan kemiringan lereng, iklim dan curah hujan, geologi dan jenis tanah serta hidrologi.

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km^2 atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 158 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7^o 35' - 7^o 44' Lintang selatan dan 113^o 30' - 114^o 42' Bujur Timur. Berikut adalah Batas-batas administratif Kabupaten Situbondo antara lain:

- Batas Utara : Selat Madura
- Batas Timur : Selat Bali
- Batas Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi
- Batas Barat : Kabupaten Probolinggo

Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 627 Dusun. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km2 disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km. Adapun kecamatan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada *Tabel 3.1* dan *Peta 3.1* dibawah ini :

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Situbondo tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)
1	Sumbermalang	129.47
2	Jatibanteng	66.08
3	Banyuglugur	72.66
4	Besuki	26.41
5	Suboh	30.84
6	Mlandingan	39.61
7	Bungatan	66.07
8	Kendit	114.14
9	Panarukan	54.38
10	Situbondo	27.81
11	Mangaran	46.99
12	Panji	35.70
13	Kapongan	44.55
14	Arjasa	216.38

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)
15	Jangkar	67.00
16	Asembagus	118.74
17	Banyuputih	481.67
	Jumlah	1638.5

Sumber : Kabupaten Situbondo dalam Angka, 2022

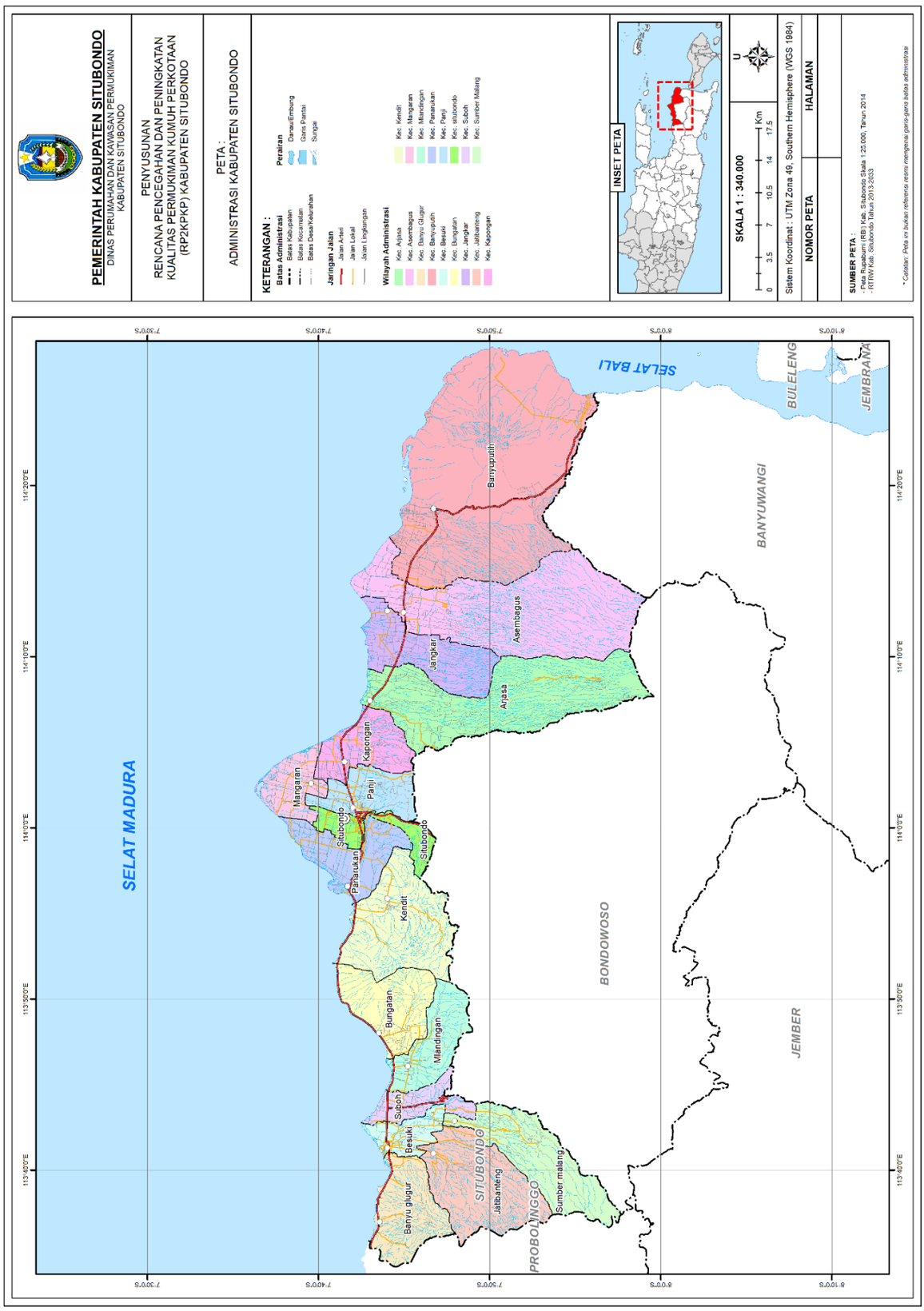

Peta 3. 1 Administrasi Kabupaten Situbondo
Sumber : RTRW Kabupaten Situbondo, 2013-2033

B. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian antara 0 – 1.250 m di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Situbondo yang beragam disebabkan oleh wilayah Kabupaten Situbondo yang terdiri dari kawasan pesisir, dataran rendah dan pegunungan. Kawasan pesisir tersebar di sebelah utara Kabupaten Situbondo, kawasan dataran rendah tersebar di tengah Kabupaten Situbondo sedangkan kawasan pegunungan tersebar di sekitar Gunung Argopuro, Gunung Ijen dan sekitar Kawasan Taman Nasional Baluran. Adapun Topografi dan Kemiringan Lereng di wilayah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada *Peta 3.2* dibawah ini.

C. Iklim dan Curah Hujan

Temperatur rata – rata di wilayah Situbondo berkisar 24,7° C – 27,9° C dengan rata–rata curah hujan antara 994 mm – 1.503 mm per tahunnya sehingga daerah ini menurut Klasifikasi Iklim Schmidt dan Fergusson tergolong daerah kering.

D. Geologi dan Jenis Tanah

Struktur Geologi Kabupaten Situbondo berada pada Aluvium luasnya 48.983 Ha, Vulkan Zaman Quarter Muda luasnya 19.787 Ha, Vulkan Zaman Quarter Tua luasnya 72.752 Ha, dan Leusita luasnya 22.328 Ha. Tekstur tanah pada umumnya tergolong sedang 96,26%, tergolong halus 2,75% dan kasar 0,99%. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42% kadang-kadang tergenang 0,05% dan selalu tergenang 0,53%. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial, regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol serta andosol. Adapun Geologi dan Jenis Tanah di wilayah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada *Peta 3.3* dan *Peta 3.4* di bawah ini.

E. Hidrologi

Kabupaten Situbondo yang di lewati hulu sungai sampean berada sekitar 800 meter di atas permukaan air laut (mdpl), sedangkan muaranya di 3 mdpl. Dengan panjang sungai 72 km dan DAS sampean seluas 1.347 km2 mencakup wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Daerah hulu berada di kompleks Gunung Argopuro dan kompleks Gunung Raung Kabupaten Situbondo. Adapun muaranya berada di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

3.1.2 Kondisi Fisik Binaan

Penggunaan lahan di Kabupaten Situbondo meliputi penggunaan lahan terbangun dan tak terbangun. Penggunaan lahan terbangun terdiri dari permukiman dan fasilitas umum, sedangkan penggunaan lahan tak terbangun terdiri dari hutan, persawahan, perkebunan, semak belukar, padang rumput, tanahh rusak, tanah tandus, tambak, rawa dan penggunaan lahan lainnya.

Tabel 3. 2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Situbondo

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (KM^2)	PERSENTASE (%)
1	Permukiman	32,55	1,99
2	Hutan	734,07	44,80
3	Persawahan	303,65	18,53
4	Pertanian tanah kering	279,62	17,07
5	Kebun campuran	4,14	0,25
6	Perkebunan	17,80	1,09
7	Semak belukar	24,93	1,52
8	Padang rumput	49,70	3,04
9	Tanah rusak	107,36	6,55
10	Tanah tandus	63,15	3,85
11	Tambak	18,66	1,14
12	Rawa	1,82	0,11
13	Lain-lain	9,99	0,06

Sumber: RTRW Kab. Situbondo Tahun 2013-2033

Berdasarkan Tabel 3.2, penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Situbondo adalah lahan hutan seluas 734,07 Km2 atau sekitar 44,80% dari luas Kabupaten Situbondo. Sedangkan, penggunaan lahan terkecil adalah penggunaan lainnya dengan luas 9,99 Km2 atau sekitar 0,06% dari luas Kabupaten Situbondo. Tabel 3.2 menjelaskan tentang komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Situbondo. Dengan pembagian penggunaan lahan pada Tabel 3.2, maka penggunaan lahan di Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan. Namun kawasan hutan yang masuk dalam kawasan lindung adalah kawasan hutan lindung. Adapun penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada *Peta 3.5* dibawah ini.

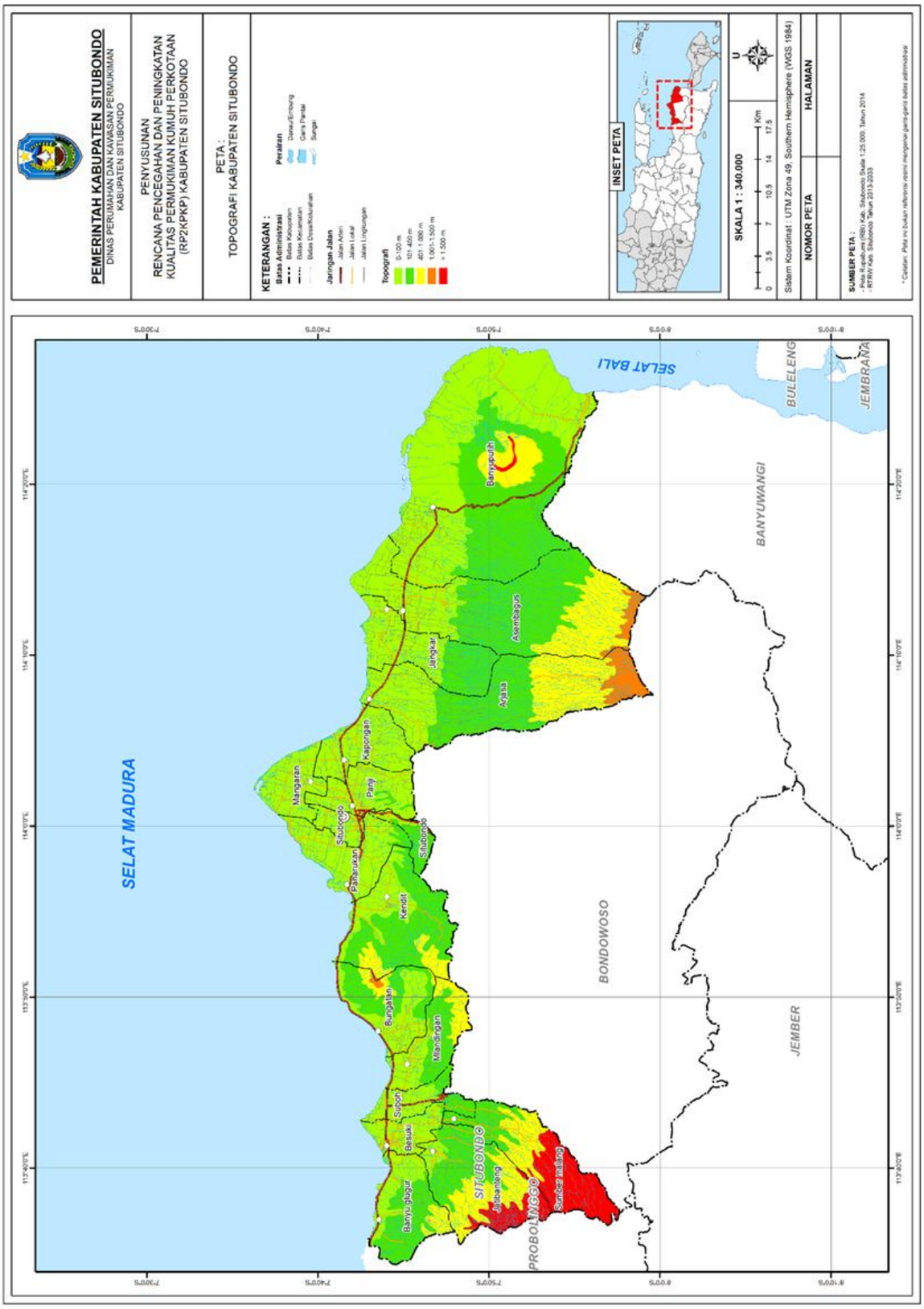

Peta 3. 2 Topografi Kabupaten Situbondo
Sumber : RTRW Kabupaten Situbondo, 2013-2033

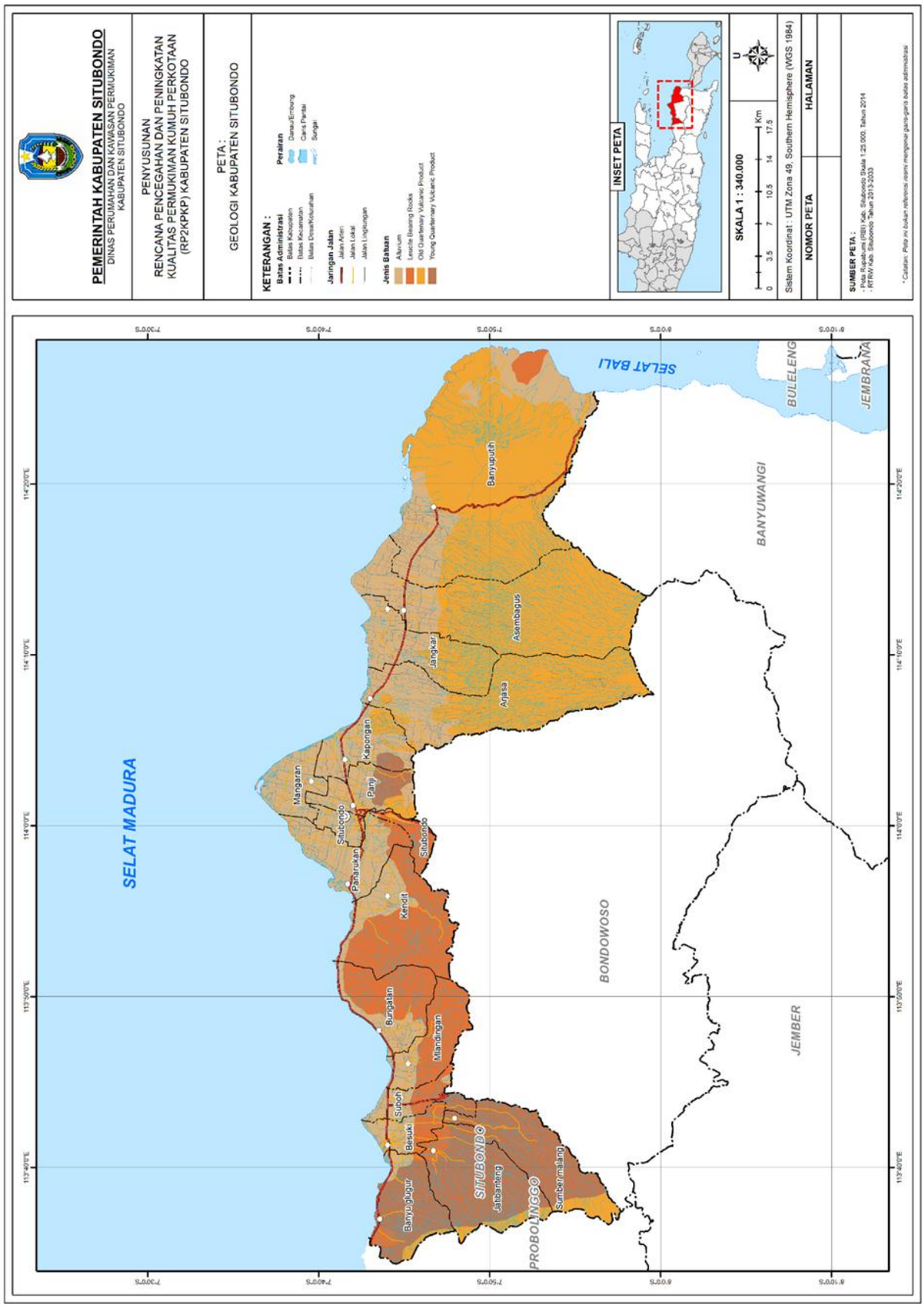

Peta 3. 3 Geologi Kabupaten Situbondo

Sumber : RTRW Kabupaten Situbondo, 2013-2033

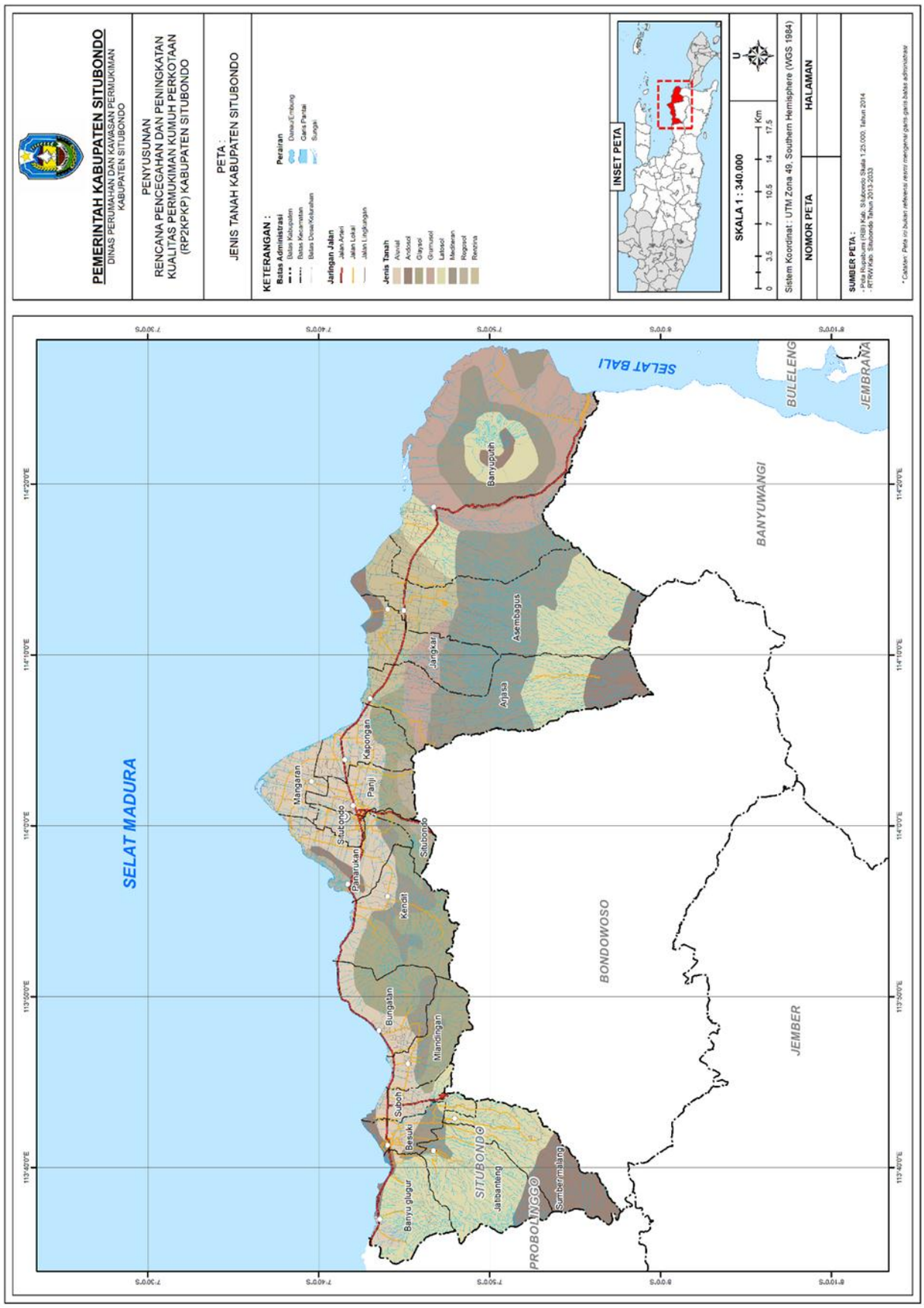

Peta 3. 4 Jenis Tanah Kabupaten Situbondo

Sumber : RTRW Kabupaten Situbondo, 2013-2033

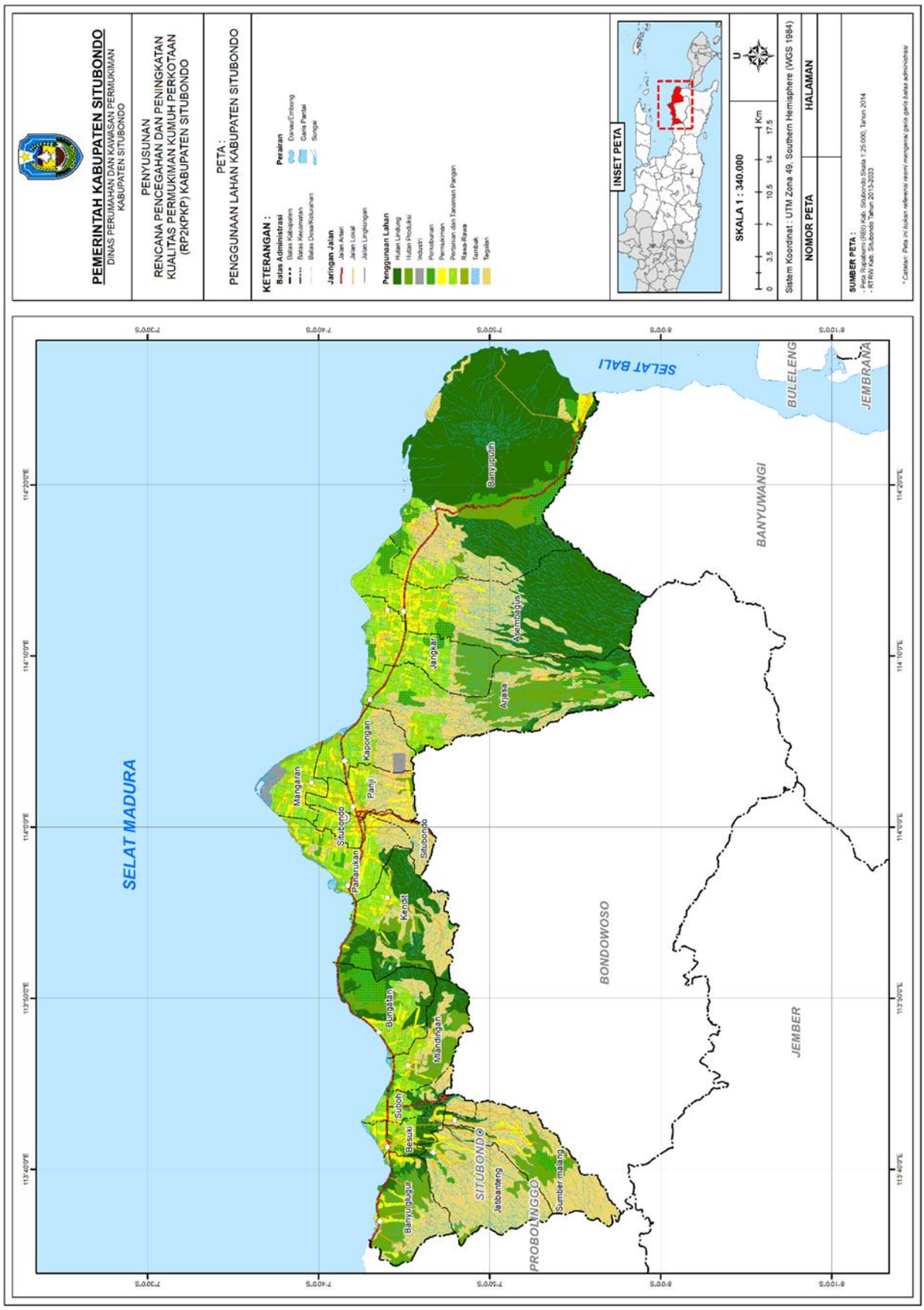

Peta 3. 5 Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo
Sumber : RTRW Kabupaten Situbondo, 2013-2033

3.1.3 Kependudukan

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2012 telah mencapai 656.691 jiwa yang terdiri dari 319.653 penduduk laki-laki dan 337.038 penduduk perempuan. Perbandingan antara penduuk laki-laki dan perempuan atau sex ratio sebesar 95,10 %, artinya dlam setiap 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki 95 jiwa.

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Sumbermalang	28.615
2	Jatibanteng	23.151
3	Banyuglugur	22.814
4	Besuki	62.296
5	Suboh	26.538
6	Mlandingan	22.572
7	Bungatan	24.730
8	Kendit	28.438
9	Panarukan	54.020
10	Situbondo	47.461
11	Mangaran	32.341
12	Panji	66.588
13	Kapongan	37.509
14	Arjasa	40.146
15	Jangkar	36.684
16	Asembagus	47.720
17	Banyuputih	56.168
Jumlah		688.337

Sumber : Kabupaten Situbondo dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Panji 66.558 jiwa, kemudian Besuki 62.296 jiwa, Panarukan 54.020 jiwa, Banyuputih 55.316 jiwa, dan Asembagus 47.720 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Jatibanteng, 22.019 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2021 mencapai 688.337 jiwa, dengan pertumbuhan rata-rata 0,35 persen tiap tahunnya. Angka kepadatan penduduk tahun 2021 di Kabupaten Situbondo setiap Km^2 adalah 400,79 jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk tahun 2021 adalah 369 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3. 4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Kategori
1	Sumbermalang	129.47	28.615	204,67	R
2	Jatibanteng	66.08	23.151	333,22	R
3	Banyuglugur	72.66	22.814	313,98	R
4	Besuki	26.41	62.296	2.358,80	T
5	Suboh	30.84	26.538	860,51	S
6	Mlandingan	39.61	22.572	569,86	R
7	Bungatan	66.07	24.730	374,30	R
8	Kendit	114.14	28.438	249,15	R
9	Panarukan	54.38	54.020	993,38	S
10	Situbondo	27.81	47.461	1.706,62	T
11	Mangaran	46.99	32.341	688,25	R
12	Panji	35.70	66.588	1.949,24	T
13	Kapongan	44.55	37.509	841,95	R

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Kategori
14	Arjasa	216.38	40.146	185,53	R
15	Jangkar	67.00	36.684	547,52	R
16	Asembagus	118.74	47.720	401,89	R
17	Banyuputih	481.67	56.168	114,84	R
	Jumlah	1638.5	688.337	400,78	

Sumber : Kabupaten Situbondo dalam Angka, 2022

3.1.4 Kebencanaan

Bencana alam yang dapat saja timbul di Kabupaten Situbondo dan sekitarnya tidak terlepas dari kondisi geo fisik wilayah Kabupaten Situbondo. Keberadaan DAS Sampeyan, adanya dataran rendah, kondisi dataran tinggi yang mulai terdegradasi, sebagian besar wilayah yang merupakan kawasan pesisir sepanjang pantai utara menjadikan Kabupaten Situbondo memiliki beberapa potensi bencana alam. Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Situbondo biasanya disebabkan oleh meluapnya sungai Sampean dan Sungai Deluwang. DAS Sampean memiliki luas 1.347 kilometer mencakup wilayah kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Adapun muaranya berada di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Kawasan yang rawan bencana banjir ialah Kecamatan Besuki, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji.
- Adanya kawasan yang menjadi daerah rawan tanah longsor yaitu Kecamatan Jatibanteng, Sumbermalang, Bungatan dan Kendit.

Terdapat potensi bencana karena angin yaitu angin laut yang sering merusak tambak dan tanaman pertanian. Wilayah yang rawan tersebut yaitu Kecamatan Besuki dan Mangaran.

- Kawasan rawan gempa tektonik berada di Kecamatan Asembagus.
- Wilayah pantai dan pesisir utara Kabupaten Situbondo merupakan kawasan rawan ombak besar

3.1.5 Potensi Ekonomi Wilayah

Potensi ekonomi wilayah yang ada di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- Potensi Hutan Produksi di Kaubupaten Situbondo memiliki luas 5.659 Ha, dimana hutan produksi yang paling dominan berada di Kecamatan Banyuputih, yaitu hutan jati di perbatasan Taman Nasional Baluran dengan Banyuwangi Utara, selanjutnya adalah Kendit dan Bungatan.
- Potensi sawah seluas 32.456 Ha dengan produksi 1.718.825 Kw. Sehingga kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk penggunaan lahan perkotaan serta kegiatan perdesaan berupa peningkatan hasil pertanian.

- Potensi holtikultura di kabupaten Situbondo terkonsentrasi pada buah-buahan dengan jenis mangga, karena semua kecamatan di Kabupaten Situbondo sebagai penghasil mangga. Produksi di tahun 2004 meningkat dari 1.577.180 kwintal pada tahun 2003 menjadi 3.357.320 kwintal atau meningkat 112 %.
- Perkebunan di Kebupaten Situbondo tersebar dibeberapa kecamatan dengan jenis-jenis komoditi kelapa, kopi, tembakau, kapuk, kapas, asam jawa, siwalan, cengkeh, jambu mente, pinang dan biji jarak.
- Potensi Perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi diwilayah pantai dengan usaha-usaha penangkapan ikan di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar, budidaya air laut, pembenihan, dan usaha pengolahan.
- Potensi pertambangan yang cukup menonjol adalah pertambangan mineral golongan batuan yaitu meliputi : batu kapur, tanah liat, batu kali/ gunung.
- Potensi Perindustrian di Kabupaten Situbondo cukup besar didukung dengan keberadaan pabrik besar (pabrik gula) serta dukungan pabrik-pabrik lainnya yaitu industri rumah tangga baik makanan maupun kerajinan.

3.2 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN SITUBONDO

Karakteristik kawasan kumuh Kabupaten Situbondo dikaji berdasarkan permasalahan yang ada. Permasalahan kawasan kumuh Kabupaten Situbondo meliputi:

- Sarana dan prasarana kurang lengkap/tidak memadai,
- Kondisi bangunan yang kurang memadai (mayoritas temporer/semi, padat dan tidak teratur (karena pertumbuhannya tidak terencana),
- Kesehatan lingkungan dan sanitasi yang rendah,
- Permukiman miskin,
- Permukiman kumuh ada di sekitar pusat kota,
- Tingkat kepadatan penduduk tinggi,
- Tingkat pendidikan rata-rata rendah,
- Tingkat pendapatan sebagian besar rendah (kondisi perekonomian ratar-ata rendah),
- Tingkat pengangguran tinggi dan tingkat kerawanan sosial tinggi.

Permasalahan yang ada di kawasan kumuh mengakibatkan kurang baiknya kondisi hidup masyarakat yang bermukim didaerah tersebut, baik dari segi estetika kawasan maupun bagi kualitas kesehatan lingkungan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: Nomor: 188/302/P/004.2/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk dimana terdapat di 17 Kawasan yang tersebar di 7 Desa/ Kelurahan dan di 4 Kecamatan dengan luas permukiman

kumuh 180,18 Ha. Sebaran kawasan kumuh di Kabupaten Situbondo adalah sebagai *Tabel 3.5* dan Peta *3.6* berikut:

Tabel 3. 5 Sebaran Prmukiman Kumuh Kabupaten Situbondo Berdasar SK Bupati

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF		KOORDINAT		KEKUMUHAN	
			KEL/DESA	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT
1	PESISIR SELATAN	5.20	KILENSARI	PANARUKAN	-7.692344	113.937031	44	KUMUH SEDANG
2	PESISIR TENGAH	4.90	KILENSARI	PANARUKAN	-7,692,352	113,938,063	49	KUMUH SEDANG
3	PESISIR UTARA	7.55	KILENSARI	PANARUKAN	-7.690711	113.938212	50	KUMUH SEDANG
4	KARANG PANCOR	9.00	ALAS MALANG	PANARUKAN	-7.678445	113.985946	29	KUMUH RINGAN
5	KARANG REJO	10.91	ALAS MALANG	PANARUKAN	-7.677174	113.983023	32	KUMUH RINGAN
6	KRAJAN	9.66	OLEAN	SITUBONDO	-7.675328	114.012873	39	KUMUH SEDANG
7	KANDANG SELATAN	5.76	OLEAN	SITUBONDO	-7.671022	114.004672	45	KUMUH SEDANG
8	SEMIRING SELATAN	14.08	SEMIRING	MANGARAN	-7.6,358,9	114.0238758	39	KUMUH SEDANG
9	SEMIRING UTARA	2.97	SEMIRING	MANGARAN	-7.6,340,6	114.0235438	42	KUMUH SEDANG
10	SEMIRING BARAT	15.97	SEMIRING	MANGARAN	-7,633,837	114.0233742	47	KUMUH SEDANG
11	KALIASIN	9.85	TANJUNG PECINAN	MANGARAN	-7,625,762	114.0555877	46	KUMUH SEDANG
12	KARANG ANYAR	7.87	TANJUNG PECINAN	MANGARAN	-7,625,762	114.0555877	46	KUMUH SEDANG
13	DUSUN TENGAH	13.33	PERANTE	ASEMBAGUS	-7.758049	114.220548	30	KUMUH RINGAN
14	DUSUN SELATAN	17.30	PERANTE	ASEMBAGUS	-7.759475	114.221466	31	KUMUH RINGAN
15	TIMUR SAWAH	16.07	WRINGINANOM	ASEMBAGUS	-7.74997	114.234777	39	KUMUH SEDANG
16	BATAAN	7.36	WRINGINANOM	ASEMBAGUS	-7.7334636	114.2217244	42	KUMUH SEDANG
17	SOK PARSE	22.40	WRINGINANOM	ASEMBAGUS	-7,749,682	114.2335108	25	KUMUH RINGAN
Total Luasan Kumuh		**180.18**						

Sumber : lampiran SK Kab. Situbondo No .188/302/P/004.2/2020

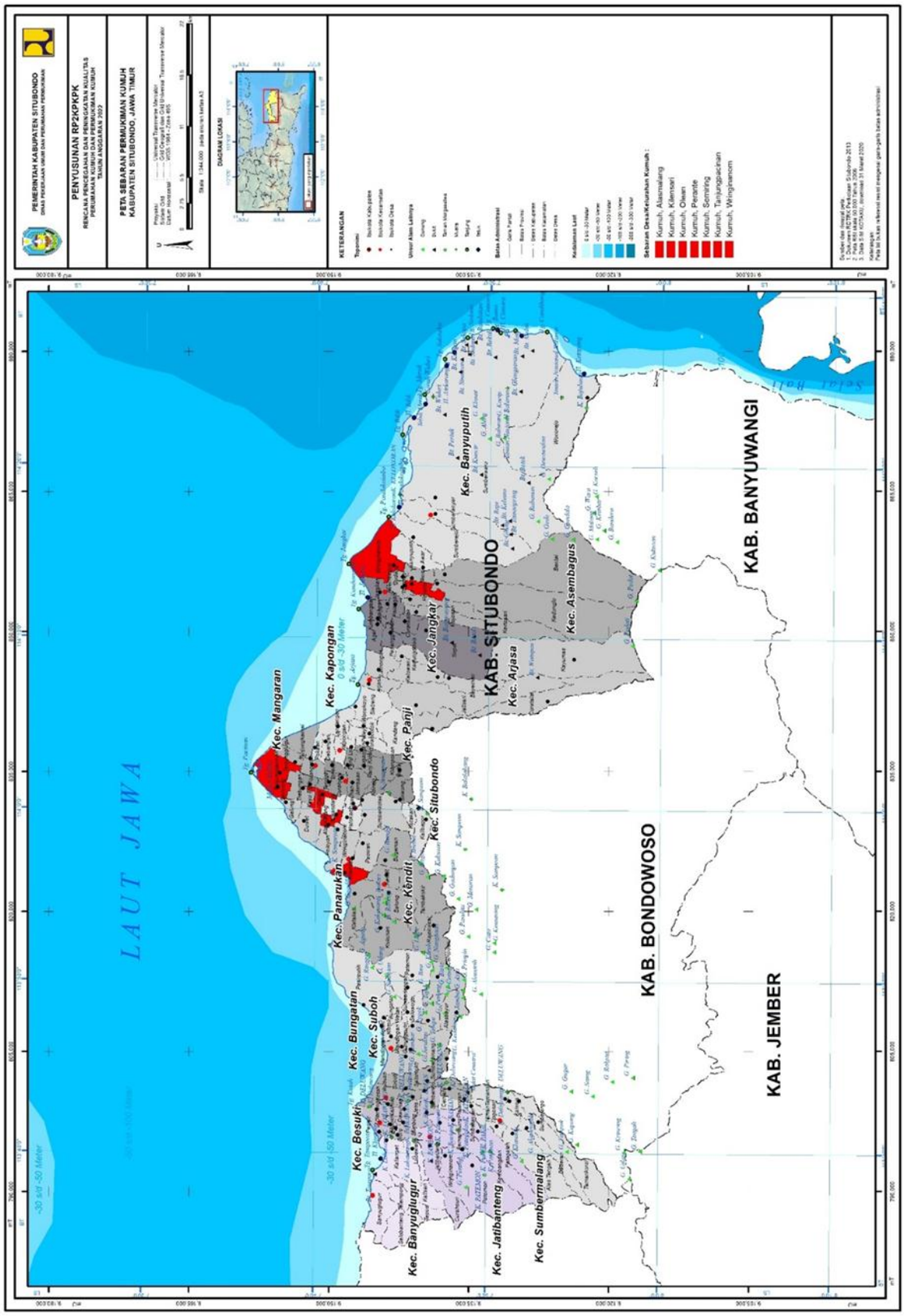

Peta 3. 6 Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Situbondo
Sumber : Analisa Penyusun, 2022

3.3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.3.1 Profil Permukiman Kumuh – Desa Kilensari

Kawasan permukiman kumuh di Desa Kilensari meliputi Kawasan Pesisir Selatan dengan luas sebesar 5.20 Ha, Pesisir Tengah dengan luas sebesar 4.90 Ha dan Kawasan Pesisir Utara dengan luas sebesar 7.55 Ha. Tipologi atau karakteristik kawasan permukiman kumuh Desa Kilensari merupakan kawasan

permukiman kumuh padat dan sebagian berada di pesisir pantai. Berikut ini adalah profil kawasan permukiman kumuh Desa Kilensari :

A.1 Karakteristik Bangunan Hunian

Keadaan bangunan hunian di Desa Kilensari mayoritas merupakan bangunan permanen dengan jumlah bangunan hunian seluruhnya 1.264 unit. Bangunan hunian di permukiman kumuh Desa Kilensari memiliki beberapa permasalahan anatara lain terdapat beberapa RTLH yang menggunakan material bangunan dinding dari kayu dan triplek, beberapa area bangunan tidak teratur yang berdiri diatas saluran irigasi yang mengakibatkan banjir, ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk bangunan yang dapat dilihat dari bangunan hunian satu dengan bangunan hunian lain di samping kanan dan kirinya. Berikut adalah gambaran kondisi bangunan hunian di Desa Kilensari :

Gambar 3. 1 Kondisi Banguan Hunian Desa Kilensari

Sumber : Survey Lapang, 2022

A.2 Karakteristik Jalan Lingkungan

Keadaan jalan lingkungan di Desa Kilensari mayoritas permukiman sudah terkoneksi oleh jaringan jalan, namun memiliki beberapa permasalahan antara lain kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman dikarenakan perkerasan jalan berupa aspal atau paving terdapat beberapa yang mengalami kerusakan, salah satunya disebabkan oleh genangan air hujan yang menggerus lapisan perkerasan jalan. Selain itu, adanya jalan yang masih belum terbangun berupa makadam maupun tanah dan kurangnya akses jalan yang menyambungkan ke jalan utama jalan lingkungan penunjang ekonomi.

Gambar 3. 2 Kondisi Jalan Lingkungan Desa Kilensari

Sumber : Survey Lapang, 2022

A.3 Karakteristik Air Bersih

Keadaan penyediaan air bersih di Desa Kilensari mayoritas masyarakat menggunakan PDAM. Nsmun terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak terpenuhinya kualitas air bersih sesuai standar kesehatan karena terdapat masyarakat menggunakan air sumur yang kondisinya tidak layak, dimana jarak antara sumber air dan tangki septik pembuangan limbah umumnya berjarak

kurang dari 10 meter. Selain itu masyarakat tidak mampu mengakses PDAM karena dianggap terlalu mahal.

Gambar 3. 3 Kondisi Penyediaan Air Minum Desa Kilensari
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.4 Karakteristik Drainase Lingkungan

Keadaan drainase lingkungan di Desa Kilensari mayoritas telah memiliki tersedia di tiap ruas jalan, namun memiliki beberapa permasalahan seperti pembuangan air limbah rumah tangga sehingga fungsi saluran drainase bercampur yang mengakibatkan pendangkalan saluran. Selain itu, adanya ketidakterhubungan saluran drainase dengan sistem drainase perkotaan sehingga tidak ada integrasi antara saluran drainase satu dengan saluran drainase lainnya, tidak ada tangkis laut di muara yang mengakibatkan masuknya air laut ke pemukiman warga.

Gambar 3. 4 Kondisi Drainase Lingkungan Desa Kilensari
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.5 Karakteristik Pengelolaan Air Limbah

Keadaan pengelolaan air limbah di Desa Kilensari mayoritas memiliki MCK pribadi dan telah terhubung dengan tangki septic, namun memiliki beberapa permasalahan, seperti limbah rumah tangga yang masih dibuang langsung ke saluran drainase atau sungai tanpa diproses terlebih dahulu. beberapa warga masih BAB di sungai atau laut.

Gambar 3. 5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Desa Kilensari
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.6 Karakteristik Pengelolaan Persampahan

Keadaan pengelolaan sampah di Desa Kilensari mayoritas masyarakat tidak dapat menerima layanan sistem pengangkutan sampah karena sistem

pengangkutan menuju TPS tidak memadai serta petugas dan armada angkut kurang. Hal ini mengakibatkan sampah tidak terangkut dan terkelola dengan baik, sampah di kelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibuang ke sungai atau laut, dan dibakar di lahan kosong. Terdapat sampah rumah tangga yang tidak terangkut oleh sistem pengolahan tidak sesuai standar teknis yaitu 104 KK

Gambar 3. 6 Kondisi Pengelolaan Sampah Desa Kilensari
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.7 Karakteristik Proteksi Kebakaran

Keadaan pengamanan bahaya kebakaran di Desa Kilensari memiliki beberapa permasalahan, seperti ketidaktersediaan sistem pengamanan bahaya kebakaran secara aktif dan pasif yang dapat dilihat dari lingkungan atau setiap bangunan hunian yang tidak memliki pengamanan bahaya kebakaran. Disamping itu, juga terdapat ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran karena masih ada beberapa jalan lingkungan yang ada memiliki lebar kurang dari 1,5 meter sehingga tidak dapat dilalui oleh mobil kebakaran.

Gambar 3. 7 Kondisi Proteksi Kebakaran Desa Kilensari
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.8 Profil dan Data Baseline Kumuh Desa Kilensari

Data Basline kumuh memuat mengenai informasi numerik 7 (tujuh) indikator kumuh serta tingkat kekumuhan di Desa Kilensari, berikut adalah data baseline kumuh Desa Kilensari :

Tabel 3. 6 Baseline Kumuh Desa Kilensari

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: JAWA TIMUR**	**Luas SK**	**17.65**	Ha
Kab/Kota	**: KAB. SITUBONDO**	**Luas Verifikasi**	**17.65**	Ha
Kecamatan	**: PANARUKAN**	**Jumlah Bangunan**	**1,264**	Unit
Kawasan	**: KILENSARI**	**Jumlah Penduduk**	**3,742**	Jiwa
		Jumlah Bangunan	**1,264**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	977.00	Unit	77.29%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	1,251.00	Unit	98.97%	5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				58.76%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4,125.00	Meter	61.80%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				30.90%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	263.00	KK	20.81%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1,104.00	KK	87.34%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				43.67%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	100.00	Meter	2.44%	0
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	-	Meter	0.00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	2,275.00	Meter	55.49%	3
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				11.10%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1,119.00	KK	88.53%	5
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	1,264.00	KK	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				94.26%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1,264.00	KK	100.00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1,262.00	KK	99.84%	5
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				66.61%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1,264.00	Unit	100.00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1,264.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100.00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		
60 -80 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	51
38 - 59 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
16 - 37 KUMUH RINGAN		
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	57.90%
	KONTRIBUSI PENANGANAN	0.00%

Sumber : Baseline Kumuh, 2020

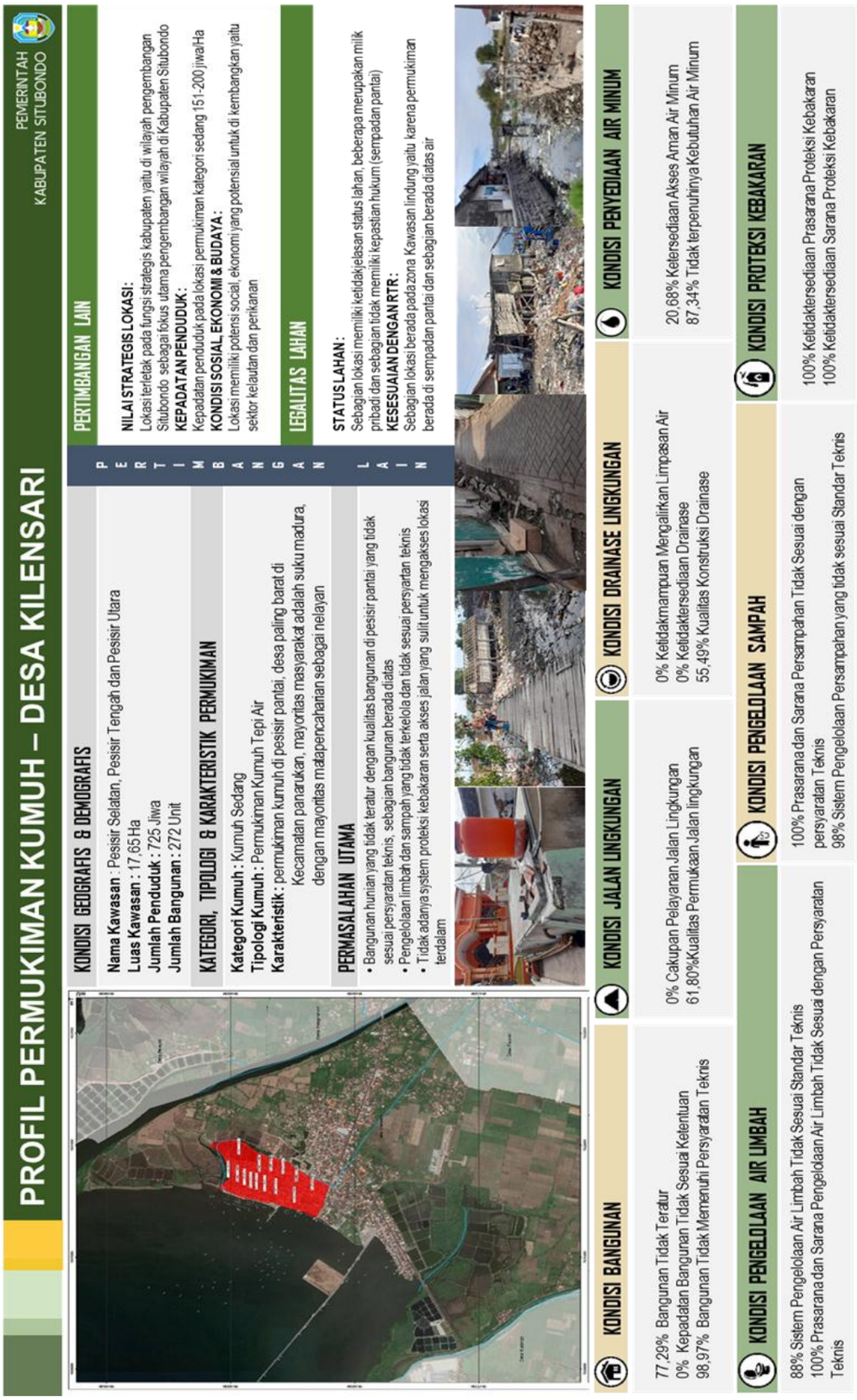

Gambar 3. 8 Profil Kumuh Desa Kilensari
Sumber : Hasil Analisa, 2022

A.9 Sebaran Permasalahan 7 Indikator Kumuh Desa Kilensari

Berikut adalah Sebaran pemasalahan terkait 7 (tujuh) indikator kumuh Desa Kilensari:

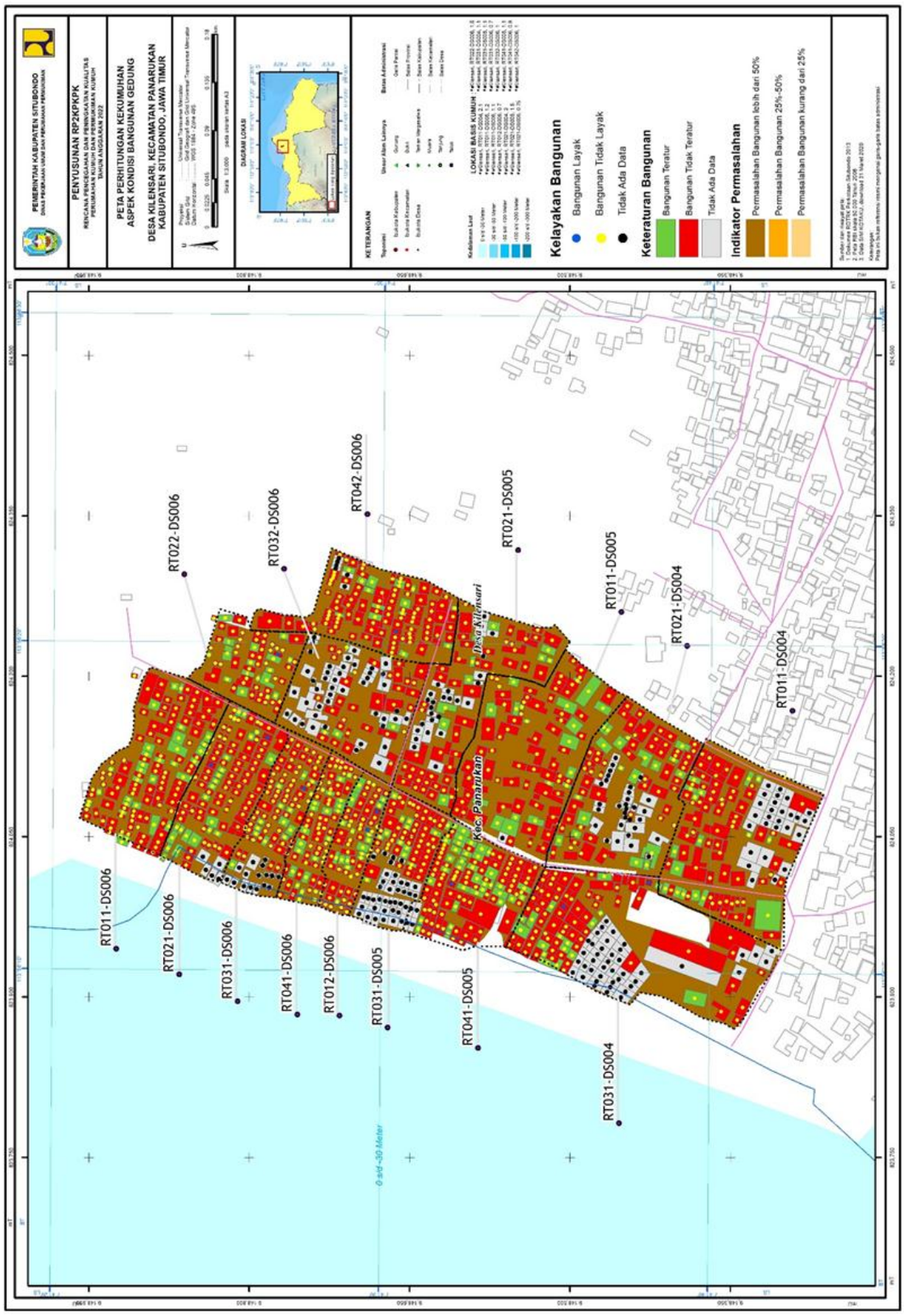

Peta 3. 7 Kondisi Permasalahan Bangunan Hunian Kilensari

Sumber : Survey Lapang, 2022

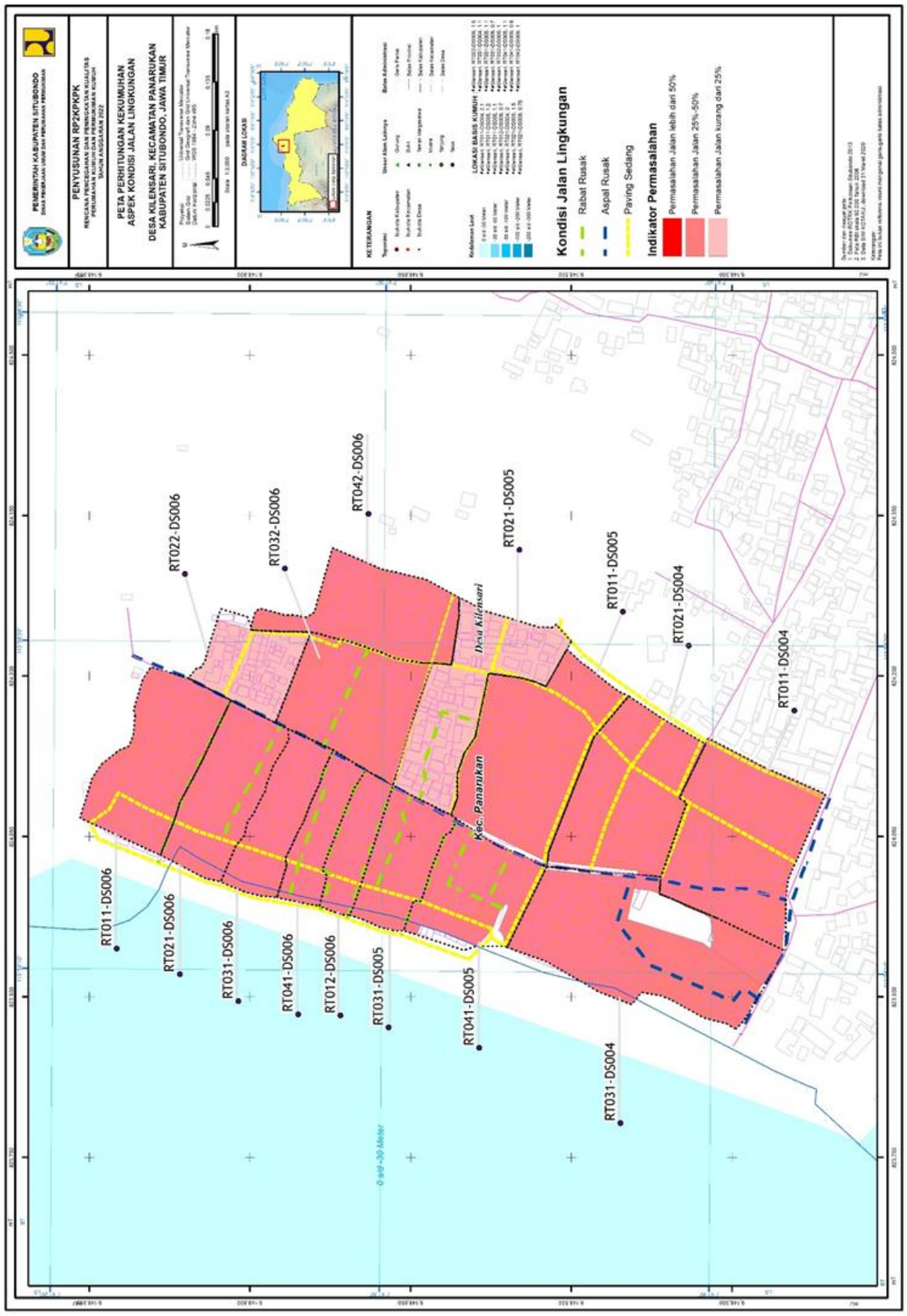

Peta 3. 8 Kondisi Permasalahan Jalan Lingkungan Kilensari

Sumber : Survey Lapang, 2022

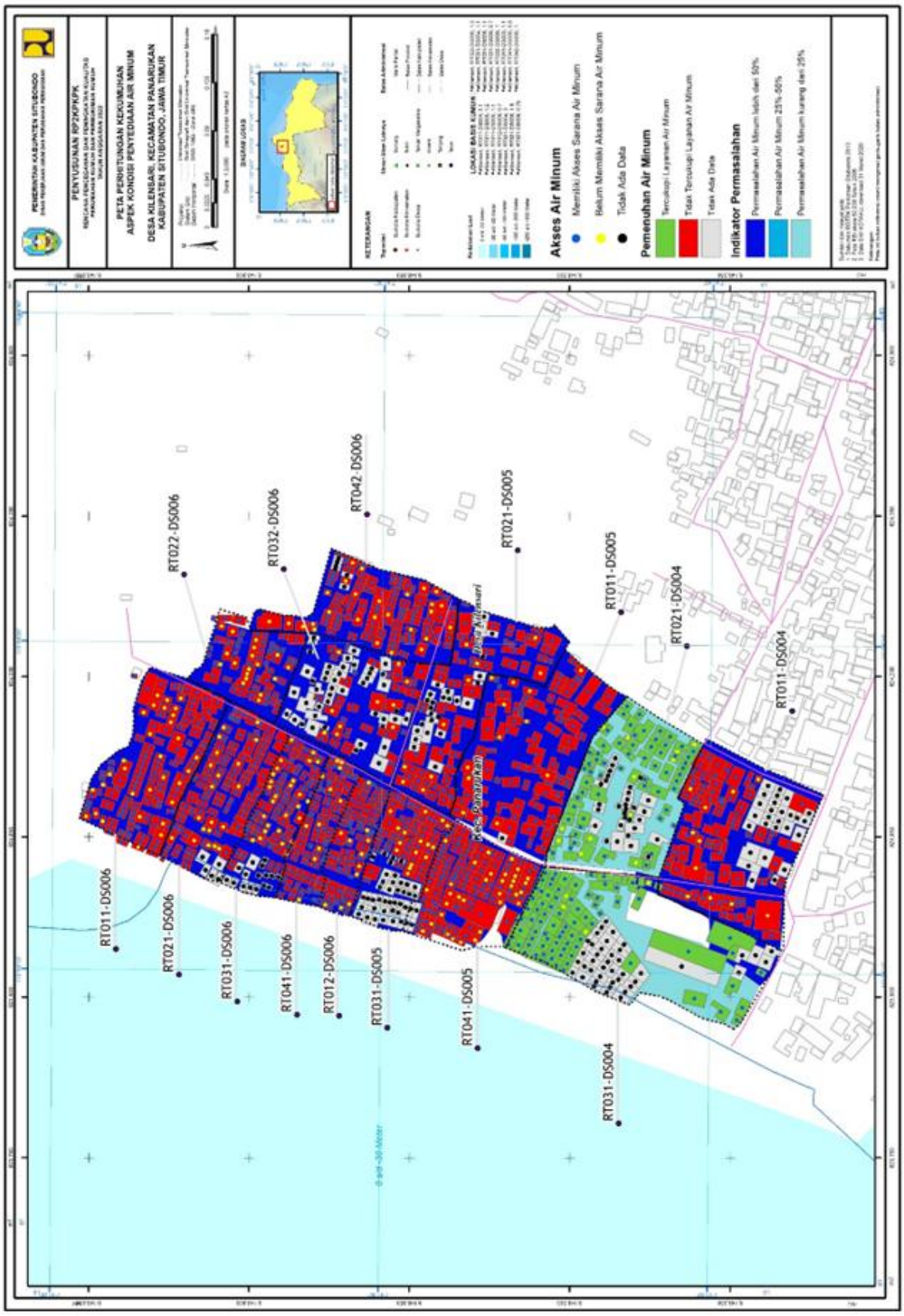

Peta 3. 9 Kondisi Permasalahan Air Minum Kilensari
Sumber : Survey Lapang, 2022

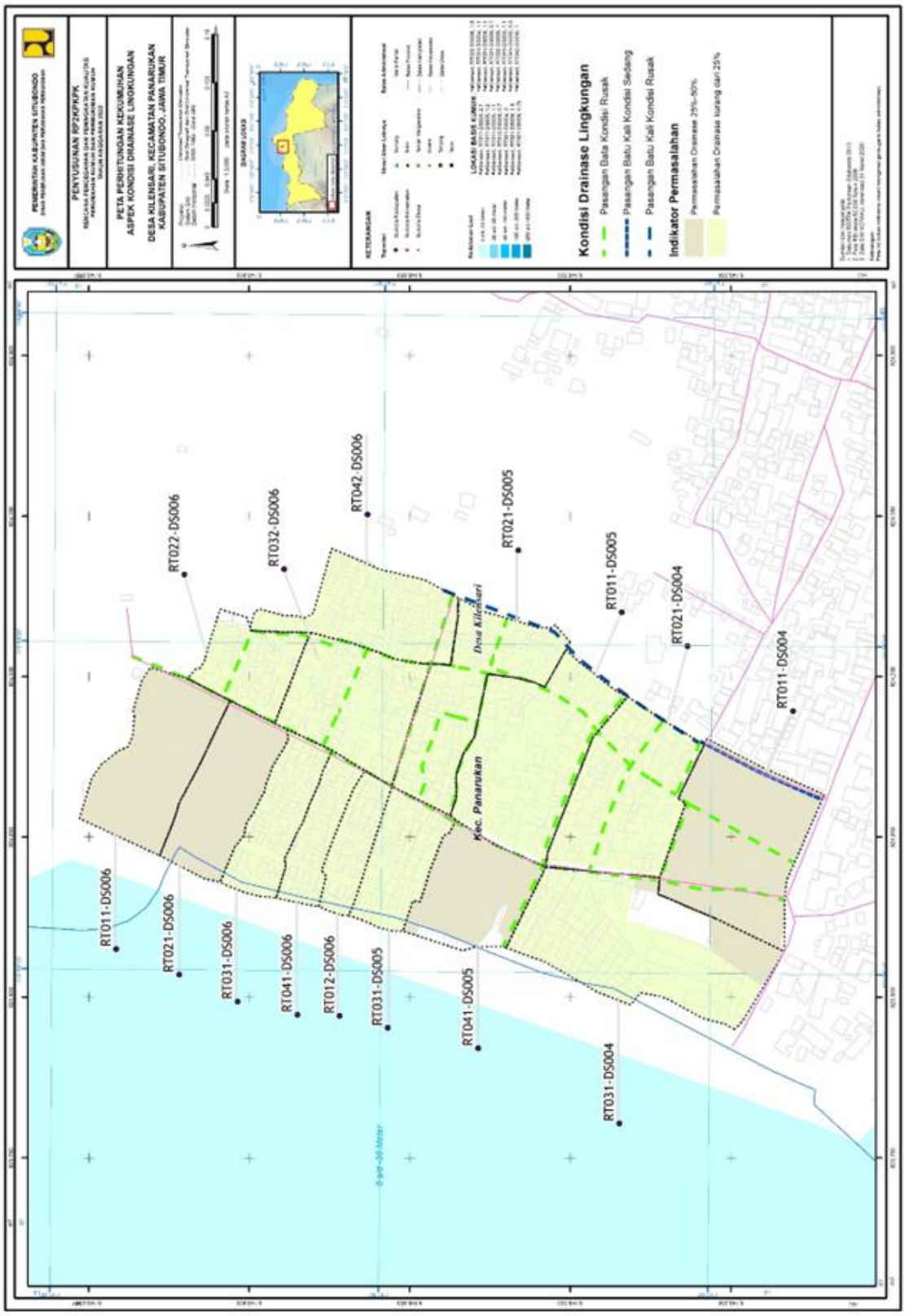

Peta 3. 10 Kondisi Permasalahan Drainase Kilensari
Sumber : Survey Lapang, 2022

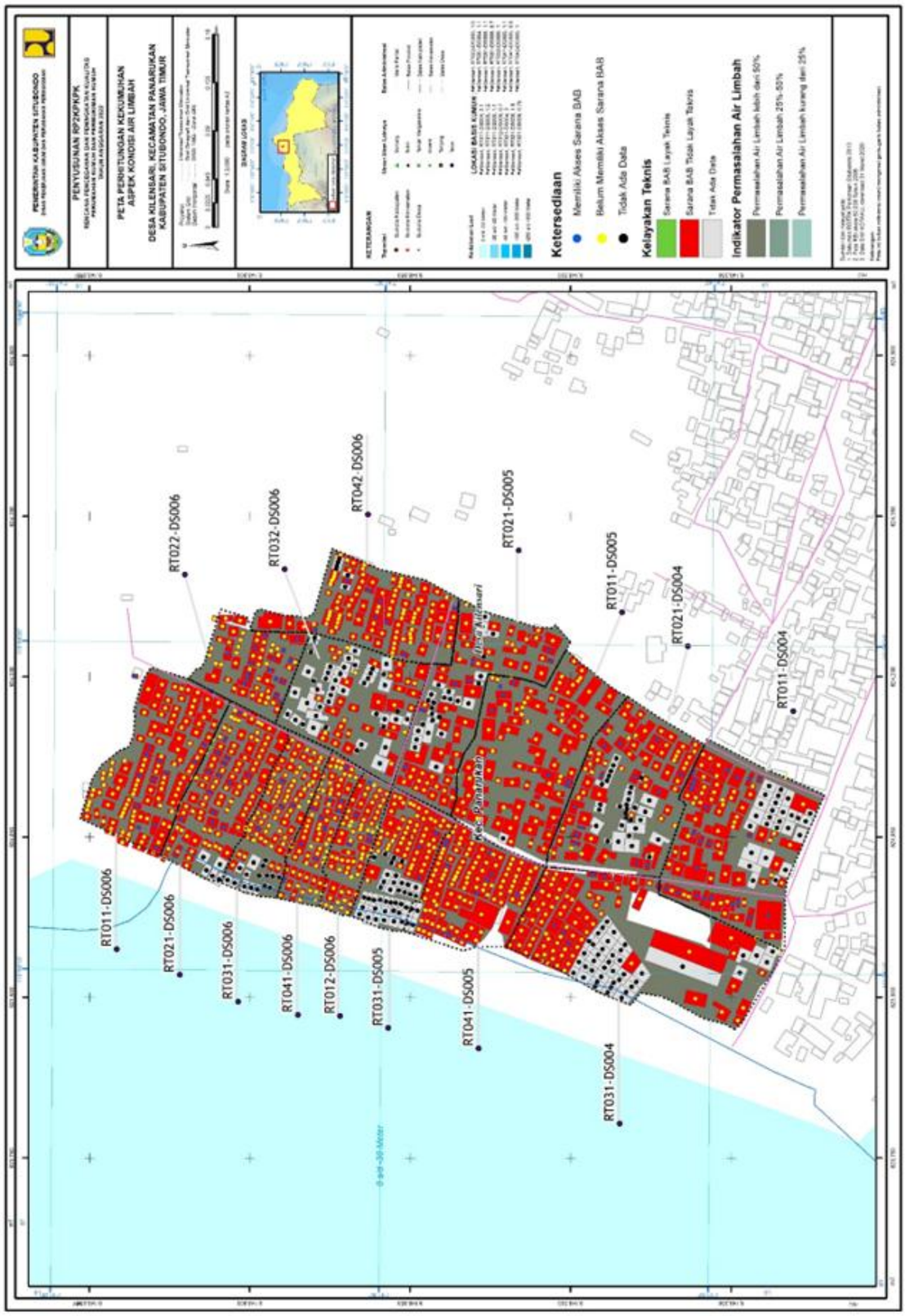

Peta 3. 11 Kondisi Permasalahan Air Limbah Kilensari

Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 12 Kondisi Permasalahan Pengelolaan Sampah Kilensari
Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 13 Kondisi Permasalahan Proteksi Kebakaran Kilensari
Sumber : Survey Lapang, 2022

3.3.2 Profil Permukiman Kumuh – Desa Alasmalang

Kawasan permukiman kumuh di Desa Alasmalang meliputi Kawasan Karang Pancor dengan luas sebesar 9.0 Ha dan Kawasan Karangrejo dengan luas sebesar 10.91 Ha. Tipologi atau karakteristik kawasan permukiman kumuh Desa Alasmalang merupakan kawasan permukiman kumuh dataran rendah dengan karakteristik pedesaan. Berikut ini adalah profil kawasan permukiman kumuh Desa Alasmalang:

A.1 Karakteristik Bangunan Hunian

Keadaan bangunan hunian di Desa Alasmalang mayoritas merupakan bangunan permanen dengan jumlah bangunan hunian seluruhnya 565 unit. Bangunan hunian di permukiman kumuh Desa Alasmalang memiliki beberapa permasalahan antara lain terdapat beberapa RTLH yang menggunakan material bangunan dinding dari kayu, triplek, bambu dan berlantai tanah. Selain itu terdapat beberapa keluarga yang memiliki bangunan kedap udara sehingga menjadi sumber penyakit. Kondisi ini disebabkan karena kemiskinan masyarakat mata pencaharian penduduk mayoritas buruh tani. Berikut adalah gambaran kondisi bangunan hunian di Desa Alasmalang:

Gambar 3. 9 Kondisi Banguan Hunian Desa Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.2 Karakteristik Jalan Lingkungan

Keadaan jalan lingkungan di Desa Alasmalang mayoritas permukiman sudah terkoneksi oleh jaringan jalan, namun memiliki beberapa permasalahan antara lain kondisi jalan yang tandus dan tidak rata saat kemarau serta licin saat musim penghujan sehingga memperlambat jarak tempuh ke tempat kerja. Selain itu, adanya jalan yang masih belum terbangun berupa makadam maupun tanah dan Jalan Rusak karena faktor usia

Gambar 3. 10 Kondisi Jalan Lingkungan Desa Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.3 Karakteristik Air Bersih

Keadaan penyediaan air bersih di Desa Alasmalang mayoritas masyarakat menggunakan sumur dan sebagian lainnya menggunakan PDAM. Namun terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak terpenuhinya kualitas air bersih sesuai standar kesehatan karena terdapat masyarakat menggunakan air sumur yang kondisinya tidak layak, dimana jarak antara sumber air dan tangki septik pembuangan limbah umumnya berjarak kurang dari 10 meter. Selain itu masyarakat tidak mampu mengakses PDAM karena dianggap terlalu mahal.

Gambar 3. 11 Kondisi Penyediaan Air Minum Desa Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.4 Karakteristik Drainase Lingkungan

Keadaan drainase lingkungan di Desa Alasmalang mayoritas telah memiliki tersedia di tiap ruas jalan, namun memiliki beberapa permasalahan seperti pembuangan air limbah rumah tangga sehingga fungsi saluran drainase bercampur yang mengakibatkan pendangkalan saluran. Selain itu, adanya ketidakterhubungan saluran drainase dengan sistem drainase perkotaan sehingga tidak ada integrasi antara saluran drainase satu dengan saluran drainase lainnya, sungai sebagai drainase utama tidak dapat menampung air hujan sehingga meluap ke permukiman warga

Gambar 3. 12 Kondisi Drainase Lingkungan Desa Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.5 Karakteristik Pengelolaan Air Limbah

Keadaan pengelolaan air limbah di Desa Alasmalang mayoritas memiliki MCK pribadi dan telah terhubung dengan tangki septic, namun memiliki beberapa permasalahan, seperti limbah rumah tangga yang masih dibuang langsung ke saluran atau sungai tanpa diproses terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kemiskinan masyarakat dan rendahnya kesadaran pentingnya menjaga kesehatan.

Gambar 3. 13 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Desa Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.6 Karakteristik Pengelolaan Persampahan

Keadaan pengelolaan sampah di Desa Alasmalang mayoritas masyarakat tidak terlayani sistem pengangkutan sampah karena belum adanya sistem pengangkutan, tidak adanya TPS serta petugas dan armada angkut kurang. Hal ini mengakibatkan sampah tidak terangkut dan terkelola dengan baik, sampah di kelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibuang ke sungai dan dibakar di lahan kosong.

Gambar 3. 14 Kondisi Pengelolaan Sampah Desa Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.7 Karakteristik Proteksi Kebakaran

Keadaan pengamanan bahaya kebakaran di Desa Alasmalang memiliki beberapa permasalahan, seperti ketidaktersediaan sistem pengamanan bahaya kebakaran secara aktif dan pasif yang dapat dilihat dari lingkungan atau setiap bangunan hunian yang tidak memliki pengamanan bahaya kebakaran. Disamping itu, juga terdapat ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran karena masih ada beberapa jalan lingkungan yang ada memiliki lebar kurang dari 1,5 meter sehingga tidak dapat dilalui oleh mobil kebakaran.

Gambar 3. 15 Kondisi Proteksi Kebakaran Desa Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.8 Profil dan Data Baseline Kumuh Desa Alasmalang

Data Basline kumuh memuat mengenai informasi numerik 7 (tujuh) indikator kumuh serta tingkat kekumuhan di Desa Alasmalang, berikut adalah data baseline kumuh Desa Alasmalang :

Tabel 3. 7 Baseline Kumuh Desa Alasmalang

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: JAWA TIMUR**	**Luas SK**	**19.91**	Ha
Kab/Kota	**: KAB. SITUBONDO**	**Luas Verifikasi**	**19.91**	Ha
Kecamatan	**: PANARUKAN**	**Jumlah Bangunan**	**565**	Unit
Kawasan	**: ALAS MALANG**	**Jumlah Penduduk**	**1,558**	Jiwa
		Jumlah Bangunan	**579**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	196.00	Unit	34.69%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	224.00	Unit	39.65%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				24.78%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	877.00	Meter	22.33%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1,706.00	Meter	43.44%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				21.72%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	290.00	KK	50.09%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	14.00	KK	2.42%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				25.04%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1.70	Ha	8.54%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	930.00	Meter	31.07%	1
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	-	Meter	0.00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1,063.00	Meter	35.52%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				13.32%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	84.00	KK	14.51%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	354.00	KK	61.14%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				30.57%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	446.00	KK	77.03%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	567.00	KK	97.93%	5
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				58.32%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	409.00	Unit	72.39%	3
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	565.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				86.19%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		
60 -80 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	27
38 - 59 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
16 - 37 KUMUH RINGAN		
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	37.13%
	KONTRIBUSI PENANGANAN	0.00%

Sumber : Baseline Kumuh, 2020

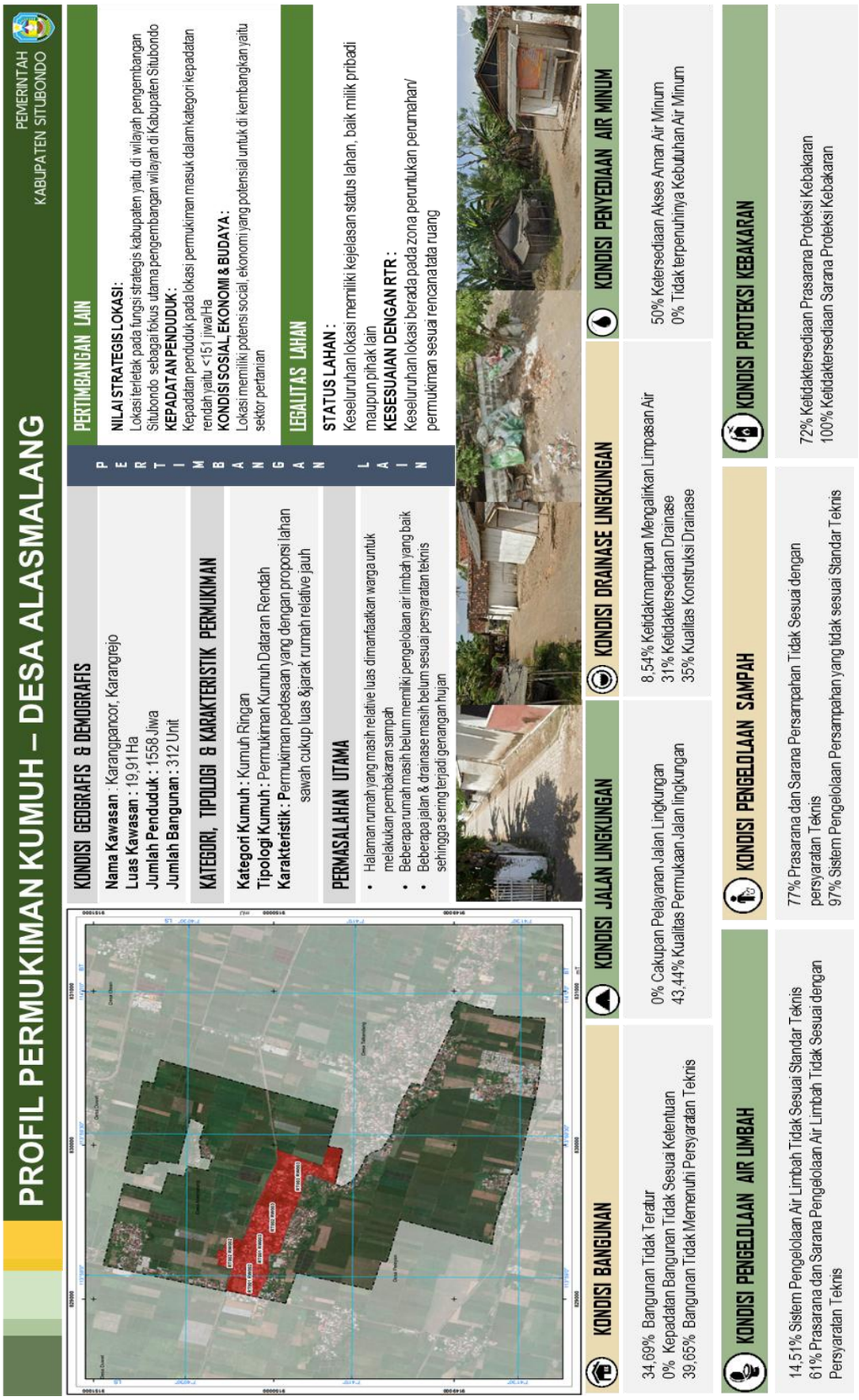

Gambar 3. 16 Profil Kumuh Desa Alasmalang
Sumber : Analisa Penulis, 2022

A.9 Sebaran Permasalahan 7 Indikator Kumuh Desa Alasmalang

Berikut adalah Sebaran pemasalahan terkait 7 (tujuh) indikator kumuh Desa Alasmalang:

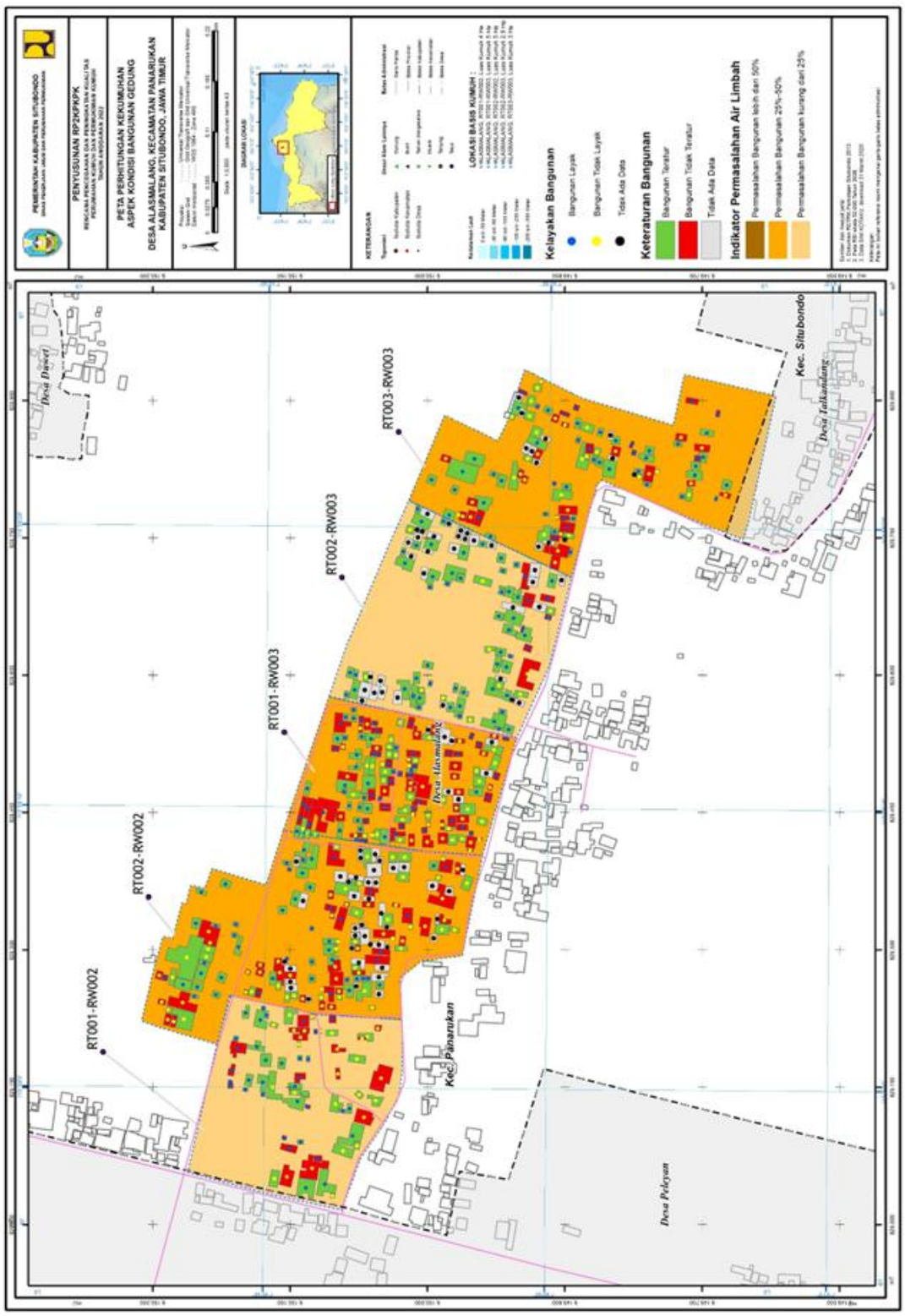

Peta 3. 14 Kondisi Permasalahan Bangunan Hunian Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

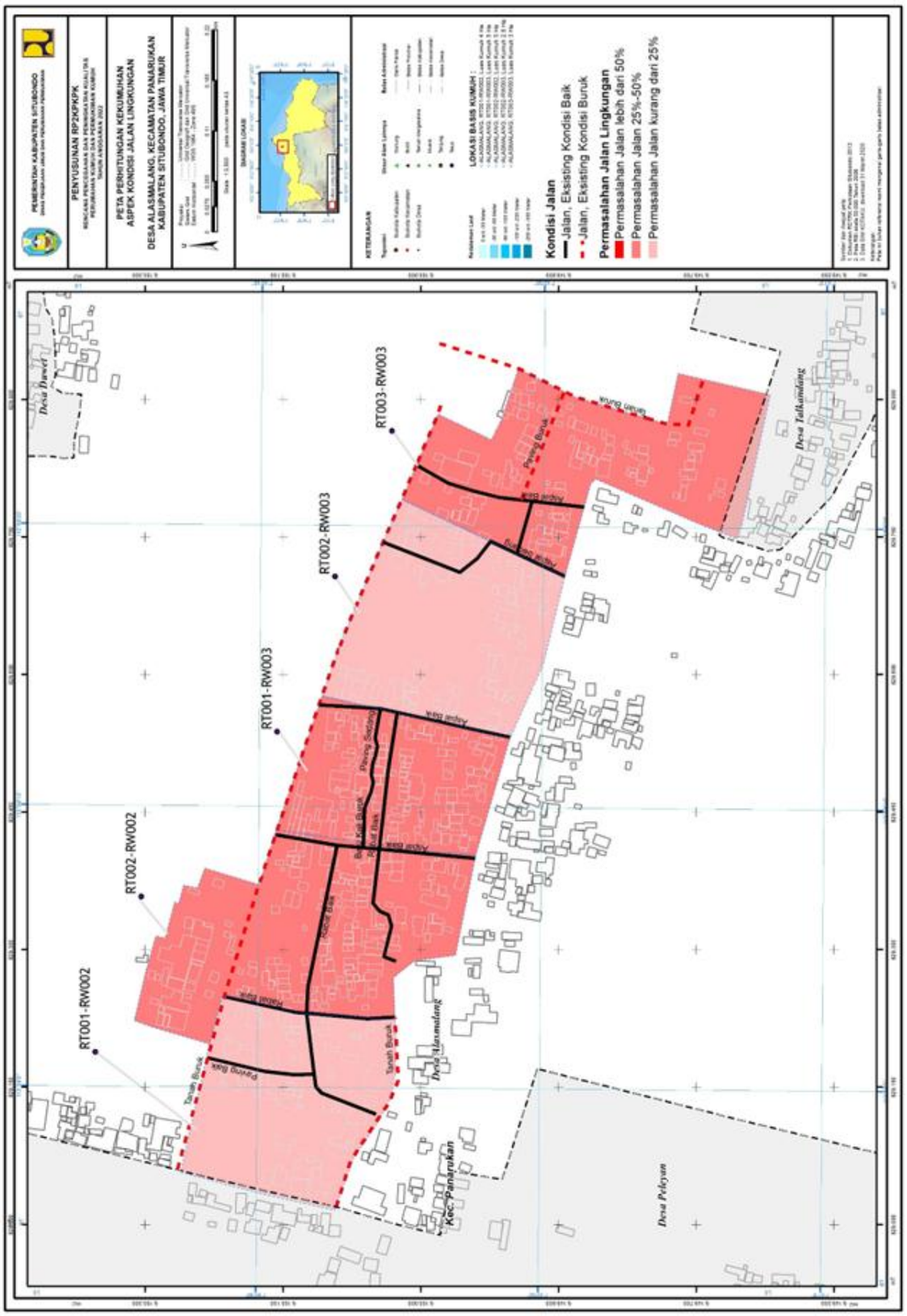

Peta 3. 15 Kondisi Permasalahan Jalan Lingkungan Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

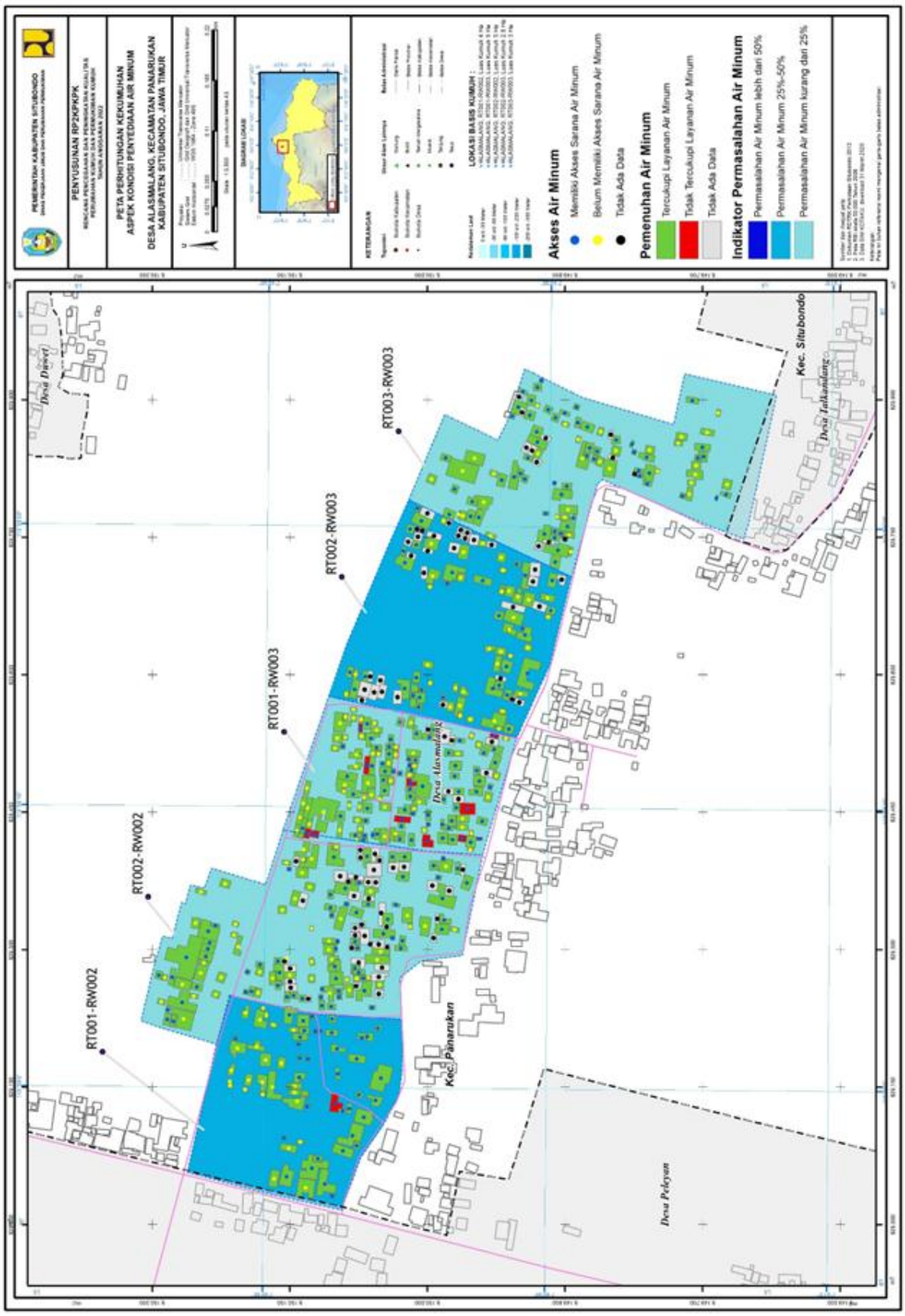

Peta 3. 16 Kondisi Permasalahan Air Minum Alasmalang

Sumber : Survey Lapang, 2022

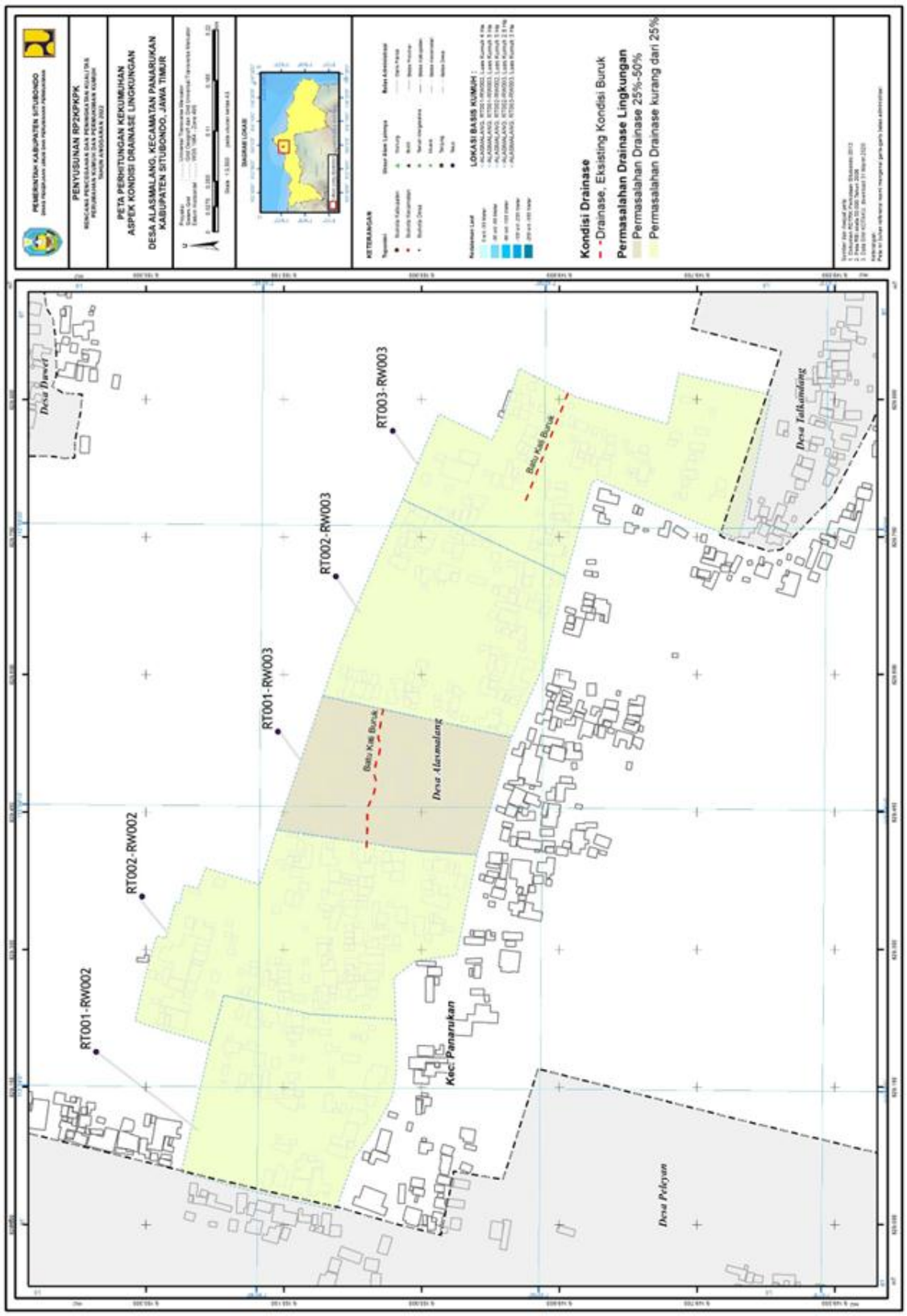

Peta 3. 17 Kondisi Permasalahan Drainase Alasmalang

Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 18 Kondisi Permasalahan Air Limbah Alasmalang

Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 19 Kondisi Permasalahan Persampahan Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

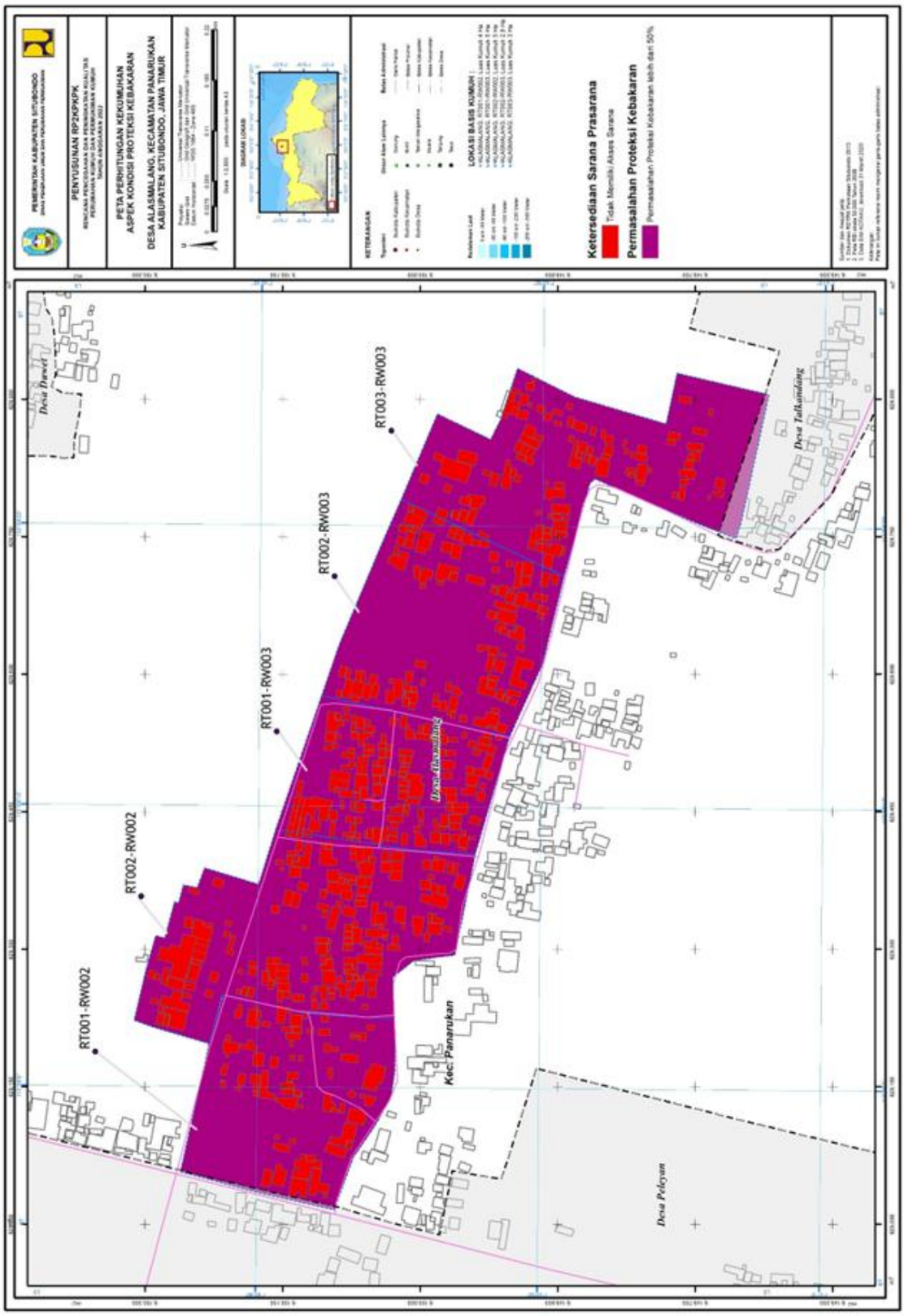

Peta 3. 20 Kondisi Permasalahan Proteksi Kebakaran Alasmalang
Sumber : Survey Lapang, 2022

3.3.3 Profil Permukiman Kumuh – Desa Olean

Kawasan permukiman kumuh di Desa Olean meliputi Kawasan Krajan dengan luas sebesar 9.66 Ha dan Kawasan Karangrejo dengan luas sebesar 5,76 Ha. Tipologi atau karakteristik kawasan permukiman kumuh Desa Olean merupakan kawasan permukiman kumuh dataran rendah dengan karakteristik pedesaan. Berikut ini adalah profil kawasan permukiman kumuh Desa Olean:

A.1 Karakteristik Bangunan Hunian

Keadaan bangunan hunian di Desa Olean Mayoritas bangunan hunian adalah bangunan permanen dan milik pribadi. Bangunan hunian di permukiman kumuh Desa Olean memiliki beberapa permasalahan antara lain terdapat beberapa RTLH yang menggunakan material bangunan dinding dari kayu, triplek, bambu dan berlantai tanah. Kondisi ini disebabkan karena kemiskinan masyarakat mata pencaharian penduduk mayoritas buruh tani. Brikut adalah gambaran kondisi bangunan hunian di Desa Olean:

Gambar 3. 17 Kondisi Banguan Hunian Desa Olean
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.2 Karakteristik Jalan Lingkungan

Keadaan jalan lingkungan di Desa Olean mayoritas permukiman sudah terkoneksi oleh jaringan jalan, namun memiliki beberapa permasalahan antara lain jalan aspal tetapi sudah mengalami kerusakan dengan kondisi sedang. Selain itu, adanya jalan yang masih belum terbangun berupa makadam maupun tanah dan Jalan Rusak karena faktor usia

Gambar 3. 18 Kondisi Jalan Lingkungan Desa Olean
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.3 Karakteristik Air Bersih

Keadaan penyediaan air bersih di Desa Olean mayoritas masyarakat menggunakan sumur sisanya menggunakan PDAM. Namun terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak terpenuhinya kualitas air bersih sesuai standar kesehatan karena terdapat masyarakat menggunakan air sumur yang kondisinya tidak layak, dimana jarak antara sumber air dan tangki septik pembuangan

limbah umumnya berjarak kurang dari 10 meter. Selain itu masyarakat tidak mampu mengakses PDAM karena dianggap terlalu mahal.

Gambar 3. 19 Kondisi Penyediaan Air Minum Desa Olean
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.4 Karakteristik Drainase Lingkungan

Keadaan drainase lingkungan di Desa Olean mayoritas telah memiliki drainase di tiap ruas jalan, namun memiliki beberapa permasalahan seperti pembuangan air limbah rumah tangga sehingga fungsi saluran drainase bercampur yang mengakibatkan pendangkalan saluran. Selain itu, adanya ketidakterhubungan saluran drainase dengan sistem drainase perkotaan sehingga tidak ada integrasi antara saluran drainase lingkungan dengan saluran drainase primer, sungai sebagai drainase utama tidak dapat menampung air hujan shingga meluap ke permukiman warga

Gambar 3. 20 Kondisi Drainase Lingkungan Desa Olean
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.5 Karakteristik Pengelolaan Air Limbah

Keadaan pengelolaan air limbah di Desa Olean mayoritas memiliki MCK pribadi dan telah terhubung dengan tangki septic, namun memiliki beberapa permasalahan, seperti limbah rumah tangga yang masih dibuang langsung ke saluran atau sungai tanpa diproses terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kemiskinan masyarakat dan rendahnya kesadaran pentingnya menjaga kesehatan.

Gambar 3. 21 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Desa Olean
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.6 Karakteristik Pengelolaan Persampahan

Keadaan pengelolaan sampah di Desa Olean mayoritas masyarakat tidak terlayani sistem pengangkutan sampah karena belum adanya sistem pengangkutan, tidak adanya TPS serta petugas dan armada angkut kurang.

Hal ini mengakibatkan sampah tidak terangkut dan terkelola dengan baik, sampah di kelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibuang ke sungai dan dibakar di lahan kosong.

Gambar 3. 22 Kondisi Pengelolaan Sampah Desa Olean
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.7 Karakteristik Proteksi Kebakaran

Keadaan pengamanan bahaya kebakaran di Desa Olean memiliki beberapa permasalahan, seperti ketidaktersediaan sistem pengamanan bahaya kebakaran secara aktif dan pasif yang dapat dilihat dari lingkungan atau setiap bangunan hnian yang tidak memliki pengamanan bahaya kebakaran. Disamping itu, juga terdapat ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran karena masih ada beberapa jalan lingkungan yang ada memiliki lebar kurang dari 1,5 meter sehingga tidak dapat dilalui oleh mobil kebakaran.

Gambar 3. 23 Kondisi Proteksi Kebakaran Desa Olean
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.8 Profil dan Data Baseline Kumuh Desa Olean

Data Basline kumuh memuat mengenai informasi numerik 7 (tujuh) indikator kumuh serta tingkat kekumuhan di Desa Olean, berikut adalah data baseline kumuh Desa Olean :

Tabel 3. 8 Baseline Kumuh Desa Olean

Provinsi	**: JAWA TIMUR**	**Luas SK**	**15.42**	Ha
Kab/Kota	**: KAB. SITUBONDO**	**Luas Verifikasi**	**15.42**	Ha
Kecamatan	**: SITUBONDO**	**Jumlah Bangunan**	**888**	Unit
Kawasan	**: OLEAN**	**Jumlah Penduduk**	**1,996**	Jiwa
		Jumlah Bangunan	**895**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	535.00	Unit	60.25%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	706.00	Unit	79.50%	5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				46.58%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	450.00	Meter	17.56%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1,151.50	Meter	44.94%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				22.47%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	168.00	KK	18.77%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0.00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1.05	Ha	6.81%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	755.00	Meter	23.67%	0
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	-	Meter	0.00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1,465.00	Meter	45.92%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				9.18%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	673.00	KK	75.20%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	806.00	KK	90.06%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				82.63%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	758.00	KK	84.69%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	891.00	KK	99.55%	5
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				61.42%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	888.00	Unit	100.00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	888.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100.00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		
60 -80 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	38
38 - 59 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
16 - 37 KUMUH RINGAN		
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	46.04%
	KONTRIBUSI PENANGANAN	0.00%

Sumber : Baseline Kumuh, 2020

Gambar 3. 24 Profil Kumuh Desa Olean

Sumber : Hasil Analisa, 2022

A.9 **Sebaran Permasalahan 7 Indikator Kumuh Desa Olean**

Berikut adalah Sebaran pemasalahan terkait 7 (tujuh) indikator kumuh Desa Olean:

Peta 3. 21 Kondisi Permasalahan Bangunan Hunian Olean

Sumber : Survey Lapang, 2022

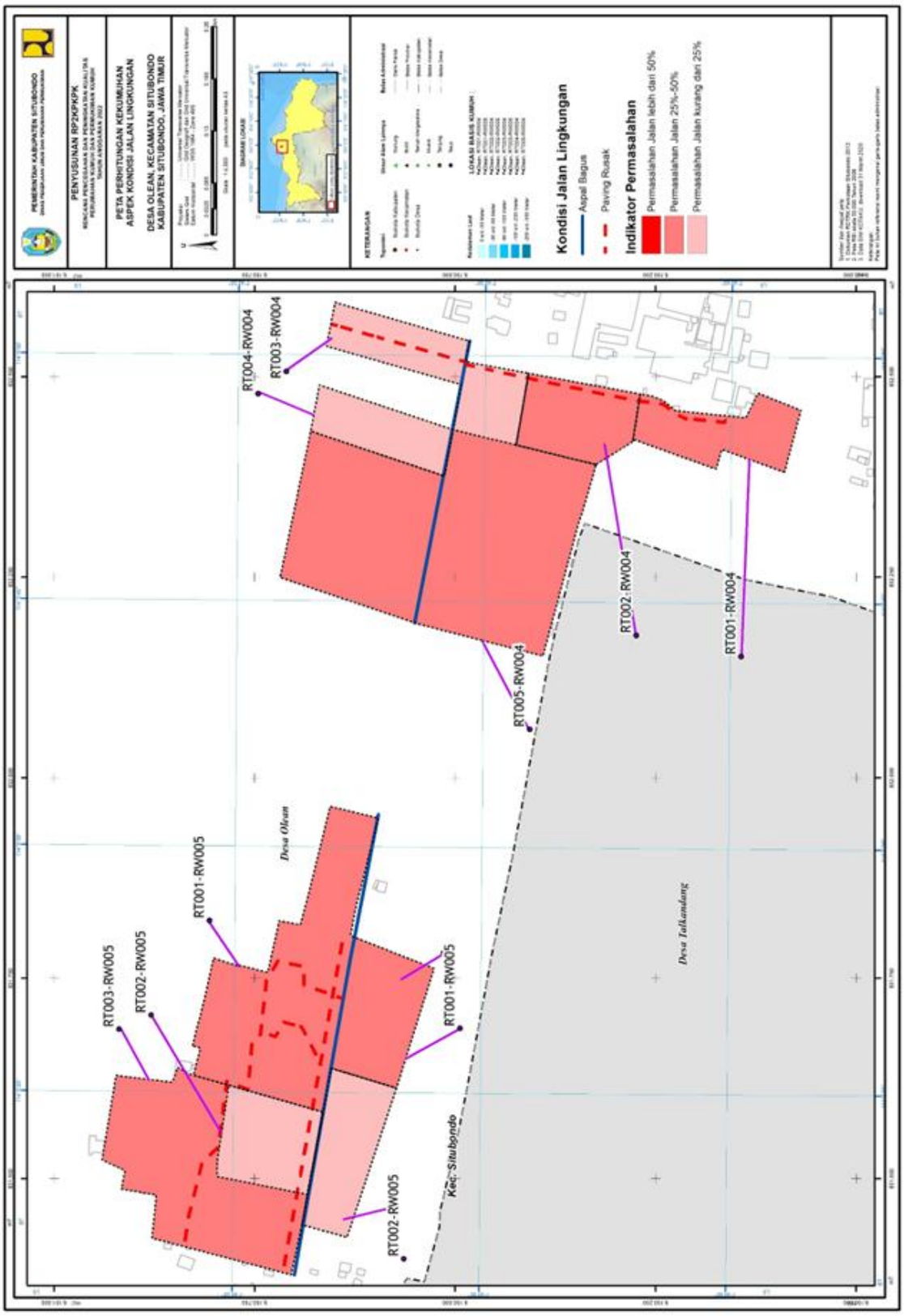

Peta 3. 22 Kondisi Permasalahan Jalan Lingkungan Olean

Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 23 Kondisi Permasalahan Air Minum Olean

Sumber : Survey Lapang, 2022

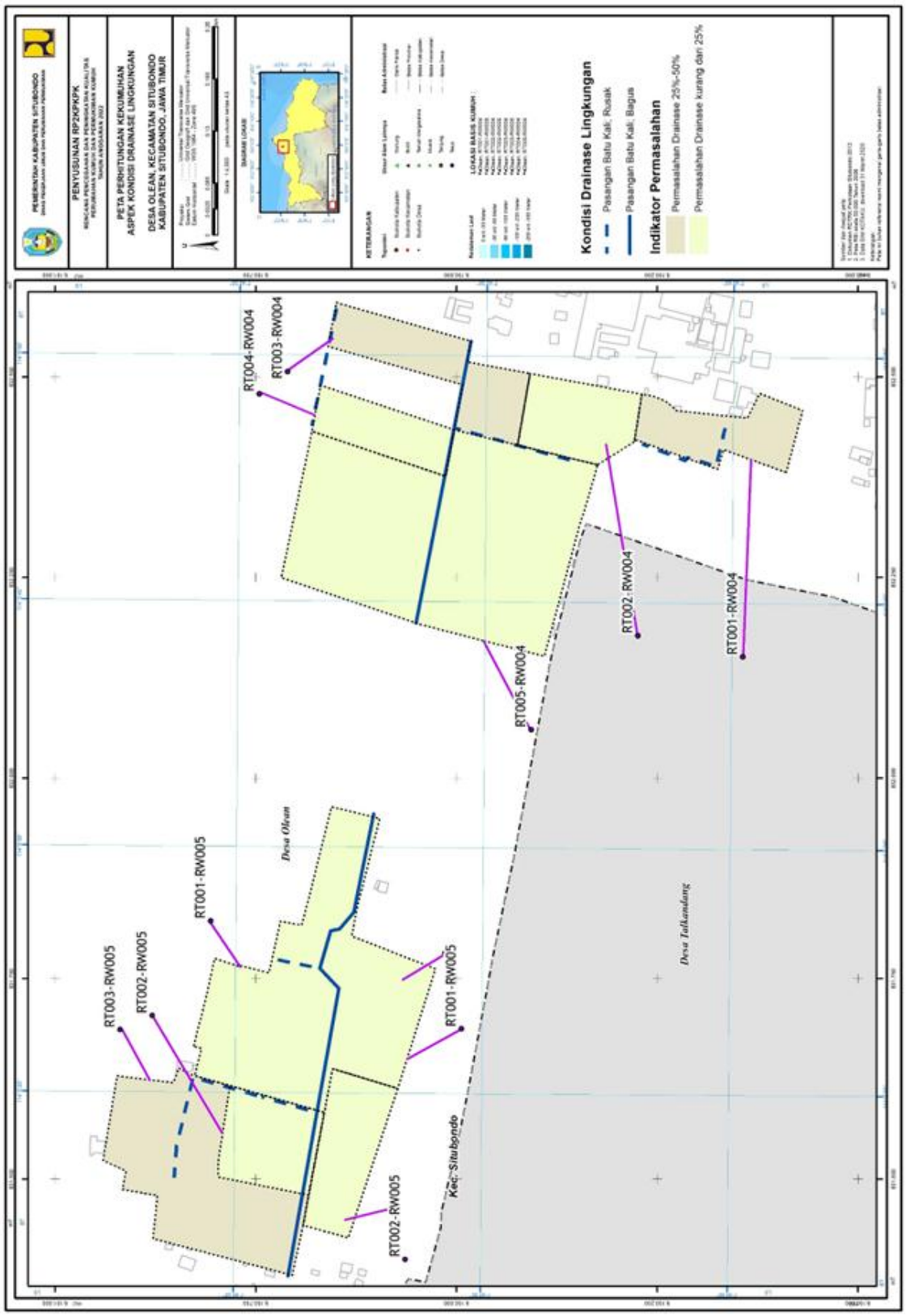

Peta 3. 24 Kondisi Permasalahan Drainase Olean

Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 25 Kondisi Permasalahan Air Limbah Olean

Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 26 Kondisi Permasalahan Persampahan Olean
Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 27 Kondisi Permasalahan Proteksi Kebakaran Olean
Sumber : Survey Lapang, 2022

3.3.4 Profil Permukiman Kumuh – Desa Perante

Kawasan permukiman kumuh di Desa Perante meliputi Kawasan dusun Tengah dengan luas sebesar 13.33 Ha dan Kawasan Dusun Selatan dengan luas sebesar 17.30 Ha. Tipologi atau karakteristik kawasan permukiman kumuh Desa Perante merupakan kawasan permukiman kumuh dataran rendah dengan

karakteristik pedesaan. Berikut ini adalah profil kawasan permukiman kumuh Desa Perante:

A.1 Karakteristik Bangunan Hunian

Keadaan bangunan hunian di Desa Perante Mayoritas bangunan hunian adalah bangunan permanen dengan status lahan legal, dan merupakan milik pribadi. Bangunan hunian di permukiman kumuh Desa Perante memiliki beberapa permasalahan antara lain terdapat beberapa RTLH yang menggunakan material bangunan dinding dari kayu, triplek, bambu dan berlantai tanah. Selain itu terdapat beberapa area bangunan tidak teratur yang berdiri diatas saluran irigasi yang mengakibatkan banjir Kondisi ini disebabkan karena kemiskinan masyarakat mata pencaharian penduduk mayoritas buruh tani. Brikut adalah gambaran kondisi bangunan hunian di Desa Perante:

Gambar 3. 25 Kondisi Banguan Hunian Desa Perante
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.2 Karakteristik Jalan Lingkungan

Keadaan jalan lingkungan di Desa Perante mayoritas permukiman sudah terkoneksi oleh jaringan jalan, namun memiliki beberapa permasalahan antara lain jalan aspal dan paving tetapi sudah mengalami kerusakan dengan kondisi sedang. Selain itu, adanya jalan yang masih belum terbangun berupa makadam maupun tanah dan Jalan Rusak karena faktor usia. Kerusakan jalan banyak disebabkan oleh kesalahan perencanaan dan pelakasanaan, serta pemeliharaan jalan yang tidak memadai

Gambar 3. 26 Kondisi Jalan Lingkungan Desa Perante
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.3 Karakteristik Air Bersih

Keadaan penyediaan air bersih di Desa Perante mayoritas masyarakat menggunakan sumur. Kebutuhan air bersih untuk masak, cuci dan mandi tercukupi, sedangkan untuk kebutuhan air minum membeli air minum eceran. Namun terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak terpenuhinya kualitas air bersih sesuai standar kesehatan karena terdapat masyarakat menggunakan air sumur yang kondisinya tidak layak, belum ada jaringan PDAM dimana PDAM

dianggap terlalu mahal, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat serta masyarakat mengeluarkan uang untuk membeli air untuk minum, yang seharusnya bisa dialokasi untuk keperluan yang lain

Gambar 3. 27 Kondisi Penyediaan Air Minum Desa Perante
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.4 Karakteristik Drainase Lingkungan

Keadaan drainase lingkungan di Desa Perante mayoritas telah memiliki drainase di tiap ruas jalan, namun memiliki beberapa permasalahan seperti pembuangan air limbah rumah tangga sehingga fungsi saluran drainase bercampur yang mengakibatkan pendangkalan saluran. Selain itu, adanya ketidakterhubungan saluran drainase dengan sistem drainase perkotaan sehingga tidak ada integrasi antara saluran drainase lingkungan dengan saluran drainase primer, sungai sebagai drainase utama tidak dapat menampung air hujan shingga meluap ke permukiman warga

Gambar 3. 28 Kondisi Drainase Lingkungan Desa Perante
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.5 Karakteristik Pengelolaan Air Limbah

Keadaan pengelolaan air limbah di Desa Perante mayoritas memiliki MCK pribadi dan telah terhubung dengan tangki septic, namun memiliki beberapa permasalahan, seperti limbah rumah tangga yang masih dibuang langsung ke saluran atau sungai tanpa diproses terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kemiskinan masyarakat dan rendahnya kesadaran pentingnya menjaga kesehatan.

Gambar 3. 29 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Desa Perante
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.6 Karakteristik Pengelolaan Persampahan

Keadaan pengelolaan sampah di Desa Perante mayoritas masyarakat tidak terlayani sistem pengangkutan sampah karena belum adanya sistem pengangkutan, tidak adanya TPS serta petugas dan armada angkut kurang. Hal ini mengakibatkan sampah tidak terangkut dan terkelola dengan baik, sampah di kelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibuang ke sungai dan dibakar di lahan kosong.

Gambar 3. 30 Kondisi Pengelolaan Sampah Desa Perante
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.7 Karakteristik Proteksi Kebakaran

Keadaan pengamanan bahaya kebakaran di Desa Perante memiliki beberapa permasalahan, seperti ketidaktersediaan sistem pengamanan bahaya kebakaran secara aktif dan pasif yang dapat dilihat dari lingkungan atau setiap bangunan hnian yang tidak memliki pengamanan bahaya kebakaran. Disamping itu, juga terdapat ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran karena masih ada beberapa jalan lingkungan yang ada memiliki lebar kurang dari 1,5 meter sehingga tidak dapat dilalui oleh mobil kebakaran.

Gambar 3. 31 Kondisi Proteksi Kebakaran Desa Perante
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.8 Profil dan Data Baseline Kumuh Desa Perante

Data Basline kumuh memuat mengenai informasi numerik 7 (tujuh) indikator kumuh serta tingkat kekumuhan di Desa Perante, berikut adalah data baseline kumuh Desa Perante :

Tabel 3. 9 Baseline Kumuh Desa Perante

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: JAWA TIMUR**	**Luas SK**	**30.63**	Ha
Kab/Kota	**: KAB. SITUBONDO**	**Luas Verifikasi**	**30.63**	Ha
Kecamatan	**: ASEMBAGUS**	**Jumlah Bangunan**	**935**	Unit
Kawasan	**: PERANTE**	**Jumlah Penduduk**	**2,525**	Jiwa
		Jumlah Bangunan	**935**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	612.00	Unit	65.45%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	785.00	Unit	83.96%	5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				49.80%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4,432.00	Meter	64.38%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32.19%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	535.00	KK	57.22%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				28.61%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	5,099.00	Meter	76.03%	5
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	-	Meter	0.00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1,062.00	Meter	15.83%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15.21%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	326.00	KK	34.87%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	340.00	KK	36.36%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				35.61%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	935.00	KK	100.00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	861.00	KK	92.09%	5
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				64.03%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0.00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	196.00	Unit	20.96%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				0.00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		
60 -80 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	31
38 - 59 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
16 - 37 KUMUH RINGAN		
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	32.21%
	KONTRIBUSI PENANGANAN	0.00%

Sumber : Baseline Kumuh, 2020

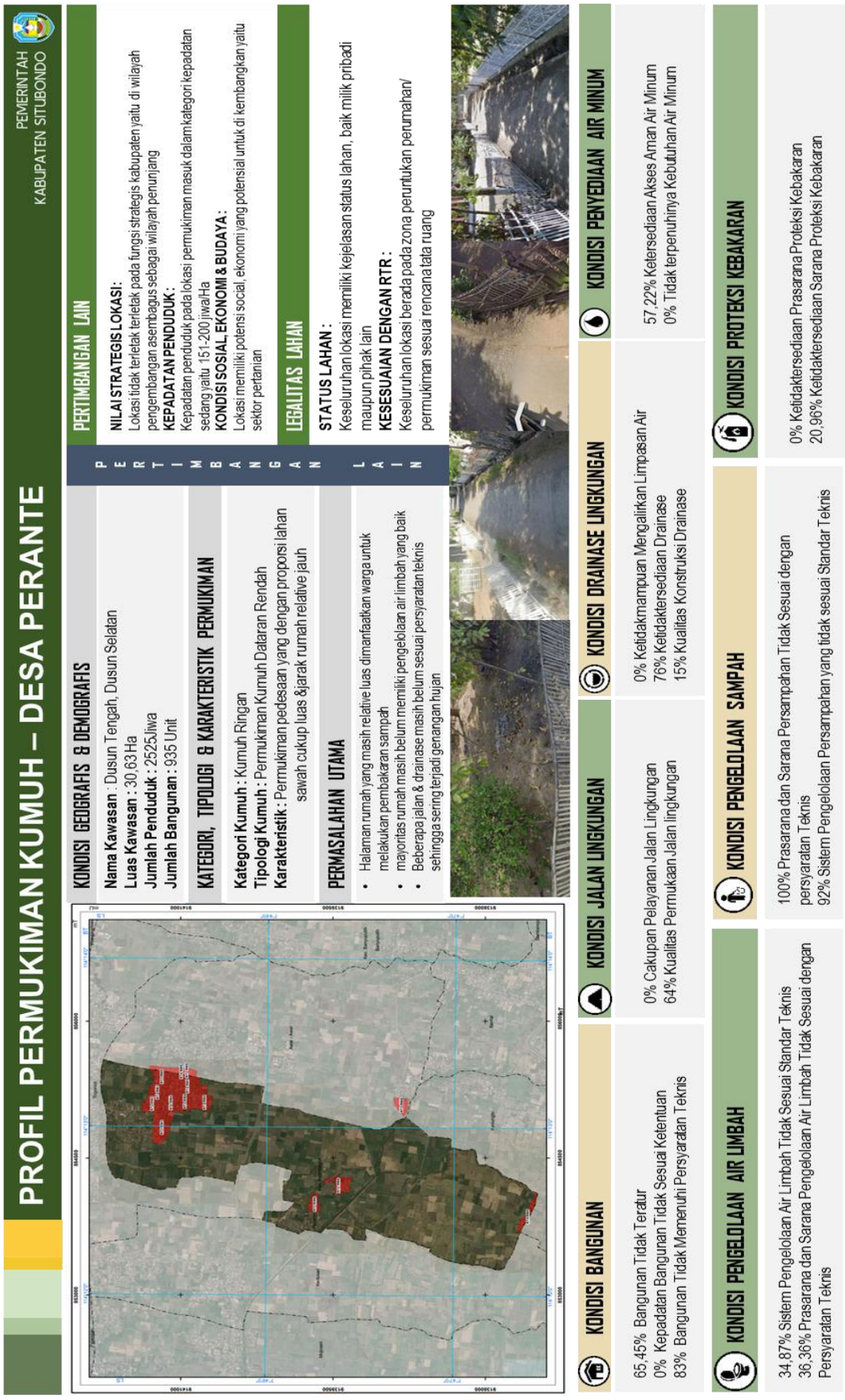

Gambar 3. 32 Profil Kumuh Desa Perante
Sumber : Analisa Penulis, 2022

A.9 Sebaran Permasalahan 7 Indikator Kumuh Desa Perante

Berikut adalah Sebaran pemasalahan terkait 7 (tujuh) indikator kumuh Desa Perante :

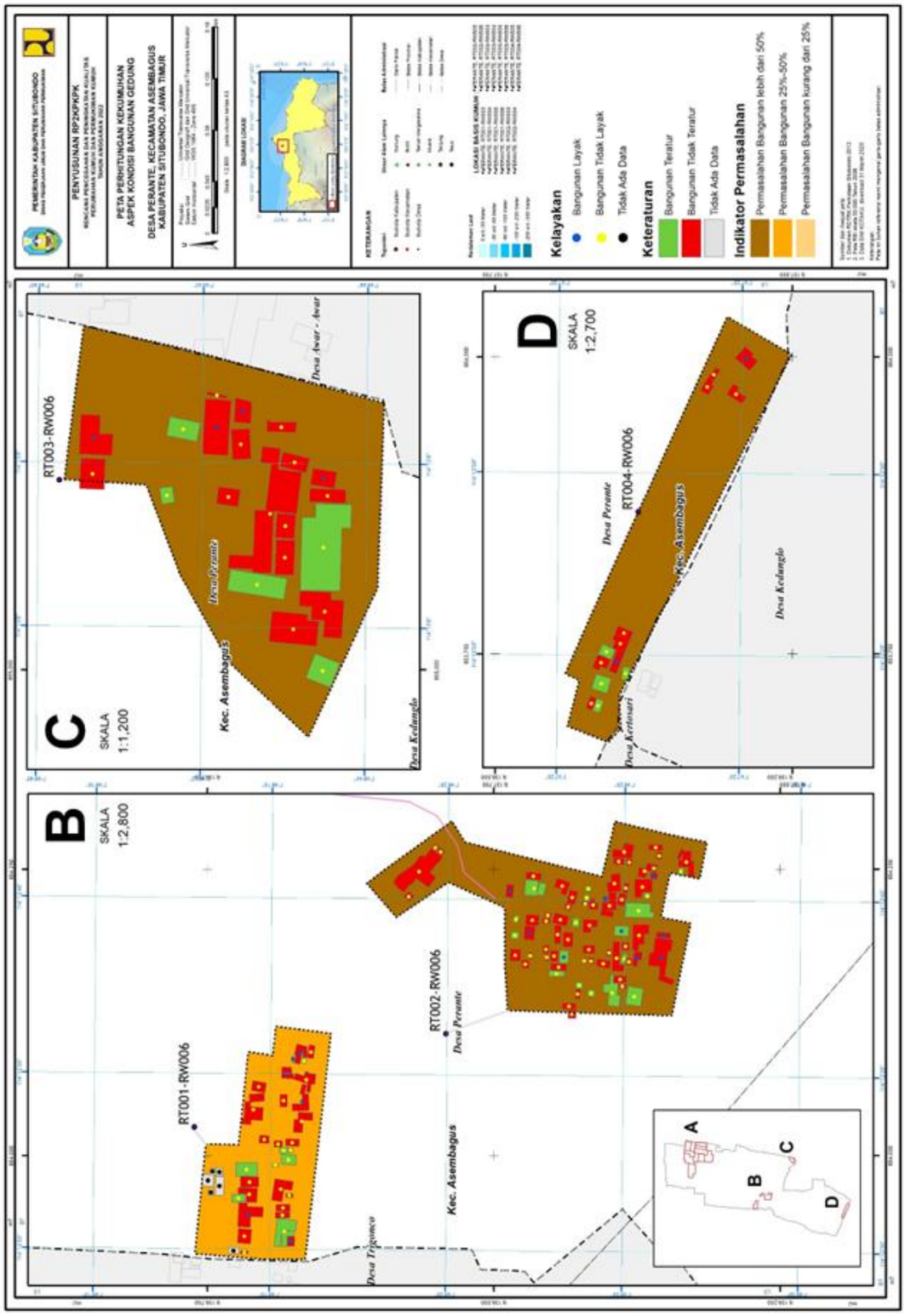

Peta 3. 28 Kondisi Permasalahan Bangunan Hunian Perante Selatan

Sumber : Survey Lapang, 2022

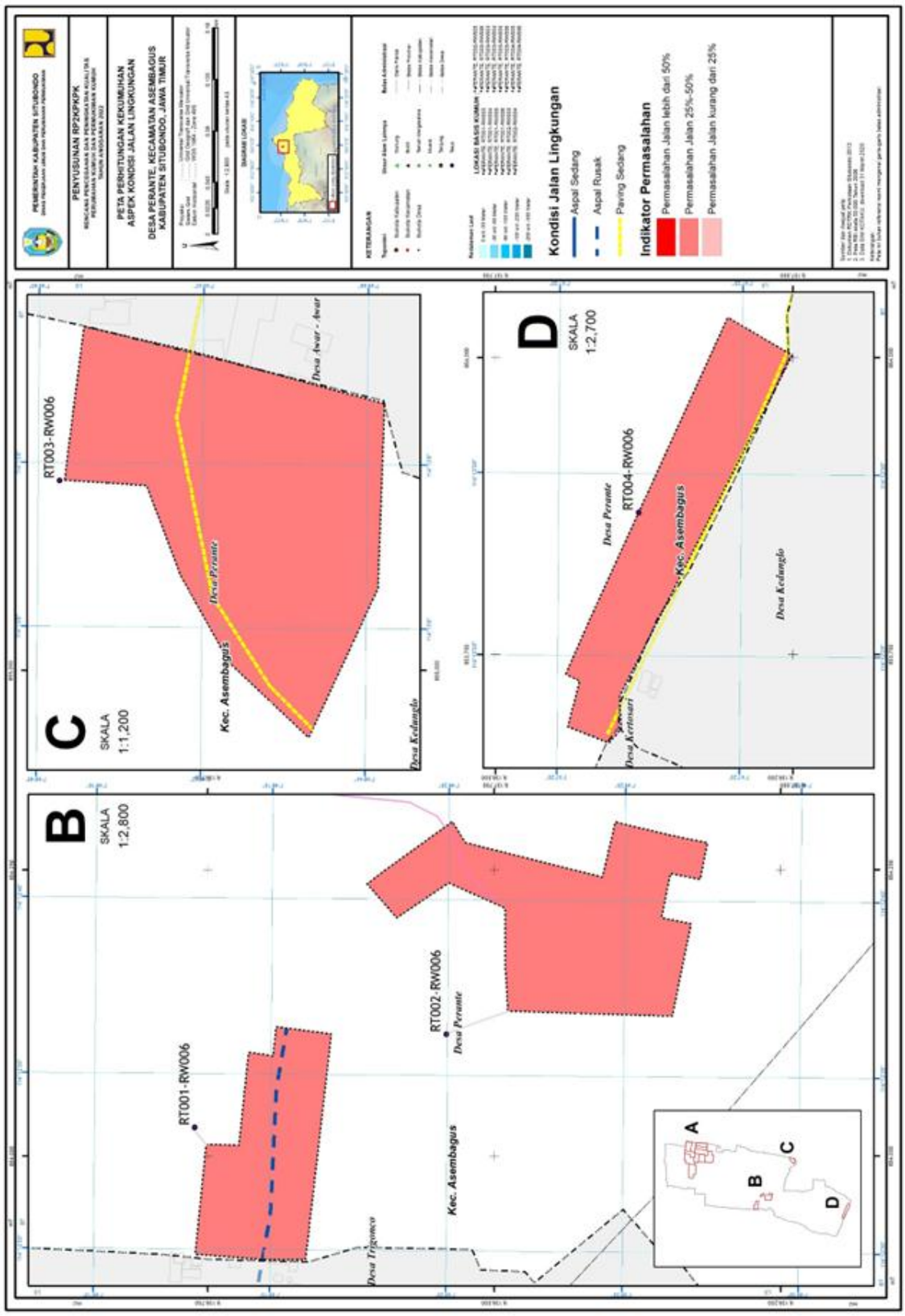

Peta 3. 29 Kondisi Permasalahan Jalan Lingkungan Perante Selatan

Sumber : Survey Lapang, 2022

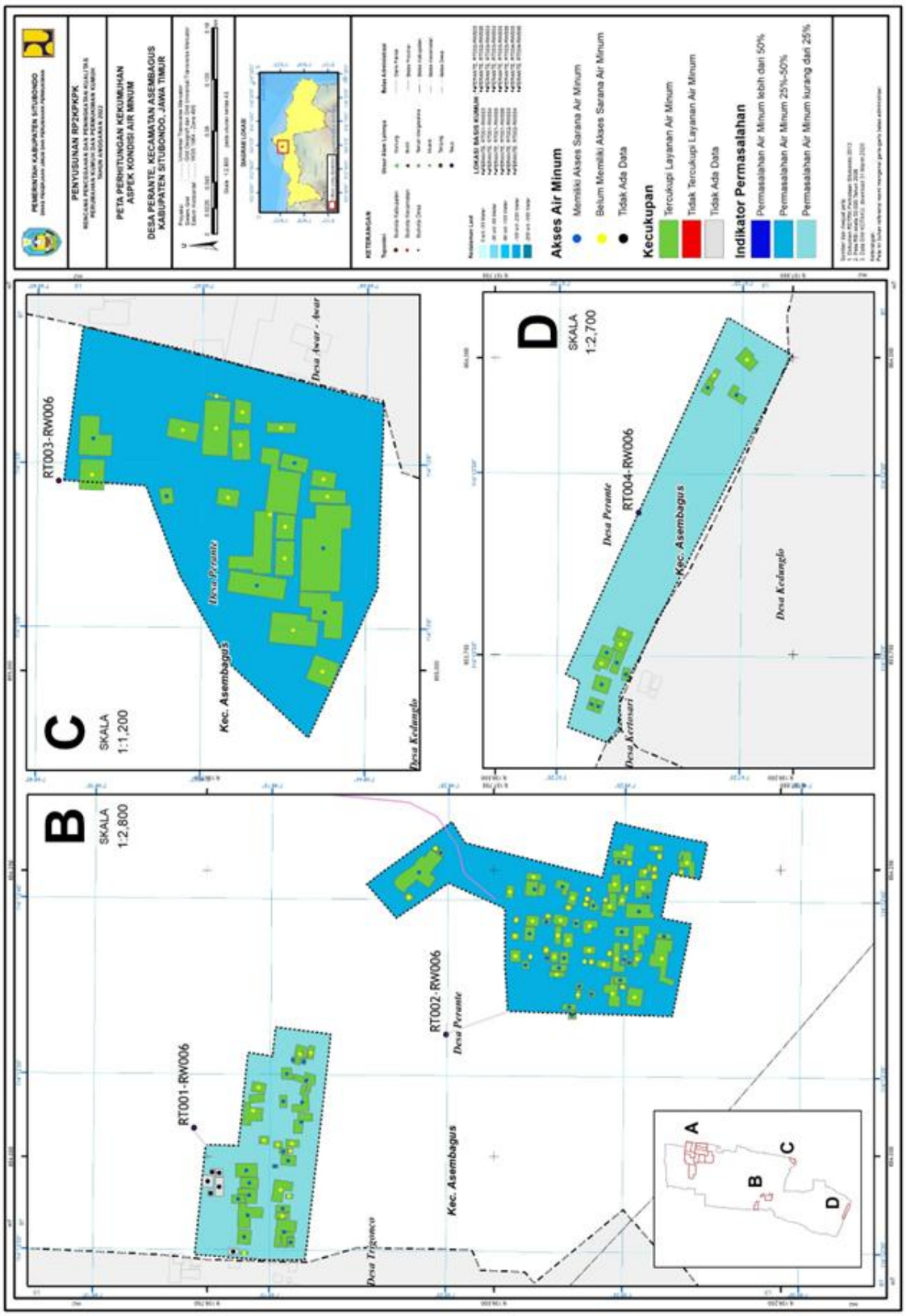

Peta 3. 30 Kondisi Permasalahan Air Minum Perante Selatan

Sumber : Survey Lapang, 2022

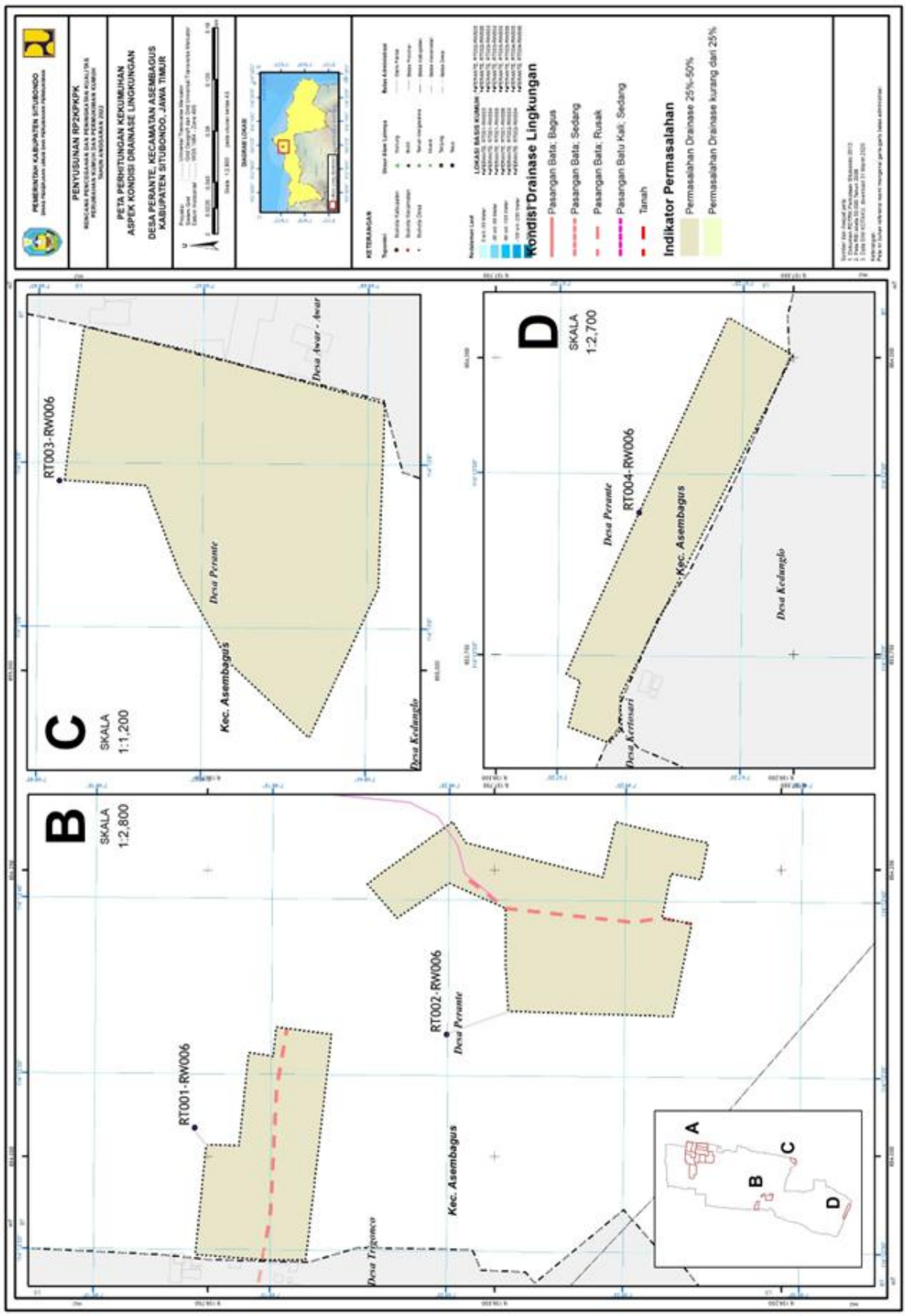

Peta 3. 31 Kondisi Permasalahan Drainase Lingkungan Perante Selatan

Sumber : Survey Lapang, 2022

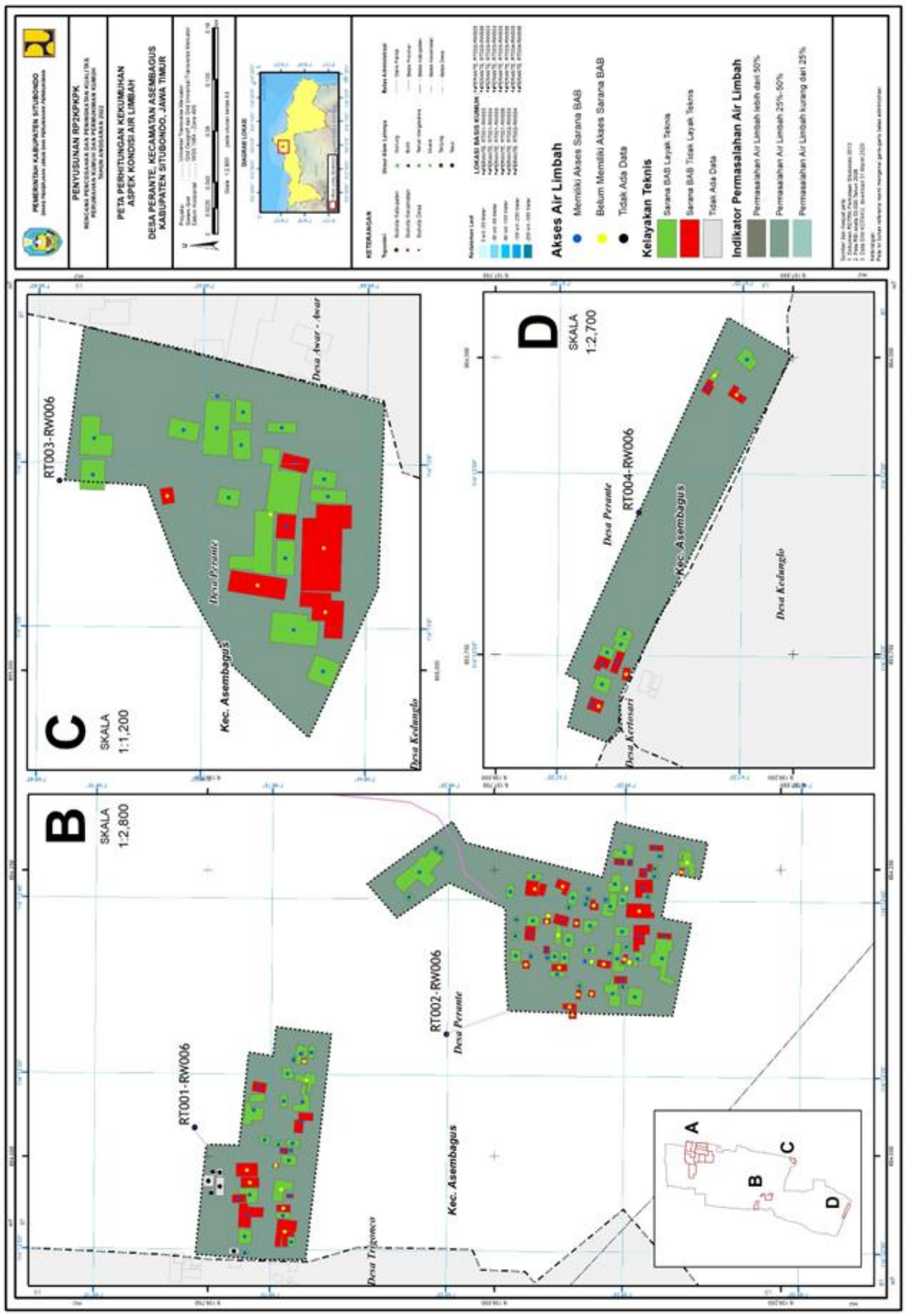

Peta 3. 32 Kondisi Permasalahan Air Limbah Perante Selatan

Sumber : Survey Lapang, 2022

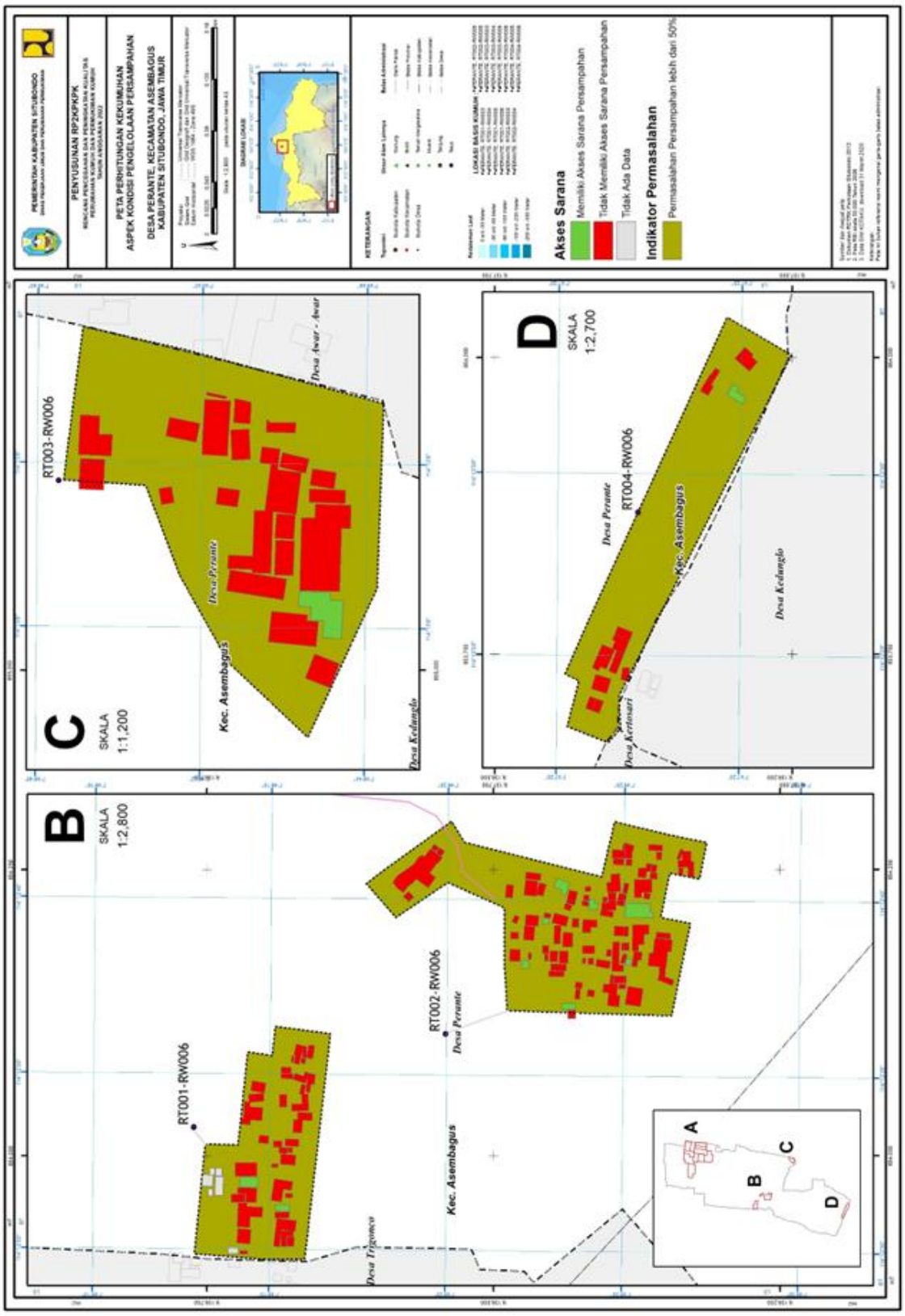

Peta 3. 33 Kondisi Permasalahan Persampahan Perante Selatan

Sumber : Survey Lapang, 2022

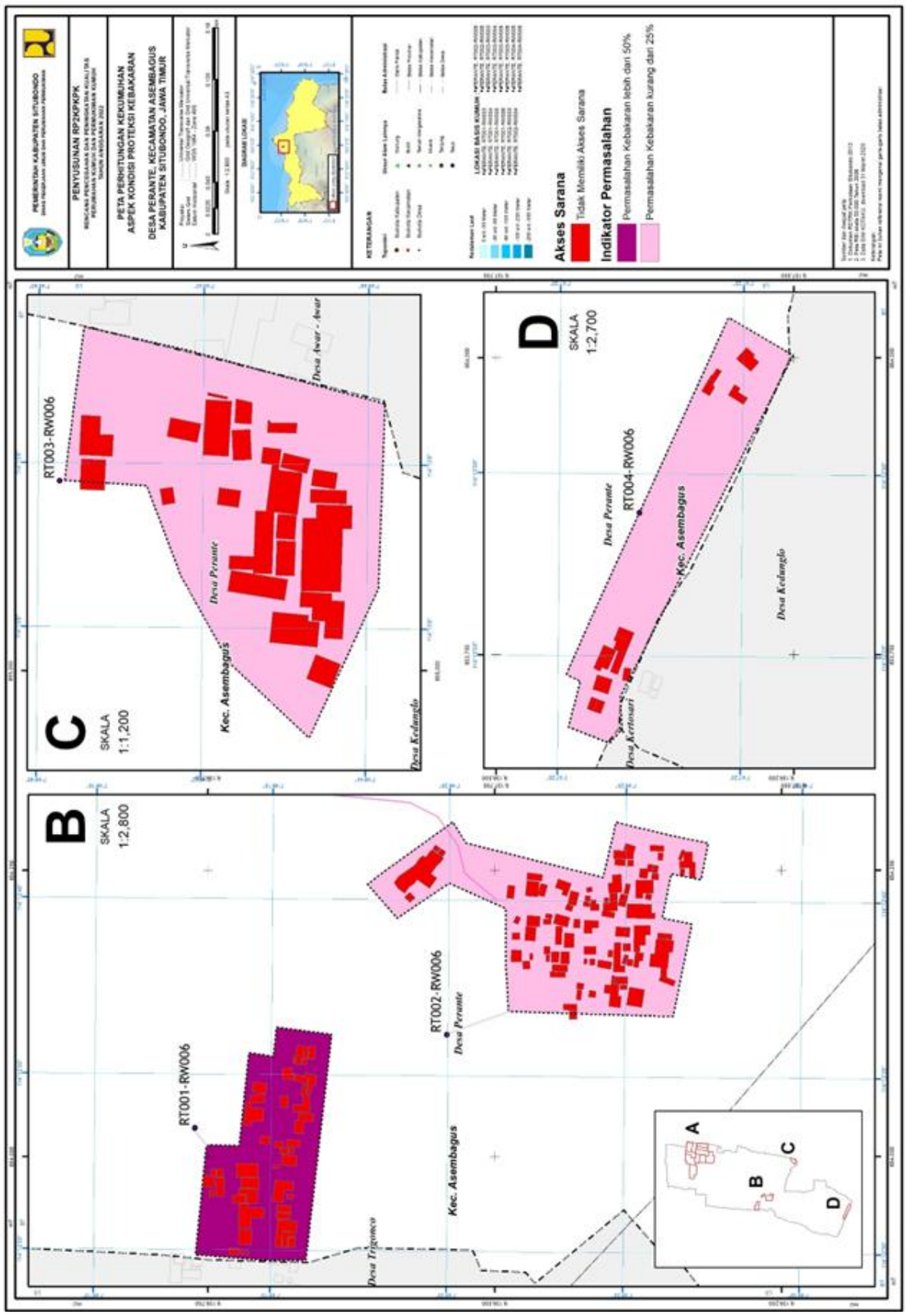

Peta 3. 34 Kondisi Permasalahan Proteksi Kebakaran Perante Selatan

Sumber : Survey Lapang, 2022

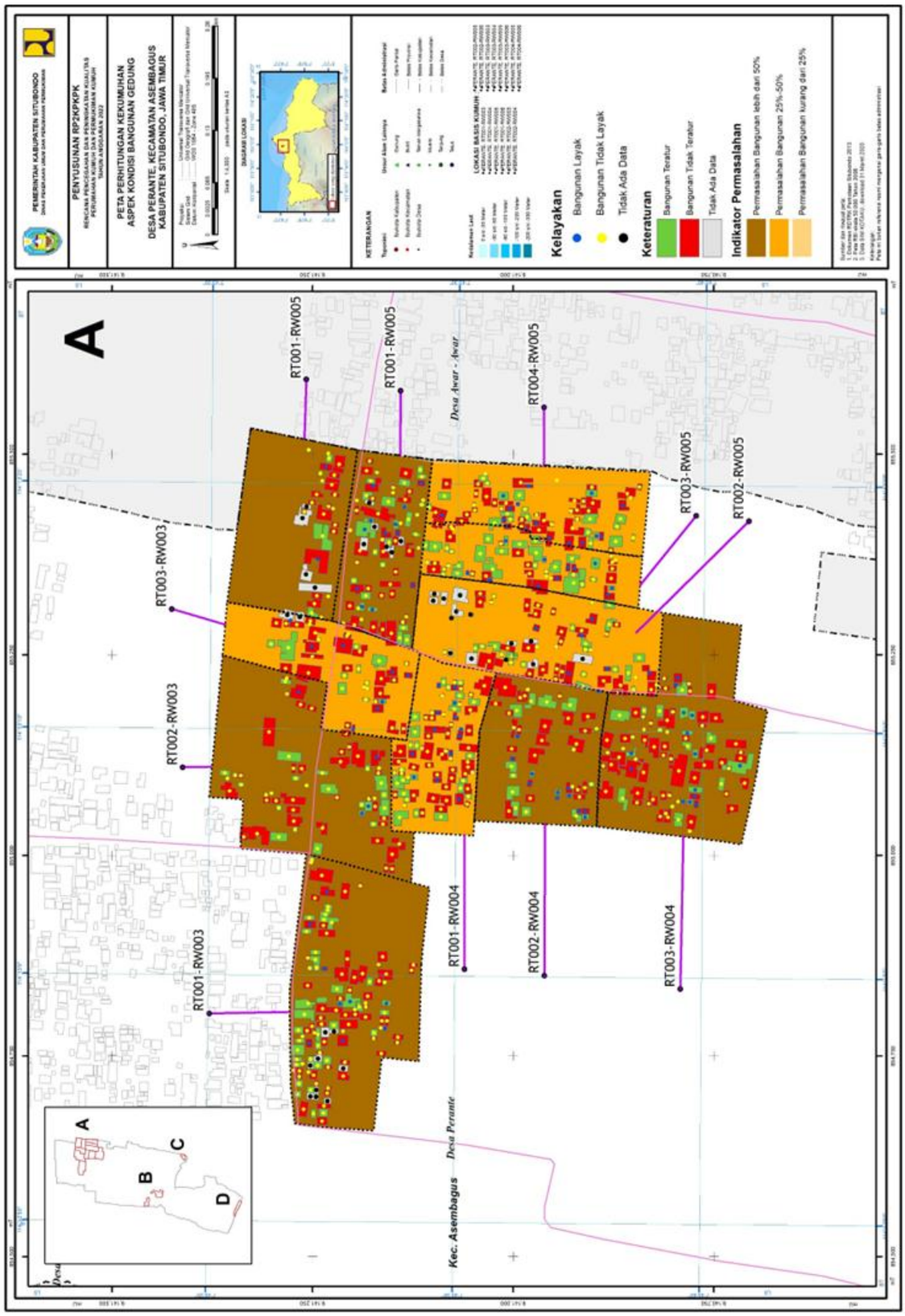

Peta 3. 35 Kondisi Permasalahan Bangunan Hunian Perante Utara
Sumber : Survey Lapang, 2022

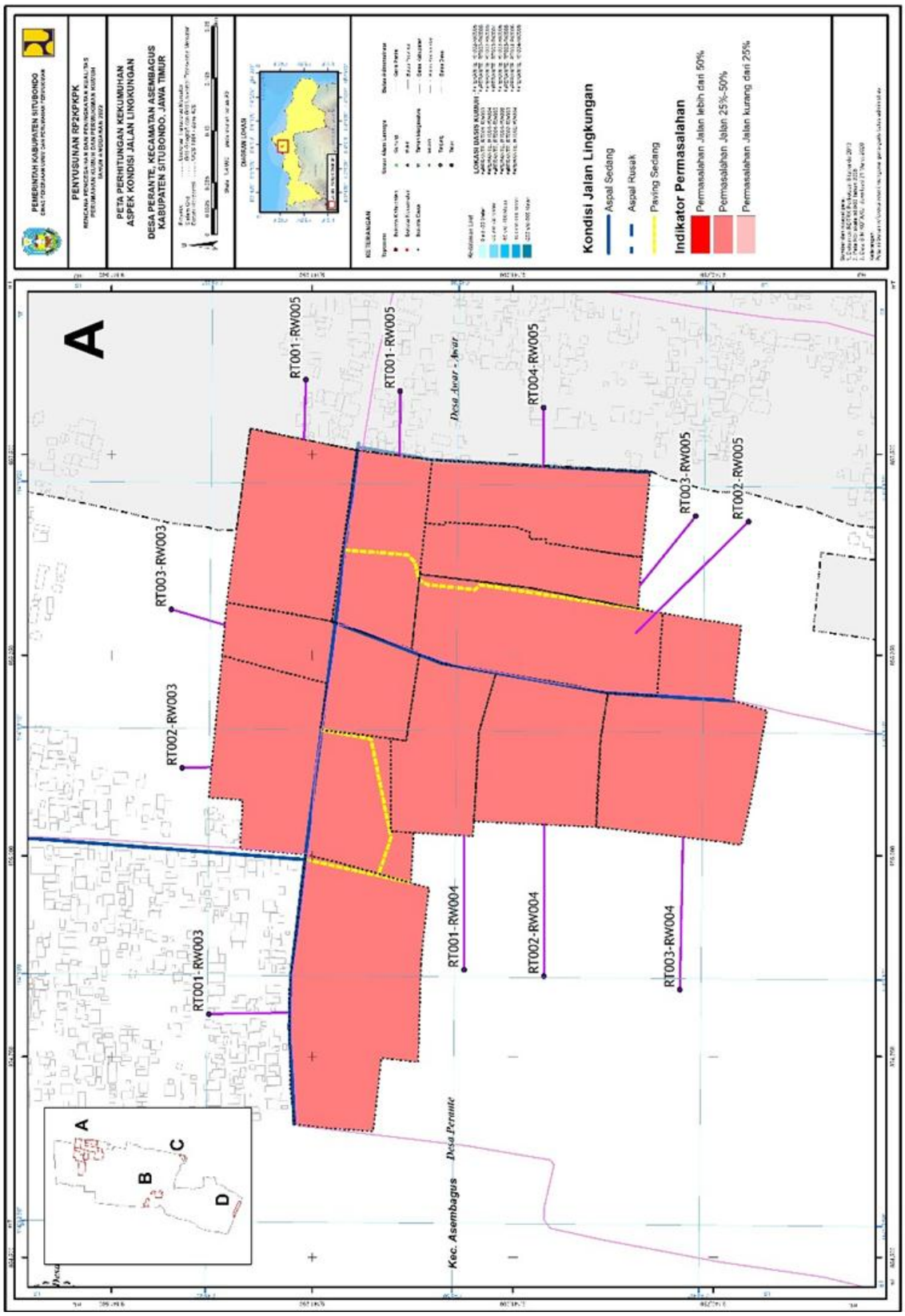

Peta 3. 36 Kondisi Permasalahan Jalan Lingkungan Perante Utara

Sumber : Survey Lapang, 2022

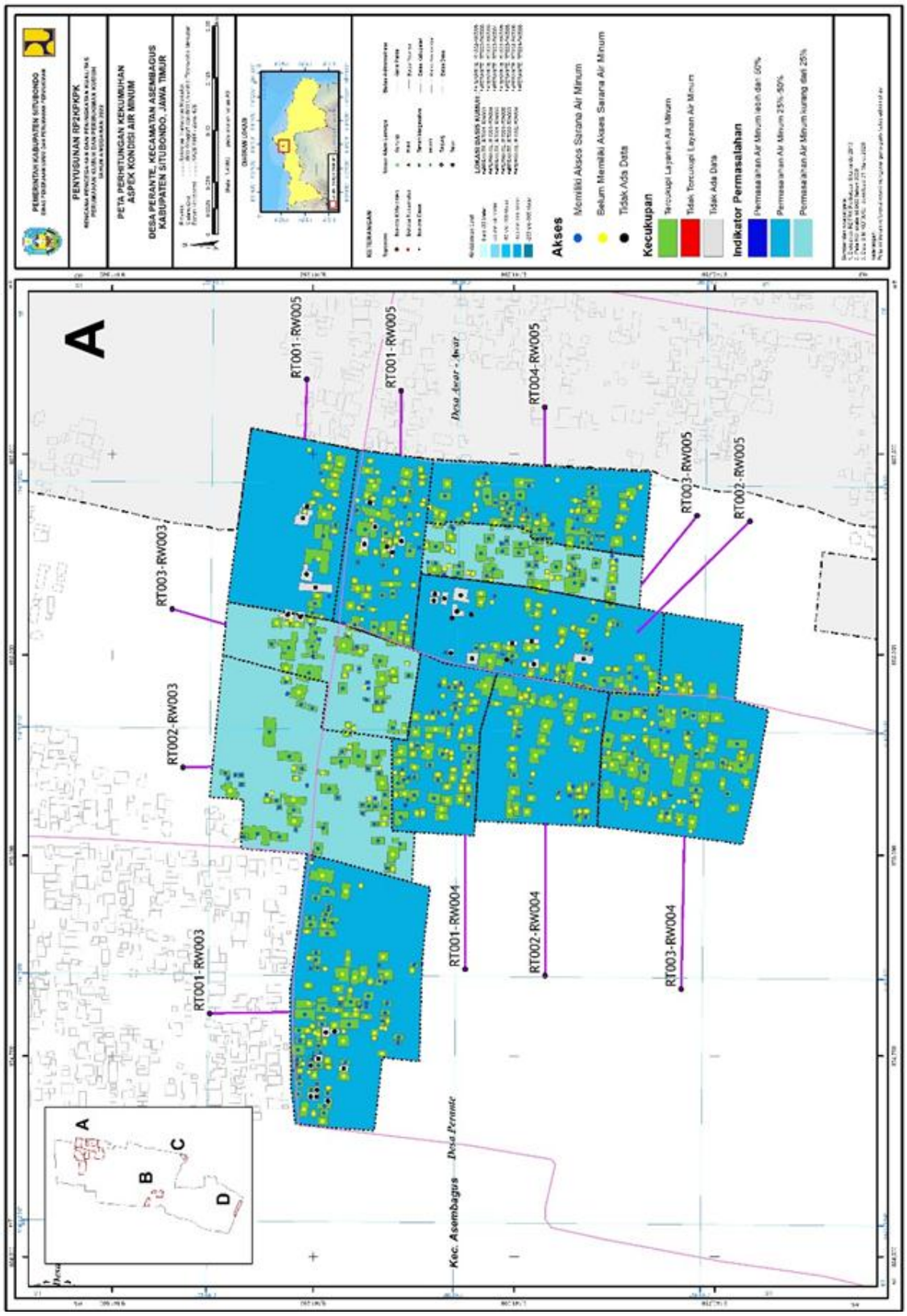

Peta 3. 37 Kondisi Permasalahan Air Minum Perante Utara

Sumber : Survey Lapang, 2022

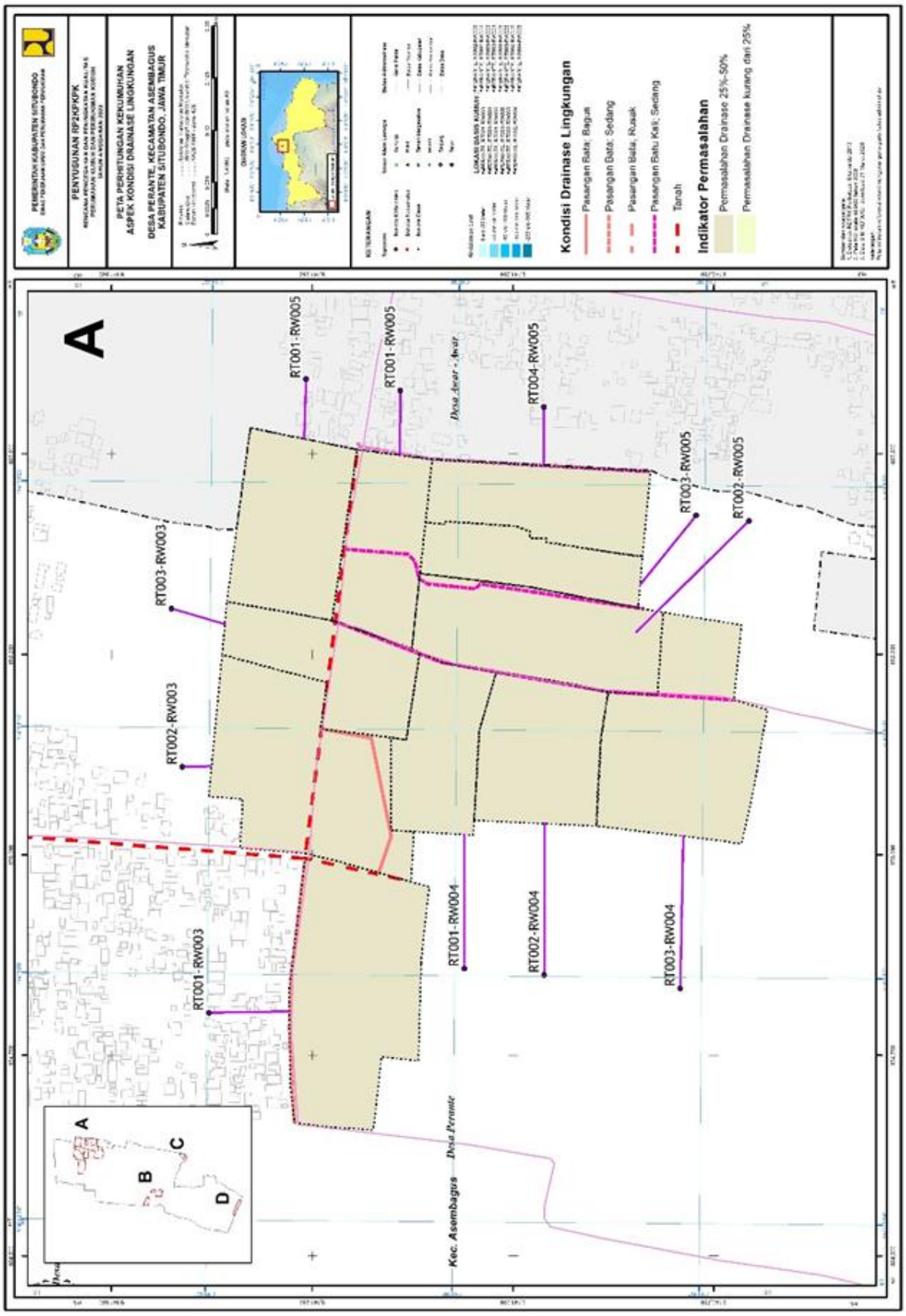

Peta 3. 38 Kondisi Permasalahan Drainase Lingkungan Perante Utara

Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 39 Kondisi Permasalahan Air Limbah Perante Utara

Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 40 Kondisi Permasalahan Persampahan Perante Utara

Sumber : Survey Lapang, 2022

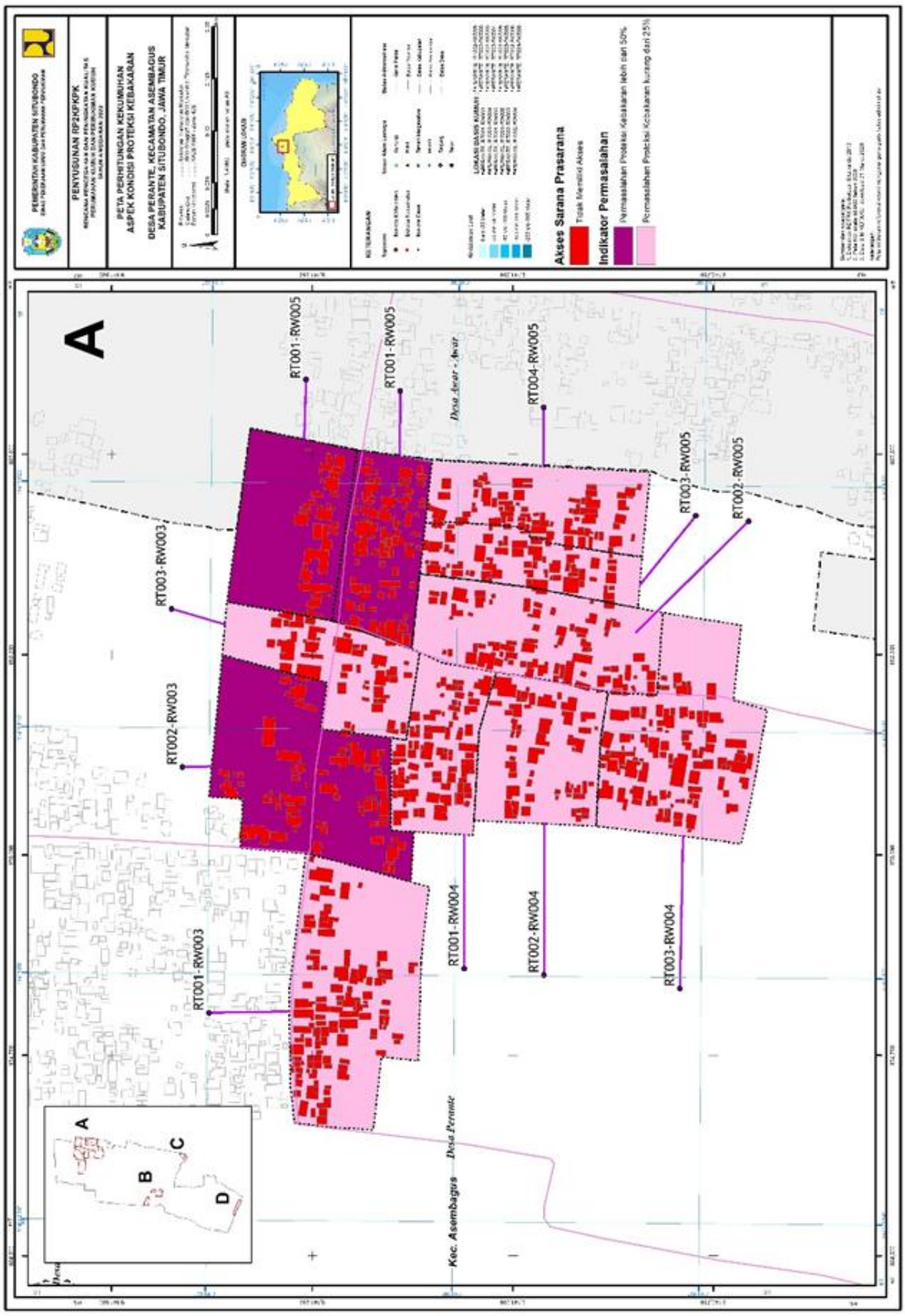

Peta 3. 41 Kondisi Permasalahan Proteksi Kebakaran Perante Utara
Sumber : Survey Lapang, 2022

3.3.5 Profil Permukiman Kumuh – Desa Semiring

Kawasan permukiman kumuh di Desa Semiring meliputi Kawasan Semiring Selatan dengan luas sebesar 14,08 Ha, Semiring Utara dengan luas sebesar 2.97 Ha dan Kawasan Semiring Barat dengan luas sebesar 15.97 Ha. Tipologi atau karakteristik kawasan permukiman kumuh Desa Semiring merupakan kawasan

permukiman kumuh padat dan sebagian berada di pesisir pantai. Berikut ini adalah profil kawasan permukiman kumuh Desa Semiring :

A.1 Karakteristik Bangunan Hunian

Keadaan bangunan hunian di Desa Semiring mayoritas merupakan bangunan permanen dengan status lahan legal, dan merupakan milik pribadi. Bangunan hunian di permukiman kumuh Desa Kilensari memiliki beberapa permasalahan anatara lain terdapat beberapa RTLH yang menggunakan material bangunan dinding dari kayu dan triplek, beberapa area bangunan tidak teratur yang berdiri diatas saluran irigasi yang mengakibatkan banjir, ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk bangunan yang dapat dilihat dari bangunan hunian satu dengan bangunan hunian lain di samping kanan dan kirinya. Berikut adalah gambaran kondisi bangunan hunian di Desa Semiring :

Gambar 3. 33 Kondisi Banguan Hunian Desa Semiring

Sumber : Survey Lapang, 2022

A.2 Karakteristik Jalan Lingkungan

Keadaan jalan lingkungan di Desa Semiring mayoritas permukiman sudah terkoneksi oleh jaringan jalan, namun memiliki beberapa permasalahan antara lain kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman dikarenakan perkerasan jalan berupa aspal atau paving terdapat beberapa yang mengalami kerusakan, beberapa penyebab kerusakan dan ketidakteraturan jalan antara lain genangan air hujan yang menggerus lapisan perkerasan jalan, di lalui kendaraan bermuatan berat dan banyaknya masyarakat menggunakan jalan utk menjemur ikan. Selain itu, adanya jalan yang masih belum terbangun berupa makadam maupun tanah.

Gambar 3. 34 Kondisi Jalan Lingkungan Desa Semiring

Sumber : Survey Lapang, 2022

A.3 Karakteristik Air Bersih

Keadaan penyediaan air bersih di Desa Semiring mayoritas mayoritas masyarakat menggunakan sumur. Kebutuhan air bersih untuk masak, cuci dan mandi tercukupi, sedangkan untuk kebutuhan air minum membeli air minum

eceran. Namun terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak terpenuhinya kualitas air bersih sesuai standar kesehatan karena terdapat masyarakat menggunakan air sumur yang kondisinya tidak layak, belum ada jaringan PDAM dimana PDAM dianggap terlalu mahal, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat

Gambar 3. 35 Kondisi Penyediaan Air Minum Desa Semiring
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.4 Karakteristik Drainase Lingkungan

Keadaan drainase lingkungan di Desa Semiring mayoritas telah memiliki tersedia di tiap ruas jalan, namun memiliki beberapa permasalahan seperti pembuangan air limbah rumah tangga sehingga fungsi saluran drainase bercampur yang mengakibatkan pendangkalan saluran. Selain itu, adanya ketidakterhubungan saluran drainase dengan sistem drainase perkotaan sehingga tidak ada integrasi antara saluran drainase satu dengan saluran drainase lainnya, tidak ada tangkis laut di muara yang mengakibatkan masuknya air laut ke pemukiman warga.

Gambar 3. 36 Kondisi Drainase Lingkungan Desa Semiring
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.5 Karakteristik Pengelolaan Air Limbah

Keadaan pengelolaan air limbah di Desa Semiring mayoritas memiliki MCK pribadi dan telah terhubung dengan tangki septic, namun memiliki beberapa permasalahan, seperti limbah rumah tangga yang masih dibuang langsung ke saluran drainase atau sungai tanpa diproses terlebih dahulu. beberapa warga masih BAB di sungai atau laut.

Gambar 3. 37 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Desa Semiring
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.6 Karakteristik Pengelolaan Persampahan

Keadaan pengelolaan sampah di Desa Semiring mayoritas masyarakat tidak dapat menerima layanan sistem pengangkutan sampah karena sistem pengangkutan menuju TPS tidak memadai serta petugas dan armada angkut kurang. Hal ini mengakibatkan sampah tidak terangkut dan terkelola dengan baik, sampah di kelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibuang ke sungai atau laut, dan dibakar di lahan kosong. Terdapat sampah rumah tangga yang tidak terangkut oleh sistem pengolahan tidak sesuai standar teknis yaitu 104 KK

Gambar 3. 38 Kondisi Pengelolaan Sampah Desa Semiring
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.7 Karakteristik Proteksi Kebakaran

Keadaan pengamanan bahaya kebakaran di Desa Semiring memiliki beberapa permasalahan, seperti ketidaktersediaan sistem pengamanan bahaya kebakaran secara aktif dan pasif yang dapat dilihat dari lingkungan atau setiap bangunan hunian yang tidak memliki pengamanan bahaya kebakaran. Disamping itu, juga terdapat ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran karena masih ada beberapa jalan lingkungan yang ada memiliki lebar kurang dari 1,5 meter sehingga tidak dapat dilalui oleh mobil kebakaran.

Gambar 3. 39 Kondisi Proteksi Kebakaran Desa Semiring
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.8 Profil dan Data Baseline Kumuh Desa Semiring

Data Basline kumuh memuat mengenai informasi numerik 7 (tujuh) indikator kumuh serta tingkat kekumuhan di Desa Semiring, berikut adalah data baseline kumuh Desa Semiring:

Tabel 3. 10 Baseline Kumuh Desa Semiring

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: JAWA TIMUR**	**Luas SK**	**33.02**	Ha
Kab/Kota	**: KAB. SITUBONDO**	**Luas Verifikasi**	**33.02**	Ha
Kecamatan	**: MANGARAN**	**Jumlah Bangunan**	**559**	Unit
Kawasan	**: SEMIRING**	**Jumlah Penduduk**	**1,381**	Jiwa
		Jumlah Bangunan	**559**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	500.00	Unit	89.45%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	457.00	Unit	81.75%	5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				57.07%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2,248.00	Meter	23.28%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	5,753.00	Meter	59.58%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				29.79%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	347.00	KK	62.08%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.00	KK	0.18%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				31.04%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	2,101.00	Meter	28.90%	1
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	-	Meter	0.00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	2,681.00	Meter	36.88%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				13.16%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	402.00	KK	71.91%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	549.00	KK	98.21%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				85.06%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	559.00	KK	100.00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	552.00	KK	98.75%	5
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				66.25%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	265.00	Unit	47.41%	1
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	559.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				73.70%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		
60 -80 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	42
38 - 59 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
16 - 37 KUMUH RINGAN		
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	50.87%
	KONTRIBUSI PENANGANAN	0.00%

Sumber : Baseline Kumuh, 2020

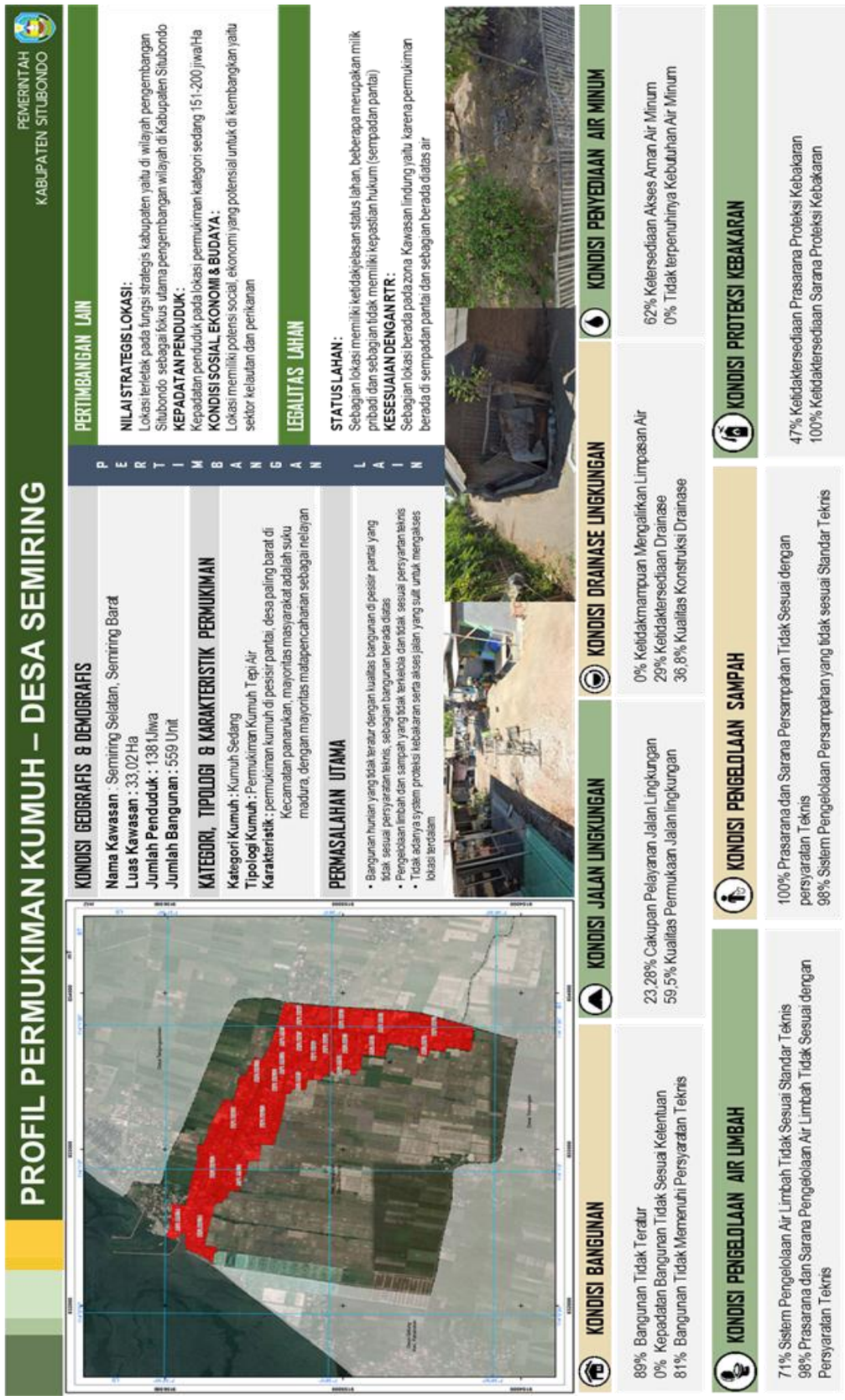

Gambar 3. 40 Profil Kumuh Desa Semiring

Sumber : Analisa Penulis, 2022

A.9 Sebaran Permasalahan 7 Indikator Kumuh Desa Semiring

Berikut adalah Sebaran pemasalahan terkait 7 (tujuh) indikator kumuh Desa Semiring:

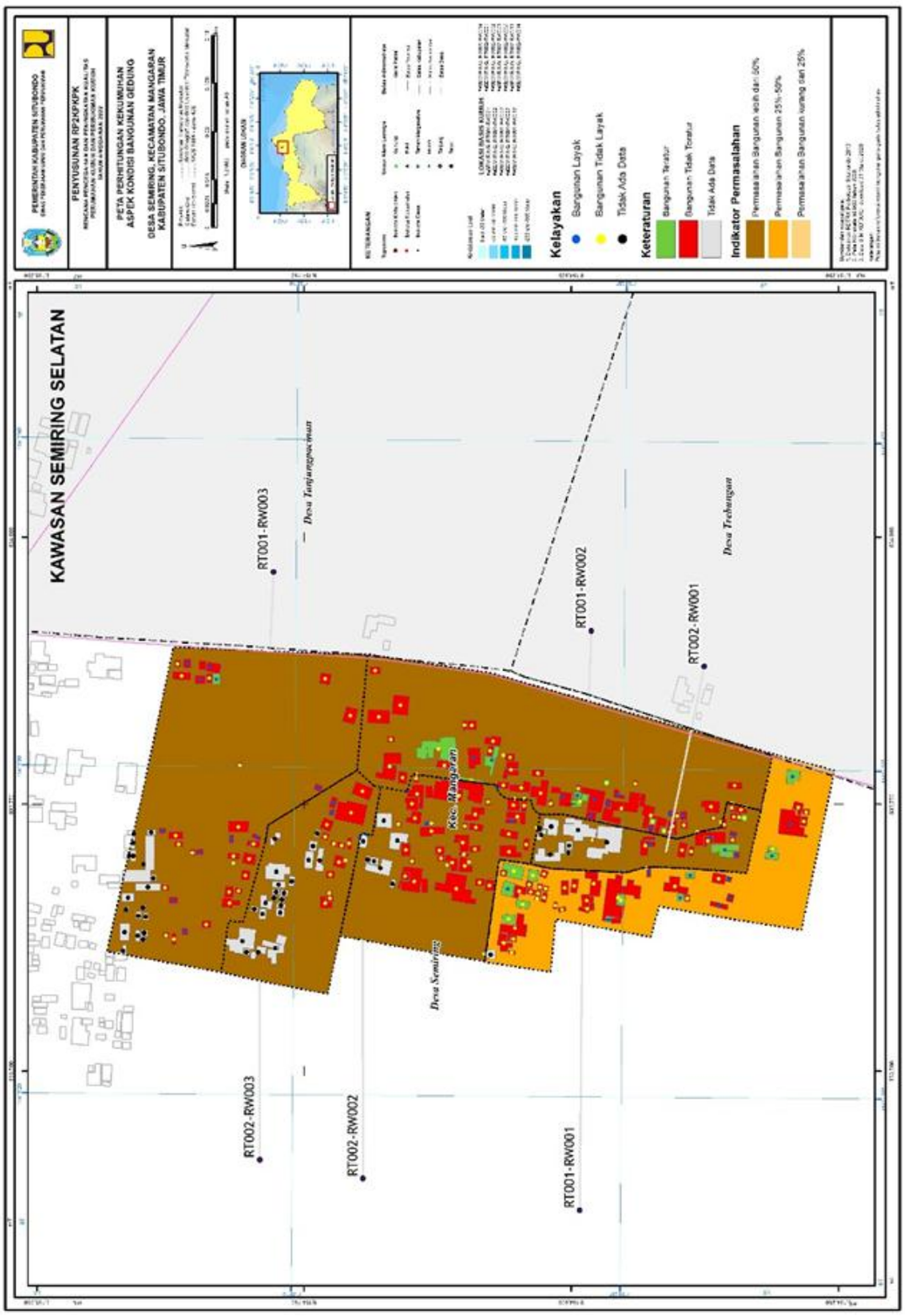

Peta 3. 42 Kondisi Permasalahan Bangunan hunian Semiring Selatan

Sumber : Survey Lapang, 2022

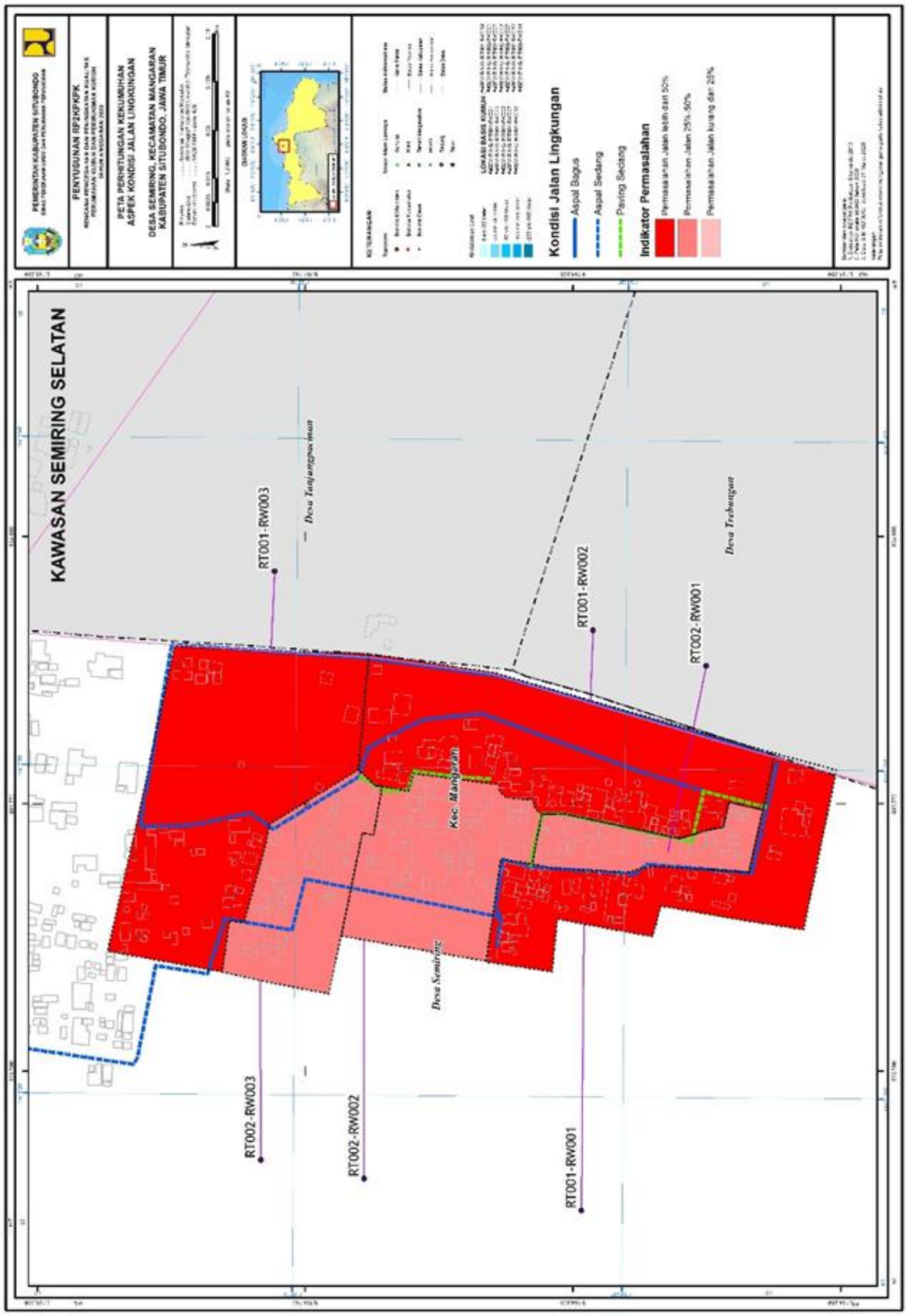

Peta 3. 43 Kondisi Permasalahan Jalan Lingkungan Semiring Selatan
Sumber : Survey Lapang, 2022

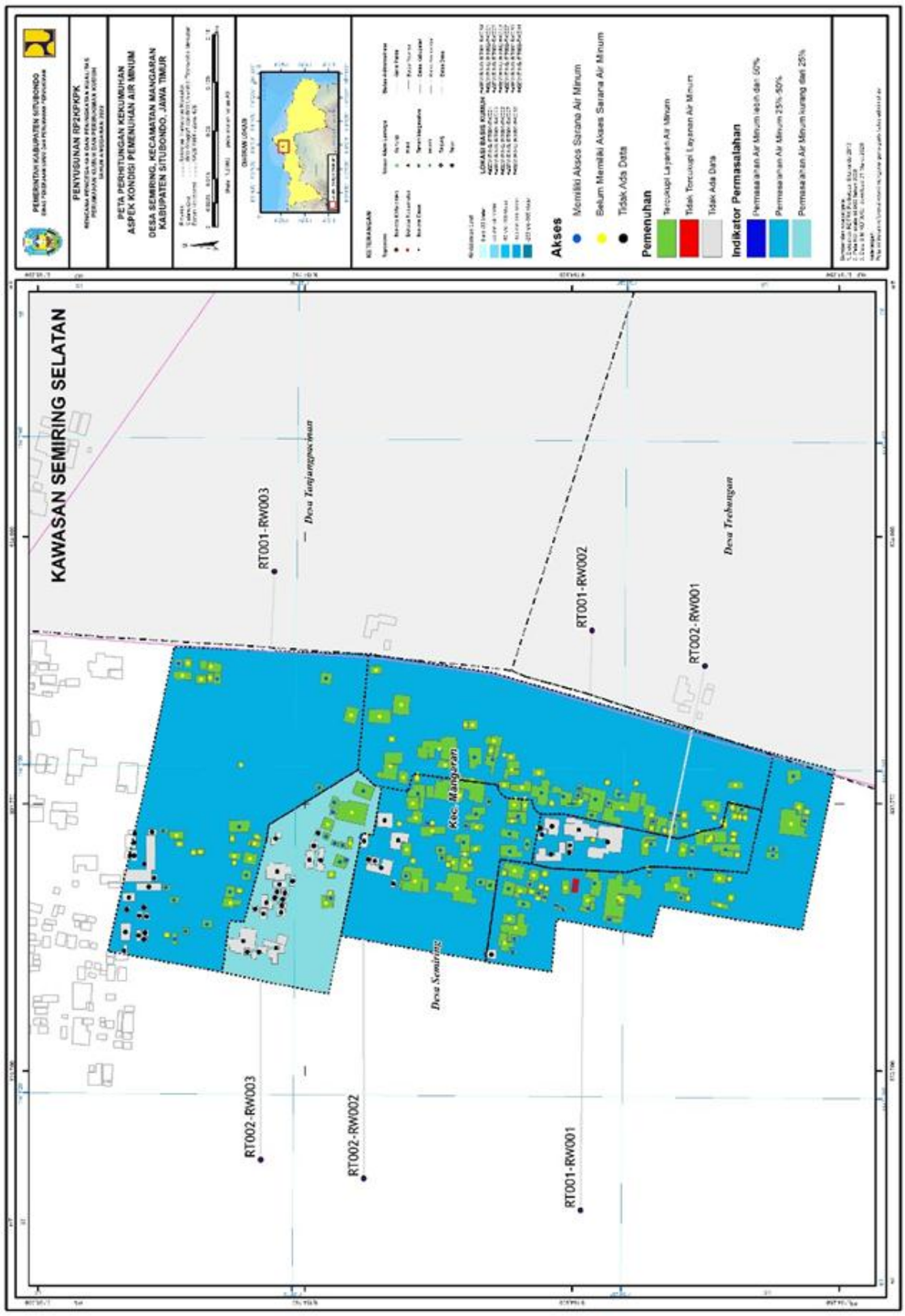

Peta 3. 44 Kondisi Permasalahan Air Minum Semiring Selatan
Sumber : Survey Lapang, 2022

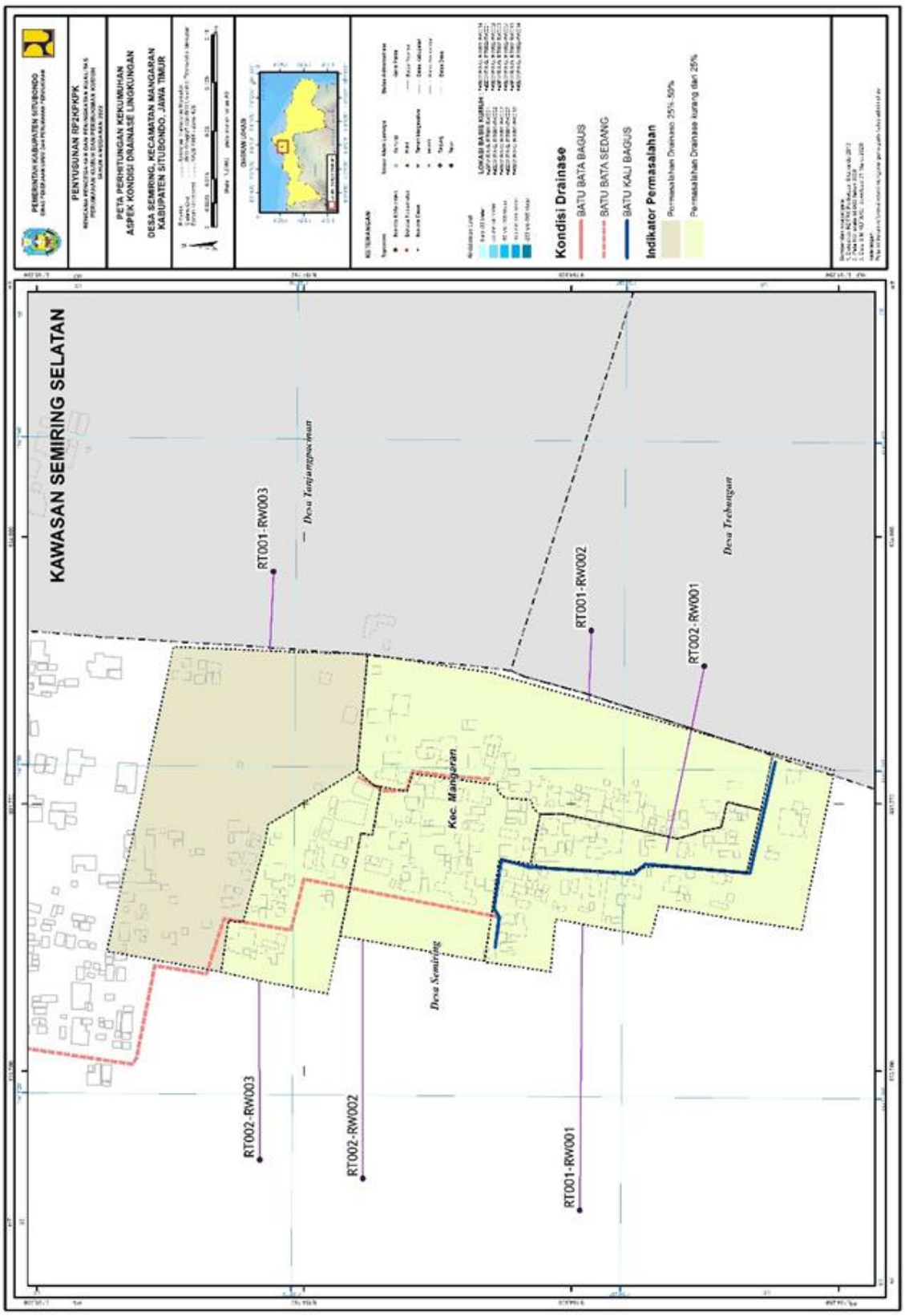

Peta 3. 45 Kondisi Permasalahan Drainase Lingkungan Semiring Selatan
Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 46 Kondisi Permasalahan Air Limbah Semiring Selatan
Sumber : Survey Lapang, 2022

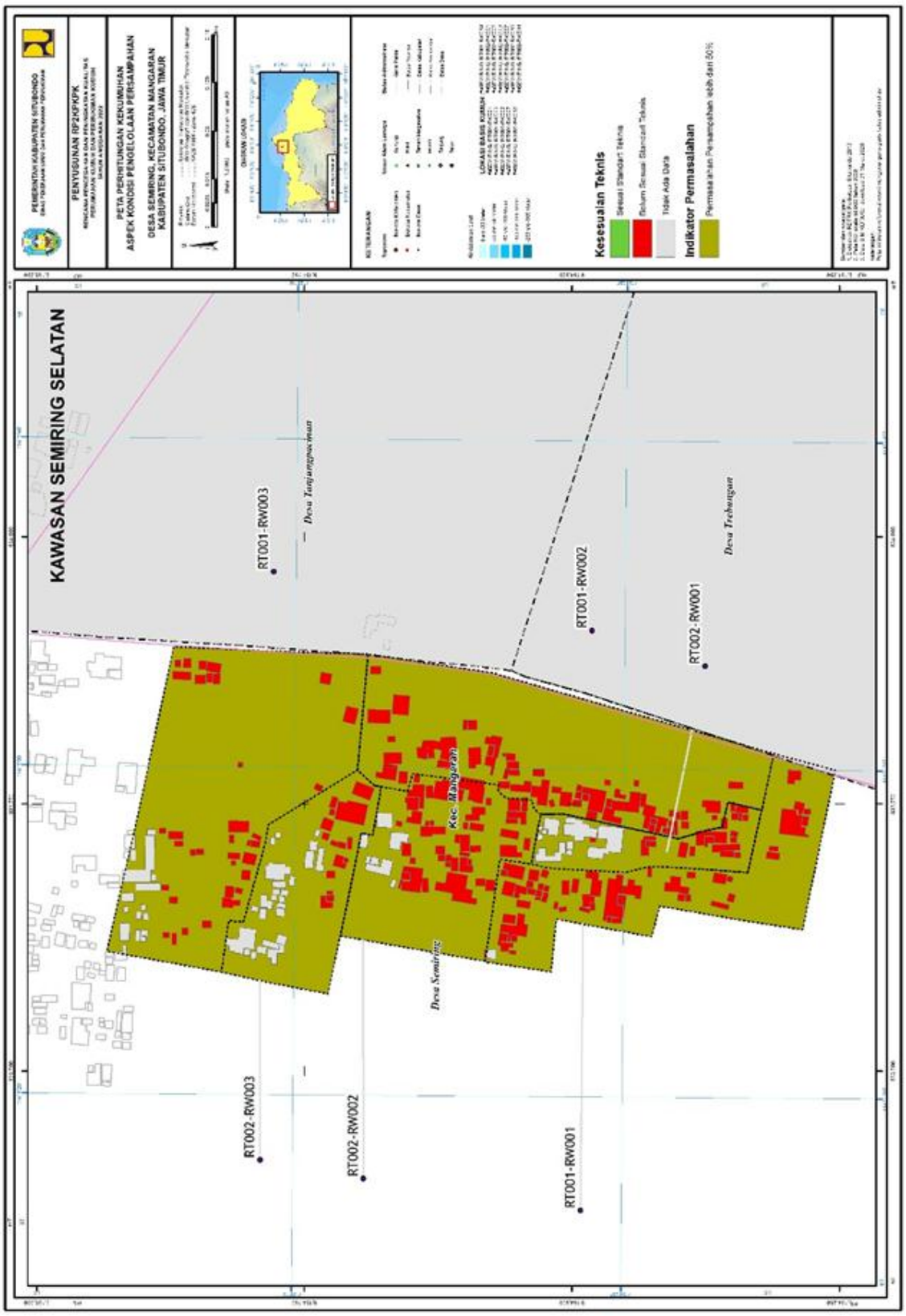

Peta 3. 47 Kondisi Permasalahan Persampahan Semiring Selatan
Sumber : Survey Lapang, 2022

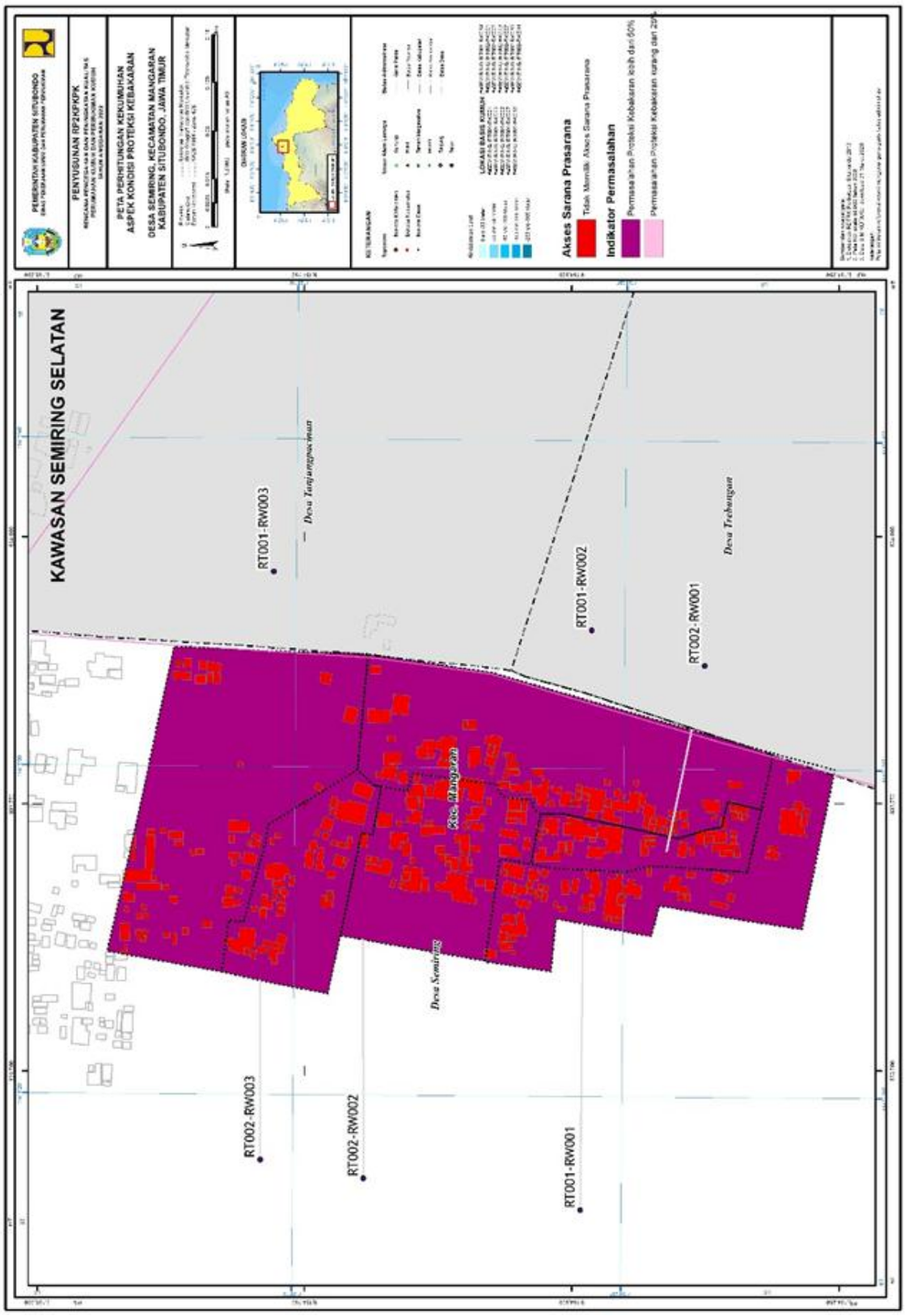

Peta 3. 48 Kondisi Permasalahan Proteksi Kebakaran Semiring Selatan

Sumber : Survey Lapang, 2022

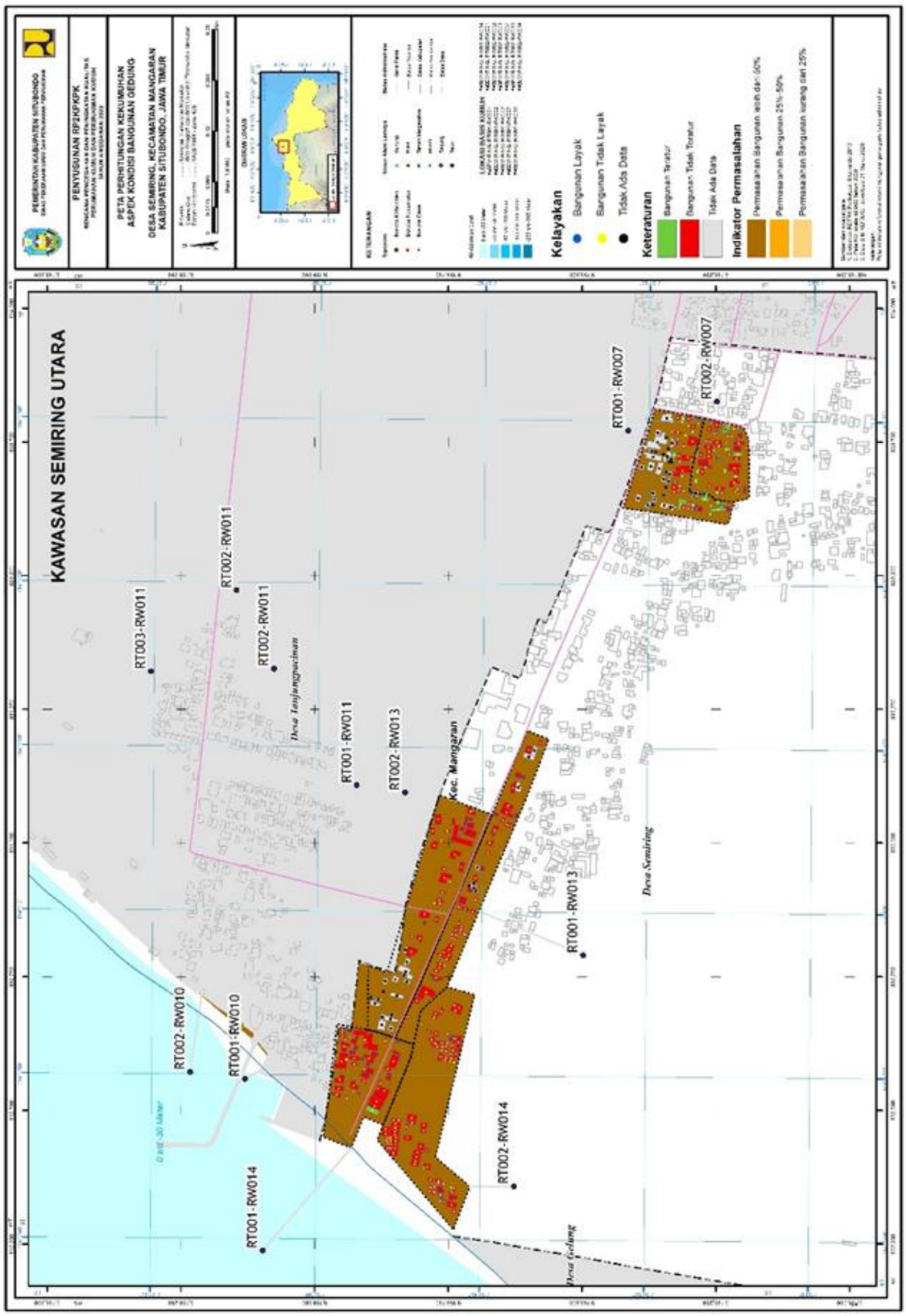

Peta 3. 49 Kondisi Permasalahan Bangunan Hunian Semiring Utara

Sumber : Survey Lapang, 2022

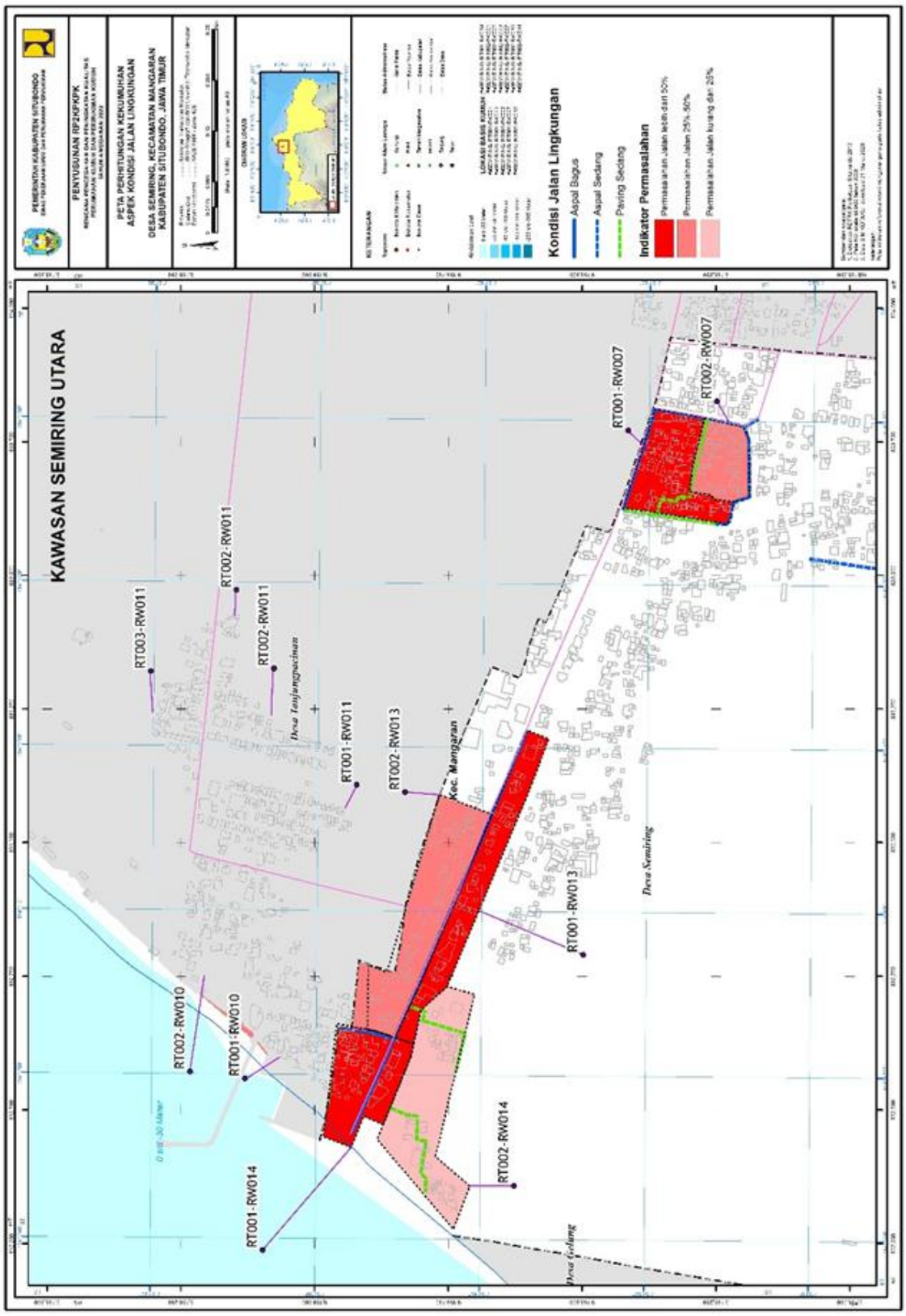

Peta 3. 50 Kondisi Permasalahan Jalan Lingkungan Semiring Utara

Sumber : Survey Lapang, 2022

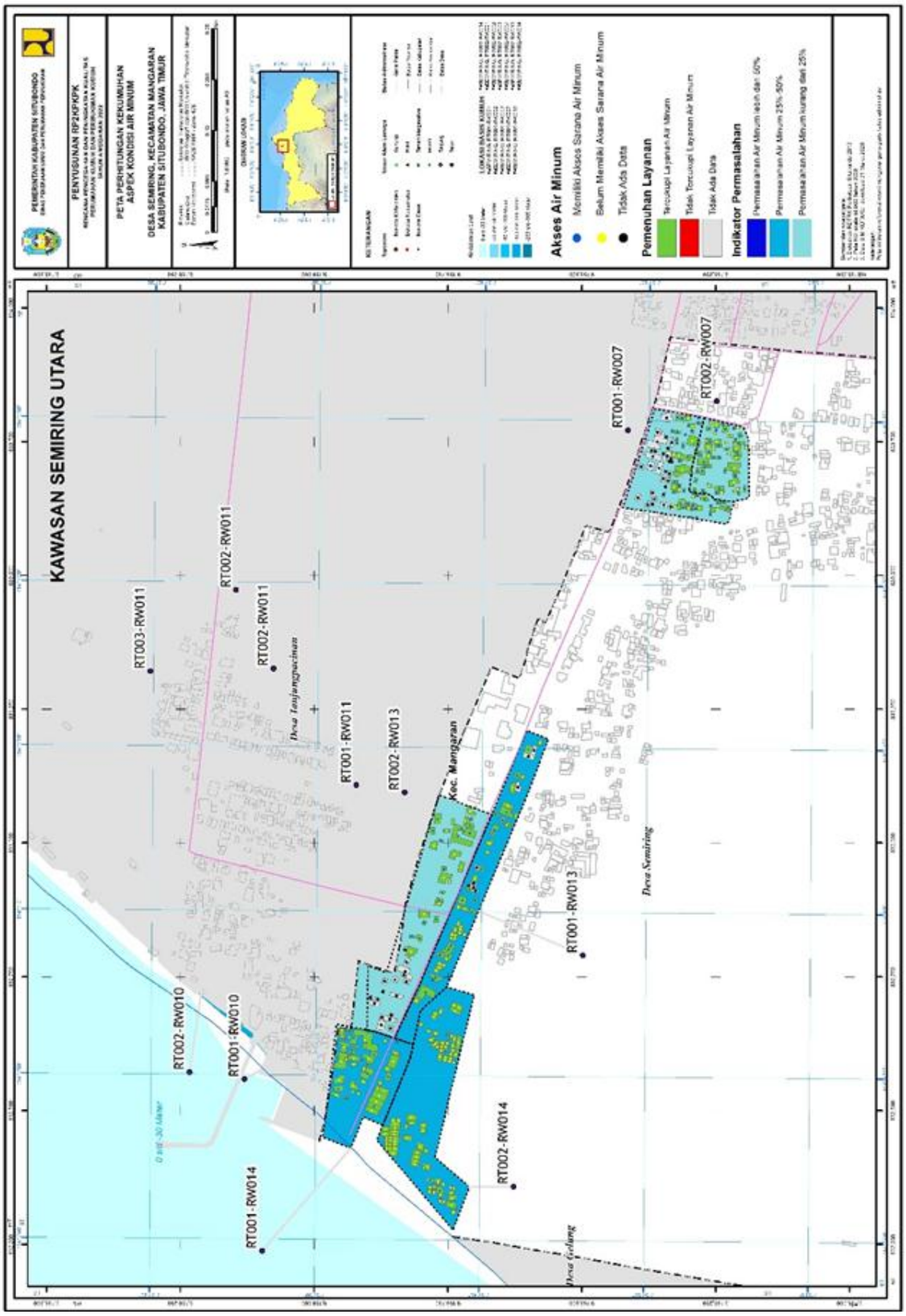

Peta 3. 51 Kondisi Permasalahan Air Minum Semiring Utara

Sumber : Survey Lapang, 2022

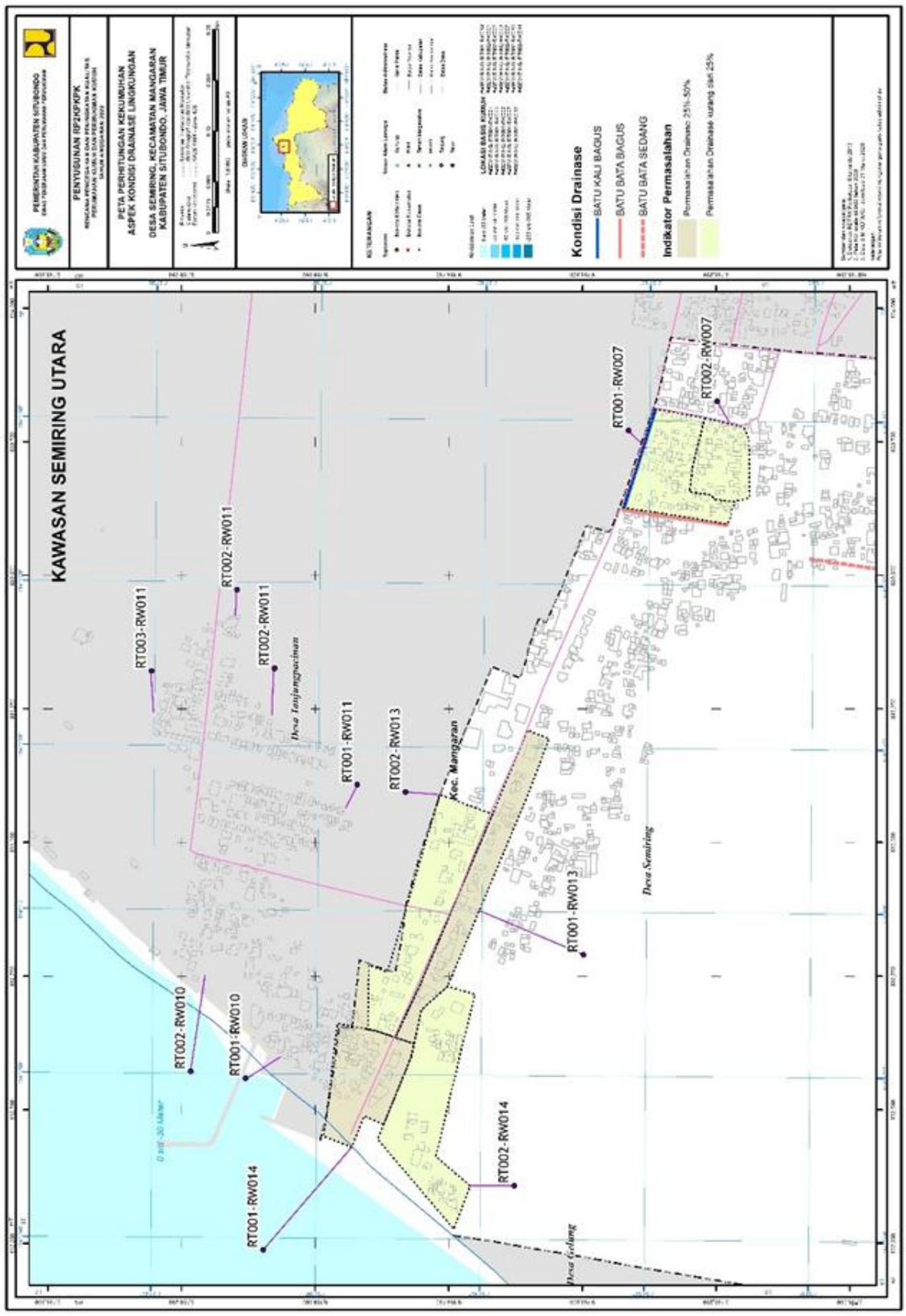

Peta 3. 52 Kondisi Permasalahan Drainase Lingkungan Semiring Utara

Sumber : Survey Lapang, 2022

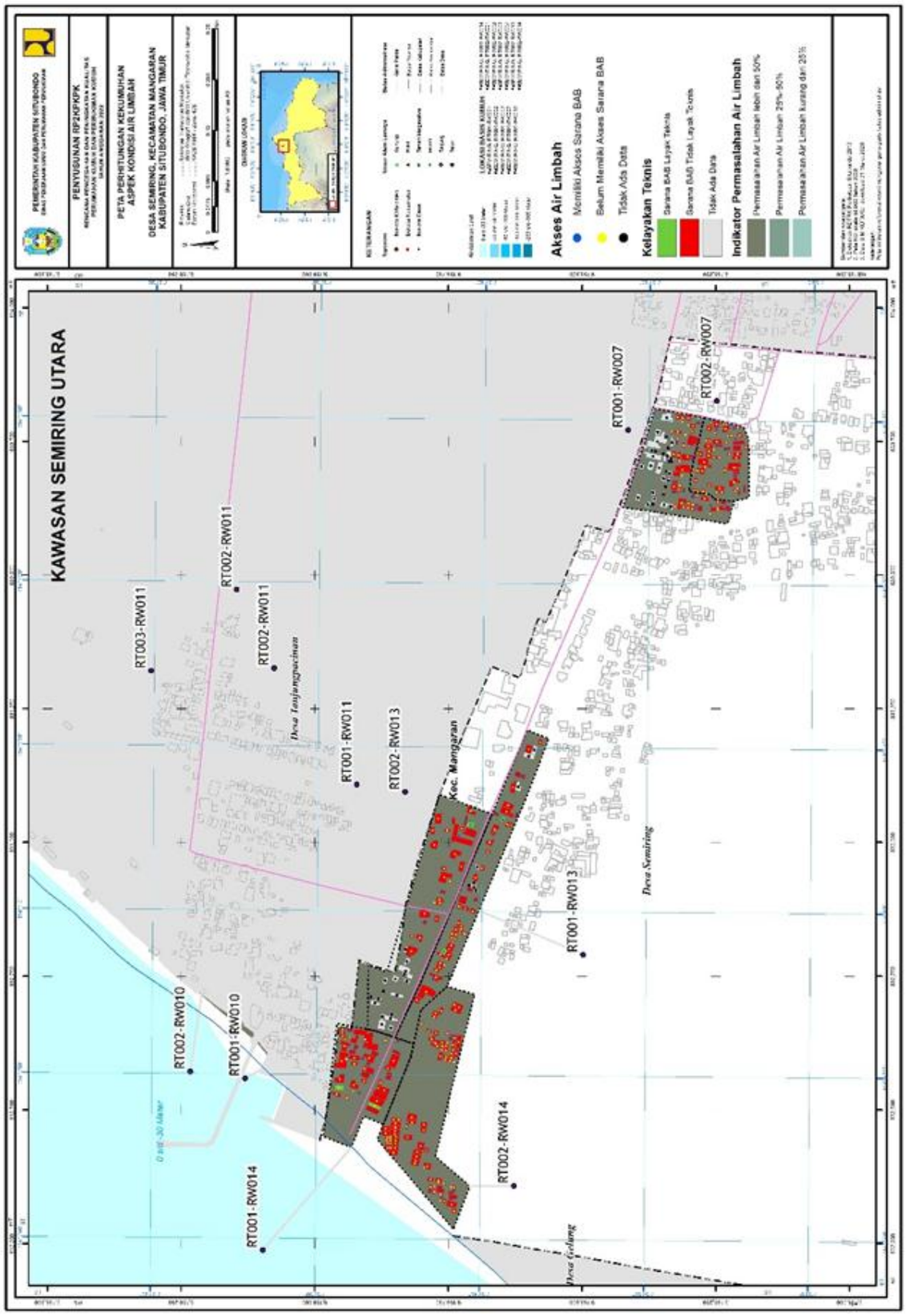

Peta 3. 53 Kondisi Permasalahan Air Limbah Semiring Utara
Sumber : Survey Lapang, 2022

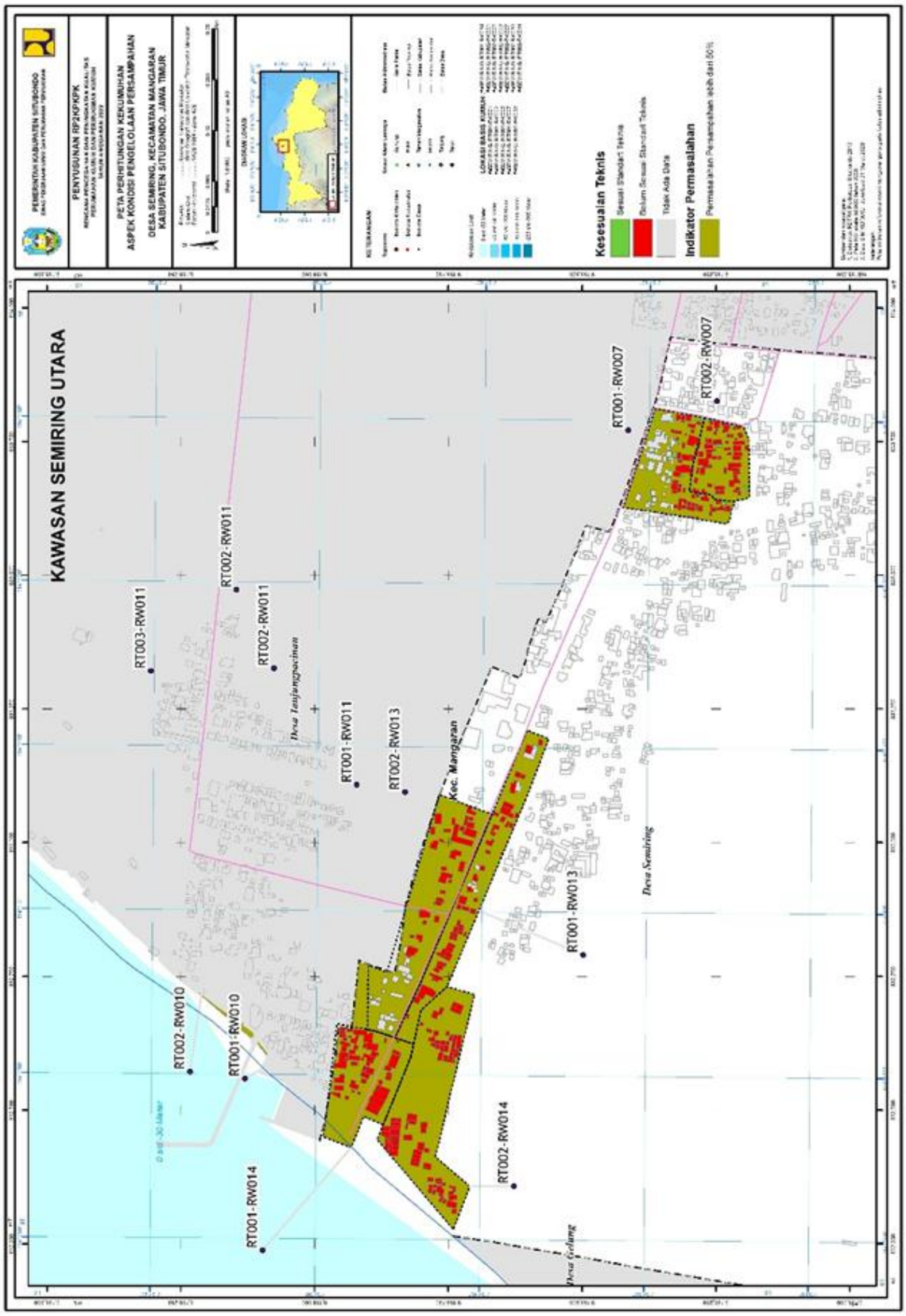

Peta 3. 54 Kondisi Permasalahan Persampahan Semiring Utara
Sumber : Survey Lapang, 2022

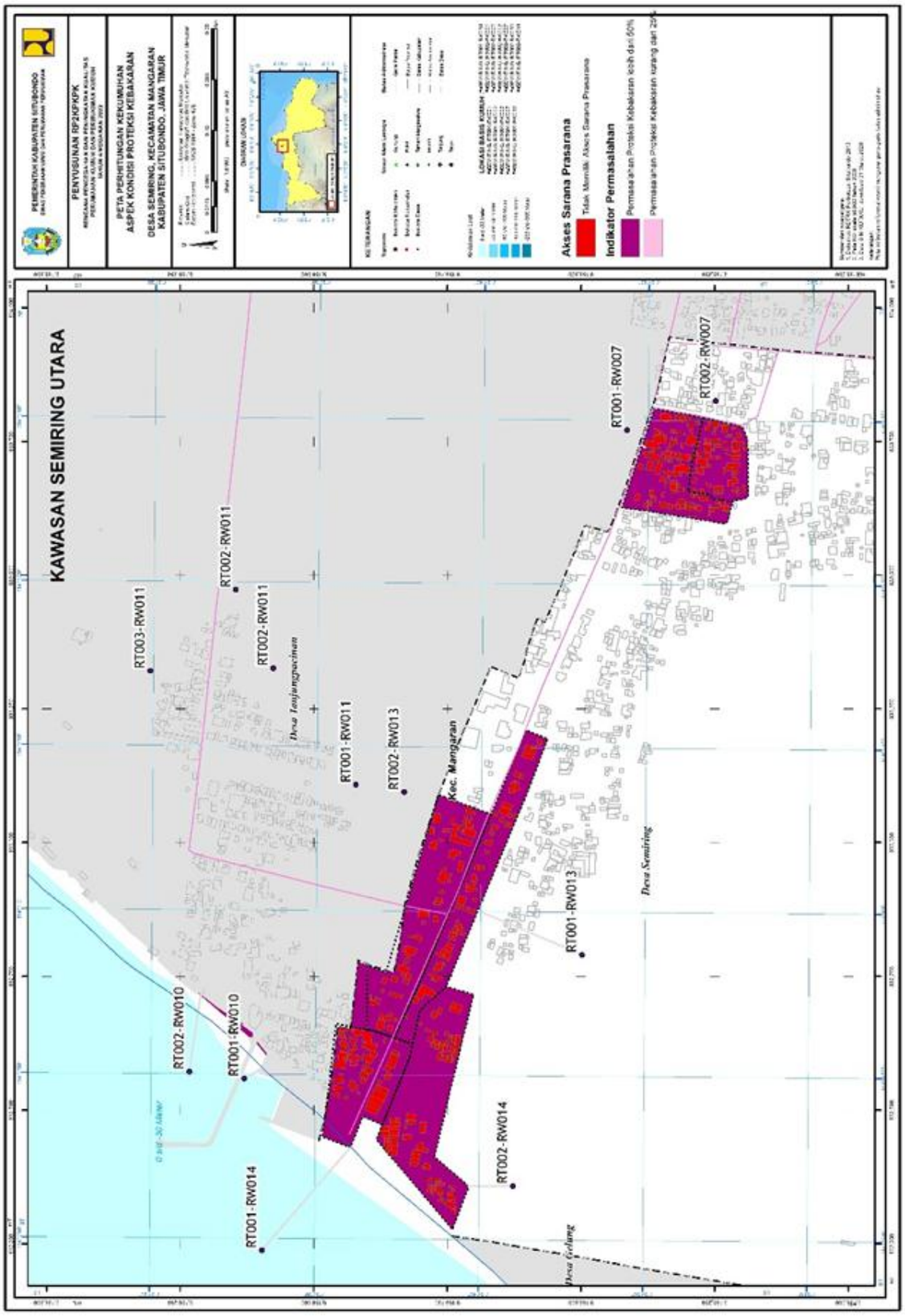

Peta 3. 55 Kondisi Permasalahan Proteksi Kebakaran Semiring Utara
Sumber : Survey Lapang, 2022

3.3.6 Profil Permukiman Kumuh – Desa Tanjung Pecinan

Kawasan permukiman kumuh di Desa Tanjung Pecinan meliputi Kawasan Kaliasin dengan luas sebesar 9.85 Ha dan Kawasan Karanganyar dengan luas sebesar 7.87 Ha. Tipologi atau karakteristik kawasan permukiman kumuh Desa Tanjung Pecinan merupakan kawasan permukiman kumuh padat dan sebagian

berada di pesisir pantai. Berikut ini adalah profil kawasan permukiman kumuh Desa Tanjung Pecinan :

A.1 Karakteristik Bangunan Hunian

Keadaan bangunan hunian di Desa Tanjung Pecinan mayoritas merupakan bangunan permanen dengan status lahan legal, dan merupakan milik pribadi. Bangunan hunian di permukiman kumuh Desa Tanjung Pecinan memiliki beberapa permasalahan anatara lain terdapat beberapa RTLH yang menggunakan material bangunan dinding dari kayu dan triplek, beberapa area bangunan tidak teratur yang berdiri diatas saluran irigasi yang mengakibatkan banjir, ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk bangunan yang dapat dilihat dari bangunan hunian satu dengan bangunan hunian lain di samping kanan dan kirinya. Berikut adalah gambaran kondisi bangunan hunian di Desa Tanjung Pecinan :

Gambar 3. 41 Kondisi Banguan Hunian Desa Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.2 Karakteristik Jalan Lingkungan

Keadaan jalan lingkungan di Desa Tanjung Pecinan mayoritas permukiman sudah terkoneksi oleh jaringan jalan, namun memiliki beberapa permasalahan antara lain kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman dikarenakan perkerasan jalan berupa aspal atau paving terdapat beberapa yang mengalami kerusakan, beberapa penyebab kerusakan dan ketidakteraturan jalan antara lain genangan air hujan yang menggerus lapisan perkerasan jalan, di lalui kendaraan bermuatan berat dan adanya jalan yang masih belum terbangun berupa makadam maupun tanah.

Gambar 3. 42 Kondisi Jalan Lingkungan Desa Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.3 Karakteristik Air Bersih

Keadaan penyediaan air bersih di Desa Tanjung Pecinan mayoritas mayoritas masyarakat menggunakan sumur. Kebutuhan air bersih untuk masak,

cuci dan mandi tercukupi, sedangkan untuk kebutuhan air minum membeli air minum eceran. Namun terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak terpenuhinya kualitas air bersih sesuai standar kesehatan karena terdapat masyarakat menggunakan air sumur yang kondisinya tidak layak, belum ada jaringan PDAM dimana PDAM dianggap terlalu mahal, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat

Gambar 3. 43 Kondisi Penyediaan Air Minum Desa Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.4 Karakteristik Drainase Lingkungan

Keadaan drainase lingkungan di Desa Tanjung Pecinan mayoritas telah memiliki tersedia di tiap ruas jalan, namun memiliki beberapa permasalahan seperti pembuangan air limbah rumah tangga sehingga fungsi saluran drainase bercampur yang mengakibatkan pendangkalan saluran. Selain itu, adanya ketidakterhubungan saluran drainase dengan sistem drainase perkotaan sehingga tidak ada integrasi antara saluran drainase satu dengan saluran drainase lainnya, tidak ada tangkis laut di muara yang mengakibatkan masuknya air laut ke pemukiman warga.

Gambar 3. 44 Kondisi Drainase Lingkungan Desa Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.5 Karakteristik Pengelolaan Air Limbah

Keadaan pengelolaan air limbah di Desa Tanjung ecinan mayoritas memiliki MCK pribadi dan telah terhubung dengan tangki septic, namun memiliki beberapa permasalahan, seperti limbah rumah tangga yang masih dibuang langsung ke saluran drainase atau sungai tanpa diproses terlebih dahulu. beberapa warga masih BAB di sungai atau laut.

Gambar 3. 45 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Desa Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.6 Karakteristik Pengelolaan Persampahan

Keadaan pengelolaan sampah di Desa Tanjung Pecinan mayoritas masyarakat tidak dapat menerima layanan sistem pengangkutan sampah karena sistem pengangkutan menuju TPS tidak memadai serta petugas dan armada angkut kurang. Hal ini mengakibatkan sampah tidak terangkut dan terkelola dengan baik, sampah di kelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibuang ke sungai atau laut, dan dibakar di lahan kosong.

Gambar 3. 46 Kondisi Pengelolaan Sampah Desa Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.7 Karakteristik Proteksi Kebakaran

Keadaan pengamanan bahaya kebakaran di Desa Tanjung Pecinan memiliki beberapa permasalahan, seperti ketidaktersediaan sistem pengamanan bahaya kebakaran secara aktif dan pasif yang dapat dilihat dari lingkungan atau setiap bangunan hunian yang tidak memliki pengamanan bahaya kebakaran. Disamping itu, juga terdapat ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran karena masih ada beberapa jalan lingkungan yang ada memiliki lebar kurang dari 1,5 meter sehingga tidak dapat dilalui oleh mobil kebakaran.

Gambar 3. 47 Kondisi Proteksi Kebakaran Desa Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.8 Profil dan Data Baseline Kumuh Desa Tanjung Pecinan

Data Basline kumuh memuat mengenai informasi numerik 7 (tujuh) indikator kumuh serta tingkat kekumuhan di Desa Tanjung Pecinan, berikut adalah data baseline kumuh Desa Tanjung Pecinan:

Tabel 3. 11 Baseline Kumuh Desa Tanjung Pecinan

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi	**: JAWA TIMUR**	**Luas SK**	**17.72**	Ha
Kab/Kota	**: KAB. SITUBONDO**	**Luas Verifikasi**	**17.72**	Ha
Kecamatan	**: MANGARAN**	**Jumlah Bangunan**	**719**	Unit
Kawasan	**: TANJUNG PECINAN**	**Jumlah Penduduk**	**1,743**	Jiwa
		Jumlah Bangunan	**719**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	555.00	Unit	77.19%	5
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	691.00	Unit	96.11%	5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				57.77%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	5,057.00	Meter	64.35%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				32.17%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	119.00	KK	16.55%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	492.00	KK	68.43%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				34.21%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	5,730.00	Meter	75.41%	3
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	-	Meter	0.00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1,211.00	Meter	15.94%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				15.08%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	691.00	KK	96.11%	5
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	691.00	KK	96.11%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				96.11%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	719.00	KK	100.00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	719.00	KK	100.00%	5
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				66.67%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0.00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	719.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50.00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		
60 -80 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	44
38 - 59 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
16 - 37 KUMUH RINGAN		
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	50.29%
	KONTRIBUSI PENANGANAN	0.00%

Sumber : Baseline Kumuh, 2020

Gambar 3. 48 Profil Kumuh Desa Tanjung Pecinan

Sumber : Analisa Penulis, 2022

A.9 Sebaran Permasalahan 7 Indikator Kumuh Desa Tanjung Pecinan

Berikut adalah Sebaran pemasalahan 7 (tujuh) indikator kumuh Desa Tanjung Pecinan:

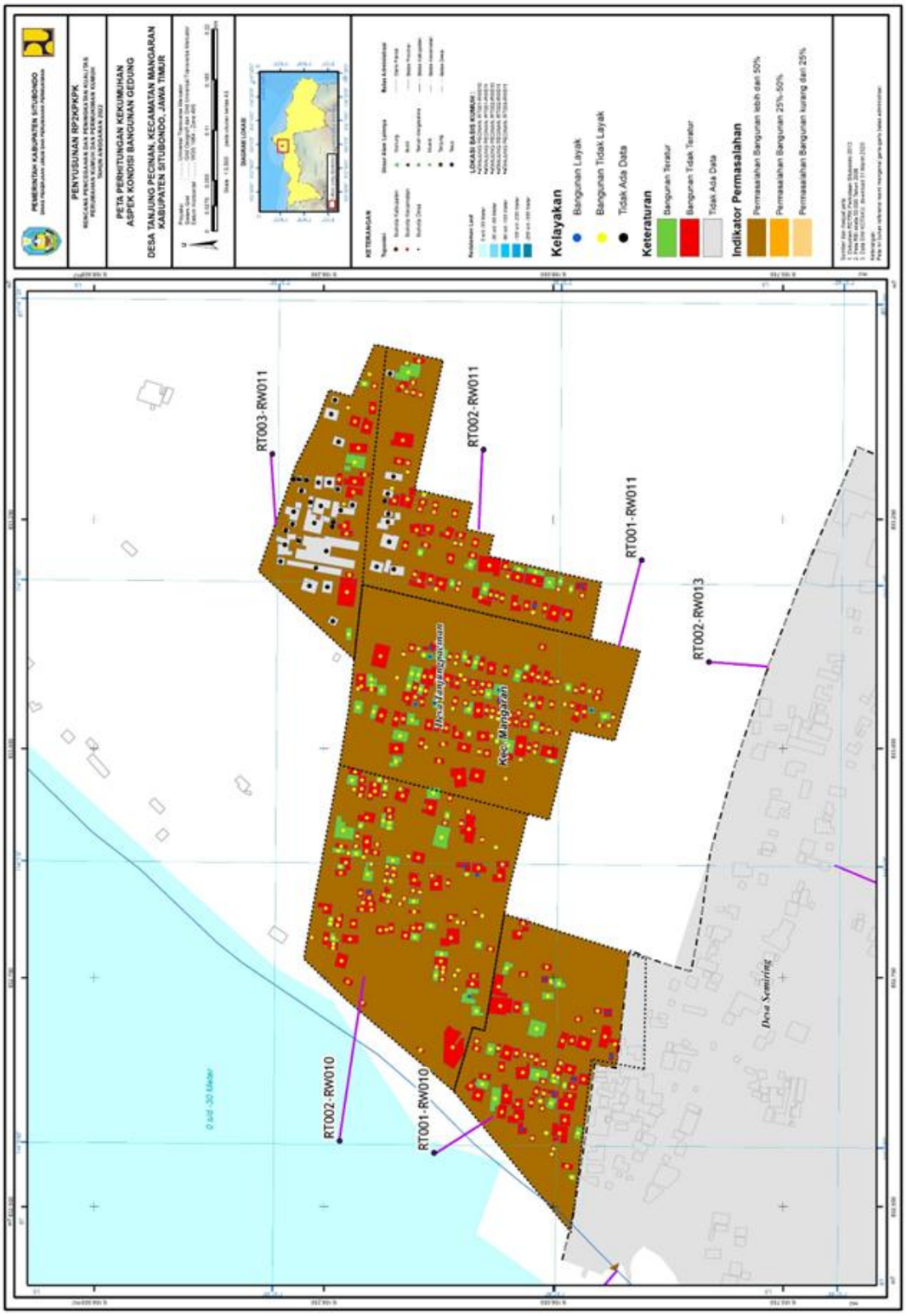

Peta 3. 56 Kondisi Permasalahan Bangunan Hunian Tanjung Pecinan

Sumber : Survey Lapang, 2022

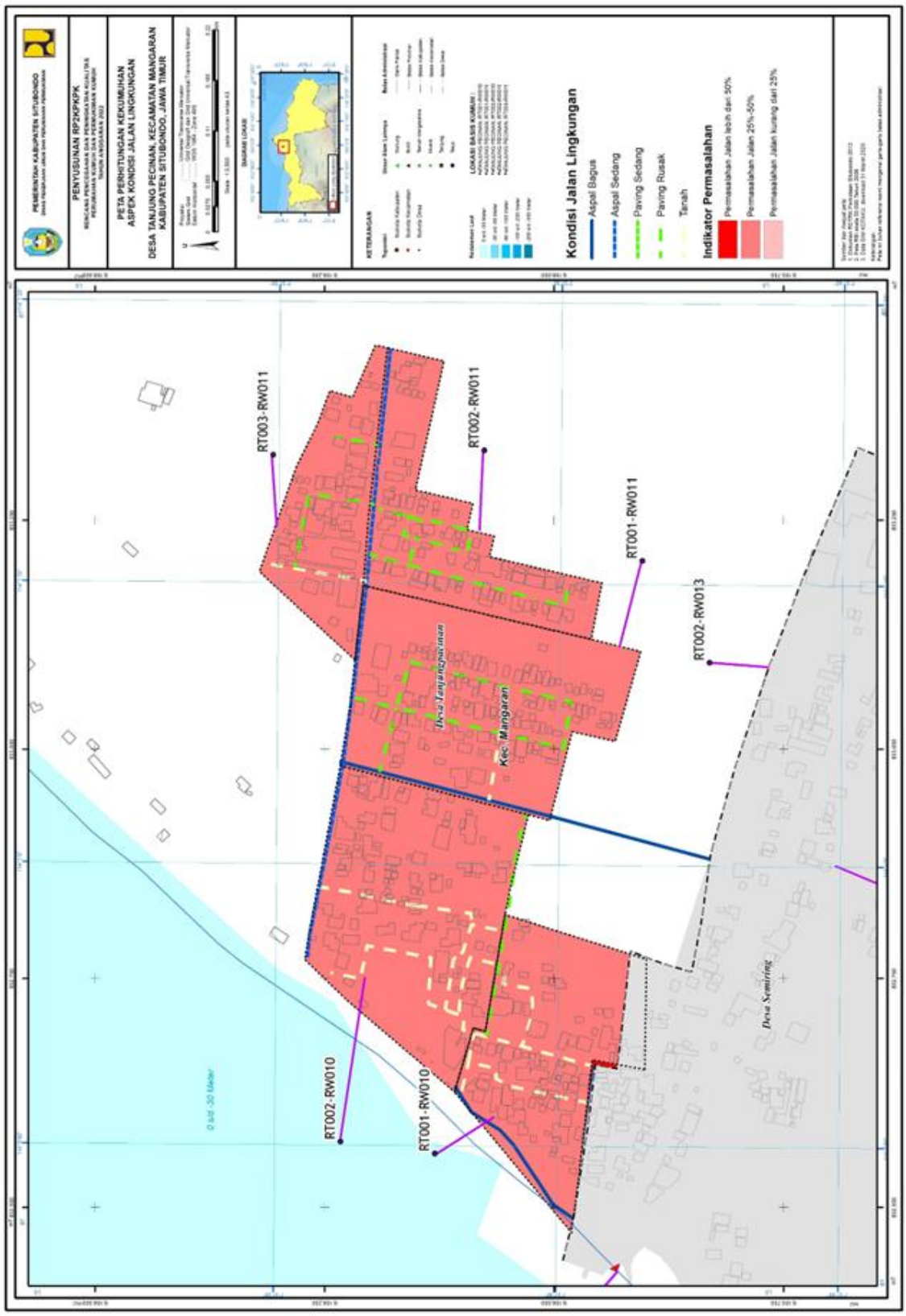

Peta 3. 57 Kondisi Permasalahan Jalan Lingkungan Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

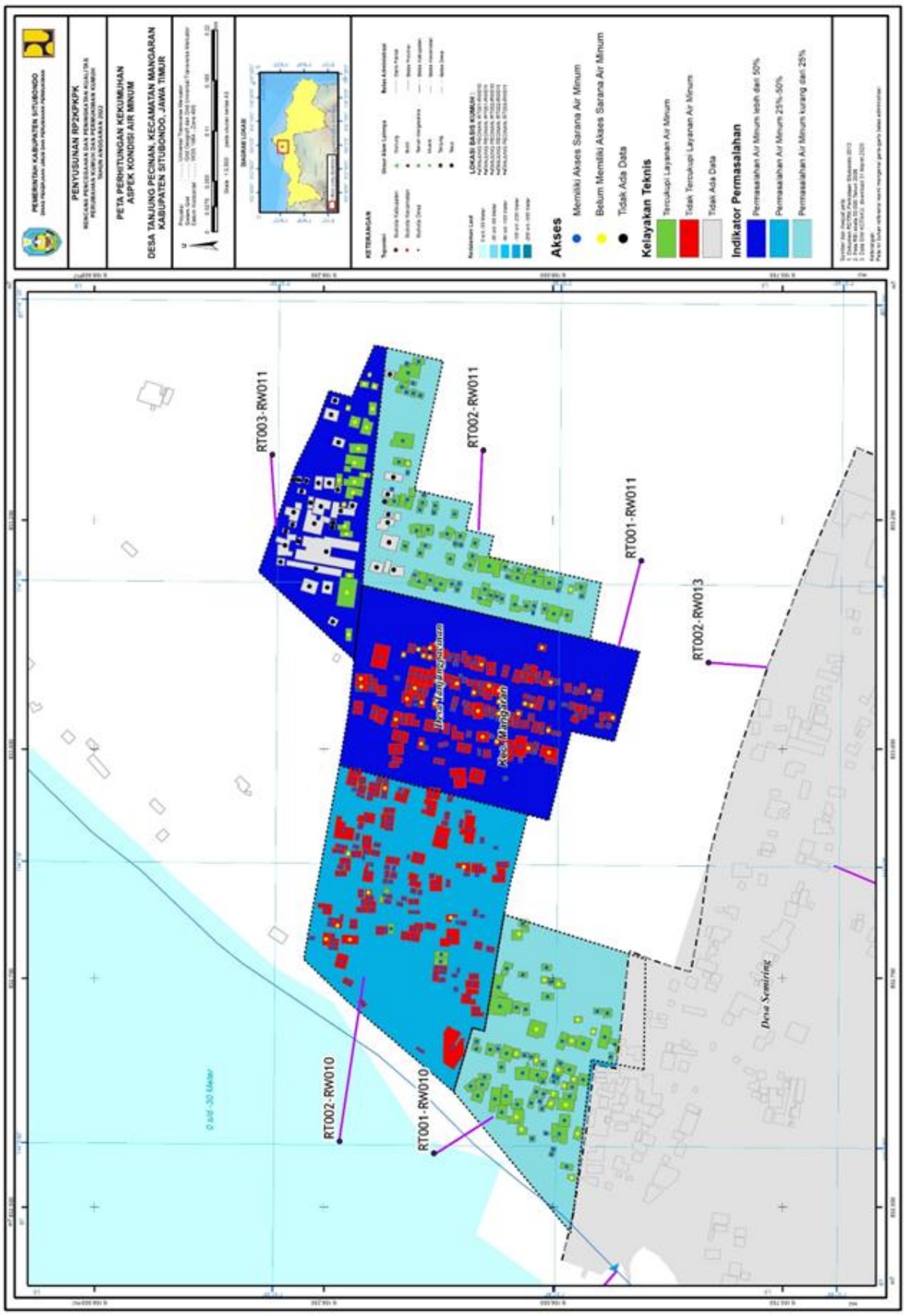

Peta 3. 58 Kondisi Permasalahan Air Minum Tanjung Pecinan

Sumber : Survey Lapang, 2022

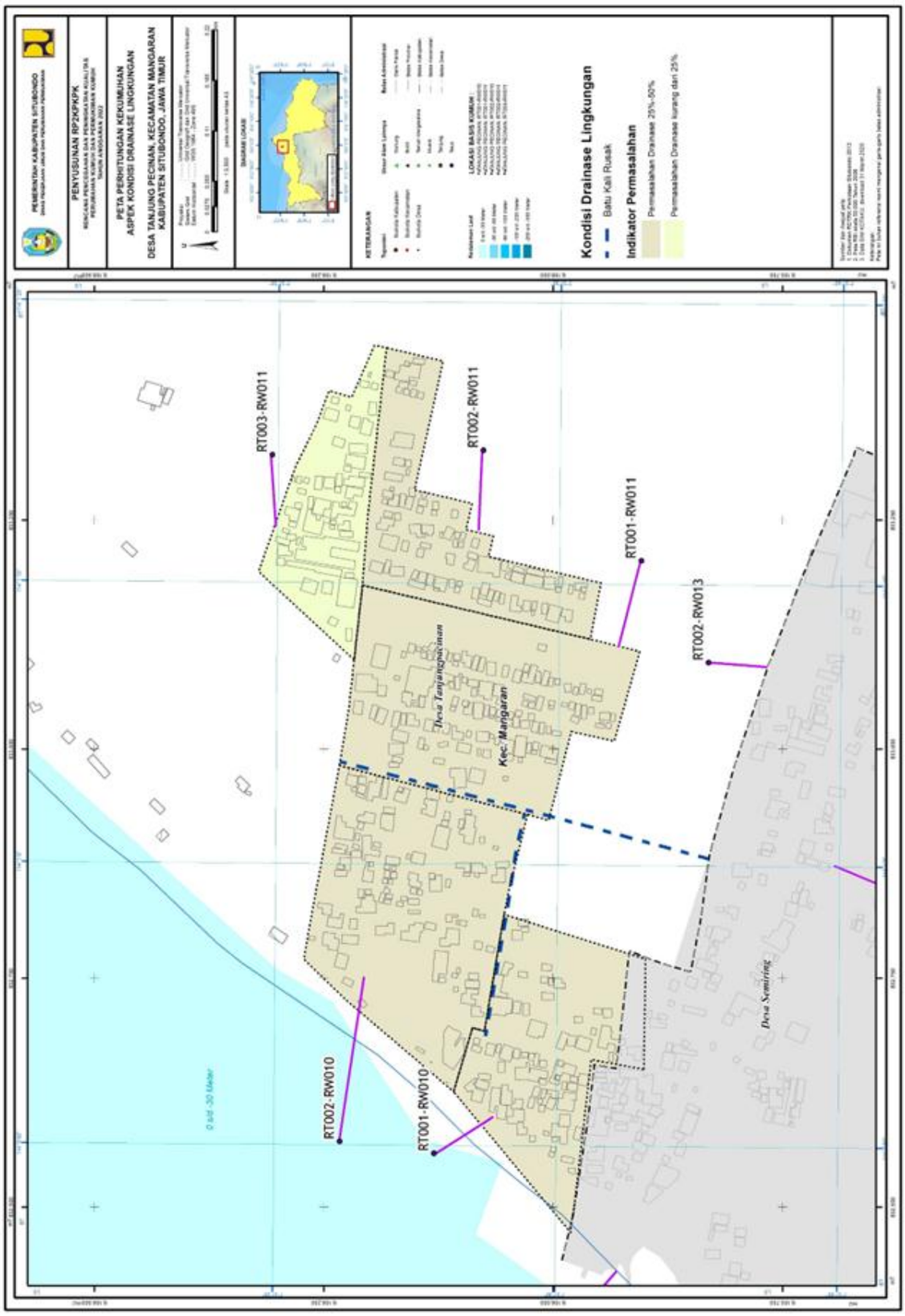

Peta 3. 59 Kondisi Permasalahan Drainase Lingkungan Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

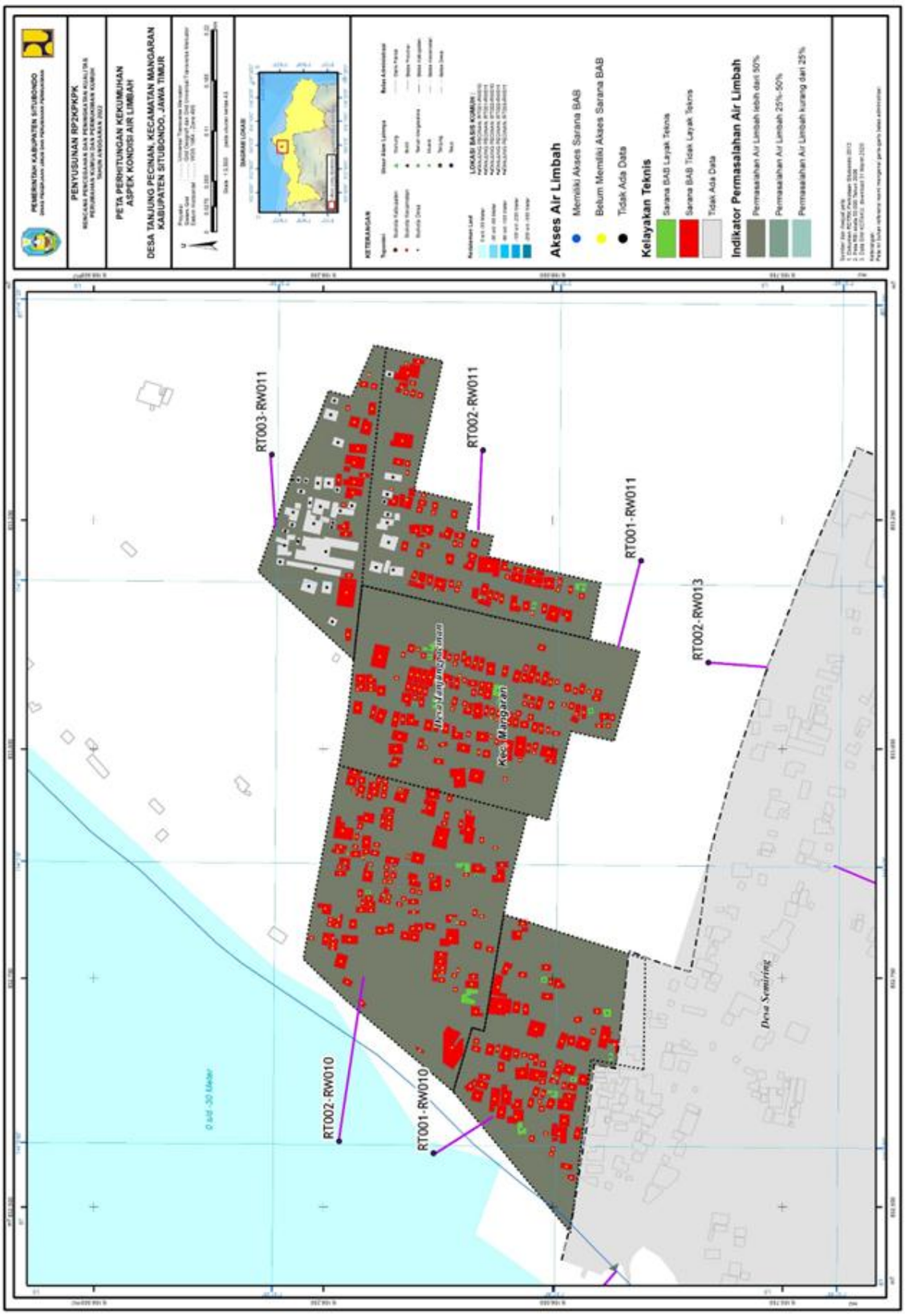

Peta 3. 60 Kondisi Permasalahan Air Limbah Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

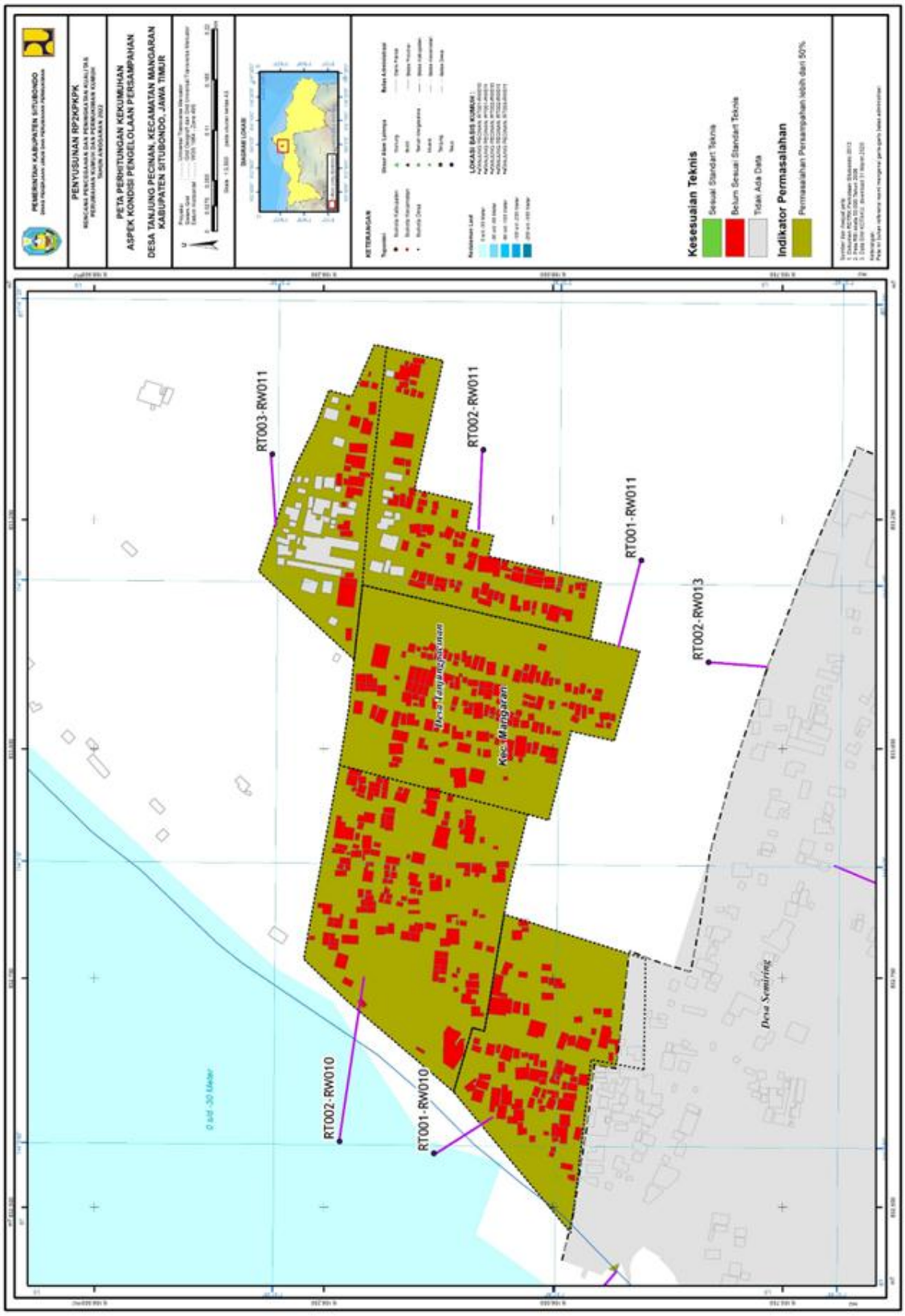

Peta 3. 61 Kondisi Permasalahan Persampahan Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

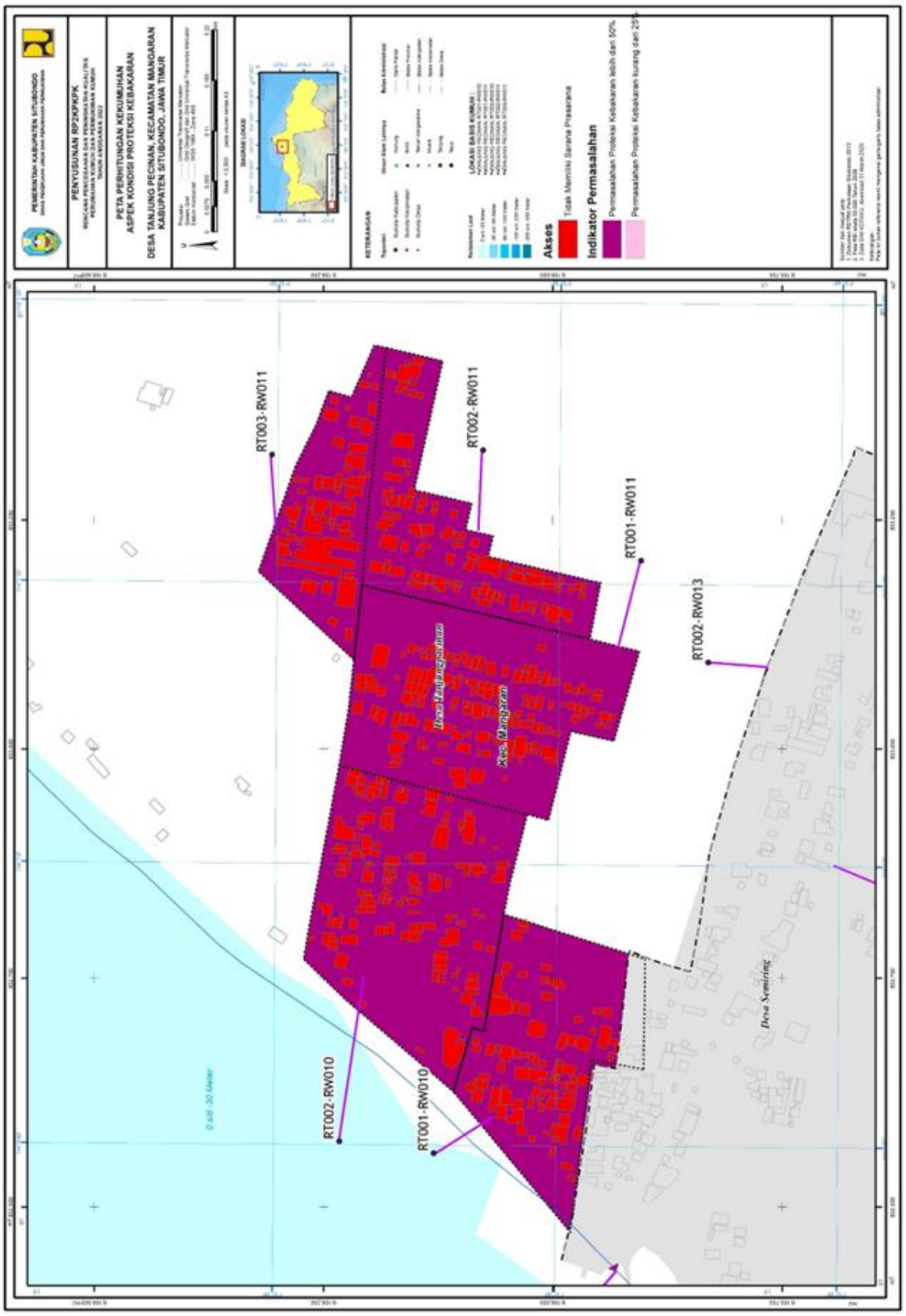

Peta 3. 62 Kondisi Permasalahan Proteksi Kebakaran Tanjung Pecinan
Sumber : Survey Lapang, 2022

3.3.7 Profil Permukiman Kumuh – Desa Wringin Anom

Kawasan permukiman kumuh di Desa Wringin Anom meliputi Kawasan Timur Sawah dengan luas sebesar 16.07Ha, Kawasan Bataan dengan luas sebesar 7,36 Ha dan Kawasan Sok Parse dengan luas sebesar 22.40 Ha. Tipologi atau karakteristik kawasan permukiman kumuh Desa Olean merupakan kawasan permukiman kumuh dataran rendah dengan karakteristik pedesaan. Berikut ini adalah profil kawasan permukiman kumuh Desa Wringin Anom:

A.1 Karakteristik Bangunan Hunian

Keadaan bangunan hunian di Desa Wringin Anom Mayoritas bangunan hunian adalah bangunan permanen dan milik pribadi. Bangunan hunian di permukiman kumuh Desa Wringin Anom memiliki beberapa permasalahan antara lain terdapat beberapa RTLH yang menggunakan material bangunan dinding dari kayu, triplek, bambu dan berlantai tanah. Kondisi ini disebabkan karena kemiskinan masyarakat mata pencaharian penduduk mayoritas buruh tani. Berikut adalah gambaran kondisi bangunan hunian di Desa Wringin Anom:

Gambar 3. 49 Kondisi Banguan Hunian Desa Wringin Anom
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.2 Karakteristik Jalan Lingkungan

Keadaan jalan lingkungan di Desa Wringin Anom mayoritas permukiman sudah terkoneksi oleh jaringan jalan, namun memiliki beberapa permasalahan antara lain jalan aspal tetapi sudah mengalami kerusakan dengan kondisi sedang. Selain itu, adanya jalan yang masih belum terbangun berupa makadam maupun tanah dan Jalan Rusak karena faktor usia

Gambar 3. 50 Kondisi Jalan Lingkungan Desa Wringin Anom
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.3 Karakteristik Air Bersih

Keadaan penyediaan air bersih di Desa Wringin Anom mayoritas masyarakat menggunakan sumur sisanya menggunakan PDAM. Namun terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak terpenuhinya kualitas air bersih sesuai standar kesehatan karena terdapat masyarakat menggunakan air sumur yang kondisinya tidak layak, dimana jarak antara sumber air dan tangki septik

pembuangan limbah umumnya berjarak kurang dari 10 meter. Selain itu masyarakat tidak mampu mengakses PDAM karena dianggap terlalu mahal.

Gambar 3. 51 Kondisi Penyediaan Air Minum Desa Wringin Anom
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.4 Karakteristik Drainase Lingkungan

Keadaan drainase lingkungan di Desa Wringin Anom mayoritas telah memiliki drainase di tiap ruas jalan, namun memiliki beberapa permasalahan seperti pembuangan air limbah rumah tangga sehingga fungsi saluran drainase bercampur yang mengakibatkan pendangkalan saluran. Selain itu, adanya ketidakterhubungan saluran drainase dengan sistem drainase perkotaan sehingga tidak ada integrasi antara saluran drainase lingkungan dengan saluran drainase primer, sungai sebagai drainase utama tidak dapat menampung air hujan shingga meluap ke permukiman warga

Gambar 3. 52 Kondisi Drainase Lingkungan Desa Wringin Anom
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.5 Karakteristik Pengelolaan Air Limbah

Keadaan pengelolaan air limbah di Desa Wringin Anom mayoritas memiliki MCK pribadi dan telah terhubung dengan tangki septic, namun memiliki beberapa permasalahan, seperti limbah rumah tangga yang masih dibuang langsung ke saluran atau sungai tanpa diproses terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kemiskinan masyarakat dan rendahnya kesadaran pentingnya menjaga kesehatan.

Gambar 3. 53 Kondisi Pengelolaan Air Limbah Desa Wringin Anom
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.6 Karakteristik Pengelolaan Persampahan

Keadaan pengelolaan sampah di Desa Wringin Anom mayoritas masyarakat tidak terlayani sistem pengangkutan sampah karena belum adanya sistem pengangkutan, tidak adanya TPS serta petugas dan armada angkut kurang.

Hal ini mengakibatkan sampah tidak terangkut dan terkelola dengan baik, sampah di kelola sendiri oleh masyarakat dengan cara dibuang ke sungai dan dibakar di lahan kosong.

Gambar 3. 54 Kondisi Pengelolaan Sampah Desa Wringin Anom
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.7 Karakteristik Proteksi Kebakaran

Keadaan pengamanan bahaya kebakaran di Desa Wringin Anom memiliki beberapa permasalahan, seperti ketidaktersediaan sistem pengamanan bahaya kebakaran secara aktif dan pasif yang dapat dilihat dari lingkungan atau setiap bangunan hnian yang tidak memliki pengamanan bahaya kebakaran. Disamping itu, juga terdapat ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran karena masih ada beberapa jalan lingkungan yang ada memiliki lebar kurang dari 1,5 meter sehingga tidak dapat dilalui oleh mobil kebakaran.

Gambar 3. 55 Kondisi Proteksi Kebakaran Desa Wringin Anom
Sumber : Survey Lapang, 2022

A.8 Profil dan Data Baseline Kumuh Desa Olean

Data Basline kumuh memuat mengenai informasi numerik 7 (tujuh) indikator kumuh serta tingkat kekumuhan di Desa Wringin Anom, berikut adalah data baseline kumuh Desa Wringin Anom :

Tabel 3. 12 Baseline Kumuh Desa Wringin Anom

Provinsi	**: JAWA TIMUR**	**Luas SK**	**15.42**	Ha
Kab/Kota	**: KAB. SITUBONDO**	**Luas Verifikasi**	**15.42**	Ha
Kecamatan	**: SITUBONDO**	**Jumlah Bangunan**	**888**	Unit
Kawasan	**: OLEAN**	**Jumlah Penduduk**	**1,996**	Jiwa
		Jumlah Bangunan	**895**	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	535.00	Unit	60.25%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	706.00	Unit	79.50%	5
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				46.58%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	450.00	Meter	17.56%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1,151.50	Meter	44.94%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				22.47%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	168.00	KK	18.77%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0.00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	1.05	Ha	6.81%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	755.00	Meter	23.67%	0
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	-	Meter	0.00%	0
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1,465.00	Meter	45.92%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				9.18%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	673.00	KK	75.20%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	806.00	KK	90.06%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				82.63%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	758.00	KK	84.69%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	891.00	KK	99.55%	5
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				61.42%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	888.00	Unit	100.00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	888.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100.00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		
60 -80 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	38
38 - 59 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
16 - 37 KUMUH RINGAN		
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	46.04%
	KONTRIBUSI PENANGANAN	0.00%

Sumber : Baseline Kumuh, 2020

Gambar 3. 56 Profil Kumuh Desa Wringin Anom
Sumber : Analisa Penulis, 2022

A.9 Sebaran Permasalahan 7 Indikator Kumuh Desa Wringin Anom

Berikut adalah Sebaran pemasalahan terkait 7 (tujuh) indikator kumuh Desa Wringin Anom:

Peta 3. 63 Kondisi Permasalahan Bangunan Hunian Wringinanom

Sumber : Survey Lapang, 2022

Peta 3. 64 Kondisi Permasalahan Jalan Lingkungan Wringinanom
Sumber : Survey Lapang, 2022

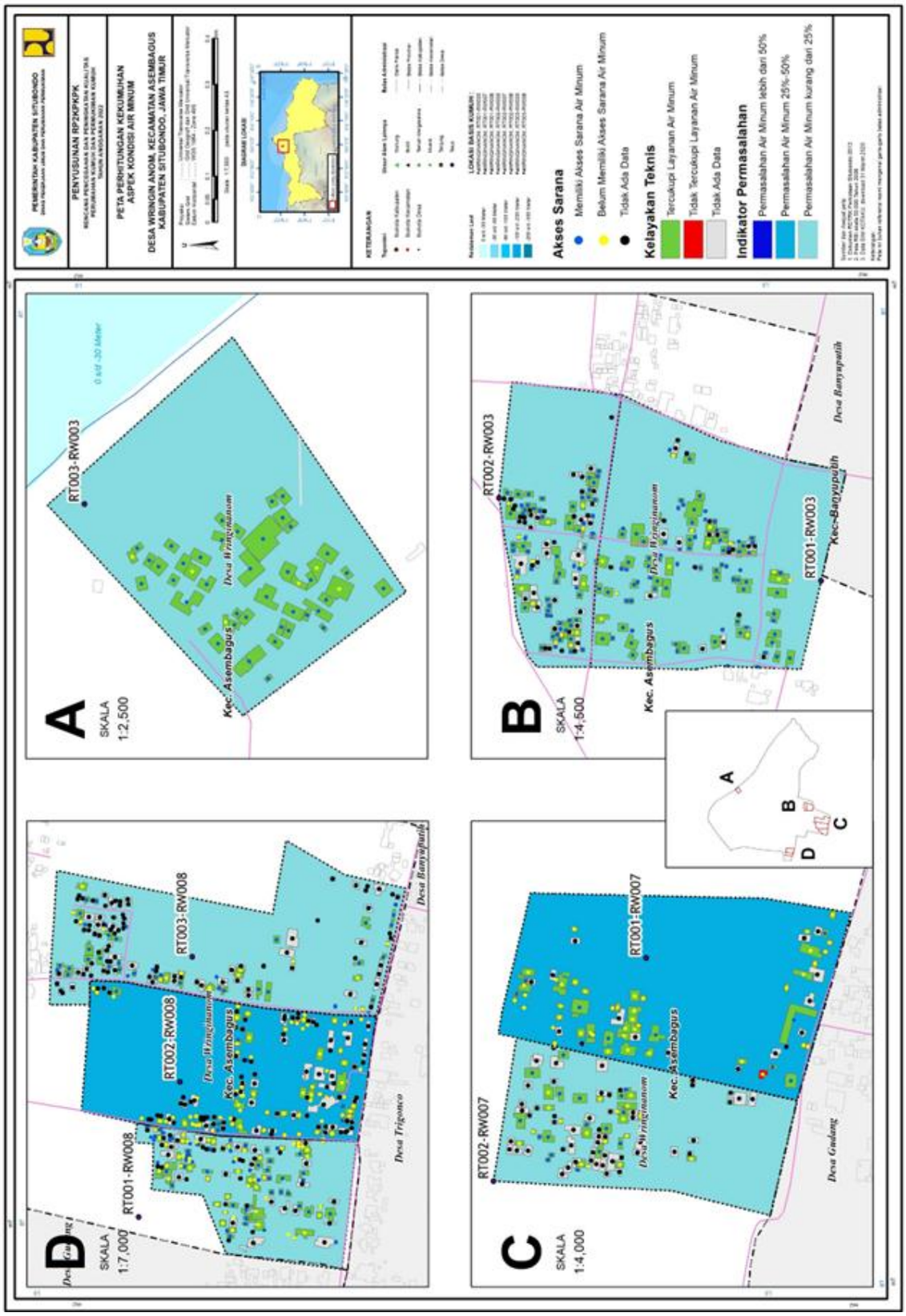

Peta 3. 65 Kondisi Permasalahan Air Minum Wringinanom
Sumber : Survey Lapang, 2022

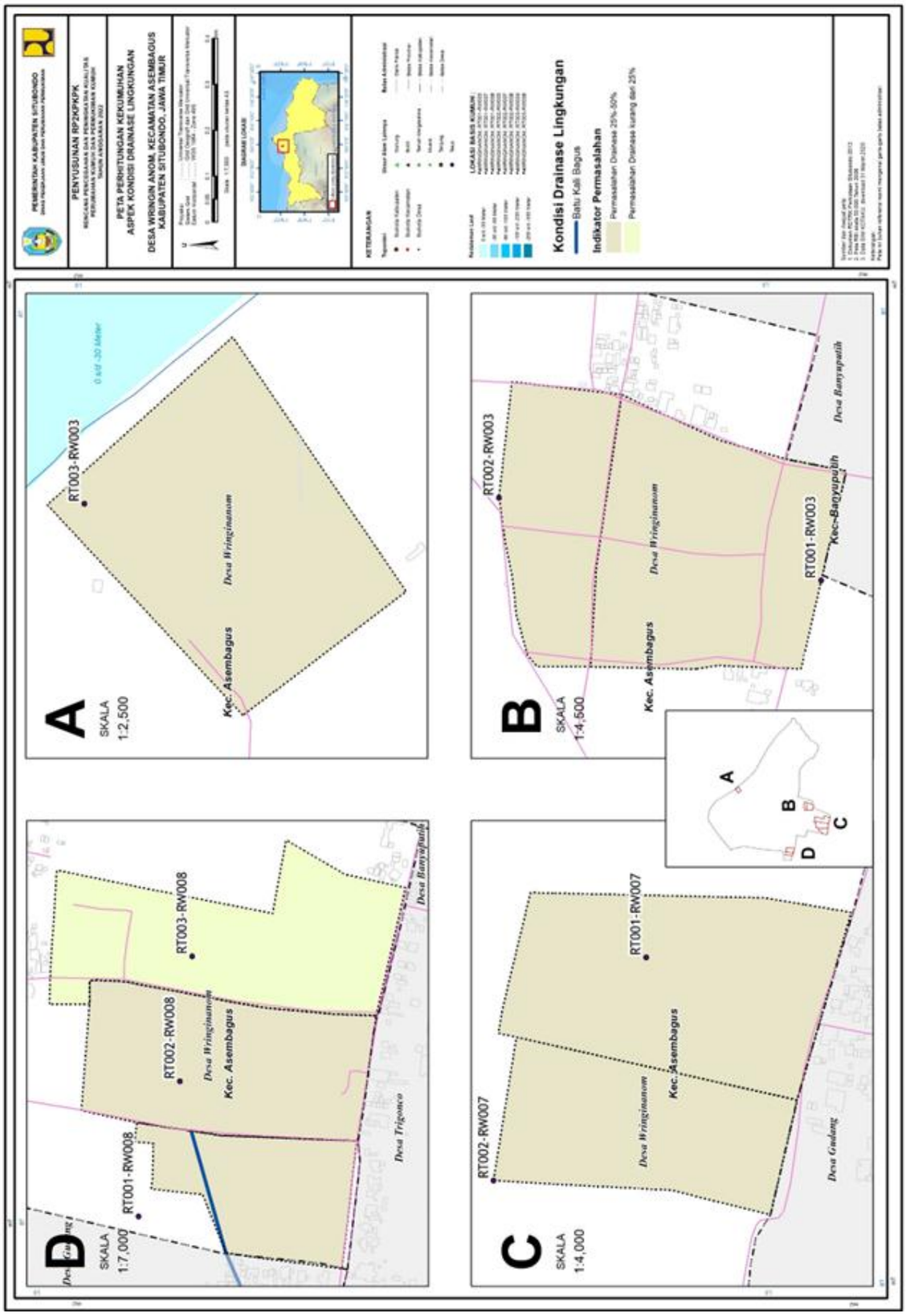

Peta 3. 66 Kondisi Permasalahan Drainase Lingkungan Wringinanom
Sumber : Survey Lapang, 2022

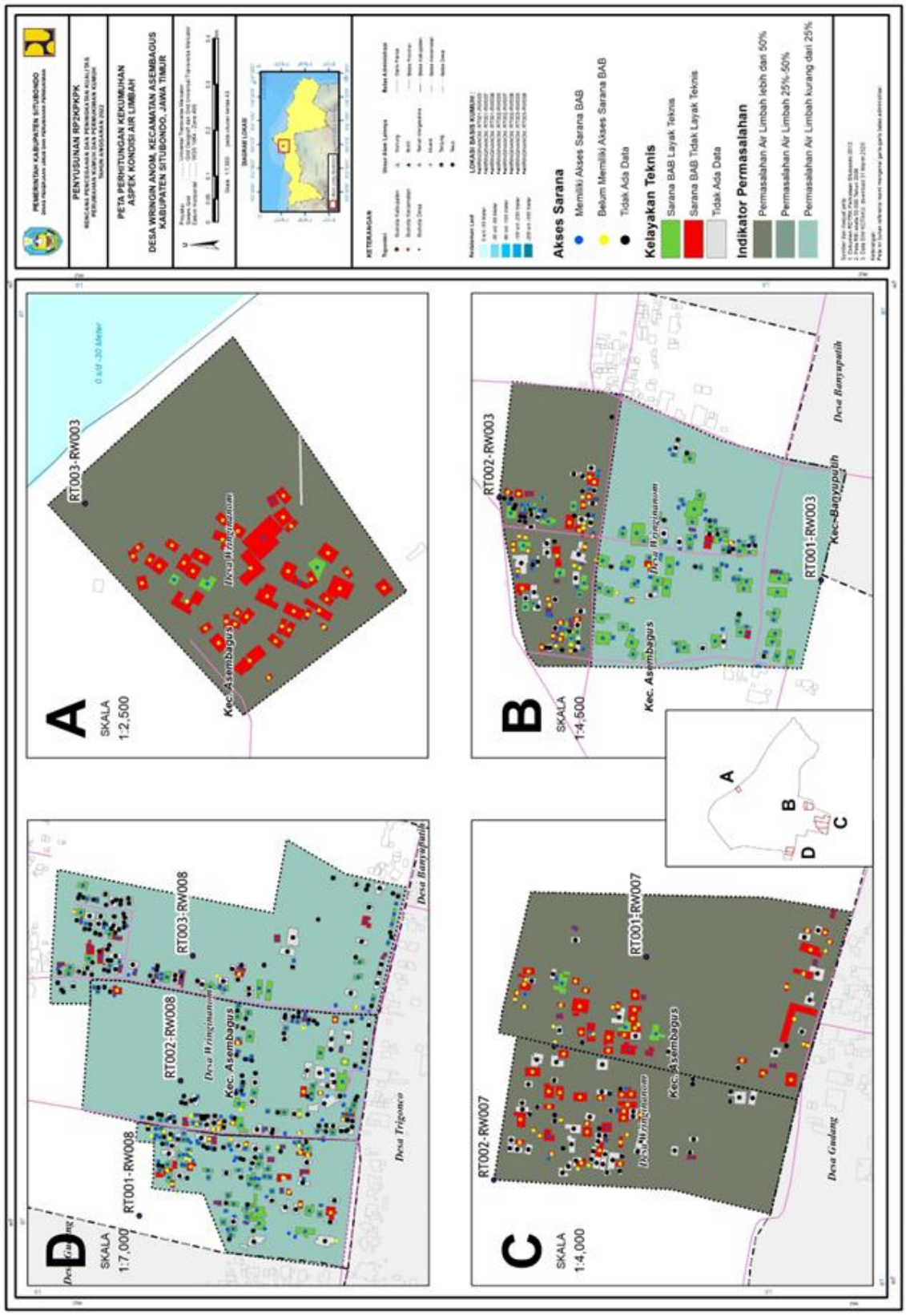

Peta 3. 67 Kondisi Permasalahan Air Limbah Wringinanom
Sumber : Survey Lapang, 2022

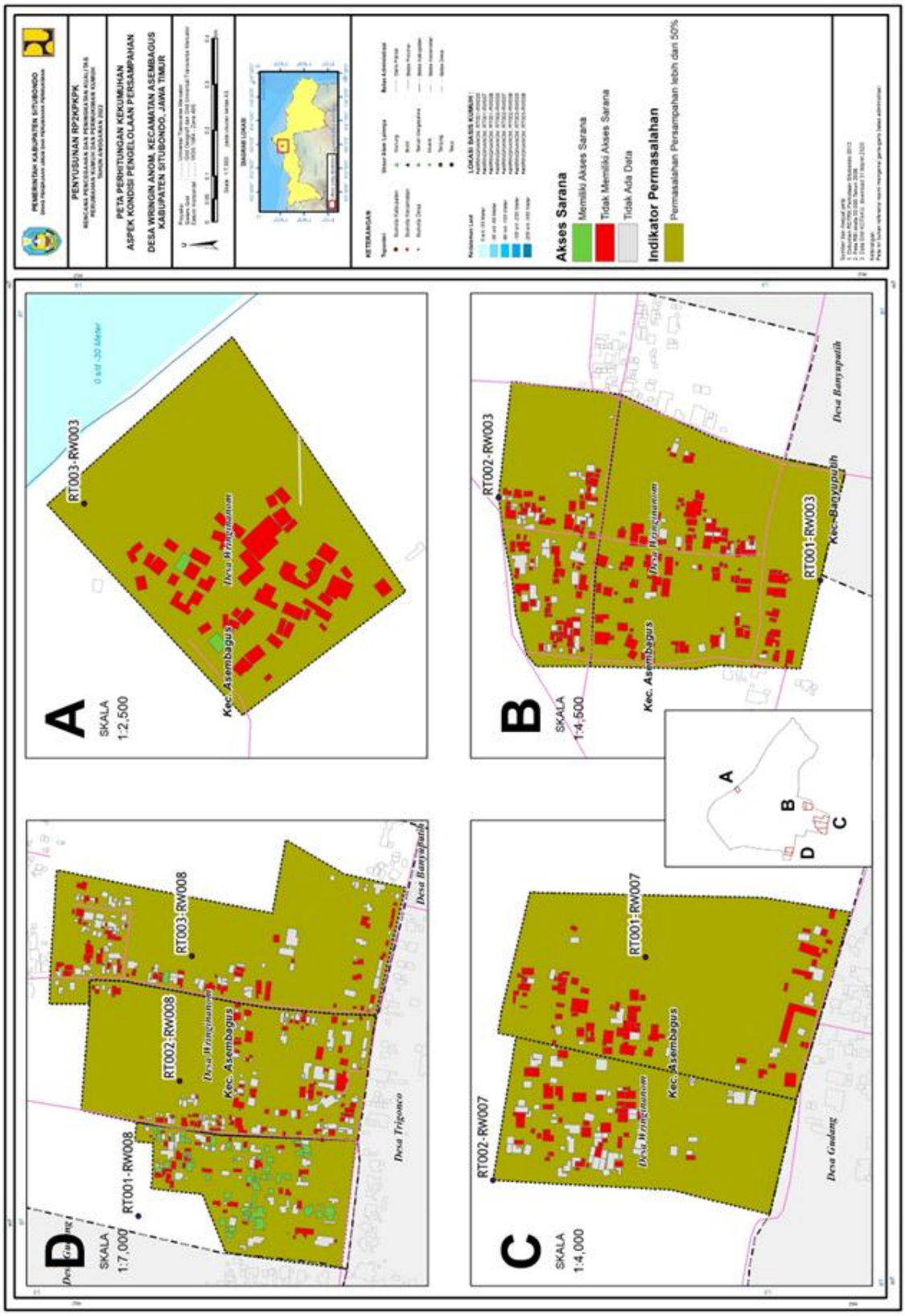

Peta 3. 68 Kondisi Permasalahan Persampahan Wringinanom

Sumber : Survey Lapang, 2022

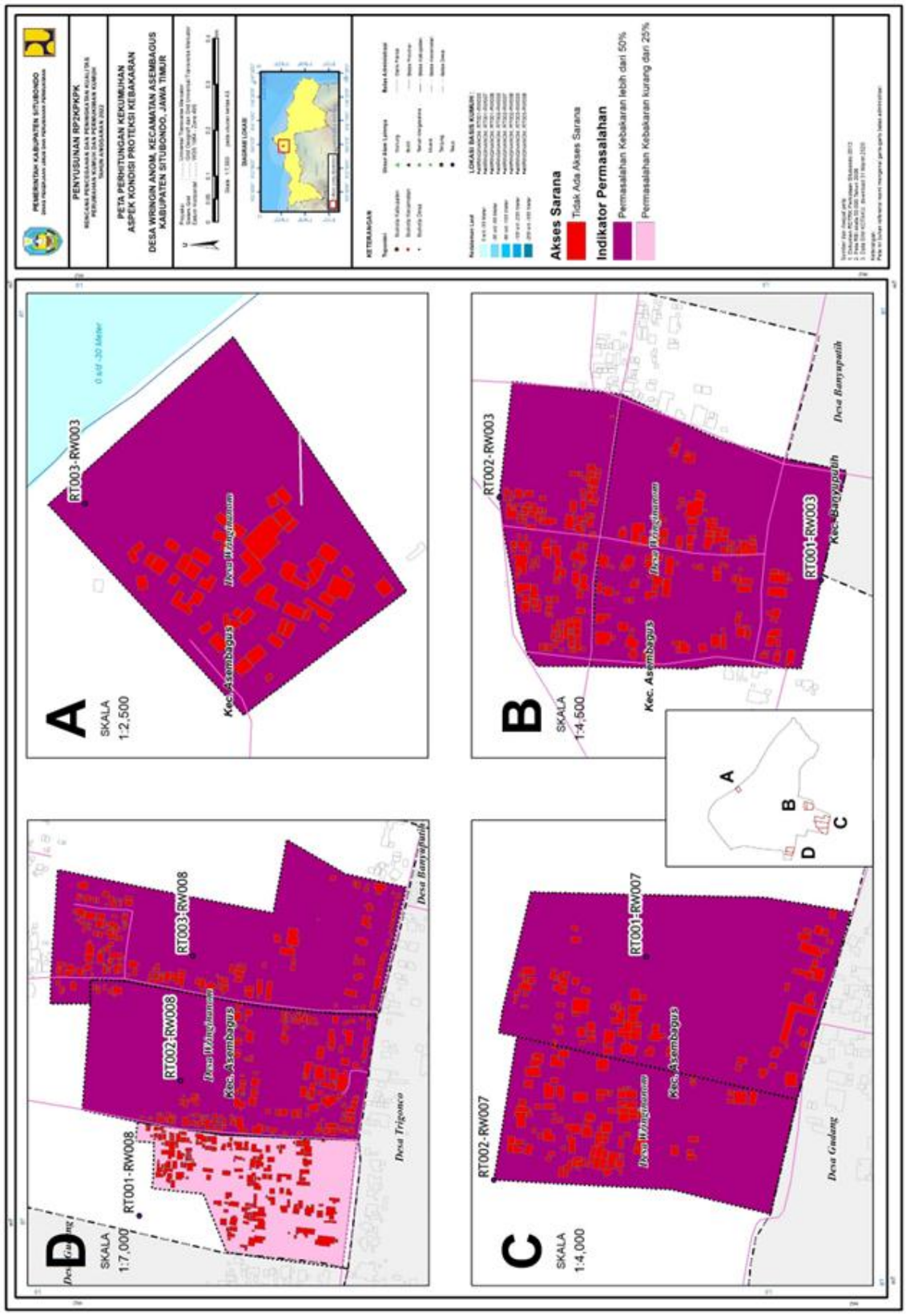

Peta 3. 69 Kondisi Permasalahan Proteksi Kebakaran Wringinanom
Sumber : Survey Lapang, 2022

BAB IV
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1 PENENTUAN KLASIFIKASI KEKUMUHAN DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

Terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam penentuan kawasan permukiman kumuh prioritas meliputi kondisi kekumuhan, pertimbangan lain, dan legalitas lahan. Berikut ini adalah penjelasan ketiga aspek tersebut.

4.1.1 Identifikasi Kondisi Kekumuhan

Identifikasi permasalahan kekumuhan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur ke-Cipta Karya-an pada suatu lokasi. Identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional. Atas dasar itu, maka identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan pada beberapa indikator

1) Kondisi bangunan hunian**,** dengan kriteria sebagai berikut:

- Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan bangunan, dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk tapak maupun bangunan;
- Lokasi memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, yaitu tingginya jumlah bangunan per hektar sesuai klasifikasi kota yang bersangkutan;
- Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis, khususnya persyaratan teknis untuk hunian sederhana (sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan).

2) Kondisi jalan lingkungan, dengan kriteria sebagai berikut:

- Cakupan pelayanan jalan lingkungan tidak memadai terhadap luas area, artinya sebagian besar lokasi belum terlayani jalan lingkungan; serta
- Sebagian besar kualitas jalan lingkungan yang ada kondisinya buruk, artinya kerataan permukaan jalan yang tidak memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, termasuk akses bagi mobil ambulan.

3) Kondisi drainase lingkungan, dengan kriteria sebagai berikut:

- Sebagian besar jaringan drainase pada lokasi yang ada tidak mampu mengatasi genangan minimal, yaitu genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun; dan

- Cakupan pelayanan jaringan drainse yang ada tidak memadai terhadap luas area, artinya sebagian besar lokasi belum terlayani jaringan drainase.

4) Kondisi penyediaan air bersih, dengan kriteria sebagai berikut:

- Sebagian besar luas area memilki sistem penyediaan air bersih yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik jaringan perpupaan yang terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit disrtibusi, unit pelayanan dan unit pengelolahan maupun jaringan bukan perpipaan yang terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampung air hujan, terminal air, mobil tanki air, instalasi air kemasan, atau bangunana perlindungan mata air; serta
- Cakupan pelayanan penyediaan air bersih yang ada tidak memadai terhadap popuasi, artinya sebagian besar populasi bekum terpenuhi akses air bersih yang aman sebesar 60 liter/orang/hari.

5) Kondisi pengelolaaan sanitasi, dengan kriteria sebagai berikut:

- Sebagain besar luas area memiliki sistem pengelolahan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik sistem pengelolahan air limbah setempat secara individual atau komunal, maupun sistem pengelolahan air limbah terpusat; serta
- Cakupan pelayanan pengelolahan air limbah yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sistem pengelolahan air limbah yang ada belum mampu menampung timbulan limbah sevesar 5-40 liter/orang/hari.

6) Kondisi pengelolahan sampah, dengan kriteria sebagai berikut:

- Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolahan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik dalam hal pewadahan, pemilahan, pengumpulan., pengangkutan, dan pengelolahan; serta
- Cakupan pelayanan pengelolahan persampahan yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sistem pengelolahan persampahan yang ada belum mampu menampung timbulan sampah sebesar 0,3 kg/orang/hari.

7) Kondisi proteksi kebakaran, dengan kriteria sebagai berikut:

- Sebagian besar luas area memiliki pasokan air untuk pemadam kebakaran yang tidak memadai, baik dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tanki air, kolam renang, reservoir air, mobil tanki air dan hidran); serta
- Sebagian besar luas area memiliki jalan lingkungan yang tidak memadai untuk mobil pemadam kebakaran, yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter dan bebas dari hambatan apapun.

Berikut ini adalah formula penentuan klasifikasi kekumuhan pada permukiman kumuh perkotaan sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh :

Tabel 4. 1 Formula Penentuan Klasifikasi Permukiman Kumuh Perkotaan

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	Kondisi Bangunan Hunian	a. Ketidakteraturan Bangunan	• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	• 76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
				• 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
				• 25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL, dan/atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: - Untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/ha - Untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/ha	• 76%-100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5
				• 51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3
				• 25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarna/sarana umum • Keselamatan bangunan gedung (BG) • Kenyamanan BG • Kemudahan BG	• 76%-100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				• 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				• 25%-50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1
2	Kondisi Jalan Lingku	a. Cakupan Pelay	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan	• 76%-100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan	5

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
	ngan	anan Jalan Lingkungan	lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis.	lingkungan	
				• 51%-75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3
				• 25%-50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman.	• 76%-100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5
				• 51%-75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3
				• 25%-50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1
3	Kondisi Penyediaan Air Bersih	a. Ketersediaan Akses Aman Air Bersih	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air bersih yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.	• 76%-100% populasi tidak dapat mengakses air bersih yang aman	5
				• 51%-75% populasi tidak dapat mengakses air bersih yang aman	3
				• 25%-50% populasi tidak dapat mengakses air bersih yang aman	1
		b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih	Kebutuhan air bersih masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.	• 76%-100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air bersih minimalnya	5
				• 51%-75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air bersih minimalnya	3
				• 25%-50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air bersih minimalnya	1
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 kali setahun.	• 76%-100% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2x setahun	5
				• 51%-75% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2x setahun	3
				• 25%-50% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2x setahun	1

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
		b. Ketidaktersediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan dan permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokasl.	• 76%-100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5
				• 51%-75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3
				• 25%-50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan.	• 76%-100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5
				• 51%-75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3
				• 25%-50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1
5	Kondisi Pengelolahan Sanitasi	a. Sistem Pengelolahan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolahan air limbah pada lokasi perumahan dan permukiman tidak memiliki system yang memadai, yaitu kakus atau kloset yang tidak terhubung dengan tangki septic baik secara individual/domestic, komunal maupun terpusat.	• 76%-100% area memiliki system air limbah yang tidak sesuai standard teknis	5
				• 51%-75% area memiliki system air limbah yang tidak sesuai standard teknis	3
				• 25%-50% area memiliki system air limbah yang tidak sesuai standard teknis	1
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolahan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasrana dan sarana pengelolahan air limbah pada lokasi perumahan dan permukiman dimana: • Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septic; • Tidak tersedianya system pengolahan limbah setempat atau terpusat.	• 76%-100% area memiliki sarpras air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5
				• 51%-75% area memiliki sarpras air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3
				• 25%-50% area memiliki sarpras air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
6	Kondisi Pengolahan Sampah	a. Prasarana dan Sarana Persampahan tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahana pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan tekni, yaitu: • Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestic atau rumah tangga; • Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R pada skala lingkungan; • Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan • Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	• 76%-100% area memiliki sarpras pengelolahan persampahan yang tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	5
				• 51%-75% area memiliki sarpras pengelolahan persampahan yang tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	3
				• 25%-50% area memiliki sarpras pengelolahan persampahan yang tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	1
		b. Sistem Pengelolahan Persampahan yang tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolahan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persayaratan sebagai berikut: • Pewadahan dan pemilahan domestic; • Pengumpulan lingkungan; • Pengangkutan lingkungan; • Pengolahan lingkungan.	• 76%-100% area memiliki sistem persampahan yang tidak sesuai standard	5
				• 51%-75% area memiliki sistem persampahan yang tidak sesuai standard	3
				• 25%-50% area memiliki sistem persampahan yang tidak sesuai standar persyaratan teknis	1
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prsarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: • Pasokan air; • Jalan lingkungan; • Sarana komunikasi; • Data system proteksi kebakaran lingkungan; dan • Bangunan pos kebakaran.	• 76%-100% area tidak memiliki prsarana proteksi kebakaran	5
				• 51%-75% area tidak memiliki prsarana proteksi kebakaran	3
				• 25%-50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebak	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada loksai, yaitu: • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); • Mobil pompa; • Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan • Perlatan pendukung	• 76%-100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
				• 51%-75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
				• 25%-50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
		aran	lainnya.		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat N0. 14/PRT/M/2018

4.1.2 Identifikasi Pertimbangan Lain (Non Fisik)

Identifikasi pertimbangan lain (non fisik) merupakan tahap identifikasi untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang teridentifikasi dengan sudut pandang lain yang mempengaruhi efektifitas/keberhasilan program penanganan. Identifikasi pertibangan lain dilakukan oleh pemerinyan daerah berdasarkan pertimbangan non fisik yang relevan. Identifikasi pertimbangan lain dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Nilai strategis lokasi, dengan kriteria sebagai berikut:
   Lokasi terletak pada fungi strategis kawasan/wilayah, konstelasi kawasan/wilayah, seperti fungi pemerintah, industri, perdagangan dan jasa, dan fungsi lainnya.
2. Kepadatan penduduk, dengan kriteria sebagai berikut:
   Lokasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, artinya jumlah penduduk per hektar pada lokasi relatif tinggi sesuai klasifikasi wilayah yang bersangkutan.
3. Potensi sosial ekonomi, dengan kriteria sebagai berikut:
   Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan, artinya pada lokasi terdapat potensi kegiatan ekonomi seperti budidaya industri, perdagangan maupun jasa, maupun potensi kegiatan sosial budaya kesenian, kerajinan dan lain sebagainya.
4. Dukungan masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut:
   Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi, artinya masyarakat mendukung program penanganan bahkan berperan aktif sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaan fisik.
5. Komitmen pemerintah daerah, dengan kriteria sebagai berikut:
   Pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi dalam penanganan lokasi, dimana komitmen pemerintah daerah terhadap lokasi dalam hal ini dinilai dari lokasi anggaran, progam regulasi, kebijakan maupun kelembagaan.

Berikut ini adalah formula penentuan pertimbangan lain pada permukiman kumuh perkotaan sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh :

Tabel 4. 2 Formula Penentuan Pertimbangan Lain pada Permukiman Kumuh

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	Pertimbangan Lain	a. Nilai Strategi Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: • Fungsi statregis kabupaten/Kota;atau • Bukan fungsi strategis kabupaten/kota.	• Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5
				• Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1
		b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: • Rendah yaitu kepadatan penduduk dibawah 150 jiwa/ha • Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha • Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha • Sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha	Untuk metropolitan dan kota besar: • Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >400 jiwa/ha Untuk kota sedang dan kota kecil: • Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >200 jiwa/ha	5
				• Kepadatan penduduk pda lokasi sebesar 151-200 jiwa/ha	3
				• Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <151 jiwa/ha	1
		c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: • Potensi soial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; • Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau terpelihara	5
				• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau diperlihara	1

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
			setempat; • Potensi budaya yaitu adanya kegiatan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.		

Berdasarkan formula penentuan pertimbangan lain diatas, maka berikut adalah penilaian klasifikasi pertimbangan lain permukiman kumuh Kabupaten Situbondo di Kabupaten Situbondo:

4.1.3 Identifikasi Legalitas Lahan

Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan legalitas lahan pada obyek kajian setiap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang difokuskan pada suatu lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang dan persyaratan administrasi bangunan. Identifikasi legalitas lahan meliputi dua aspek yaitu aspek kejelasan status penguasaan lahan dan aspek kesesuaian dengan rencana tata ruang. Identifikasi legalitas lahan dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1) Aspek status lahan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut:
   - Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status lahan, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal).
   - Status kepemilikan sendiri disertai dengan bukti dokumensertifikat ha katas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah. Sedangkan kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang ha katas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang ha katas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
   - Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status tanah, baik merupakan milik orang lain, milik Negara dan milik masyarakat adat tanpa izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah maupun tanah sengketa (status tanah illegal).
2) Aspek kesesuaian rencana tata ruang (RTR), dengan beberapa kriteria sebagai berikut:
   - Keseluruhan lokasi berada pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR (sesui);
   - Sebagian atau keseluruhan lokasi berada tidak pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR (tidak sesuai).

3) Aspek persyaratan administrasi bangunan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut:
   - Keseluruhan bangunan pada lokasi telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)
   - Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
   - Berikut ini adalah formula penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan

Berikut ini adalah formula penentuan legalitas lahan pada permukiman kumuh perkotaan sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:

Tabel 4. 3 Formula Penentuan Legalitas Lahan pada Permukiman Kumuh

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	Legalitas Lahan	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan status penguasan lahan berupa: • Kepemilikan sndiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau • Kepemilikan pihak lain (termasuk milik atat/ulayat) dengan bukti ijin pemanfaatan tanah dari pemegang ha katas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang ha katas tanah atau pemilik tanah dengan pihak lain.	• Keseluruhan loksai memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)
				• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)
		b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti izin mendirikan bangunan atau surat keterangan rencana kabupaten/kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan peumahan atau permukiman sesuai dengan RTR	(+)
				• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada	(-)

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
				bukan pada peruntukan perumahan atau permukiman sesuai RTR	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018

Berdasarkan formula penentuan pertimbangan lain dan legalitas lahan diatas, maka berikut adalah penilaian pertimbangan lain dan legalitas lahan permukiman kumuh Kabupaten Situbondo:

Tabel 4. 4 Penilaian Pertimbangan Lain & Legalitas Lahan Kawasan permukiman kumuh Kabupaten Situbondo

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	LOKASI PERMUKIMAN KUMUH							
				KILENSARI		ALASMALANG		OLEAN		TANJUNG PECINAN	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
A. KLASIFIKASI KEKUMUHAN											
1	Kondisi Bangunan Hunian	Ketidakteraturan bangunan	Bangunan/rumah yang tidak memiliki keteraturan	77%	5	35%	1	60%	3	77%	5
		Tingkat kepadatan bangunan	Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan (luas kawasan dengan kepadatan ≥ 250 unit/ha untuk kota besar, sedangkan untk kota kecil dengan kepadatan ≥ 200 unit/ha)	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis	Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan (dampak lingkungan, kecukupan luas, keamanan, kenyamanan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan)	99%	5	40%	1	80%	5	96%	5
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan	0%	0	22%	0	18%	0	0%	0

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	LOKASI PERMUKIMAN KUMUH							
				KILENSARI		ALASMALANG		OLEAN		TANJUNG PECINAN	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
			persyaratan teknis								
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang memiliki kualitas permukaan jalan buruk	62%	3	43%	1	45%	1	64%	3
3	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Ketidaktersediaan akses aman air bersih	Jumlah penduduk yang tidak dapat mengakses air bersih yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tidak berwarna)	21%	0	50%	1	19%	0	17%	0
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih	Jumlah penduduk yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih minimalnya (60 ltr/hr)	87%	5	2%	0	0%	0	68%	3
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	Luas area yang terkena genangan (>30 cm , selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun)	0%	0	9%	0	7%	0	0%	0
		Ketidaktersediaan drainase	Jalan lingkungan yang tidak memiliki saluran drainase lingkungan	2%	0	31%	1	24%	0	75%	3
		Kualitas konstruksi drainase	Konstruksi drainase lingkungan buruk	55%	3	36%	1	46%	1	16%	0

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	LOKASI PERMUKIMAN KUMUH							
				KILENSARI		ALASMALANG		OLEAN		TANJUNG PECINAN	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
5	Kondisi Pengelolaan Sanitasi	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Jumlah masyarakat yang tidak memiliki Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis	89%	5	15%	0	75%	3	96%	5
		Prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah jamban yang tidak terhubung dengan septic-tank	100%	5	61%	3	90%	5	96%	5
6	Kondisi Pengolahan Sampah	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki tempat sampah dengan sistem pemilahan sampah	100%	5	77%	5	85%	5	100%	5
		Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Jumlah rumah tangga yang tidak terlayani sistem pengangkutan sampah ke TPS/TPA	100%	5	98%	5	100%	5	100%	5

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	LOKASI PERMUKIMAN KUMUH							
				KILENSARI		ALASMALANG		OLEAN		TANJUNG PECINAN	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketersediaan prasarana proteksi kebakaran	Luas area yang tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, bangunan pos kebakaran, data sisem proteksi kebakaran)	100%	5	72%	3	100%	5	0%	0
		Ketersediaan sarana proteksi kebakaran	Luas area yang tidak memiliki sarana proteksi kebakaran (alat pemadam api ringan, mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya)	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5
JUMLAH NILAI				**51**		**27**		**38**		**44**	
KLASIFIKASI KEKUMUHAN				**SEDANG**		**RINGAN**		**SEDANG**		**SEDANG**	
B. PERTIMBANGAN LAIN											
1	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi	Merupakan kawasan strategis Kabupaten	5	Merupakan kawasan strategis Kabupaten	5	Merupakan kawasan strategis Kabupaten	5	Merupakan kawasan strategis Kabupaten	5

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	LOKASI PERMUKIMAN KUMUH							
				KILENSARI		ALASMALANG		OLEAN		TANJUNG PECINAN	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
			strategis kabupaten/kota								
2		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; 3. Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha	3	Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha	1	Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha	1	Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha	1
3		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat	Lokasi memiliki potensi sosial,	5	Lokasi kurang memiliki potensi	1	Lokasi kurang memiliki potensi	1	Lokasi memiliki potensi sosial,	5

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	LOKASI PERMUKIMAN KUMUH							
				KILENSARI		ALASMALANG		OLEAN		TANJUNG PECINAN	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
				ekonomi dan budaya untuk dikembangkan		sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan		sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan		ekonomi dan budaya untuk dikembangkan	
JUMLAH NILAI				**13**		**7**		**7**		**11**	
KLASIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN				**TINGGI**		**SEDANG**		**SEDANG**		**TINGGI**	
C. LEGALITAS LAHAN											
1	Legalitas Lahan	Kejelasan Status Penguasaan tanah	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain	Status lahan jelas	(+)	Status lahan jelas	(+)	Status lahan jelas	(+)	Status lahan jelas	(+)
2		Kesesuaian RTR	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	Peruntukan kawasan permukiman perkotaan	(+)	Peruntukan kawasan permukiman perkotaan	(+)	Peruntukan kawasan permukiman perkotaan	(+)	Peruntukan kawasan permukiman perkotaan	(+)
JUMLAH NILAI				**(+)**		**(+)**		**(+)**		**(+)**	
KLASIFIKASI LEGALITAS LAHAN				**LEGAL**		**LEGAL**		**LEGAL**		**LEGAL**	

Lanjutan.....

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SEMIRING		PERANTE		WRINGINANOM	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
A. KLASIFIKASI KEKUMUHAN									
1	Kondisi Bangunan Hunian	Ketidakteraturan bangunan	Bangunan/rumah yang tidak memiliki keteraturan	89%	5	65%	3	52%	3
		Tingkat kepadatan bangunan	Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan (luas kawasan dengan kepadatan ≥ 250 unit/ha untuk kota besar, sedangkan untk kota kecil dengan kepadatan ≥ 200 unit/ha)	0%	0	0%	0	0%	0
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis	Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan (dampak lingkungan, kecukupan luas, keamanan, kenyamanan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan)	82%	5	84%	5	68%	3
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	23%	0	0%	0	0%	0
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang memiliki kualitas permukaan jalan buruk	60%	3	64%	3	66%	3

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SEMIRING		PERANTE		WRINGINANOM	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
3	Kondisi Penyediaan Air Bersih	Ketidaktersediaan akses aman air bersih	Jumlah penduduk yang tidak dapat mengakses air bersih yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tidak berwarna)	62%	3	57%	3	41%	1
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih	Jumlah penduduk yang tidak terpenuhi kebutuhan air bersih minimalnya (60 ltr/hr)	0%	0	0%	0	0%	0
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	Luas area yang terkena genangan (>30 cm , selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun)	0%	0	0%	0	0%	0
		Ketidaktersediaan drainase	Jalan lingkungan yang tidak memiliki saluran drainase lingkungan	29%	1	76%	5	82%	5
		Kualitas konstruksi drainase	Konstruksi drainase lingkungan buruk	37%	1	16%	0	11%	0
5	Kondisi Pengelolaan Sanitasi	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Jumlah masyarakat yang tidak memiliki Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis	72%	3	35%	1	36%	1
		Prasarana dan sarana	Jumlah jamban yang tidak terhubung dengan	98%	5	36%	1	49%	1

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SEMIRING		PERANTE		WRINGINANOM	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
		pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	septic-tank						
6	Kondisi Pengolahan Sampah	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki tempat sampah dengan sistem pemilahan sampah	100%	5	100%	5	100%	5
		Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Jumlah rumah tangga yang tidak terlayani sistem pengangkutan sampah ke TPS/TPA	99%	5	92%	5	88%	5
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketersediaan prasarana proteksi kebakaran	Luas area yang tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran (pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi, bangunan pos kebakaran, data sisem proteksi kebakaran)	47%	1	0%	0	0%	0

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SEMIRING		PERANTE		WRINGINANOM	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
		Ketersediaan sarana proteksi kebakaran	Luas area yang tidak memiliki sarana proteksi kebakaran (alat pemadam api ringan, mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya)	100%	5	21%	0	82%	5
JUMLAH NILAI				**42**		**31**		**32**	
KLASIFIKASI KEKUMUHAN				**SEDANG**		**RINGAN**		**RINGAN**	
B. PERTIMBANGAN LAIN									
1	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Merupakan kawasan strategis Kabupaten	5	Bukan fungsi strategis kabupaten/kota	1	Bukan fungsi strategis kabupaten/kota	1
2		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;	Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha	1	Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha	1	Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha	1

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SEMIRING		PERANTE		WRINGINANOM	
				KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI	KONDISI	NILAI
			2. Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha;						
			3. Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/ha;						
			4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;						
3		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan	5	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan	5	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan	5
JUMLAH NILAI				**11**		**7**		**7**	
KLASIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN				**TINGGI**		**SEDANG**		**SEDANG**	
C. LEGALITAS LAHAN									
1	Legalitas Lahan	Kejelasan Status Penguasaan tanah	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain	Status lahan jelas	(+)	Status lahan jelas	(+)	Status lahan jelas	(+)
2		Kesesuaian RTR	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukima	Peruntukan kawasan permukiman perkotaan	(+)	Peruntukan kawasan permukiman perkotaan	(+)	Peruntukan kawasan permukiman perkotaan	(+)

NO	ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SEMIRING		PERANTE		WRINGINANOM	
				KON DISI	NILAI	KON DISI	NILAI	KON DISI	NILAI
			n sesuai RTR						
JUMLAH NILAI				(+)		(+)		(+)	
KLASIFIKASI LEGALITAS LAHAN				LEGAL		LEGAL		LEGAL	

Sumber : Hasil Analisa, 2022

4.1.4 Penentuan Klasifikasi Dan Skala Prioritas Penanganan di Kabupaten Situbondo

Berbagai faktor yang menyebabkan penambahan kumuh baru, selain dari faktor manusia maupun fisik lingkungan, terdapat faktor utama yaitu perubahan pada penilaian kumuh yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri PUPR no 2 tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri PUPR no 14 Tahun 2018 tentang klasifikasi kumuh yang menyebabkan perubahan kategori kumuh dari skor 19 menjadi 16 (kategori kumuh ringan). Perubahan penilaian tersebut ditunjukkan sebagai berikut :

NILAI	KETERANGAN	A1
Kondisi Kekumuhan		
71 – 95	Kumuh Berat	X
45 – 70	Kumuh Sedang	
19 – 44	Kumuh Ringan	
Legalitas tanah		
(+)	Status Tanah Legal	X
(-)	Status Tanah Tidak Legal	
Pertimbangan Lain		
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang	
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah	
	SKALA PRIORITAS PENANGANAN =	1

NILAI	KETERANGAN	A1
Kondisi Kekumuhan		
60 – 80	Kumuh Berat	X
38 – 59	Kumuh Sedang	
16 – 37	Kumuh Ringan	
Legalitas Lahan		
(+)	Status Lahan Legal	X
(-)	Status Lahan Tidak Legal	
Pertimbangan Lain		
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang	
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah	
	SKALA PRIORITAS PENANGANAN =	1

Gambar 4. 1 Perubahan Klasifikasi Kumuh Berdarkan Peraturan Menteri PUPR

Sumber : RP2KPKPK Kabupaten Situbondo, 2020

Berdasarkan perubahan perubahan pada penilaian kumuh yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri PUPR no 2 tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri PUPR no 14 Tahun 2018 diatas, maka Klasifikasi Kawasan Permukiman Kumuh yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kabupaten Situbondo adalah :

Tabel 4. 5 Klasifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Nilai	Keterangan	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Tingkat Kekumuhan (Total Nilai A)																			
60 - 80	Kumuh Berat	x	x	x	x	x	X												
38 - 59	Kumuh Sedang							x	X	x	x	x	x						
16 - 37	Kumuh Ringan													x	x	x	x	x	x
Pertimbangan Lain (Total Nilai B)																			
11 - 15	Pertimbangan Lain Tinggi	x	x					x	X					x	x				
6 - 10	Pertimbangan Lain Sedang			x	x					x	x					x	x		
1 - 5	Pertimbangan Lain Rendah					x	X					x	x					x	x
Legalitas Lahan (Total Nilai C)																			
(+)	Status Lahan Legal	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		x		x		X		X		x		x		x		x		x
Skala Prioritas Penanganan		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018

Berdasarkan formula penentuan sebelumnya, maka terdapat 18 kemungkinan klasifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yaitu:

1) A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi dan status lahan legal;
2) A2 merupakan lokasi kumuh berat, pertimbangan lain tinggi dan status lahan tidak legal;
3) A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang dan status legal;
4) A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang dan status tidak legal;
5) A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah dan status legal;
6) A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah dan status tidak legal;
7) B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi dan status legal;
8) B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi dan status tidak legal;
9) B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang dan status legal;
10) B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang dan status tidak legal;

11) B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah dan status legal;
12) B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah dan status tidak legal;
13) C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi dan status legal;
14) C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi dan status tidak legal;
15) C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang dan status legal;
16) C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang dan status tidak legal;
17) C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah dan status legal;
18) C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah dan status tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan. Adapun prioritas penanganannya yaitu:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6

Berdasarkan formula penentuan sebelumnya, maka berikut ini adalah Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan di Kabupaten Situbondo :

Tabel 4. 6 Rekap Penentuan Skala Prioritas Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Situbondo

Desa/ Kel	Kawasan	Nilai		Keterangan	Klasifikasi	Skala Prioritas Penanganan	Pola Penanganan
Kilensari	• Pesisir Selatan • Pesisir Tengah • Pesisir Utara	Kondisi Kekumuhan	51	Kumuh Sedang	B1	2	Pemugaran
		Legalitas Tanah	Legal	(+)			
		Pertimbangan Lain	13	Tinggi			
Alasmalang	• Karangpancor • Karangrejo	Kondisi Kekumuhan	27	Kumuh Ringan	C3	6	Pemugaran
		Legalitas Tanah	Legal	(+)			
		Pertimbangan Lain	7	Sedang			
Olean	• Krajan • Kandang Selatan	Kondisi Kekumuhan	38	Kumuh Sedang	B3	5	Pemugaran
		Legalitas Tanah	Legal	(+)			
		Pertimbangan Lain	7	Sedang			
Tanjung Pecinan	• Kaliasin • Karanganyar	Kondisi Kekumuhan	44	Kumuh Sedang	B1	2	Pemugaran
		Legalitas Tanah	Legal	(+)			
		Pertimbangan Lain	11	Tinggi			
Semiring	• Semiring Selatan • Semiring Barat • Semirin	Kondisi Kekumuhan	42	Kumuh Sedang	B1	2	Pemugaran
		Legalitas Tanah	Legal	(+)			
		Pertimbangan	11	Tinggi			

Desa/ Kel	Kawasan	Nilai		Keterangan	Klasifikasi	Skala Prioritas Penanganan	Pola Penanganan
	g Utara	Lain					
Perante	• Dusun Tengah • Dusun Selatan	Kondisi Kekumuhan	31	Kumuh Ringan	C1	3	Pemugaran
		Legalitas Tanah	Legal	(+)			
		Pertimbangan Lain	7	Sedang			
Wringinanom	• Timur Sawah • Bataan • Sok Parse	Kondisi Kekumuhan	32	Kumuh Ringan	C1	3	Pemugaran
		Legalitas Tanah	Legal	(+)			
		Pertimbangan Lain	7	Sedang			
		Legalitas Tanah	Legal	Status Tanah Legal			
		Pertimbangan Lain	3	Rendah			

Sumber : Hasil Analisa, 2021

Berdasarkan pada hasil penilaian diatas maka kawasan permukiman kumuh Kabupaten Situbondo dibagi menjadi beberapa priroritas penanganan permukiman kumuh antara lain :

1. Klasifikasi B2 *(lokasi Kumuh Sedang, dengan Pertimbangan Lain Tinggi dan Status Ilegal)*

   Terdiri dari Kawasan Permukiman Kumuh Kilensari, Tanjungpecinan, Semiring
2. Klasifikasi B3 *(lokasi Kumuh Rendah, dengan Pertimbangan Lain Sedang dan Status Legal)*

   Terdiri dari Kawasan Permukiman Kumuh Olean
3. Klasifikasi C3 *(lokasi Kumuh Rendah, dengan Pertimbangan Lain Rendah dan Status Legal)*

   Terdiri dari Kawasan Permukiman Kumuh Alasmalang, Perante, Wringinanom

4.1.5 Klastering Kawasan Prioritas Penanganan

Pengelompokan kawasan menjadi cluster dimaksudkan untuk mempermudah penanganan kawasan didasarkan beberapa pertimbangan seperti berikut ini:

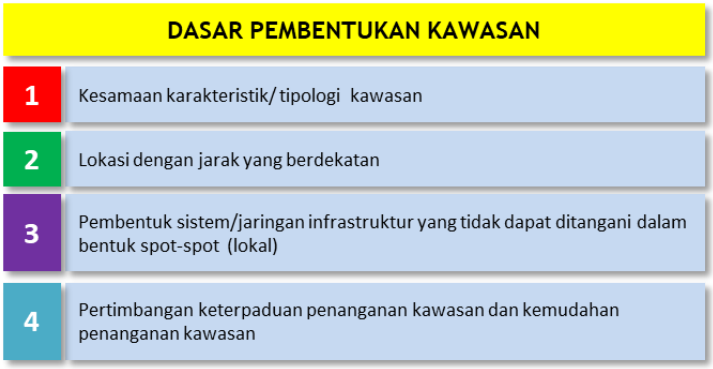

Gambar 4. 2 Dasar Pembentukan Kawasan (Clustering)
Sumber : Hasil Analisa, 2022

Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka dilakukan identifikasi terhadap masing – masing kawasan dan didapatkan hasil clusting kawasan seperti di bawah ini :

1) Cluster Prioritas 1 (Cluster Kumuh Pesisir Kilensari)
   Terdiri dari Desa Kilensari (Pesisir Selatan, Pesisir Tengah dan Pesisir Utaradengan total luas kumuh 17,65 Ha. Dengan kriteria Kumuh Sedang, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain tinggi sehingga termasuk di dalam kategori B1 dengan Skala Prioritas ke 2.
2) Cluster Prioritas 2 (Cluster Kumuh Pesisir Mangaran)
   Terdiri dari Desa Semiring Kec.Mangaran dan Desa Tanjungpecinan Kec.Mangaran dengan total luas kumuh 50,74 Ha. Dengan kriteria Kumuh Sedang, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain tinggi sehingga termasuk di dalam kategori B1 dengan Skala Prioritas ke 2.
3) Cluster Prioritas 3 (Cluster Kumuh Situbondo)
   Terdiri dari Desa Alasmalang Kec.Panarukan dan Desa Olean Kec.Situbondo dengan total luas kumuh 35,33 Ha. Dengan kriteria kumuh ringan, status lahan legal dan pertimbangan lain sedang sehingga termasuk di dalam kategori C3 dengan Skala Prioritas ke 6.
4) Cluster Prioritas 4 (Cluster Kumuh Asembagus)
   Terdiri dari Desa Perante Kec. Asembagus dan Desa Wringinanom Kec. Asembagus dengan total luas kumuh 76,46 Ha. Dengan kriteria kumuh

ringan, status lahan legal dan pertimbangan lain sedang sehingga termasuk di dalam kategori C3 dengan Skala Prioritas ke 6

Tabel 4. 7 Identifikasi Klastering Kawasan

No	Cluster	Lokasi	Kesamaan Tipologi	Kedekatan Lokasi	Sistem Jaringan	Kemudahan Penanganan	Arah Pengembangan Kota
1	Cluster Kumuh Pesisir Kilensari	Desa Kilensari Kec. Panarukan	√	√	√	√	√
2	Cluster Kumuh Situbondo	Desa Alasmalang Kec. Panarukan Desa Olean Kec. Situbondo	√	√	-	√	√
3	Cluster Kumuh Pesisir Mangaran	Desa Semiring Kec. Mangaran Desa Tanjungpecinan Kec. Mangaran	√	√	√	√	√
4	Cluster Kumuh Asembagus	Desa Perante Kec. Asembagus Desa Wringinanom Kec. Asembagus	√	√	-	√	√

Sumber : Hasil Analisa, 2022

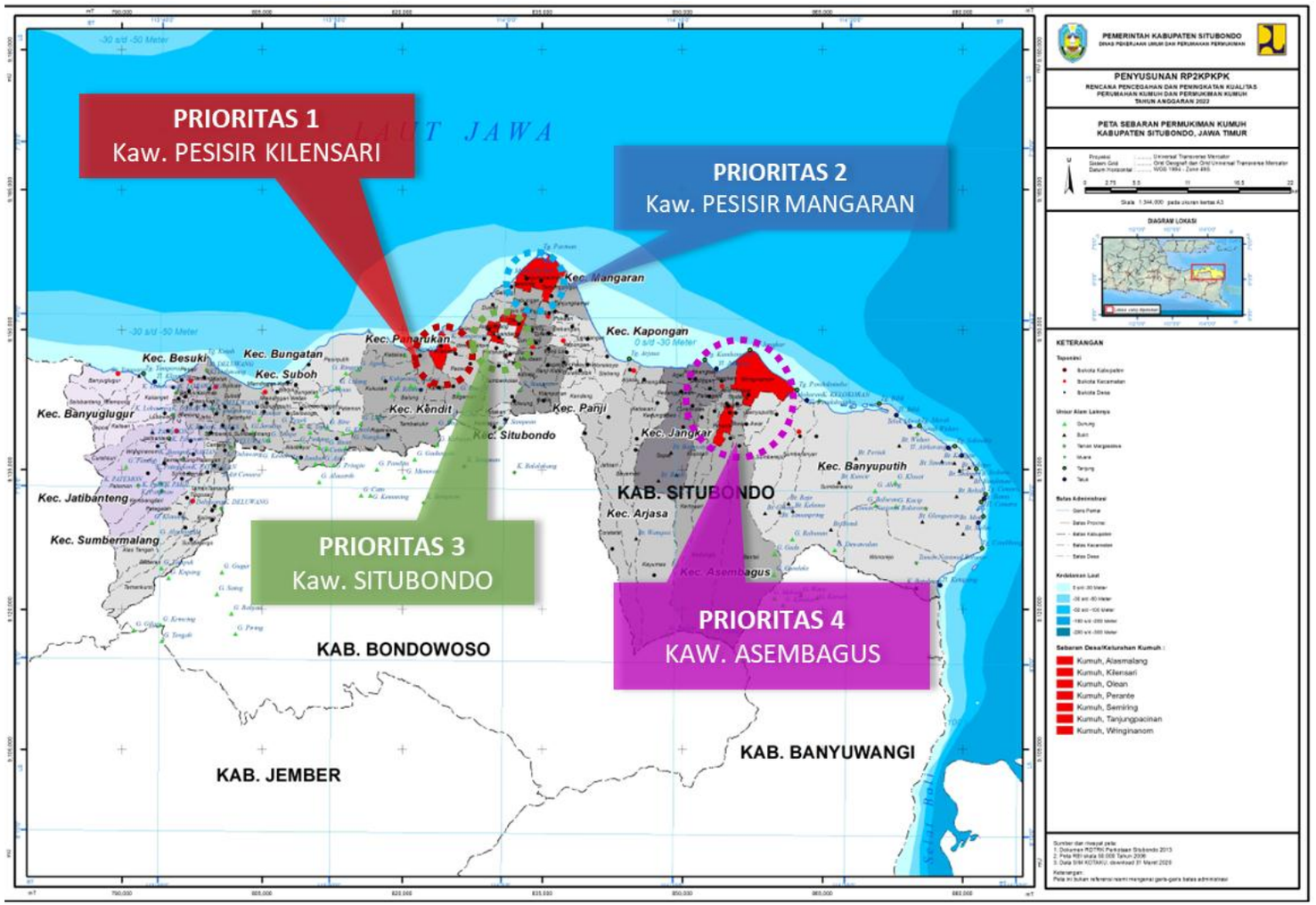

Peta 4. 1 Sebaran Segmentasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Situbondo

Sumber : Hasil Analisa, 2022

4.2 PERUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN

Kebutuhan penanganan permukiman kumuh perkotaan, yang didasarkan pada isu strategis kawasan permukiman kumuh dan karakteristik permasalahan permukiman kumuh perkotaan secara eksisting; dirumuskan berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis serta kebijakan penanganan permukiman kumuh hasil overview yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya.

Kebutuhan penanganan dirumuskan berdasarkan kajian kebijakan, profil permukiman kumuh, dan isu permasalahan pada bab sebelumnya. Dengan perumusan kebutuhan penanganan ini diharapkan dapat memberikan gambaran konsep dan strategi penanganan baik pencegahan maupun peningkatan kualitas untuk kawasan permukiman kumuh perkotaan.

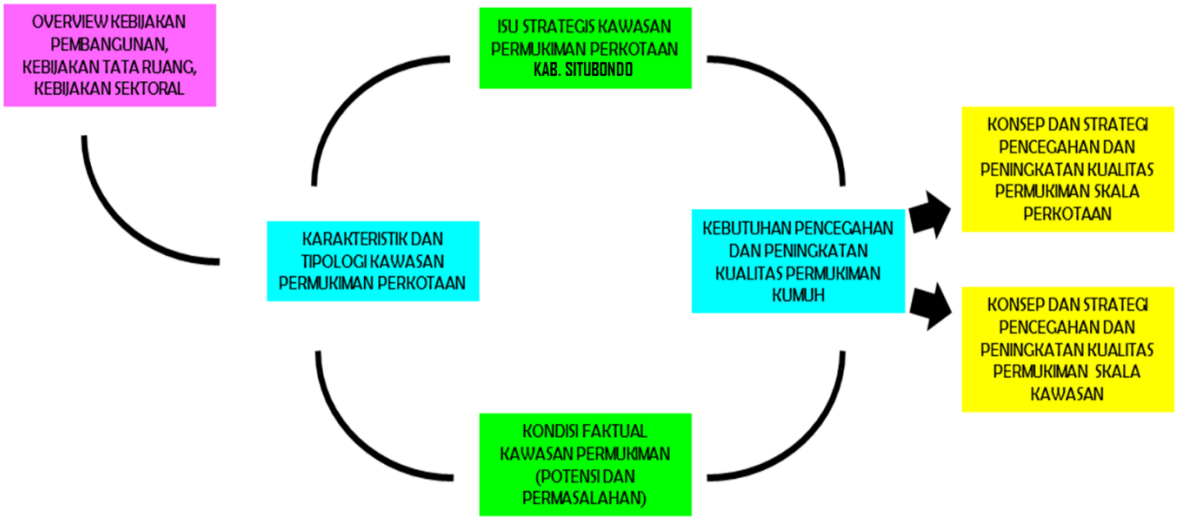

Gambar 4. 3 Landasan Perumusan Kebutuhan serta Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peingkatan Kualitas

Sumber: Rencana, 2022

Berikut ini adalah kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan Kabupaten Situbondo :

Tabel 4. 8 Kebutuhan Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Situbondo

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
SKALA KOTA				
1	Skala Kota Kabupaten Situbondo	• Kebutuhan bangunan hunian yang layak dan sesuai persyaratan teknis (backlog kepemilikan rumah) • Kebutuhan penataan bangunan hunian semakin meningkat • Munculnya bangunan hunian di lahan yang tidak sesuai peruntukannya • Belum optimalnya penerapan perijinan pembangunan hunian	• Pengawasan pembangunan bangunan hunian sesuai dengan persyaratan teknis • Pengendalian munculnya bangunan hunian yang tidak sesuai guna lahannya secara berkala • Pembinaan masyarakat dalam kegiatan penunjang lingkungan permukiman seperti perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi bangunan	• Pemenuhan kebutuhan perumahan swadaya (backlog) • Peningkatan kebutuhan dan penataan bangunan hunian yang memenuhi standar teknis dan minimun (pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan penunjangnya)
		• Kurang optimalnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman (air bersih, persampahan, sanitasi, drainase, jalan, proteksi kebakaran dan lain sebagainya)	• engawasan pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai dengan persyaratan teknis • Pembinaan masyarakat dalam kegiatan penunjang lingkungan permukiman seperti pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	• Peningkatan infrastruktur dasar permukiman yang memenuhi standar teknis dan minimun serta berbasis masyarakat
		• Belum jelasnya klasifikasi drainase tingkat kota hingga lingkungan atau tingkat primer, sekunder, dan tersier • Adanya double fungsi antara saluran drainase dan saluran	• Pengawasan pembangunan saluran drainase sesuai dengan persyaratan teknis • Pengendalian inventarisasi data saluran drainase perkotaan dan peta kawasan	• Peningkatan saluran drainase yang memenuhi standar teknis dan minimum serta berbasis masyarakat

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		irigasi yang melewati kawasan perkotaan • Kapasitas saluran drainase perkotaan yang tidak bisa menampung saluran air hujan sebagai akibat dari konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis serta kurangnya pemeliharan saluran drainase dan faktor topografi yang relatif datar • Terdapatnya beberapa kawasan permukiman perkokotaan yang rawan banjir dan genangan	rawan banjir serta genangan • Pembinaan masyarakat dalam kegiatan penunjang lingkungan permukiman seperti pengelolaan dan pemeliharaan saluran drainase	
		• Ruang publik berupa Ruang Terbuka Hijau di perkotaan Kabupaten Situbondo termasuk masih minim • Adanya area pertanian yang fungsinya sama dengan Ruang Terbuka Hijau, namun memiliki kecenderungan untuk alih fungsi lahan pertanian sebagai bangunan hunian	• Pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai bangunan hunian • Pembinaan masyarakat dalam kegiatan penunjang lingkungan permukiman seperti penghijauan	• Peningkatan kawasan ruang terbuka hijau maupun penghijauan (seluas 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% RTH *publik dan 10% RTH privat*) yang memenuhi standar teknis dan minimum serta berbasis masyarakat
SKALA KAWASAN & LINGKUNGAN				
1	Kawasan Permukiman kumuh	**Bangunan Hunian** • 977 unit Bangunan tidak teratur	**Bangunan Hunian** • Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan hunian	**Bangunan Hunian** Peningkatan kualitas bangunan hunian layak

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
	Desa Kilensari	• 0 unit Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan • 1251 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis **Jalan Lingkungan** • 0 meter Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 4125 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk **Penyediaan Air Bersih** • 263 KK Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman • 1104 KK Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minimum minimalnya **Drainase Lingkungan** • 0 Ha Area terjadi genangan > 30 cm • 100 meter Tidak tersedia drainase lingkungan • 2275 meter Area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk **Pengelolaan Sanitasi** • 1119 KK Sistem air limbah	yang tidak sesuai aturan dan perizinan • Pembinaan masyarakat dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian **Jalan Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** • Pengawasan dan pengendalian penyediaan air bersih yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan drainase lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan	**Jalan Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** Peningkatan pelayanan penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan air limbah **Pengelolaan Sampah** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan sampah **Proteksi Kebakaran** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras proteksi kebakaran **Ruang Publik** Peningkatan penghijauan lingkungan dan pemanfaatan lahan sebagai RTP

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		yang tidak sesuai standar teknis • 1264 KK Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis **Pengelolaan Sampah** • 1264 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 1264 KK Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis **Proteksi Kebakaran** • 1264 Unit permukiman tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 1264 Unit permukiman tidak memiliki sarana proteksi kebakaran **Ruang Publik** • RTH dan RTP bagi masyarakat sekitar masih sangat minim **Sosial** • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya terutama terhadap pengellolaan sampah dan limbah	**Pengelolaan Sanitasi** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan air limbah **Pengelolaan Sampah** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan sampah **Proteksi Kebakaran** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras proteksi kebakaran yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Pembinaan masyarakat dalam penghijauan lingkungan dan	**Sosial** Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan bersih dan sehat **Ekonomi** Peningkatan kapasitas masyarakat tentang ekonomi kreatif

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		Ekonomi • Kurangnya ketrampilan usaha bagi MBR karena faktor pendidikan, mayoritas bekerja di sektor kelautan masih kurang kreatifitas dalam pengembangan ekonomi	pemanfaatan lahan sebagai RTP **Sosial** • Pembinaan masyarakat dalam hal lingkungan sehat dan bersih **Ekonomi** • Pembinaan masyarakat dalam hal ekonomi kreatif	
2	Kawasan Permukiman kumuh Desa Alasmalang	**Bangunan Hunian** • 196 Unit Bangunan tidak teratur • 0 Unit Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan • 224 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis **Jalan Lingkungan** • 877 meter Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 1706 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk **Penyediaan Air Bersih** • 290 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman • 14 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimum	**Bangunan Hunian** • Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan hunian yang tidak sesuai aturan dan perizinan • Pembinaan masyarakat dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian **Jalan Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** • Pengawasan dan pengendalian	**Bangunan Hunian** Peningkatan ketersediaan dan penataan bangunan hunian layak **Jalan Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** Peningkatan pelayanan penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan air limbah

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		minimalnya **Drainase Lingkungan** • 1,7 Ha Area terjadi genangan > 30 cm • 930 meter Tidak tersedia drainase lingkungan • 1063 meter memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk **Pengelolaan Sanitasi** • 84 KK Sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 354 KK Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis **Pengelolaan Sampah** • 446 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 567 KK Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis **Proteksi Kebakaran** • 409 Permukiman tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 565 Permukiman tidak memiliki sarana proteksi	penyediaan air bersih yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan drainase lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan air limbah **Pengelolaan Sampah** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan	**Pengelolaan Sampah** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan sampah **Proteksi Kebakaran** Peningkatan pelayanan proteksi kebakaran **Ruang Publik** Peningkatan penghijauan lingkungan **Sosial** Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan bersih dan sehat **Ekonomi** Peningkatan kapasitas masyarakat tentang ekonomi kreatif

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		kebakaran **Ruang Publik** • RTH masih cukup luas namun minimnya RTP aktif maupun pasif bagi masyarakat sekitar **Sosial** • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya terutama dalam pengelolaan limbah dan sampah **Ekonomi** • Kurangnya ketrampilan usaha bagi MBR karena faktor pendidikan	sarpras pengelolaan sampah **Proteksi Kebakaran** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras proteksi kebakaran yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Pembinaan masyarakat dalam penghijauan lingkungan **Sosial** • Pembinaan masyarakat dalam hal lingkungan sehat dan bersih **Ekonomi** • Pembinaan masyarakat dalam hal ekonomi kreatif	
3	Kawasan Permukiman kumuh Desa Olean	**Bangunan Hunian** • 535 Unit Bangunan tidak teratur • 0 Unit Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan • 706 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	**Bangunan Hunian** • Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan hunian yang tidak sesuai aturan dan perizinan • Pembinaan masyarakat dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian	**Bangunan Hunian** Peningkatan ketersediaan dan penataan bangunan hunian layak **Jalan Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas jalan lingkungan

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		Jalan Lingkungan • 450meter Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 1151 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk **Penyediaan Air Bersih** • 168 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman • 0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimum minimalnya **Drainase Lingkungan** • 1,05 Ha Area terjadi genangan > 30 cm • 755 meter Tidak tersedia drainase lingkungan • 1465 meter memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk **Pengelolaan Sanitasi** • 673 KK Sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 806 KK Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis **Pengelolaan Sampah**	**Jalan Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** • Pengawasan dan pengendalian penyediaan air bersih yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan drainase lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan air limbah yang	**Penyediaan Air Bersih** Peningkatan pelayanan penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan air limbah **Pengelolaan Sampah** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan sampah **Proteksi Kebakaran** Peningkatan pelayanan proteksi kebakaran **Ruang Publik** Peningkatan penghijauan lingkungan **Sosial** Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan bersih dan sehat

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		• 758 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 891 KK Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis **Proteksi Kebakaran** • 888 Permukiman tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 888 Permukiman tidak memiliki sarana proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Minimnya RTH privat dan RTH lingkungan **Sosial** • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya **Ekonomi** • Kurangnya ketrampilan usaha bagi MBR karena faktor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat	tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan air limbah **Pengelolaan Sampah** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan sampah **Proteksi Kebakaran** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras proteksi kebakaran yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Pembinaan masyarakat dalam penghijauan lingkungan **Sosial** • Pembinaan masyarakat dalam hal lingkungan sehat dan bersih	**Ekonomi** Peningkatan kapasitas masyarakat tentang ekonomi kreatif

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
			Ekonomi • Pembinaan masyarakat dalam hal ekonomi kreatif	
4	Kawasan Permukiman kumuh Desa Tanjung Pecinan	**Bangunan Hunian** • 555 Unit Bangunan tidak teratur • 0 Unit Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan • 691 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis **Jalan Lingkungan** • 0 meter Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 5057 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk **Penyediaan Air Bersih** • 119 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman • 492 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimum minimalnya **Drainase Lingkungan** • 0 Ha Area terjadi genangan > 30 cm • 5730 meter Tidak tersedia drainase lingkungan	**Bangunan Hunian** • Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan hunian yang tidak sesuai aturan dan perizinan • Pembinaan masyarakat dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian **Jalan Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** • Pengawasan dan pengendalian penyediaan air bersih yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan**	**Bangunan Hunian** Peningkatan ketersediaan dan penataan bangunan hunian layak **Jalan Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** Peningkatan pelayanan penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan air limbah **Pengelolaan Sampah** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan sampah **Proteksi Kebakaran**

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		• 1211meter memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk **Pengelolaan Sanitasi** • 691 KK Sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 691 KK Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis **Pengelolaan Sampah** • 719 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 719KK Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis **Proteksi Kebakaran** • 0 Permukiman tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 719 Permukiman tidak memiliki sarana proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Minimnya RTH privat dan RTH lingkungan **Sosial** • Kurangnya kesadaran	• Pengawasan dan pengendalian pembangunan drainase lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan air limbah **Pengelolaan Sampah** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan sampah **Proteksi Kebakaran** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras proteksi kebakaran yang tidak sesuai standar teknis	Peningkatan pelayanan proteksi kebakaran **Ruang Publik** Peningkatan penghijauan lingkungan **Sosial** Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan bersih dan sehat **Ekonomi** Peningkatan kapasitas masyarakat tentang ekonomi kreatif

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		masyarakat terhadap lingkungannya **Ekonomi** • Kurangnya ketrampilan usaha bagi MBR karena faktor pendidikan dan minimnya pelatihan yang di dapatkan oleh pengusaha UMKM	• Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Pembinaan masyarakat dalam penghijauan lingkungan **Sosial** • Pembinaan masyarakat dalam hal lingkungan sehat dan bersih **Ekonomi** • Pembinaan masyarakat dalam hal ekonomi kreatif	
5	Kaswasan Permukiman kumuh Desa Perante	**Bangunan Hunian** • 612 Unit Bangunan tidak teratur • 0 Ha Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan • 784 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis **Jalan Lingkungan** • 0 meter Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 4432 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	**Bangunan Hunian** • Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan hunian yang tidak sesuai aturan dan perizinan • Pembinaan masyarakat dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian **Jalan Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam	**Bangunan Hunian** Peningkatan ketersediaan dan penataan bangunan hunian layak **Jalan Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** Peningkatan pelayanan penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas drainase lingkungan

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		Penyediaan Air Bersih • 535 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman • 0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimum minimalnya **Drainase Lingkungan** • 0 Ha Area terjadi genangan > 30 cm • 5099 meter Tidak tersedia drainase lingkungan • 1062 meter memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk **Pengelolaan Sanitasi** • 326 KK Sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 340 KK Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis **Pengelolaan Sampah** • 935 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 861 KK Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis **Proteksi Kebakaran**	pengelolaan dan pemeliharaan jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** • Pengawasan dan pengendalian penyediaan air bersih yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan drainase lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan air limbah **Pengelolaan Sampah** • Pengawasan dan pengendalian	**Pengelolaan Sanitasi** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan air limbah **Pengelolaan Sampah** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan sampah **Proteksi Kebakaran** Peningkatan pelayanan proteksi kebakaran **Ruang Publik** Peningkatan penghijauan lingkungan **Sosial** Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan bersih dan sehat **Ekonomi** Peningkatan kapasitas masyarakat tentang ekonomi kreatif

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		• 0 Permukiman tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 196 Permukiman tidak memiliki sarana proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Minimnya RTH privat dan RTH lingkungan **Sosial** • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya **Ekonomi** • Kurangnya ketrampilan usaha bagi MBR karena minimnya pelatihan yang didapatkan pelaku UMKM	pembangunan sarpras pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan sampah **Proteksi Kebakaran** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras proteksi kebakaran yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Pembinaan masyarakat dalam penghijauan lingkungan **Sosial** • Pembinaan masyarakat dalam hal lingkungan sehat dan bersih **Ekonomi** • Pembinaan masyarakat dalam hal ekonomi kreatif	
6	Kawasan Permukiman kumuh Desa	**Bangunan Hunian** • 500 Unit Bangunan tidak teratur	**Bangunan Hunian** • Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan hunian	**Bangunan Hunian** Peningkatan ketersediaan dan penataan bangunan hunian

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
	Semiring	• 0 Ha Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan • 457 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis **Jalan Lingkungan** • 2248 meter Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 5753 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk **Penyediaan Air Bersih** • 347 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman • 1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimum minimalnya **Drainase Lingkungan** • 0 Ha Area terjadi genangan > 30 cm • 2101 meter Tidak tersedia drainase lingkungan • 2681 meter memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk **Pengelolaan Sanitasi** • 402 KK Sistem air limbah yang	yang tidak sesuai aturan dan perizinan • Pembinaan masyarakat dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian **Jalan Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** • Pengawasan dan pengendalian penyediaan air bersih yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan drainase lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan	layak **Jalan Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** Peningkatan pelayanan penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan air limbah **Pengelolaan Sampah** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan sampah **Proteksi Kebakaran** Peningkatan pelayanan proteksi kebakaran **Ruang Publik** Peningkatan penghijauan lingkungan

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		tidak sesuai standar teknis • 549 KK Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis **Pengelolaan Sampah** • 559 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 552 KK Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis **Proteksi Kebakaran** • 265 Permukiman tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 559 Permukiman tidak memiliki sarana proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Minimnya RTH privat dan RTH lingkungan **Sosial** • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya **Ekonomi** • Kurangnya ketrampilan usaha	**Pengelolaan Sanitasi** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan air limbah **Pengelolaan Sampah** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan sampah **Proteksi Kebakaran** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras proteksi kebakaran yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Pembinaan masyarakat dalam penghijauan lingkungan	**Sosial** Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan bersih dan sehat **Ekonomi** Peningkatan kapasitas masyarakat tentang ekonomi kreatif

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		bagi MBR karena faktor pendidikan	**Sosial** • Pembinaan masyarakat dalam hal lingkungan sehat dan bersih **Ekonomi** • Pembinaan masyarakat dalam hal ekonomi kreatif	
7	Kawasan Permukiman kumuh Desa Wringinanom	**Bangunan Hunian** • 294 Unit Bangunan tidak teratur • 0 Ha Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan • 386 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis **Jalan Lingkungan** • 0 meter Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 6918 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk **Penyediaan Air Bersih** • 236 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman • 1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimum minimalnya	**Bangunan Hunian** • Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan hunian yang tidak sesuai aturan dan perizinan • Pembinaan masyarakat dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian **Jalan Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** • Pengawasan dan pengendalian penyediaan air bersih yang tidak sesuai standar teknis	**Bangunan Hunian** Peningkatan ketersediaan dan penataan bangunan hunian layak **Jalan Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas jalan lingkungan **Penyediaan Air Bersih** Peningkatan pelayanan penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** Peningkatan pelayanan dan kualitas drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan air limbah **Pengelolaan Sampah**

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		Drainase Lingkungan • 0 Ha Area terjadi genangan > 30 cm • 7300 meter Tidak tersedia drainase lingkungan • 992 meter memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk **Pengelolaan Sanitasi** • 207 KK Sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 278 KK Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis **Pengelolaan Sampah** • 570 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 500 KK Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis **Proteksi Kebakaran** • 0 Permukiman tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 467 Permukiman tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	• Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras penyediaan air bersih **Drainase Lingkungan** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan drainase lingkungan yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase lingkungan **Pengelolaan Sanitasi** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan air limbah **Pengelolaan Sampah** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan sampah	Peningkatan pelayanan dan kualitas sarpras pengeloaan sampah **Proteksi Kebakaran** Peningkatan pelayanan proteksi kebakaran **Ruang Publik** Peningkatan penghijauan lingkungan **Sosial** Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan bersih dan sehat **Ekonomi** Peningkatan kapasitas masyarakat tentang ekonomi kreatif

No	Kawasan	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan Kualitas
		Ruang Publik • Minimnya RTH privat dan RTH lingkungan **Sosial** • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya **Ekonomi** Kurangnya ketrampilan usaha bagi MBR karena faktor pendidikan	**Proteksi Kebakaran** • Pengawasan dan pengendalian pembangunan sarpras proteksi kebakaran yang tidak sesuai standar teknis • Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarpras proteksi kebakaran **Ruang Publik** • Pembinaan masyarakat dalam penghijauan lingkungan **Sosial** • Pembinaan masyarakat dalam hal lingkungan sehat dan bersih **Ekonomi** Pembinaan masyarakat dalam hal ekonomi kreatif	

Sumber : Hasil Analisa, 2022

BAB V
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

5.1 PERUMUSAN VISI DAN MISI RP2KPKPK KABUPATEN SITUBONDO

Visi dan misi RP2KPKPK Kabupaten Situbondo dirumuskan berdasarkan kajian kebijakan pada bab sebelumnya. Dengan perumusan visi dan misi ini diharapkan dapat memberikan gambaran konsep dan strategi penanganan baik pencegahan maupun peningkatan kualitas untuk kawasan permukiman kumuh perkotaan, yang mana berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Perumusan visi dan misi ini juga tidak lepas dari visi misi produk perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RTRW Kabupaten Situbondo. Berikut ini adalah visi dan misi RP2KPKPK Kabupaten Situbondo

Tabel 5. 1 Visi dan Misi P2KPKPK Kabupaten Situbondo

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2018-2023	**Visi dan Misi RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2040**	**Visi dan Misi RP2KPKPK Kabupaten Situbondo Tahun 2021**
VISI: *“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SITUBONDO YANG BERAKHLAK, SEJAHTERA, ADIL, DAN BERDAYA”* MISI: 1. Membangun Masyarakat Situbondo Beriman Dalam Keberagaman 2. Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan 3. Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Saing 4. Membangun Pemerintahan Yang Profesional, Bersih Dan Tangguh	VISI: *““TERWUJUDNYA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN INDUSTRI, PERTANIAN, DAN PARIWISATA BAHARI YANG SELARAS DENGAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN SERTA BERBASIS MITIGASI BENCANA”* MISI: 1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah; 2. Mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan	VISI: *“TERWUJUDNYA PERMUKIMAN KABUPATEN SITUBONDO YANG BEBAS KUMUH SEBAGAI PENUNJANG PENGEMBANGAN INDUSTRI, PERTANIAN, DAN PARIWISATA BAHARI YANG SELARAS DENGAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN “* MISI: 1. Menata bangunan hunian melalui pengaturan kepadatan, keteraturan, dan kondisi fisik bangunan layak huni. 2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan jalan lingkungan untuk menunjang aksesibilitas antar wilayah. 3. Meningkatkan pelayanan air minum

	dalam mendukung potensi bahar 3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; dan 4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi	melalui perluasan jangkauan pelayanan dan peningkatan kualitas air. 4. Meningkatkan pelayanan jaringan drainase lingkungan untuk pengurangan luasan genangan. 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan. 6. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan persampahan dengan partisipasi masyarakat. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana proteksi kebakaran, serta menejemen mitigasi bencana. 8. mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan dalam mendukung potensi baharI 9. Menggali dan mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Hasil Analisa, 2022

5.2 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota didasarkan dari isu strategis kota dan overview kebijakan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sedangkan pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 pasal 97 antara lain :

- Pemugaran;
- Peremajaan;
- Permukiman kembali.

Pola – pola pengelolaan penanganan dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman.

1) Pemugaran

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Pemugaran perumahan dan permukiman kumuh merupakan kegiatan perbaikan tanpa perombakan mendasar, serta bersifat parsial dan dilakukan terhadap perumahan dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan untuk kegiatan permukiman.

Jenis – jenis penanganan pemugaran

- Revitalisasi Kawasan Permukiman — Merupakan jenis penanganan untuk meningkatkan vitalitas kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan, tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik kawasan permukiman tersebut.
- Rehabilitasi (Perbaikan) — Merupakan jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degadrasi, sehingga dapat berfungsi kembali secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran air bersih, drainase dan lain-lain.
- Renovasi — Merupakan jenis penanganan dengan melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen permukiman (prasarana dan sarana) dengan tujuan komponen tersebut masih dapat beradaptasi dan menampung fungsi baru. Yang termasuk renovasi adalah:
  - Penyesuaian organisasi ruang dan peningkatan system prasarana/utilitas dan menyesuaikan arah bangunan
  - Ukuran bangunan (penyesuaian bangunan) agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan penanganan
  - Orientasi ruang

- Rekonstruksi — Merupakan jenis penanganan yang bertujuan mengembalikan kondisi (kualitas dan fungsi) dan peningkatan komponen permukiman kedalam kondisi asal, baik persyaratan maupun penggunaannya.
- Preservasi (Pemeliharaan dan Pengendalian) — Merupakan jenis penanganan yang dilakukan dengan tujuan untuk pemeliharaan komponen-komponen permukiman yang masih berfungsi dengan baik dan mencegah dari proses kerusakan.

  Sebagai fungsi pengendalian, maka preservasi dapat dilakukan dengan penegasan melalui aturan-aturan pemanfaatan ruang dan bangunan (KBD, KLB, GSB, GSJ, dan lain-lain).

2) Peremajaan

Peremajaan perumahan dan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dengan cara pembangunan kembali perumahan dan permukiman melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Pelaksanaan peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak dengan memenuhi norma dan standar teknis yang berlaku.

Peremajaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dan diterapkan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berdiri di atas lahan yang dalam RTRW diperuntukkan bagi permukiman.

Jenis – Jenis Penanganan Peremajaan

- Renewel (peremajaan) — Merupakan jenis penanganan yang bersifat menyeluruh dengan melakukan pembongkaran sebagian atau seluruh komponen permukiman, kemudian mengubah secara struktural dan membangun kembali di lahan yang sama.

  Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai pemanfaatan lahan optimal sesuai dengan potensi lahan, dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi dan vitalitas baru.

Konsekuensi bentuk teknis pada penanganan ini adalah:

- Konsolidasi tanah
- Land *re-adjusment*
- *Land sharing*, kombinasi pemanfaatan lahan permukiman dengan komersial

- Redevelopment: Merupakan upaya penataan kembali suatu permukiman kumuh dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian atau seluruh kawasan yang telah dinyatakan tidak dapat lagi dipertahankan kehadirannya.
- Restorasi: Merupakan jenis penanganan untuk mengembalikan kondisi suatu permukiman kumuh pada kondisi asal sesuai dengan persyaratan yang benar, menghilangkan tambahan atau komponen yang timbul kemudian mengadakan kembali unsur-unsur permukiman yang telah hilang tanpa menambah unsur-unsur baru.

3) **Permukiman Kembali**

Permukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terkena dampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi batang ataupun orang. Penanganan ini diterapkan pada permukiman:

- Secara lokasi berada pada lahan illegal
- Tidak memiliki potensi yang lebih baik dari fungsi yang ditetapkan
- Secara lingkungan memberikan dampak negative yang lebih besar apabila tetap dipertahankan

Termasuk dalam penanganan ini adalah permukiman yang secara teknologi tidak mampu mendukung penyelesaian masalah. Beberapa kondisi yang memenuhi persyaratan penanganan ini, antar lain:

- Lokasi yang berada di atas tanah Negara dengan peruntukan non permukiman (bantaran sungai, lahan penghijauan dan lain-lain).

- Permukiman kumuh yang berada pada lokasi dimana secara fisik lingkungan sangat berbahaya sebagai tempat bermukim dan tidak dapat ditanggulangi secara teknis (di atas lahan rawan bencana alam/geologi) yaitu permukiman kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di: bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, di bawah SUTET (tiang tegangan tinggi) serta tidak sesuai peruntukannya dengan rencana tata ruang.

Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang bagi peruntukan permukiman. Lokasi akan ditentukan sebagai tempat untuk permukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Berdasarkan sintesa kebijakan dan konsep di atas, adapun konsep dan strategi skala pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota diuraikan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5. 2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/ Perkotaan	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Tumbuhnya permukiman kumuh di sempadan pantai dan sempadan sungai	▪ Wilayah Pesisir Kabupaten Situbondo ▪ Kawasan perkotaan Kabupaten Situbondo	▪ Perbaikan rumah dan lingkungan permukiman yang layak huni ▪ Penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat ▪ Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai	▪ Sosialisasi lingkungan sehat ▪ Pengaturan pemanfaatan lahan sesuai aturan tata ruang ▪ Regulasi terkait ijin mendirikan bangunan serta menyiapkan regulasi bangunan gedung ▪ Penegakan hukum terhadap tumbuh berkembangnya kawasan di area sempadan	▪ Peningkatkan infrastruktur dasar permukiman ▪ Pembuatan tanggul sempadan ▪ Pembuatan jalur hijau ▪ Pemberian rambu peringatan	Pengawasan dan Pengendalian	Pemugaran dan peremajaan	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis	• Membatasi perkembangan permukiman di kawasan sempadan pantai dan sungai • Membangun tanggul dan mengembalikan fungsi lahan sempadan sesuai peruntukannya

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/ Perkotaan	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
2	Permasalahan rawan banjir akibat kontrur rendah, luapan sungai dan laut serta ketidakterhubungan saluran drainase tersier hingga primer	Kawasan Permukiman Kumuh Situbondo	▪ Normalisasi saluran drainase dari sistem hulu ke hilir ▪ Menghubungkan sistem drainase perkotaan secara hirarki ▪ Pembangunan sistem biopori dalam kawasan permukiman padat perkotaan	▪ sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase secara berkala ▪ Sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase terkait sistem biopori	▪ Normalisasi saluran drainase dari sistem hulu ke hilir ▪ Menghubungkan sistem drainase perkotaan secara hirarki ‘Pembangunan sistem biopori dalam kawasan permukiman padat perkotaan	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	▪ Melakukan Pemeliharaan saluran drainase eksisting ▪ Melakukan Pengerukan saluran drainase dan sungai secara berkala	▪ Menyusun Detail Engineering Desain (DED) pembangunan /peningkatan sektor drainase secara komprehensif dengan mengacu masterplan drainase ▪ Membuat sudetan untuk pembuangan air ke Sungai ▪ Rehabilitasi dan/atau normalisasi sungai-sungai eksisting beserta dengan bangunan pengairannya ▪ Pembangunan saluran drainase lingkungan

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/ Perkotaan	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
									dan menjamin ketersinambungan dengan drainase skala kota ▪ Pembangunan tangkis laut di kawasan pesisir
3	Permasalahan air minum pada seluruh kawasan permukiman kumuh yaitu : - Belum meratanya cakupan pelayanan PDAM - Mayoritas belum mendapatkan pelayanan akses air yang aman	Kawasan Permukiman Kumuh Situbondo	Pengembangan jaringan perpipaan PDAM dan HIPPAM untuk melayani kebutuhan	▪ sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang HIPPAM	▪ Pembangunan jaringan perpipaan dan penambahan SR di seluruh kawasan ▪ Pembentukan kelompok HIPPAM di area dekat suber air ▪ Pemeliharaan BJP terlindungi	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	Melakukan Pemeliharaan jaringan pipanisasi eksisting dan sumber air	▪ Menyediakan air bersih dengan memanfaatkan dan pengolahan sumber air baku yang ada ▪ Meningkatkan layanan air minum melalui jaringan pipanisasi

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/ Perkotaan	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	dan belum terpenuhi kebutuhan air minum - Belum terdapatnya kelompok HIPPAM								
4	Permasalahan persampahan pada seluruh kawasan permukiman kumuh yaitu - Belum terdapatnya pengelolaan sampah - Belum terdapat sistem pengangkutan sampah - Mayoritas tidak memiliki TPS	Kawasan Permukiman Kumuh Situbondo	Pembentukan sistem pengelolaan sampah, Pembangunan TPS dan bank sampah pada masing-masing desa	sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R dan bank sampah	▪ Peningkatan sistem pengangkutan sampah ▪ Peningkatan kualitas TPA menjadi contol landfill ▪ Penambahan lokasi TPS 3R dan pengembangan 1 desa 1 bank sampah	Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	▪ Sosialisasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R ▪ Meningkatkan teknologi pengolahan sampah melalui pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organic dengan prinsip 3R	▪ Menyediakan sarana pengangkutan sampah berupa gerobak sampah dan tossa ▪ Membangun TPS 3R untuk melayani persampahan kawasan sesuai standar SPM ▪ Membentuk KSM pengelola sampah melalui pendampingan peningkatan

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/ Perkotaan	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	- Kapasitas TPA Sliwung sudah tidak memenuhi dan masih menggunakan sistem open dumping								capacity bulding yang berkelanjutan ▪ Peningkatan system pengelolaan persampahan pda TPA Sliwung
5	▪ Ruang publik berupa Ruang Terbuka Hijau di perkotaan Kabupaten Situbondo termasuk masih minim ▪ Adanya area pertanian yang fungsinya sama dengan	▪ Kawasan Permukiman Kumuh Situbondo	▪ Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau maupun penghijauan (seluas 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% RTH publik dan 10% RTH privat)	▪ Pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai bangunan hunian ▪ Pembinaan masyarakat dalam kegiatan penunjang lingkungan permukiman seperti penghijauan	▪ Peningkatan kawasan ruang terbuka hijau maupun penghijauan (seluas 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% RTH publik dan 10% RTH privat) yang memenuhi standar teknis dan	▪ Pengendalian ▪ Pemberdayaan masyarakat	▪ Peremajaan ▪ Pemugaran	▪ Membatasi alih fungsi lahan pertanian untuk bangunan hunian ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemeliharaan penghijauan	▪ Mengembangkan penghijauan vertical di kawasan permukiman perkotaan ▪ Mengembangkan ruang terbuka hijau melalui taman tematik di kawasan perkotaan ▪ Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan jumlah ruang terbuka hijau

No.	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kabupaten/ Perkotaan	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
	Ruang Terbuka Hijau, namun memiliki kecenderungan untuk alih fungsi lahan pertanian sebagai bangunan hunian				minimum serta berbasis masyarakat			lingkungan	beserta sarananya
6	Kebiasaan dan Perilaku masyarakat yang masih sangat rendah terhadap pemahaman pola hidup sehat dan bersih	Kawasan Permukiman Kumuh Situbondo	Sosialisasi dan pemberdayaan tentang lingkungan hidup sehat	sosialisasi PHBS dam edukasi tentang lingkungan hidup sehat dan layak huni		Pemberdayaan Masyarakat	Pemugaran dan Peremajaan	Sosialisasi PHBS dam edukasi tentang lingkungan hidup sehat dan layak huni	▪ Penatatan permukiman perkotaan ▪ Pengembangan TPS dan IPAL (diperuntukkan untuk industri juga)

Sumber : Hasil Analisa, 2022

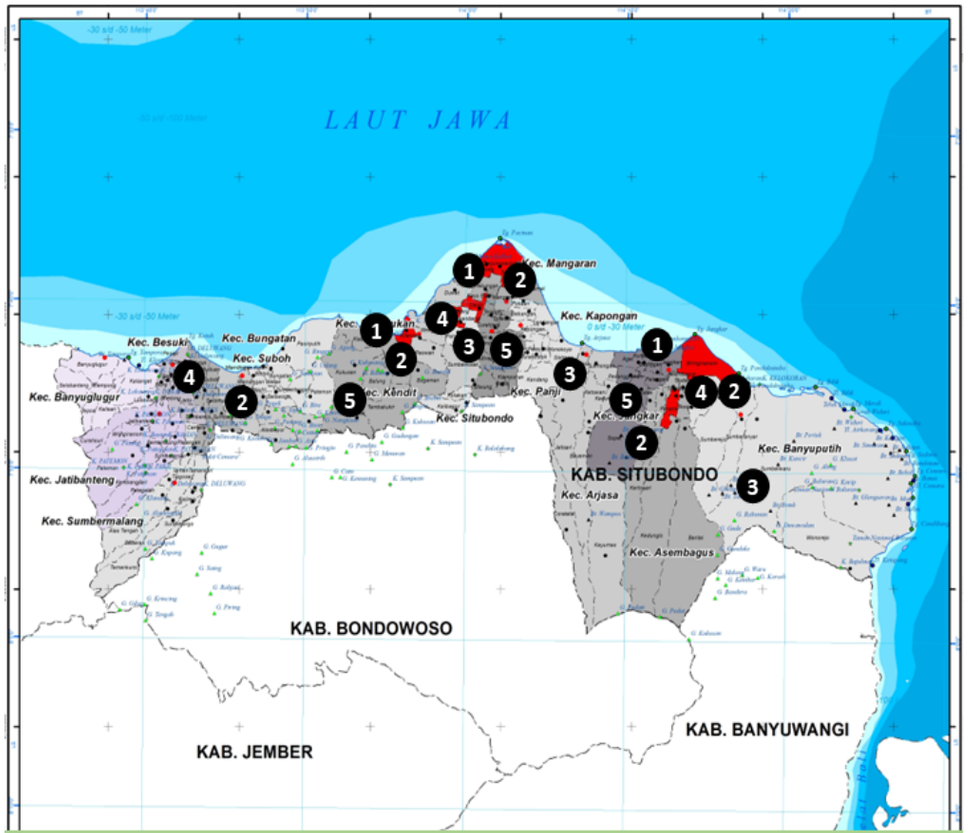

Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota

ISU STRATEGIS PERMUKIMAN

1. Tumbuhnya permukiman kumuh di sempadan pantai dan sempadan sungai
2. Permasalahan rawan banjir akibat kontrur rendah, luapan sungai dan laut serta ketidakterhubungan saluran drainase tersier hingga primer
3. Permasalahan air minum pada seluruh kawasan permukiman kumuh
4. Permasalahan persampahan pada seluruh kawasan permukiman kumuh yaitu Belum terdapatnya pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, mayoritas tidak memiliki TPS, kapasitas TPA Sliwung sudah tidak memenuhi dan masih menggunakan sistem open dumping
5. Ruang publik di perkotaan Kabupaten Situbondo termasuk masih minim
6. Kebiasaan dan Perilaku masyarakat yang masih sangat rendah terhadap pemahaman pola hidup sehat dan bersih

KONSEP PENCEGAHAN & PENINGKATAN

Pencegahan :
- Pengawasan & Pengendalian
- Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan :
- Pemugaraan
- Peremajaan

STRATEGI PENCEGAHAN

- Pemeliharaan layanan infrastruktur eksisting
- Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat
- Meningkatkan system regulasi, perixinan, pen ataan ruang dan standar teknis

STRATEGI PENINGKATAN

- Penyediaan data dukung sebagai acuan peningkatan kualitas infrastruktur pekotaan seperti penyusunan masterplan, DED, dll
- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur perkotaan

JALAN
Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan belum terbangun

DRAINASE
Pembuatan tangkis/ tanggul laut, sudetan, rehabilitasi saluran eksisting, peningkatan konektvitas jaringan drainase

SAMPAH
Penyediaan sarana prasarana dan system pengelolaan sampah mulai dari lingkungan sampai tingkat kota

AIR BERSIH
Pemerataan jaringan perpipaan dan pemanfaatan sumber air baku secara efisien

- Bantuan stimulant perumahan swadaya
- Pemaksimalan lahan di wilayah perkotaan sebagai RTH dan RTP

Gambar 5. 1 Konsep dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota Kabupaten Situbondo

Sumber : Hasil Analisa, 2022

5.3 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN - LINGKUNGAN

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan disajikan dalam tabel 5.3. Tabel tersebut sekaligus menyajikan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala lingkungan. Adapun konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan skala kawasan dan skala lingkungan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5. 3 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Lingkungan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1.	Kawasan Permukiman kumuh Kilensari	Tipologi: Perumahan dan permukiman kumuh di Tepi Air Kategori : Kumuh Sedang	Bangunan Gedung	• Beberapa pola permukiman kuldesak atau tidak teratur, tidak ada pengaturan kavling. Sehingga, bagian belakang rumah membelakangi pantai dan berada pada sempadan pantai • 977 unit Bangunan tidak teratur • 0 unit Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan • 1251 Unit Bangunan tidak	• Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan hunian yang tidak sesuai aturan dan perizinan • Pembinaan masyarakat dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian	• Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni • Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur • Pengaturan hunian tidak teratur dengan pola peremajaan	• Pemberdayaan Masyarakat berupa kepedulian terhadap rumah sehat • Pengawasan dan Pengendalian terkait penerapan keteraturan bangunan baru	• Pemugaran bangunan di permukiman kuldesak dengan merubah orientasi rumah dan persil bangunan • Pemugaran berupa rehabilitasi agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun	• Kampanye dan sosialisasi lingkungan sehat dan nyaman • Menerapkan Peraturan Zonasi untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman kumuh • Meningkatkan system regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar	• Mengembangkan kampung sehat bahari • Perbaikan RTLH dengan Pemugaran pada 1251 unit bangunan di permukiman kumuh • Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				memenuhi persyaratan teknis					teknis	
			Jalan Lingkungan	• Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (perkerasan aspal dan paving dalam kondisi rusak) yaitu sepanjang 4125 meter • Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari (pantai) kurang menarik dan lancar karena kondisi jalan eksisting banyak yang rusak dan tidak tertata	• Pemeliharaan jalan eksisting secara berkala	• Perbaikan permukaan jalan aspal dan paving • Peningkatan estetika dan Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari	• Pemberdayaan masyarakat berupa swadaya masyarakat • Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi jalan lingkungan oleh aparat terkait	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun • Pemugaran koridor jalan untuk peningkatan estetika dan Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari	• Melakukan pemeliharaan jalan eksisting secara berkala oleh SKPD terkait dan masyarakat setempat	• Meningkatkan kualitas permukaan jalan tanah menjadi jalan paving dan aspal sepanjang 4125 meter • Memperbaiki jalan untuk peningkatan estetika dan Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			Air Minum	• Sebanyak 263 KK rumah tangga tidak dapat mengakses air minum yang aman (bersih, tidak berbau dan tidak berwarna) • 1104 KK Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minimum minimalnya untuk kebutuhan minum, dengan cara membeli air kemasan (galon) • Masih sebagian masyarakat yang terlayani jaringan	• Sosialisasi hemat air dan menjaga sumber air • Penyediaan pelayanan air minum melalui pipanisasi baru oleh PDAM • Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam	• Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum melalui penambahan jaringan pipanisi PDAM • Optimalisasi layanan eksisting	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur bor oleh dinas terkait	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti pengganti an komponen pada unit-unit air baku, unit produksi	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur oleh dinas terkait	• Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan • Peningkatan kapasitas

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				perpipaan PDAM karena dirasa mahal				dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan		dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			Drainase Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak memiliki saluran drainase (drainase blum terbangun dan hanya berupa cekungan tanah) adalah sepanjang 100 meter • Drainase belum tersistem dg baik karena belum semua saluran tersier-sekunder-primer belum terhubung dg kapasitas yang memadai • kapasitas drainase yang	• Melaksanakan sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase • Melakukan sosialiasi pada masyarakat dan siswa sekolah akan pentingnya menjaga drainase dari sampah yang berakibat munculnya genangan banjir dan cara menanggula	• Membangun saluran drainase sepanjang 648 meter • Normalisasi Saluran • Pemeliharaan saluran drainase eksisting secara berkala • Pengembangan sumur resapan berupa parit berorak pada saluran – saluran drainase • Rehab saluran	• Pemberdayaan masyarakat terkait kesadaran pemeliharaan kondisi drainase termasuk optimalisasi fungsi saluran dan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Pengendalian dan pengawasan terhadap kondisi	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase • Pemugara	• Melakukan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Melakukan pengerukan saluran drainase dan sungai secara berkala • Sosialisasi tentang lingkungan sehat di semua lini masyrakat • Membuat papan larangan membuang sampah sembarang	• Memperbaiki saluran drainase sesuai standar teknis sepanjang 2275 meter • Pembangunan saluran drainase baru sepanjang 100 meter • Normalisasi Saluran • Mengembangkan jalur hijau berupa taman pasif di sempadan jalan dan sungai • Pembangunan tangkis/ tanggul laut

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				kecil dan saluran drainase yang tidak terpelihara (banyak sampah) • kondisi drainase rusak sepanjang 2275 meter • belum tersedia tangkis laut sehingga air laut sering naik ke permukiman warga	nginya • Pemeliharaan saluran drainase eksisting	drainase	dan fungsi drainase oleh dinas terkait	n dengan jenis revitalisasi dengan meningkatkan kualitas saluran drainase belum terbangun menjadi drainase terbangun, peningkatan volume saluran drainase, dll.		
			Pengolahan air limbah	• Sebanyak 1119 KK tangga yang belum memiliki Jamban keluarga/jamban bersama sesuai	• Peningkatan kampanye dan sosialisasi oleh sanitarian kepada masyarakat • Peningkatan	• Pengembangan jambanisasi yang dilengkapi dengan tangki septic • Pengopti	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemahaman PHBS dan kesadaran	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk	• Sosialisasi dan kampanye sanitasi sehat • Optimalisasi fungsi MCK umum	• Mengembangkan jamban pribadi yang terhubung septictank • Mengembangkan IPAL

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				persyaratan teknis • Sebanyak 1264 KK yang memiliki jamban yang tidak terhubung dengan septic-tank (saluran air limbang langsung masuk ke sal. Drainase) • Perilaku masyarakat masih BABS di laut	sosialisasi PHBS dan pentingnya MCK dan IPAL atau Septic Tank yang memenuhi syarat teknis • Melakukan edukasi dini pada siswa dan lomba lingkungan sekolah sehat	malan IPAL komunal • Pembangunan unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah • Pembangunan unit perpipaan menggunakan sistem pengolahan air limbah	pentingnya fungsi septic tank	mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan, seperti pengganti an komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, pengganti an komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan		komunal/Tangki Septik Komunal

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah		komponen sejenis.		
			Pengelolaan Persampahan	• Belum terdapat bak sampah dan sarana pengangkutan berupa gerobak • Sebanyak 1264 KK tidak terlayani sistem pengangkutan sampah ke TPS/TPA • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Terbukti dengan masih	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Pengadaan pelatihan-pelatihan terhadap BKM / kelompok masyarakat peduli sampah • Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan	• Pembentukan sistem pengangkutan sampah yang melayani seluruh kawasan • Pengadaan sarana persampahan berupa bak sampah, TPS, bank Sampah • Pengadaan prasaran	• Pemberdayaan masyarakat terkait 3R • Pengawasan dan pengendalian terhadap terjadinya tumpukan sampah akibat tidak adanya system pengangkutan sampah	• Pemugaran dengan jenis revitalisasi unit pengelolaan persampahan untuk merubah kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penyediaan sarana dan prasarana pemilahan,	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Membentuk kader lingkungan sebagai pelaksana pengolahan sampah 3R dengan melibatkan peran ibu rumah tangga	• Menyediakan sarana persampahan berupa bak sampah dan gerobak sampah • Pengadaan sarana pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA (berupa motor pengangkut) • Membentuk sistem dan rute

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai, saluran dan lahan kosong. • Belum ada sistem pengolahan sampah baik di TPS maupun di lingkungan permukiman	sampah dan larangan buang sampah sembarangan	a persampahan berupa gerobak/ mobil/motor pengangkut sampah dan pembentukan satgas • Pelatihan pengelolaan sampah oleh masyarakat		pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.		pengangkutan sampah dari TPS ke TPA • Pengadaan pengelolaan sampah setempat untuk meminimalisasi buangan ke TPA
			Sistem Proteksi Kebakaran	• Mayoritas bangunan menggunakan bahan material kayu yang mudah terbakar • Merupakan	• Sosialisasi tentang evakuasi kebakarankepada masyarakat dan siswa sekolah	• Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Penyediaa	• Pemberdayaan Masyarakat melalui pemahaman penyeba	• Pemugaran dengan revitalisasi unit pengelolaan persamp	• Sosialisasi tentang mitigasi dan evakuasi kebakaran	• Menyediakan alat pemadam kebakaran portable • Menetapkan jalur evakuasi

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				kawasan industri brem dimana pengolahan brem menggunakan bahan bakar kayu sehingga rawan terjadi kebakaran • Terdapat sebagian permukiman kuldesak atau tidak teratur (bagian belakang rumah satu berhadapan dengan bagian depan rumah yang lainnya) sehingga jarak antara bangunan sangat dekat • Belum ada sarana proteksi	• Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi alat pemadam kebakaran sejak dini melalui penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	n alat pemadam kebakaran portable • Penetapan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)	b , dampak dan penanggulangan awal bencana kebakaran • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran oleh masyarakat dan dinas terkait	ahan untuk merubah kondisi menjadi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran		bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Menetapkan lokasi evakuasi bencana berada berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				kebakaran						
			Ruang Publik	Terdapat ruang publik di sepanjang pantai sebagai area berkumpul masyarakat namun kondisinya tidak teroganisasi dan terawat sehingga kurang nyaman	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik	• Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik masyarakat di beberapa spot	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Pemberdayaan Masyarakat melalui pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik	• Pemugaran ruang publik dengan Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik masyarakat di beberapa spot
			Sosial Ekonomi	• Kondisi kawasan kurang	• Sosialisasi dan fasilitasi	• Peningkatan estetika	• Pemberdayaan Masyara	• Pemugaran • Peremaja	• Pengembangan komoditi	• Peningkatan estetika kawasan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				mendukung pengembangan wisata bahari • Pendidikan para nelayan relatif masih rendah • Posisi tawar antara nelayan dengan pemilik kapal ikan masih lemah • Mutu produk belum memadai penangannya	masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar dll • Sosialiasi pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan wisata bahari	kawasan pendukung wisata bahari	kat	an	dengan pola OVOP/one village one product yang berbasis clusster • Fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar	pendukung wisata bahari antara lain aksesibilitas, landmark, amenitas dan wadah display produk
2.	Kawasan Permukiman kumuh Alasmalang	Tipologi: Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran	Bangunan Gedung	• 196 Unit Bangunan tidak teratur • 224 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	• Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah sehat • Sosialisasi terkait Penerapan peraturan KDB, KLB,	• Peningkatan lingkungan sehat dan hijau • Peningkatan kualitas RTLH	• Pemberdayaan masyarakat terkait perwuju dan rumah dan lingkung	• Pemugaran dengan rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan	• Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah sehat • Kampanye kampung hijau dan manfaatny	• Mengembangkan kampung hijau (green n clean) • Mengatur orientasi bangunan secara

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		rendah Kategori : Kumuh Ringan			orientasi bangunan pada bangunan baru • Pembinaan masyarakat dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian		an sehat • Pengawasan dan pengendalian terkait pembangunan	massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun • Peningkatan kampung hijau	a	teratur • Rehab rumah tidak layak huni 224 Unit Bangunan
			Jalan Lingkungan	• 877 meter Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 1706 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	• Pemeliharaan jalan eksisting secara berkala	• Perbaikan permukaan jalan aspal dan paving Pembangunan jalan baru atau peningkatan kualitas jalan tanah	• Pemberdayaan masyarakat berupa swadaya masyarakat • Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi jalan lingkungan oleh aparat	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan, seperti perbaikan struktur jalan • Pemugaran dengan	• Melakukan pemeliharaan jaringan jalan lingkungan eksisting secara berkala • Menyediakan infrastruktur jalan pada kawasan yang belum	• Memperbaiki jalan yang rusak sepanjang 1706 meter • Pembangunana jalan baru 877 meter • Meningkatkan kualitas jalan lingkungan dari jalan tanah menjadi

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						menjadi jalan paving/ aspal	terkait	jenis revitalisasi jalan untuk peningkatan kualitas lingkungan dari jalan tidak terbangun menjadi terbangun	tersedia prasarana jalan	paving/dia spal sesuai dengan persyaratan teknis
			Air Minum	• 290 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman • 14 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minimum minimalnya • Masih sebagian masyarakat yang terlayani jaringan perpipaan	• Sosialisasi hemat air kepada masyarakat h • Penyediaan layanan air minum melalui pipanisasi	• Pembangunan jaringan perpipaan PDAM untuk menjangkau kebutuhan semua masyarakat • Perbaikan Peningka	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyarat	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air	• Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penggantian

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				PDAM		tan kualitas air sumur bor • sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam • sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan	kualitas pemakaian air sumur bor oleh dinas terkait	an teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	sumur oleh dinas terkait	komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan • Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan jangkauan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						berada di bawah tanah				pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
			Drainase Lingkungan	• 1,7 Ha Area terjadi genangan > 30 cm • 930 meter Tidak tersedia drainase lingkungan • 1063 meter memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk • Perilaku	• Melaksanakan sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase • Melakukan sosialiasi pada masyarakat dan siswa	• Membangun saluran drainase sepanjang 3.791 meter • Normalisasi Saluran • Pemeliharaan saluran drainase eksisting secara	• Pemberdayaan masyarakat terkait kesadaran pemeliharaan kondisi drainase termasuk optimalisasi fungsi	• rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediak	• Melakukan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Melakukan pengerukan saluran drainase dan sungai secara berkala • Sosialisasi tentang lingkungan	• Memperbaiki saluran drainase sesuai standar teknis sepanjang 1063 meter • Pembangunan saluran drainase baru sepanjang 930 meter • Normalisasi Saluran

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				masyarakat yang membuang sampah dan air limbah ke sungai dan saluran drainase sehingga drainase mengalami sedimentasi dan tidk terpelihara	sekolah akan pentingnya menjaga drainase dari sampah yang berakibat munculnya genangan banjir dan cara menanggulanginya • Pemeliharaan saluran drainase eksisting	berkala • Pengembangan sumur resapan berupa parit berorak pada saluran – saluran drainase	saluran dan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Pengendalian dan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi drainase oleh dinas terkait	an, seperti pengganti an kompone n gorong-gorong, perbaikan struktur drainase • revitalisasi dengan meningkatkan kualitas saluran drainase belum terbangun menjadi drainase terbangun, peningkatan volume saluran drainase, dll.	sehat di semua lini masyrakat • Membuat papan larangan membuang sampah sembarang	• Meningkatkan volume saluran drainase eksisting • Mengembangkan jalur hijau berupa taman pasif di sempadan jalan dan sungai

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			Pengolahan air limbah	• Sebanyak 84 KK tangga yang belum memiliki Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis • Sebanyak 354 KK yang memiliki jamban yang tidak terhubung dengan septic-tank (saluran air limbang langsung masuk ke sal. Drainase) • Perilaku masyarakat masih BABS di sungai	• Peningkatan kampanye dan sosialisasi oleh sanitarian kepada masyarakat • Peningkatan sosialisasi PHBS dan pentingnya MCK dan IPAL atau Septic Tank yang memenuhi syarat teknis • Melakukan edukasi dini pada siswa dan lomba lingkungan sekolah sehat	• Pengembangan jambanisasi yang dilengkapi dengan tangki septic • Pengoptimalan IPAL komunal • Pembangunan unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah • Pembang	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemahaman PHBS dan kesadaran pentingnya fungsi septic tank	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian	• Sosialisasi dan kampanye sanitasi sehat • Optimalisasi fungsi MCK umum	• Mengembangkan jamban pribadi yang terhubung septictank • Mengembangkan IPAL komunal/Tangki Septik Komunal

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						unan unit perpipaan menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah		komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.		
			Pengelolaan Persampahan	• 446 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 567 KK Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis	• Sosialisasi 3R dan kerja bakti rutin • Pengadaan pelatihan-pelatihan terhadap BKM / kelompok masyarakat peduli sampah • Melakukan	• Pembentukan sistem pengangkutan sampah • Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	• pemberdayaan masyarakat berupa pengolahan sampah 3 R • Kerjasama dengan swasta/ perorangan untuk	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Membentuk kader lingkungan sebagai pelaksana	• Menyediakan sarana persampahan berupa bak sampah dan gerobak sampah • Pengadaan sarana pengangkutan sampah dari TPS

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Terbukti dengan masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai, saluran dan lahan kosong. • Belum ada sistem pengolahan sampah baik di TPS maupun di lingkungan permukiman	edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah dan larangan buang sampah sembarangan	termasuk sarana bak sampah, pembentukan satgas, gerobak/ mobil/motor pengangkut sampah dari hunian menuju TPS dan TPA • Pembuatan papan larangan membuang sampah ke sungai	investasi dalam sistem pengolahan sampah	dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti • pengganti an sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	pengolahan sampah 3R dengan melibatkan peran ibu rumah tangga • Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah dan larangan buang sampah sembarangan	menuju TPA (berupa motor pengangkut) • Membentuk sistem dan rute pengangkutan sampah dari TPS ke TPA • Pengadaan pengelolaan sampah setempat untuk meminimalisasi buangan ke TPA
			Sistem Proteksi Kebakaran	• Mayoritas bangunan menggunakan bahan	• Sosialisasi tentang bahaya dan evakuasi	• Jalur evakuasi bencana yaitu	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dengan revitalisa	• Sosialisasi tentang mitigasi dan	• Menyediakan alat pemadam kebakaran

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				material kayu yang mudah terbakar • Terdapat sebagian permukiman kuldesak atau tidak teratur (bagian belakang rumah satu berhadapan dengan bagian depan rumah yang lainnya) sehingga jarak antara bangunan sangat dekat • Belum ada sarana proteksi kebakaran	kebakaran • Pemeliharaan jalan utama 4 meter agar tidak ada gangguan pada saat kebakaran dan mobil kebaran dapat melaluinya	jalan lingkungan utama • Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Penyediaan alat pemadam kebakaran *portable* • Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidika	melalui pemahaman penyebab , dampak dan penanggulangan awal bencana kebakaran • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran oleh masyara	si unit pengelolaan persampahan untuk merubah kondisi menjadi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	evakuasi kebakaran	portable • Menetapkan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Menetapkan lokasi evakuasi bencana berada berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						n)	kat dan dinas terkait			
			Ruang Publik	• Belum adanya ruang publik sebagai area berkumpul masyarakat yang representatif • Minimnya ruang hijau dipermukiman yang relative padat	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau	• Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik masyarakat di beberapa spot	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Pemberdayaan Masyarakat melalui pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan terbuka hijau	• Peremajaan ruang publik dengan Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik masyarakat yang representatif

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			Sosial Ekonomi	• Belum maksimalnya pemasaran produk unggulan desa berupa Bonsai Kelapa (BOKLA)	• Sosialisasi dan fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar dll	• Peningkatan estetika kawasan pendukung produk unggulan desa berupa Bonsai Kelapa (BOKLA	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran • Peremajaan	• Pengembangan komoditi dengan pola OVOP/one village one product • Fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar	• Peningkatan estetika kawasan pendukung wisata edukasi antara lain aksesibilitas, landmark, dan wadah display produk
3.	Kawasan Permukiman kumuh Olean	Tipologi : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di	Bangunan Gedung	• 535 Unit Bangunan tidak teratur • 706 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	• Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah sehat • Sosialisasi terkait Penerapan peraturan KDB, KLB,	• Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur • Peningkatan	• Pemberdayaan Masyarakat berupa kepedulian terhadap rumah sehat	• Pemugaran berupa rehabilitasi agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai	• Kampanye dan sosialisasi lingkungan sehat dan nyaman • Menerapkan Peraturan Zonasi	• Perbaikan RTLH • Mengembangkan kampung hijau (green clean) • Pemugaran pada bangunan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		dataran rendah Kategori : Kumuh Sedang			orientasi bangunan pada bangunan baru	bangunan RTLH	• Pengawasan dan Pengendalian terkait penerapan keteraturan bangunan baru	kondisi saat awal dibangun	untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman kumuh	di permukiman kuldesak dengan merubah orientasi rumah agar saling berhadapan • Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur
			Jalan Lingkungan	• 450 meter Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 1151 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	• Pemeliharaan jalan eksisting	• Perbaikan permukaan jalan aspal dan paving • Pembangunan jalan baru atau	• Pemberdayaan masyarakat berupa swadaya masyarakat • Pengawasan dan pengendalian terhadap	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi jalan, seperti perbaikan struktur jalan • revitalisasi jalan untuk	• Melakukan pemeliharaan jalan eksisting secara berkala oleh SKPD terkait dan masyarakat setempat	• Meningkatkan kualitas permukaan jalan tanah menjadi jalan paving dan aspal sepanjang 1151 meter • Pembangunan jalan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						peningkatan kualitas jalan tanah menjadi jalan paving/ aspal	kondisi jalan lingkungan oleh aparat terkait	peningkatan kualitas lingkungan dari jalan tidak terbangun menjadi terbangun		baru sepanjang 450 meter
			Air Minum	• 168 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman (bersih, tidak berbau dan tidak berwarna) • Sebagian masyarakat menggunakan sumur untuk kebutuhan mencuci dan mandi dan untuk kebutuhan minum,	• Sosialisasi hemat air	• Pembangunan jaringan perpipaan PDAM untuk menjangkau kebutuhan semua masyarakat • Pembangunan Sumur Bor dan kualitas air bersih	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun /disediak	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur oleh dinas terkait	• Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				dengan cara membeli air jirigen • Masih sebagian masyarakat yang terlayani jaringan perpipaan PDAM		• Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam • Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan berada di bawah tanah	bor oleh dinas terkait	an, seperti pengganti an komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan		produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan • Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
			Drainase Lingkungan	• 1,05 Ha Area terjadi genangan > 30 cm • 755 meter Tidak tersedia drainase lingkungan • 1465 meter memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk	• Melaksanakan sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase • Melakukan sosialiasi pada masyarakat dan siswa sekolah akan pentingnya menjaga	• Membangun saluran drainase baru • Peningkatan kualitas konstruksi drainase • Normalisasi Saluran • Pemeliharaan saluran drainase eksisting secara	• Pemberdayaan masyarakat terkait kesadaran pemeliharaan kondisi drainase termasuk optimalisasi fungsi saluran dan pemeliharaan	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi sarana dan prasarana drainase, seperti pengganti an komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase • Pemugaran dengan jenis	• Melakukan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Melakukan pengerukan saluran drainase dan sungai secara berkala • Sosialisasi tentang lingkungan sehat di semua lini masyrakat • Membuat	• Memperbaiki saluran drainase sesuai standar teknis 1465 meter • Pembangunan saluran drainase baru 755 meter • Normalisasi Saluran • Meningkatkan volume saluran drainase eksisting • Mengemba

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					drainase dari sampah yang berakibat munculnya genangan banjir dan cara menanggulanginya • Pemeliharaan saluran drainase eksisting	berkala • Pengembangan sumur resapan berupa parit berorak pada saluran – saluran drainase	saluran drainase secara berkala • Pengendalian dan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi drainase oleh dinas terkait	revitalisasi dengan meningkatkan kualitas saluran drainase belum terbangun menjadi drainase terbangun, peningkatan volume saluran drainase, dll.	papan larangan membuang sampah sembarang	ngkan jalur hijau berupa taman pasif di sempadan jalan dan sungai
			Pengolahan air limbah	• 673 KK Sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 806 KK Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan	• Sosialisasi/ Penyuluhan kepada masyarakat tentang PHBS dan STBM juga pentingnya MCK dan IPAL, dan Septic	• Pembangunan MCK Komunal untuk sanitasi • Bantuan pembangunan jamban pribadi	• Pemberdaayaan masyarakat terkait pemahaman PHBS dan kesadaran	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit pengelolaan air limbah sesuai dengan persyarat	• Sosialisasi dan kampanye sanitasi sehat • Optimalisasi fungsi MCK umum	• Mengembangkan jamban pribadi yang terhubung septictank • Mengembangkan IPAL komunal/Tangki

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				teknis • Perilaku masyarakat masih BABS di Sungai	Tank yang memenuhi syarat	yang terhubung septic tank • Pembangunan unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah	pentingnya fungsi septic tank	an teknis, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.		Septik Komunal

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			Pengelolaan Persampahan	• 758 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 891 KK Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis • kesadaran masyrakat tentang hidup bersih sehat masih rendah	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Sosialisasi untuk tidak membuang sampah di sungai dan saluran • Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah dan larangan buang sampah sembarangan	• Pembentukan sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah • Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau perorangan dalam pengelolaan persampahan • Pengelolaan sampah di	• pemberdayaan masyarakat berupa pengolahan sampah 3 R • Kerjasama dengan swasta/ perorangan untuk invesasi dalam sistem pengolahan sampah	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti pengganti an sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Membentuk kader lingkungan sebagai pelaksana pengolahan sampah 3R dengan melibatkan peran ibu rumah tangga • Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah	• Pengoptimlan fungsi TPS an sarana persampahan dikawasan Permukiman • Pengoptimalan sistem pengangkutan sampah dari bak menuju TPS dan dari TPS menuju TPA • Menyediakan sarana dan prasarana persampahan termasuk sarana gerobak/mobil/motor pengangkut

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						tingkat masyarakat (bank sampah)		pengolahan.		sampah dari hunian menuju TPS dan TPA
			Sistem Proteksi Kebakaran	• Kawasan padat • Kawasan merupakan rawan kebakaran dikarenakan banyak material bangunan menggunakan kayu • Belum ada sarana proteksi kebakaran	• Sosialisasi tentang evakuasi kebakaran • Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran	• Penyediaan alat pemadam kebakaran *portable* • Penetapan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Lokasi evakuasi bencana	• Pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman akan pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi alat	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti pengganti an sarana dan	• Sosialisasi tentang evakuasi kebakaran • Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi	• Menyediakan alat pemadam kebakaran portable • Menetapkan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Menetapkan Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)	pemadam kebakaran sejak dini • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran oleh masyarakat dan dinas terkait	prasarana proteksi kebakaran	alat pemadam kebakaran sejak dini melalui penyuluhan dan pelatihan	mempunyai kemudahan akses
			Ruang Publik	• Belum adanya ruang publik sebagai area berkumpul masyarakat	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan dan pemelihara	• Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Pemberdayaan Masyarakat melalui pemanfaatan dan pemelihar	• Pemugaran ruang publik dengan Peningkatan kualitas dan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					an ruang terbuka untuk publik	masyarakat di beberapa spot			aan ruang terbuka untuk publik • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik	estetika ruang publik masyarakat di beberapa spot
			Sosial Ekonomi	• Kondisi kawasan kurang mendukung pengembangan wisata edukasi • Belum siapnya obyek wisata dalam mendukung kesatuan	• Sosialisasi dan fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar dll	• Peningkatan estetika kawasan pendukung wisata edukasi	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran • Peremajaan	• Pengembangan komoditi dengan pola OVOP/one village one product • Fasilitasi masayarakat terkait peningkata	• Peningkatan estetika kawasan pendukung wisata edukasi antara lain aksesibilitas, landmark, amenitas rute wisata,

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				desa wisata • Belum terogranisasinya tema desa wisata, rute wisata, pemasaran oleh pokdarwis	• Sosialiasi pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan wisata edukasi				n kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar	dan wadah display produk
4.	Kawasan Permukiman kumuh Tanjung Pecinan	Tipologi : Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Tepi air Kategori : Kumuh Sedang	Bangunan Gedung	• Beberapa pola permukiman kuldesak atau tidak teratur, tidak ada pengaturan kavling. Sehingga, bagian belakang rumah membelakangi pantai dan berada pada sempadan pantai • 555 unit Bangunan	• Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan hunian yang tidak sesuai aturan dan perizinan Pembinaan masyaraka t dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian	• Perbaikan banguna n rumah tidak layak huni • Penataan banguna n hunian baru dengan pola yang lebih teratur Pengat uran hunian tidak teratur	• Pemberdayaan Masyarakat berupa kepedulian terhadap rumah sehat • Pengawasan dan Pengendalian terkait penerapan keteraturan banguna	• Pemugaran bangunan di permukiman kuldesak dengan merubah orientasi rumah dan persil bangunan • Pemugaran berupa rehabilitasi agar fungsi dan massa	• Kampanye dan sosialisasi lingkungan sehat dan nyaman • Menerapkan Peraturan Zonasi untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman kumuh Meningkatkan system	• Mengembangkan kampung sehat bahari • Perbaikan RTLH dengan Pemugaran pada 691 unit bangunan di permukiman kumuh • Penataan bangunan hunian baru dengan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				tidak teratur • 0 unit Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan • 691 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis		dengan pola perema jaan	n baru	bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun	regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis	pola yang lebih teratur
			Jalan Lingkungan	• Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (perkerasan aspal dan paving dalam kondisi rusak) yaitu sepanjang 5057 meter • Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari (pantai) kurang	Pemeliharaan jalan eksisting secara berkala	• Perbaikan permukaan jalan aspal dan paving • Peningkatan estetika dan Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari	• Pemberdaayaan masyarakat berupa swadaya masyarakat • Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi jalan lingkungan oleh aparat terkait	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun • Pemugaran koridor jalan untuk peningkat	• Melakukan pemeliharaan jalan eksisting secara berkala oleh SKPD terkait dan masyarakat setempat	• Meningkatkan kualitas permukaan jalan tanah menjadi jalan paving dan aspal sepanjang 5057 meter • Memperbaiki jalan untuk peningkatan estetika dan Aksesibilitas menuju

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				menarik dan lancar karena kondisi jalan eksisting banyak yang rusak dan tidak tertata				an estetika dan Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari		kawasan wisata bahari
			Air Minum	• Sebanyak 119 KK rumah tangga tidak dapat mengakses air minum yang aman (bersih, tidak berbau dan tidak berwarna) • 492 KK Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minimum minimalnya untuk kebutuhan minum,	• Sosialisasi hemat air dan menjaga sumber air • Penyediaan pelayanan air minum melalui pipanisasi baru oleh PDAM • Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah	• Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum melalui penambahan jaringan pipanisi PDAM • Optimalisasi layanan eksisting	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur bor oleh dinas	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur oleh dinas terkait	• Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				dengan cara membeli air kemasan (galon) Masih sebagian masyarakat yang terlayani jaringan perpipaan PDAM karena dirasa mahal	dangkal dan dalam		terkait	pengganti an kompone n pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan		jaringan unit distribusi dan unit pelayanan • Peningkata n kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambaha n komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkata n jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambaha n/ perluasan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
			Drainase Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak memiliki saluran drainase (drainase blum terbangun dan hanya berupa cekungan tanah) adalah sepanjang 5730 meter • Drainase belum tersistem dg baik karena belum semua saluran tersier-sekunder-primer belum terhubung dg	• Melaksanakan sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase • Melakukan sosialiasi pada masyarakat dan siswa sekolah akan pentingnya menjaga drainase dari sampah yang berakibat	• Membangun saluran drainase sepanjang 648 meter • Normalisasi Saluran • Pemeliharaan saluran drainase eksisting secara berkala • Pengembangan sumur resapan berupa parit berorak pada	• Pemberdayaan masyarakat terkait kesadaran pemeliharaan kondisi drainase termasuk optimalisasi fungsi saluran dan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Pengend	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti pengganti an kompone n gorong-	• Melakukan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Melakukan pengerukan saluran drainase dan sungai secara berkala • Sosialisasi tentang lingkungan sehat di semua lini masyrakat • Membuat papan larangan membuang sampah sembaran	• Memperbaiki saluran drainase sesuai standar teknis sepanjang 1211 meter • Pembangunan saluran drainase baru sepanjang 5730 meter • Normalisasi Saluran • Mengembangkan jalur hijau berupa taman pasif di sempadan jalan dan sungai

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				kapasitas yang memadai • kapasitas drainase yang kecil dan saluran drainase yang tidak terpelihara (banyak sampah) • kondisi drainase rusak sepanjang 1211 meter • belum tersedia tangkis laut sehingga air laut sering naik ke permukiman warga	munculnya genangan banjir dan cara menanggulanginya • Pemeliharaan saluran drainase eksisting	saluran – saluran drainase • Rehab saluran drainase	alian dan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi drainase oleh dinas terkait	gorong, perbaikan struktur drainase • Pemugaran dengan jenis revitalisasi dengan meningkatkan kualitas saluran drainase belum terbangun menjadi drainase terbangun, peningkatan volume saluran drainase, dll.	g	• Pembangunan tangkis/ tanggul laut
			Pengolahan air	• Sebanyak 691 KK tangga	• Peningkatan kampanye	• Pengembangan	• Pemberdaayaan	• Pemugaran dengan	• Sosialisasi dan	• Mengembangkan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			limbah	yang belum memiliki Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis • Sebanyak 691 KK yang memiliki jamban yang tidak terhubung dengan septic-tank (saluran air limbang langsung masuk ke sal. Drainase) • Perilaku masyarakat masih BABS di laut	dan sosialisasi oleh sanitarian kepada masyarakat • Peningkatan sosialisasi PHBS dan pentingnya MCK dan IPAL atau Septic Tank yang memenuhi syarat teknis • Melakukan edukasi dini pada siswa dan lomba lingkungan sekolah sehat	jambanisasi yang dilengkapi dengan tangki septic • Pengoptimalan IPAL komunal • Pembangunan unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah Pembangunan unit perpipaan	masyarakat terkait pemahaman PHBS dan kesadaran pentingnya fungsi septic tank	jenis rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada	kampanye sanitasi sehat • Optimalisasi fungsi MCK umum	jamban pribadi yang terhubung septictank • Mengembangkan IPAL komunal/Tangki Septik Komunal

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah		SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.		
			Pengelolaan Persampahan	• Belum terdapat bak sampah dan sarana pengangkutan berupa gerobak • Sebanyak 719 KK tidak terlayani sistem pengangkutan sampah ke TPS/TPA • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Pengadaan pelatihan-pelatihan terhadap BKM / kelompok masyarakat peduli sampah • Melakukan edukasi	• Pembentukan sistem pengangkutan sampah yang melayani seluruh kawasan • Pengadaan sarana persampahan berupa bak sampah, TPS, bank	• Pemberdayaan masyarakat terkait 3R • Pengawasan dan pengendalian terhadap terjadinya tumpukan sampah akibat tidak adanya	• Pemugaran dengan jenis revitalisasi unit pengelolaan persampahan untuk merubah kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penyediaan sarana	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Membentuk kader lingkungan sebagai pelaksana pengolahan sampah 3R dengan melibatkan	• Menyediakan sarana persampahan berupa bak sampah dan gerobak sampah • Pengadaan sarana pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA (berupa motor pengangkut

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				persampahan. Terbukti dengan masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai, saluran dan lahan kosong. • Belum ada sistem pengolahan sampah baik di TPS maupun di lingkungan permukiman	dini pada siswa tentang pengolahan sampah dan larangan buang sampah sembarangan	Sampah • Pengadaan prasarana persampahan berupa gerobak/ mobil/motor pengangkut sampah dan pembentukan satgas • Pelatihan pengelolaan sampah oleh masyarakat	system pengangkutan sampah	dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	peran ibu rumah tangga	) • Membentuk sistem dan rute pengangkutan sampah dari TPS ke TPA • Pengadaan pengelolaan sampah setempat untuk meminimalisasi buangan ke TPA
			Sistem Proteksi Kebakaran	• Mayoritas bangunan menggunakan bahan	• Sosialisasi tentang evakuasi kebakarank	• Pasokan air memanfaatkan	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran dengan revitalisasi unit	• Sosialisasi tentang mitigasi dan	• Menyediakan alat pemadam kebakaran

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				material kayu yang mudah terbakar • Merupakan kawasan industri brem dimana pengolahan brem menggunakan bahan bakar kayu sehingga rawan terjadi kebakaran • Terdapat sebagian permukiman kuldesak atau tidak teratur (bagian belakang rumah satu berhadapan dengan bagian depan rumah yang lainnya) sehingga jarak antara bangunan	epada masyarakat dan siswa sekolah • Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi alat pemadam kebakaran sejak dini melalui penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggula	sumber air setempat • Penyediaan alat pemadam kebakaran portable • Penetapan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses	melalui pemahaman penyebab , dampak dan penanggulangan awal bencana kebakaran • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran oleh masyarakat dan	pengelolaan persampahan untuk merubah kondisi menjadi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	evakuasi kebakaran	portable • Menetapkan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Menetapkan lokasi evakuasi bencana berada berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				sangat dekat • Belum ada sarana proteksi kebakaran	ngan kebakaran.	(kecuali fasilitas pendidikan)	dinas terkait			
			Ruang Publik	• Terdapat ruang publik di sepanjang pantai sebagai area berkumpul masyarakat namun kondisinya tidak teroganisasi dan terawat sehingga kurang nyaman	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik	• Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik masyarakat di beberapa spot	• Pemberdayaan Masyarakat •	• Pemugaran	• Pemberdayaan Masyarakat melalui pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik	• Pemugaran ruang publik dengan Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik masyarakat di beberapa spot

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			Sosial Ekonomi	• Kondisi kawasan kurang mendukung pengembangan pelabuhan internasional • Mutu produk belum memadai penangannya	• Sosialisasi dan fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar dll • Sosialiasi pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan pelabuhan internasional	• Peningkatan estetika kawasan pendukung pelabuhan internasional	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran • Peremajaan	• Pengembangan komoditi dengan pola OVOP/one village one product yang berbasis clusster • Fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar	• Peningkatan estetika kawasan pendukung pelabuhan internasional antara lain aksesibilitas, landmark dan amenitas
5.	Kawasan Permukiman kumuh Semiring	Tipologi : Perumahan kumuh dan permuki	Bangunan Gedung	• Beberapa pola permukiman kuldesak atau tidak teratur, tidak ada	• Pengawasan dan pengendalian pendirian bangunan hunian yang tidak	• Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni	• Pemberdayaan Masyarakat berupa kepedulian	• Pemugaran bangunan di permukiman kuldesak	• Kampanye dan sosialisasi lingkungan sehat dan nyaman • Menerapka	• Mengembangkan kampung sehat bahari • Perbaikan RTLH

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		man kumuh di tepi air Kategori : Kumuh sedang		pengaturan kavling. Sehingga, bagian belakang rumah membelakangi pantai dan berada pada sempadan pantai • 500 unit Bangunan tidak teratur • 0 unit Kepadatan bangunan tidak sesuai ketentuan • 457 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	sesuai aturan dan perizinan • Pembinaan masyarakat dalam hal aturan dan perizianan pendirian bangunan hunian	• Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur • Pengaturan hunian tidak teratur dengan pola peremajaan	terhadap rumah sehat • Pengawasan dan Pengendalian terkait penerapan keteraturan bangunan baru	dengan merubah orientasi rumah dan persil bangunan • Pemugaran berupa rehabilitasi agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun	n Peraturan Zonasi untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman kumuh • Meningkatkan system regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis	dengan Pemugaran pada 500 unit bangunan di permukiman kumuh • Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur
			Jalan Lingkungan	• Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	• Pemeliharaan jalan eksisting secara berkala	• Perbaikan permukaan jalan aspal	• Pemberdaayaan masyarakat berupa	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi jalan	• Melakukan pemeliharaan jalan eksisting secara	• Meningkatkan kualitas permukaan jalan tanah menjadi

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				(perkerasan aspal dan paving dalam kondisi rusak) yaitu sepanjang 5753 meter • Jalan belum terbangun sepanjang 2248 meter • Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari (pantai) kurang menarik dan lancar karena kondisi jalan eksisting banyak yang rusak dan tidak tertata		dan paving • Peningkatan estetika dan Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari	swadaya masyarakat • Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi jalan lingkungan oleh aparat terkait	untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun • Pemugaran koridor jalan untuk peningkatan estetika dan Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari	berkala oleh SKPD terkait dan masyarakat setempat	jalan paving dan aspal sepanjang 5753 meter • Pembangunan jalan baru/ tanah sepanjang 2248 meter • Memperbaiki jalan untuk peningkatan estetika dan Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari
			Air Minum	• Sebanyak 347 KK rumah tangga tidak dapat mengakses air minum	• Sosialisasi hemat air dan menjaga sumber air • Penyediaan	• Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliha	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit penyediaa	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas	• Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembal

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				yang aman (bersih, tidak berbau dan tidak berwarna) • Masih sebagian masyarakat yang terlayani jaringan perpipaan PDAM karena dirasa mahal	pelayanan air minum melalui pipanisasi baru oleh PDAM • Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam	melalui penambahan jaringan pipanisi PDAM • Optimalisasi layanan eksisting	raan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur bor oleh dinas terkait	n air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti pengganti an komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur oleh dinas terkait	ikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan • Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										unit air baku dan unit produksi • Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
			Drainase Lingkungan	• Jalan lingkungan yang tidak memiliki saluran drainase (drainase blum terbangun dan hanya	• Melaksanakan sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaata	• Membangun saluran drainase sepanjang 648 meter • Normalisasi Saluran	• Pemberdayaan masyarakat terkait kesadaran pemeliharaan kondisi	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengemb	• Melakukan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Melakukan pengerukan saluran drainase	• Memperbaiki saluran drainase sesuai standar teknis sepanjang 2101 meter • Pembangun

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				berupa cekungan tanah) adalah sepanjang 2101 meter • Drainase belum tersistem dg baik karena belum semua saluran tersier-sekunder-primer belum terhubung dg kapasitas yang memadai • kapasitas drainase yang kecil dan saluran drainase yang tidak terpelihara (banyak sampah) • kondisi drainase rusak	n drainase • Melakukan sosialiasi pada masyarakat dan siswa sekolah akan pentingnya menjaga drainase dari sampah yang berakibat munculnya genangan banjir dan cara menanggulanginya • Pemeliharaan saluran drainase eksisting	• Pemeliharaan saluran drainase eksisting secara berkala • Pengembangan sumur resapan berupa parit berorak pada saluran – saluran drainase • Rehab saluran drainase	drainase termasuk optimalisasi fungsi saluran dan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Pengendalian dan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi drainase oleh dinas terkait	alikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun /disediakan, seperti pengganti an kompone n gorong-gorong, perbaikan struktur drainase • Pemugaran dengan jenis revitalisasi dengan meningkatkan kualitas saluran drainase belum	dan sungai secara berkala • Sosialisasi tentang lingkungan sehat di semua lini masyrakat • Membuat papan larangan membuang sampah sembarang	an saluran drainase baru sepanjang 2681 meter • Normalisasi Saluran • Mengembangkan jalur hijau berupa taman pasif di sempadan jalan dan sungai • Pembangunan tangkis/ tanggul laut

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				sepanjang 2681 meter • belum tersedia tangkis laut sehingga air laut sering naik ke permukiman warga				terbangun menjadi drainase terbangun, peningkatan volume saluran drainase, dll.		
			Pengolahan air limbah	• Sebanyak 402KK tangga yang belum memiliki Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis • Sebanyak 549 KK yang memiliki jamban yang tidak terhubung dengan septic-tank (saluran air	• Peningkatan kampanye dan sosialisasi oleh sanitarian kepada masyarakat • Peningkatan sosialisasi PHBS dan pentingnya MCK dan IPAL atau Septic Tank yang memenuhi syarat teknis	• Pengembangan jambanisasi yang dilengkapi dengan tangki septic • Pengoptimalan IPAL komunal • Pembangunan unit pengolahan air limbah setempat ditempat	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemahaman PHBS dan kesadaran pentingnya fungsi septic tank	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis seperti pengganti	• Sosialisasi dan kampanye sanitasi sehat • Optimalisasi fungsi MCK umum	• Mengembangkan jamban pribadi yang terhubung septictank • Mengembangkan IPAL komunal/Tangki Septik Komunal

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				limbang langsung masuk ke sal. Drainase) • Perilaku masyarakat masih BABS di laut	• Melakukan edukasi dini pada siswa dan lomba lingkungan sekolah sehat	kan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah • Pembangunan unit perpipaan menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah		an komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.		

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			Pengelolaan Persampahan	• Belum terdapat bak sampah dan sarana pengangkutan berupa gerobak • Sebanyak 559 KK tidak terlayani sistem pengangkutan sampah ke TPS/TPA • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Terbukti dengan masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai, saluran dan lahan kosong.	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Pengadaan pelatihan-pelatihan terhadap BKM / kelompok masyarakat peduli sampah • Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah dan larangan buang sampah sembarangan	• Pembentukan sistem pengangkutan sampah yang melayani seluruh kawasan • Pengadaan sarana persampahan berupa bak sampah, TPS, bank Sampah • Pengadaan prasarana persampahan berupa gerobak/ mobil/motor	• Pemberdayaan masyarakat terkait 3R • Pengawasan dan pengendalian terhadap terjadinya tumpukan sampah akibat tidak adanya system pengangkutan sampah	• Pemugaran dengan jenis revitalisasi unit pengelolaan persampahan untuk merubah kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penyediaan sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangk	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Membentuk kader lingkungan sebagai pelaksana pengolahan sampah 3R dengan melibatkan peran ibu rumah tangga	• Menyediakan sarana persampahan berupa bak sampah dan gerobak sampah • Pengadaan sarana pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA (berupa motor pengangkut) • Membentuk sistem dan rute pengangkutan sampah dari TPS ke TPA • Pengadaan pengelolaan sampah

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				• Belum ada sistem pengolahan sampah baik di TPS maupun di lingkungan permukiman		pengangkut sampah dan pembentukan satgas • Pelatihan pengelolaan sampah oleh masyarakat		utan, dan pengolahan.		setempat untuk meminimalisasi buangan ke TPA
			Sistem Proteksi Kebakaran	• Mayoritas bangunan menggunakan bahan material kayu yang mudah terbakar • Merupakan kawasan industri brem dimana pengolahan brem menggunakan bahan bakar	• Sosialisasi tentang evakuasi kebakarankepada masyarakat dan siswa sekolah • Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya	• Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Penyediaan alat pemadam kebakaran portable • Penetapan jalur	• Pemberdayaan Masyarakat melalui pemahaman penyebab , dampak dan penanggulangan awal bencana	• Pemugaran dengan revitalisasi unit pengelolaan persampahan untuk merubah kondisi menjadi sesuai dengan	• Sosialisasi tentang mitigasi dan evakuasi kebakaran	• Menyediakan alat pemadam kebakaran portable • Menetapkan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Menetapka

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				kayu sehingga rawan terjadi kebakaran • Terdapat sebagian permukiman kuldesak atau tidak teratur (bagian belakang rumah satu berhadapan dengan bagian depan rumah yang lainnya) sehingga jarak antara bangunan sangat dekat • Belum ada sarana proteksi kebakaran	mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi alat pemadam kebakaran sejak dini melalui penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)	kebakaran • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran oleh masyarakat dan dinas terkait	persyaratan teknis, seperti penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran		n lokasi evakuasi bencana berada berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)
			Ruang Publik	• Terdapat ruang publik di sepanjang pantai sebagai area berkumpul	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan dan	• Peningkatan kualitas dan estetika ruang	• Pemberdayaan Masyarakat •	• Pemugaran	• Pemberdayaan Masyarakat melalui pemanfaatan dan	• Pemugaran ruang publik dengan Peningkatan kualitas

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				masyarakat namun kondisinya tidak teroganisasi dan terawat sehingga kurang nyaman	pemeliharaan ruang terbuka untuk publik	publik masyarakat di beberapa spot			pemeliharaan ruang terbuka untuk publik • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik	dan estetika ruang publik masyarakat di beberapa spot
			Sosial Ekonomi	• Kondisi kawasan kurang mendukung pengembangan pelabuhan internasional • Mutu produk belum memadai	• Sosialisasi dan fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran,	• Peningkatan estetika kawasan pendukung pelabuhan internasional	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran • Peremajaan	• Pengembangan komoditi dengan pola OVOP/one village one product yang berbasis	• Peningkatan estetika kawasan pendukung pelabuhan internasional antara lain aksesibilit

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				penangannya	daya tawar dll • Sosialiasi pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan pelabuhan internasional				clusster • Fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar	as, landmark dan amenitas
6.	Kawasan Permukiman kumuh Perante	Tipologi: Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah Kategori : Kumuh Ringan	Bangunan Gedung	• 612 Unit Bangunan tidak teratur • 784 Unit Bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	• Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah sehat • Sosialisasi terkait Penerapan peraturan KDB, KLB, orientasi bangunan pada bangunan baru	• Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur • Peningkatan bangunan RTLH	• Pemberdayaan Masyarakat berupa kepedulian terhadap rumah sehat • Pengawasan dan Pengendalian terkait penerapan	• Pemugaran berupa rehabilitasi agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun	• Kampanye dan sosialisasi lingkungan sehat dan nyaman Menerapkan Peraturan Zonasi untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman kumuh	• Perbaikan RTLH sebanyak 784 unit • Mengembangkan kampung hijau (green clean) • Pemugaran pada bangunan di permukiman kuldesak dengan merubah

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							keteraturan bangunan baru			orientasi rumah agar saling berhadapan • Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur
			Jalan Lingkungan	4432 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Pemeliharaan jalan eksisting	• Perbaikan permukaan jalan aspal dan paving • Pembangunan jalan baru atau peningkatan kualitas jalan tanah menjadi jalan	• Pemberdaayaan masyarakat berupa swadaya masyarakat • Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi jalan lingkungan oleh aparat terkait	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi jalan, seperti perbaikan struktur jalan • revitalisasi jalan untuk peningkatan kualitas lingkungan dari jalan tidak	• Melakukan pemeliharaan jalan eksisting secara berkala oleh SKPD terkait dan masyarakat setempat	• Pembangunana jalan baru sepanjang 4432 meter

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						paving/ aspal		terbangun menjadi terbangun		
			Air Minum	• 535 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman (bersih, tidak berbau dan tidak berwarna) • Sebagian masyarakat menggunakan sumur untuk kebutuhan mencuci dan mandi dan untuk kebutuhan minum, dengan cara membeli air jirigen Masih sebagian masyarakat yang terlayani	• Sosialisasi hemat air	• Pembangunan jaringan perpipaan PDAM untuk menjangkau kebutuhan semua masyarakat • Pembangunan Sumur Bor dan kualitas air bersih • Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur bor oleh dinas terkait	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun /disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur oleh dinas terkait	• Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				jaringan perpipaan PDAM		permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam • Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan berada di bawah tanah		air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan		• Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
										distribusi dan unit pelayanan
			Drainase Lingkungan	• 5099 meter Tidak tersedia drainase lingkungan • 1062 meter memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk	• Melaksanakan sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase • Melakukan sosialiasi pada masyarakat dan siswa sekolah akan pentingnya menjaga drainase dari sampah yang berakibat munculnya genangan	• Membangun saluran drainase baru • Peningkatan kualitas konstruksi drainase • Normalisasi Saluran • Pemeliharaan saluran drainase eksisting secara berkala • Pengembangan sumur resapan berupa parit	• Pemberdayaan masyarakat terkait kesadaran pemeliharaan kondisi drainase termasuk optimalisasi fungsi saluran dan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Pengendalian dan pengawa	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi sarana dan prasarana drainase, seperti pengganti an kompone n gorong-gorong, perbaikan struktur drainase • Pemugaran dengan jenis revitalisasi dengan meningkatkan kualitas saluran drainase	• Melakukan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Melakukan pengerukan saluran drainase dan sungai secara berkala • Sosialisasi tentang lingkungan sehat di semua lini masyrakat • Membuat papan larangan membuang sampah sembarang	• Memperbaiki saluran drainase sesuai standar teknis 1062 meter • Pembangunan saluran drainase baru 5099 meter • Normalisasi Saluran • Meningkatkan volume saluran drainase eksisting • Mengembangkan jalur hijau berupa taman pasif di sempadan jalan dan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					banjir dan cara menanggulanginya Pemeliharaan saluran drainase eksisting	berorak pada saluran – saluran drainase	san terhadap kondisi dan fungsi drainase oleh dinas terkait	belum terbangun menjadi drainase terbangun, peningkatan volume saluran drainase, dll.		sungai
			Pengolahan air limbah	• 326 KK Sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 326 KK Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis • Perilaku masyarakat masih BABS di Sungai	• Sosialisasi/ Penyuluhan kepada masyarakat tentang PHBS dan STBM juga pentingnya MCK dan IPAL, dan Septic Tank yang memenuhi syarat	• Pembangunan MCK Komunal untuk sanitasi • Bantuan pembangunan jamban pribadi yang terhubung septic tank • Pembangunan unit	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemahaman PHBS dan kesadaran pentingnya fungsi septic tank	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit pengelolaan air limbah sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penggantian komponen pada SPAL-T	• Sosialisasi dan kampanye sanitasi sehat • Optimalisasi fungsi MCK umum	• Mengembangkan jamban pribadi yang terhubung septictank • Mengembangkan IPAL komunal/Tangki Septik Komunal

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah		seperti komponen pemipaan, pengganti an komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.		
			Pengelolaan Persampahan	• 935 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 861 KK Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Sosialisasi untuk tidak membuang sampah di sungai dan saluran	• Pembentukan sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah • Peningkatan kerjasama antara	• pemberdayaan masyarakat berupa pengolahan sampah 3 R • Kerjasama dengan swasta/ perorangan untuk invesasi	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Membentuk kader lingkungan sebagai pelaksana	• Pengoptimlan fungsi TPS an sarana persampahan dikawasan Permukiman • Pengoptimalan sistem pengangkutan sampah dari bak

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				• kesadaran masyrakat tentang hidup bersih sehat masih rendah	• Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah dan larangan buang sampah sembarangan	pemerintah dengan swasta atau perorangan dalam pengelolaan persampahan • Pengelolaan sampah di tingkat masyarakat (bank sampah)	dalam sistem pengolahan sampah	dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan	pengolahan sampah 3R dengan melibatkan peran ibu rumah tangga • Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah	menuju TPS dan dari TPS menuju TPA • Menyediakan sarana dan prasarana persampahan termasuk sarana gerobak/mobil/motor pengangkut sampah dari hunian menuju TPS dan TPA
			Sistem Proteksi Kebakaran	• Kawasan padat • Kawasan merupakan rawan kebakaran dikarenakan banyak	• Sosialisasi tentang evakuasi kebakaran • Meningkatkan pemahaman kepada	• Penyediaan alat pemadam kebakaran portable • Penetapa	• Pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman akan	Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit proteksi kebakara	• Sosialisasi tentang evakuasi kebakaran • Meningkatkan pemahaman kepada	• Menyediakan alat pemadam kebakaran portable • Menetapkan jalur evakuasi

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				material bangunan menggunakan kayu • Belum ada sarana proteksi kebakaran	masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran	n jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)	pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi alat pemadam kebakaran sejak dini • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang dapat menyebabkan terjadiny	n untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti pengganti an sarana dan prasarana proteksi kebakaran	masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi alat pemadam kebakaran sejak dini melalui penyuluhan dan pelatihan	bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Menetapkan Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							a kebakaran oleh masyarakat dan dinas terkait			
			Ruang Publik	• Belum adanya ruang publik sebagai area berkumpul masyarakat	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik	• Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik masyarakat di beberapa spot	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Pemberdayaan Masyarakat melalui pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ruang	• Pemugaran ruang publik dengan Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik masyarakat di beberapa spot

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
									terbuka untuk publik	
			Sosial Ekonomi	• Kondisi kawasan kurang mendukung pengembangan wisata kuliner • Kurangnya pemasaran event kuliner dan makanan khas perante sehingga pasar terbatas	• Sosialisasi dan fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar dll • Fasilitasi kegiatan pemasaran event kuliner lintas wilayah	• Peningkatan estetika kawasan pendukung wisata kuliner	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran • Peremajaan	• Pengembangan komoditi dengan pola OVOP/one village one product • Fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar	• Peningkatan estetika kawasan pendukung wisata kuliner antara lain aksesibilitas, landmark, dan wadah display produk
7.	Kawasan Permukiman kumuh Wringinanom	Tipologi: Perumahan kumuh dan permuki	Bangunan Gedung	• 294 Unit Bangunan tidak teratur • 386 Unit Bangunan tidak memenuhi	• Sosialisasi dan edukasi mengenai rumah sehat • Sosialisasi terkait	• Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih	• Pemberdayaan Masyarakat berupa kepedulian terhadap	• Pemugaran berupa rehabilitasi agar fungsi dan massa	• Kampanye dan sosialisasi lingkungan sehat dan nyaman • Menerapka	• Perbaikan RTLH sebanyak 386 unit • Mengembangkan kampung

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		man kumuh di dataran rendah Kategori : Kumuh Sedang		persyaratan teknis	Penerapan peraturan KDB, KLB, orientasi bangunan pada bangunan baru	teratur • Peningkatan bangunan RTLH	rumah sehat • Pengawasan dan Pengendalian terkait penerapan keteraturan bangunan baru	bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun	n Peraturan Zonasi untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman kumuh	hijau (green n clean) • Pemugaran pada bangunan di permukiman kuldesak dengan merubah orientasi rumah agar saling berhadapan • Penataan bangunan hunian baru dengan pola yang lebih teratur
			Jalan Lingkungan	6918 meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Pemeliharaan jalan eksisting	• Perbaikan permukaan jalan aspal dan paving	• Pemberdaayaan masyarakat berupa swadaya masyarakat	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi jalan, seperti perbaikan	• Melakukan pemeliharaan jalan eksisting secara berkala oleh SKPD	• Pembangunana jalan baru sepanjang 6918meter

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						• Pembangunan jalan baru atau peningkatan kualitas jalan tanah menjadi jalan paving/ aspal	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi jalan lingkungan oleh aparat terkait	struktur jalan • revitalisasi jalan untuk peningkatan kualitas lingkungan dari jalan tidak terbangun menjadi terbangun	terkait dan masyarakat setempat	
			Air Minum	• 236 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman (bersih, tidak berbau dan tidak berwarna) • Sebagian masyarakat menggunakan sumur untuk kebutuhan mencuci dan	• Sosialisasi hemat air	• Pembangunan jaringan perpipaan PDAM untuk menjangkau kebutuhan semua masyarakat • Pembangunan Sumur	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum • Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemeliharaan kualitas air minum Pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas pemakaian air sumur oleh dinas	• Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis, seperti penggantian

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				mandi dan untuk kebutuhan minum, dengan cara membeli air jirigen Masih sebagian masyarakat yang terlayani jaringan perpipaan PDAM		Bor dan kualitas air bersih • Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam • Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan	pemakaian air sumur bor oleh dinas terkait	saat awal dibangun/ disediakan, seperti pengganti an komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	terkait	komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan • Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi Peningkatan jangkauan pelayanan

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
						berada di bawah tanah				dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan / perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
			Drainase Lingkungan	• 7300 meter Tidak tersedia drainase lingkungan • 992 meter memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk	• Melaksanakan sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainase • Melakukan sosialiasi pada masyarakat dan siswa sekolah akan pentingnya menjaga	• Membangun saluran drainase baru • Peningkatan kualitas konstruksi drainase • Normalisasi Saluran • Pemeliharaan saluran drainase eksisting secara	• Pemberdayaan masyarakat terkait kesadaran pemeliharaan kondisi drainase termasuk optimalisasi fungsi saluran dan pemeliharaan	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi sarana dan prasarana drainase, seperti pengganti an kompone n gorong-gorong, perbaikan struktur drainase • Pemugaran dengan jenis	• Melakukan pemeliharaan saluran drainase secara berkala • Melakukan pengerukan saluran drainase dan sungai secara berkala • Sosialisasi tentang lingkungan sehat di semua lini masyrakat • Membuat	• Memperbaiki saluran drainase sesuai standar teknis 992meter • Pembangunan saluran drainase baru 7300 meter • Normalisasi Saluran • Meningkatkan volume saluran drainase eksisting • Mengemba

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
					drainase dari sampah yang berakibat munculnya genangan banjir dan cara menanggulanginya Pemeliharaan saluran drainase eksisting	berkala • Pengembangan sumur resapan berupa parit berorak pada saluran – saluran drainase	saluran drainase secara berkala • Pengendalian dan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi drainase oleh dinas terkait	revitalisasi dengan meningkatkan kualitas saluran drainase belum terbangun menjadi drainase terbangun, peningkatan volume dll.	papan larangan membuang sampah sembarang	ngkan jalur hijau berupa taman pasif di sempadan jalan dan sungai
			Pengolahan air limbah	• 207 KK Sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 278 KK Sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis • Perilaku	• Sosialisasi/ Penyuluhan kepada masyarakat tentang PHBS dan STBM juga pentingnya MCK dan IPAL, dan Septic Tank yang memenuhi	• Pembangunan MCK Komunal untuk sanitasi • Bantuan pembangunan jamban pribadi yang terhubun	• Pemberdayaan masyarakat terkait pemahaman PHBS dan kesadaran pentingnya fungsi septic tank	• Pemugaran dengan jenis rehabilitasi unit pengelolaan air limbah sesuai dengan persyaratan teknis, seperti	• Sosialisasi dan kampanye sanitasi sehat • Optimalisasi fungsi MCK umum	• Mengembangkan jamban pribadi yang terhubung septictank • Mengembangkan IPAL komunal/Tangki Septik Komunal

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				masyarakat masih BABS di Sungai	syarat	g septic tank • Pembangunan unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah		pengganti an komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, pengganti an komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.		
			Pengelol aan Persam pahan	• 570 KK Sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 500 KK	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan sistem 3R • Sosialisasi	• Pembent ukan sistem pengang kutan dan pengelol aan sampah	• pemberd ayaan masyarak at berupa pengolah an sampah 3 R • Kerjasam	• Pemugara n dengan jenis rehabilitas i unit pengelolaa n persampa han	• Melakukan sosialisasi kepada masyaraka t terkait pengelolaa n sampah dengan sistem 3R	• Pengoptiml an fungsi TPS an sarana persampah an dikawasan Permukima n

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				Sistem persampahan tidak sesuai standar teknis • kesadaran masyrakat tentang hidup bersih sehat masih rendah	untuk tidak membuang sampah di sungai dan saluran • Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah dan larangan buang sampah sembarangan	• Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau perorangan dalam pengelolaan persampahan • Pengelolaan sampah di tingkat masyarakat (bank sampah)	a dengan swasta/ perorangan untuk invesasi dalam sistem pengolahan sampah	sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti pengganti an sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan.	• Membentuk kader lingkungan sebagai pelaksana pengolahan sampah 3R dengan melibatkan peran ibu rumah tangga • Melakukan edukasi dini pada siswa tentang pengolahan sampah	• Pengoptimalan sistem pengangkutan sampah dari bak menuju TPS dan dari TPS menuju TPA • Menyediakan sarana dan prasarana persampahan termasuk sarana gerobak/mobil/motor pengangkut sampah dari hunian menuju TPS dan TPA
			Sistem Proteksi Kebakar	• Kawasan padat • Kawasan	• Sosialisasi tentang evakuasi	• Penyedian alat pemada	• Pemberdayaan masyara	Pemugaran dengan jenis	• Sosialisasi tentang evakuasi	• Menyediakan alat pemadam

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			an	merupakan rawan kebakaran dikarenakan banyak material bangunan menggunakan kayu • Belum ada sarana proteksi kebakaran	kebakaran • Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran	m kebakaran portable • Penetapan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama • Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses (kecuali fasilitas pendidikan)	kat melalui pemahaman akan pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi alat pemadam kebakaran sejak dini • Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyara	rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti pengganti an sarana dan prasarana proteksi kebakaran	kebakaran • Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta mengenalkan proteksi alat pemadam kebakaran sejak dini melalui penyuluhan dan pelatihan	kebakaran portable • Menetapkan jalur evakuasi bencana yaitu jalan lingkungan dan jalan utama Menetapkan Lokasi evakuasi bencana berada di fasilitas umum yang mempunyai kemudahan akses

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							kat yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran oleh masyarakat dan dinas terkait			
			Ruang Publik	• Belum adanya ruang publik sebagai area berkumpul masyarakat yang representatif	• Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka publik	• Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik masyarakat di beberapa spot	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran	• Pemberdayaan Masyarakat melalui pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka untuk publik	• Peremajaan ruang publik dengan Peningkatan kualitas dan estetika ruang publik masyarakat yang representatif
			Sosial Ekonomi	• Kurang adanya produk unggulan	• Sosialisasi dan fasilitasi masayaraka	• Peningkatan estetika kawasan	• Pemberdayaan Masyarakat	• Pemugaran • Peremajaan	• Pengembangan komoditi dengan	• Peningkatan estetika kawasan pendukung

No.	Kawasan Kumuh	Tipologi Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
					Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
				desa wringin anom	t terkait peningkatan kapasitas UMKM, pengolahan dan inovasi produk	pendukung produk unggulan desa			pola OVOP/one village one product	

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan - Kilensari

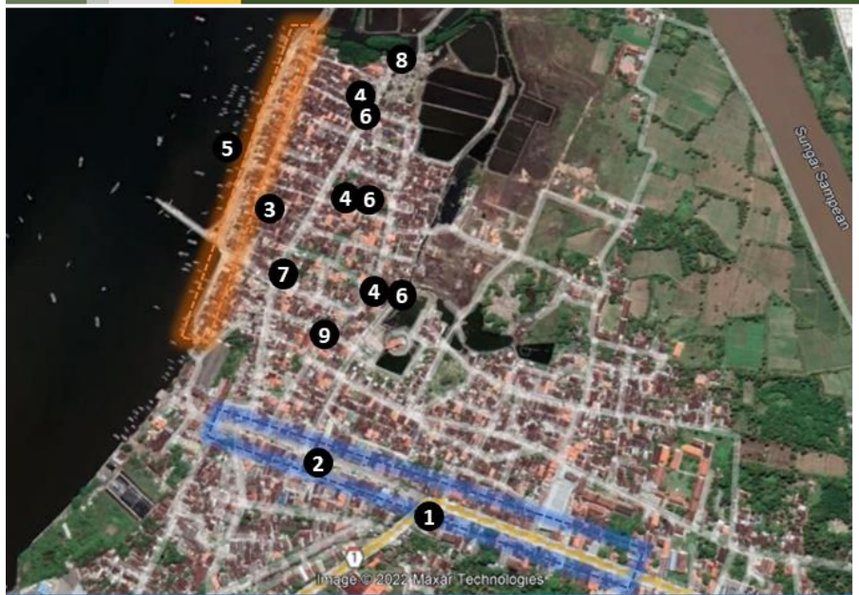

"TEMA PENGEMBANGAN : KAMPUNG WISATA BAHARI KILENSARI"

1. Penataan landmark dan pintu masuk kawasan
2. Penataan koridor masuk Kampung Wisata Bahari Kilensari
3. Penataan ruang public & amenitas wisata (warung makan, mushola, kamar mandi dll)
4. Peningkatan aksesibilitas dan jalan lingkungan
5. Pembangunan tangkis laut
6. Peningkatan kualitas saluran drainase
7. Penataan system pengelolaan sampah
8. Penataan system pengelolaan air limbah
9. Penataan system proteksi kebakaran

ISU PERMASALAHAN

- Beberapa pola permukiman kuldesak atau tidak teratur dan tidak sesuai standar teknis
- Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari (pantai) kurang menarik dan lancar karena kondisi jalan eksisting banyak yang rusak dan tidak tertata
- Masih sebagian masyarakat yang terlayani jaringan perpipaan PDAM karena dirasa mahal
- belum tersedia tangkis laut sehingga air laut sering naik ke permukiman warga
- Drainase belum tersistem dg baik karena belum semua saluran tersier-sekunder-primer belum terhubung dg kapasitas yang memadai
- Banyak masy yang belum memiliki Jamban keluarga yang terhubung dengan septic-tank
- Belum ada sistem pengolahan sampah
- Kondisi kawasan kurang mendukung pengembangan wisata bahari
- Pendidikan para nelayan relatif masih rendah
- Posisi tawar antara nelayan dengan pemilik kapal ikan masih lemah
- Mutu produk belum memadai penangannya

KONSEP PENCEGAHAN & PENINGKATAN

Pencegahan :
- Pengawasan & Pengendalian
- Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan :
- Pemugaraan
- Peremajaan

STRATEGI PENCEGAHAN

- Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan Pemeliharaan layanan infrastruktur eksisting
- Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat terkait PHBS
- Meningkatkan system regulasi, perixinan, pen ataan ruang dan standar teknis
- Pengembangan komoditi dengan pola OVOP/ *one village one product* yang berbasis cluster
- Fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, daya tawar

STRATEGI PENINGKATAN

BANGUNAN
Mengembangkan kampung sehat bahari dan perbaikan RTLH
JALAN
Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan belum terbangun
Memperbaiki jalan untuk peningkatan estetika dan Aksesibilitas menuju kawasan wisata bahari
DRAINASE
Pembuatan tangkis/ tanggul laut, sudetan, rehabilitasi saluran eksisting, peningkatan konektvitas jaringan drainase
AIR LIMBAH
Mengembangkan IPAL komunal/Tangki Septik KomunaL
SAMPAH
Penyediaan sarana prasarana dan system pengelolaan sampah mulai dari lingkungan sampai tingkat kota
AIR BERSIH
Pemerataan jaringan perpipaan dan pemanfaatan sumber air baku secara efisien
PROTEKSI KEBAKARAN
Menyediakan alat pemadam kebakaran dan menetapkan jalur evakuasi bencana
SOSIAL EKONOMI
Peningkatan estetika kawasan pendukung wisata bahari antara lain ruang public, aksesibilitas, landmark, amenitas dan wadah display produk

Gambar 5. 2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Kilensari
Sumber : Hasil Analisa, 2022

Gambar 5. 3 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Alasmalang

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan - Olean

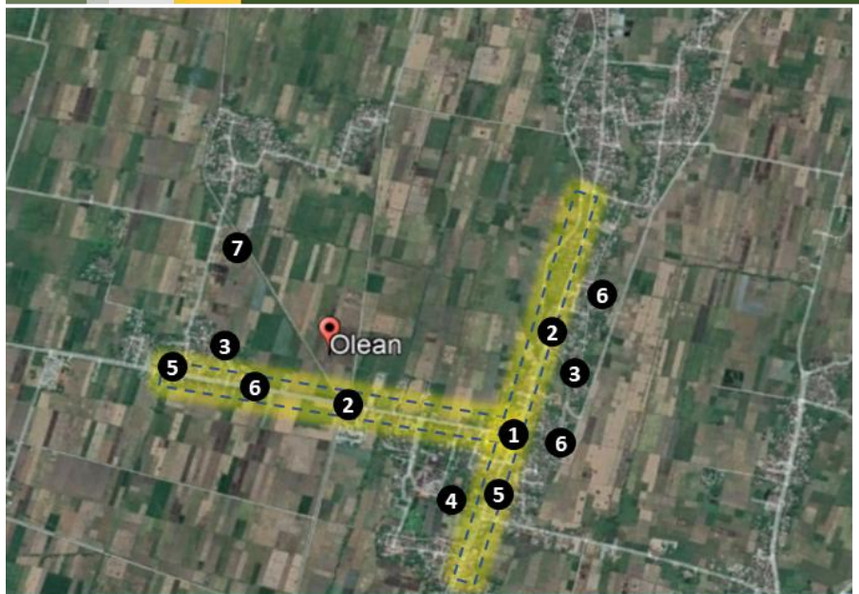

"TEMA PENGEMBANGAN : KAMPUNG WISATA TERPADU OLEAN"

(Kampung Mistis Karang Kenek, Hidroponik, Revitalisasi Pabrik Gula Olean menjadi Wisata Museum)

1. Penataan landmark dan pintu masuk kawasan
2. Penataan koridor dan penanda pintu masuk Kampung wisata terpadu olean
3. Pengembangan wisata edukasi hidroponik
4. Pengembangan wisata museum Pabrik Gula Olean
5. Peningkatan aksesibilitas kawasan
6. Peningkatan kualitas saluran drainase
7. Penataan system pengelolaan sampah
8. Penataan system pengelolaan air limbah
9. Penataan system proteksi kebakaran

ISU PERMASALAHAN

- Beberapa pola permukiman kuldesak atau tidak teratur dan tidak sesuai standar teknis
- Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta aksesibilitas menuju kawasan wisata edukasi kurang mendukung karena kondisi jalan eksisting banyak yang rusak dan tidak tertata
- Masih sebagian masyarakat yang terlayani jaringan perpipaan PDAM karena dirasa mahal
- Drainase belum tersistem dg baik karena belum semua saluran tersier-sekunder-primer belum terhubung dg kapasitas yang memadai
- Banyak masy yang belum memiliki Jamban keluarga yang terhubung dengan septic-tank
- Belum ada sistem pengolahan dan pengangkutan sampah
- **Kondisi kawasan kurang mendukung pengembangan wisata terpadu karena belum tersedianya amenitas pendukung dan rute wisata**
- **Kurang meluasnya pemasaran produk hidroponik**
- **Kurangnya pemasaran branding desa wisata edukasi oleh pemerintah desa**

KONSEP PENCEGAHAN & PENINGKATAN

Pencegahan :
- Pengawasan & Pengendalian
- Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan :
- Pemugaraan
- Peremajaan

STRATEGI PENCEGAHAN

- Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan Pemeliharaan layanan infrastruktur eksisting
- Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat terkait PHBS
- Meningkatkan system regulasi, perixinan, pen ataan ruang dan standar teknis
- Pengembangan komoditi dengan pola OVOP/ *one village one product* yang berbasis cluster
- Fasilitasi masayarakat terkait peningkatan kapasitas mutu produk, pemasaran, dan pengelolaan pariwisata oleh POKDARWIS

STRATEGI PENINGKATAN

BANGUNAN
Mengembangkan kampung sehat bahari dan perbaikan RTLH

JALAN
Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan belum terbangun
Memperbaiki jalan untuk peningkatan estetika dan Aksesibilitas menuju kawasan wisata edukasi

DRAINASE
Pembuatan sudetan, rehabilitasi saluran eksisting, peningkatan konektvitas jaringan drainase

AIR LIMBAH
Mengembangkan IPAL komunal/Tangki Septik KomunaL

SAMPAH
Penyediaan sarana prasarana dan system pengelolaan sampah mulai dari lingkungan sampai tingkat kota

AIR BERSIH
Pemerataan jaringan perpipaan dan pemanfaatan sumber air baku secara efisien

PROTEKSI KEBAKARAN
Menyediakan alat pemadam kebakaran dan menetapkan jalur evakuasi bencana

SOSIAL EKONOMI
Peningkatan estetika kawasan pendukung wisata edukasi antara lain ruang public, aksesibilitas, landmark, amenitas dan rute wisata

Gambar 5. 4 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Olean

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Gambar 5. 5 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Tanjung Pecinan – Semiring

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Gambar 5. 6 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Perante

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Gambar 5. 7 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Wringinanom

Sumber : Hasil Analisa, 2022

BAB VI
RENCANA PENCEGAHAN PERTUMBUHAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Permukiman kumuh merupakan bagian kecil dari seluruh kawasan permukiman dan perumahan di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu pola penanganan kawasan kumuh di perkotaan adalah dengan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh. Pola pencegahan dilakukan melalui:

a) Pengawasan dan pengendalian, dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b) Pemberdayaan masyarakat, dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

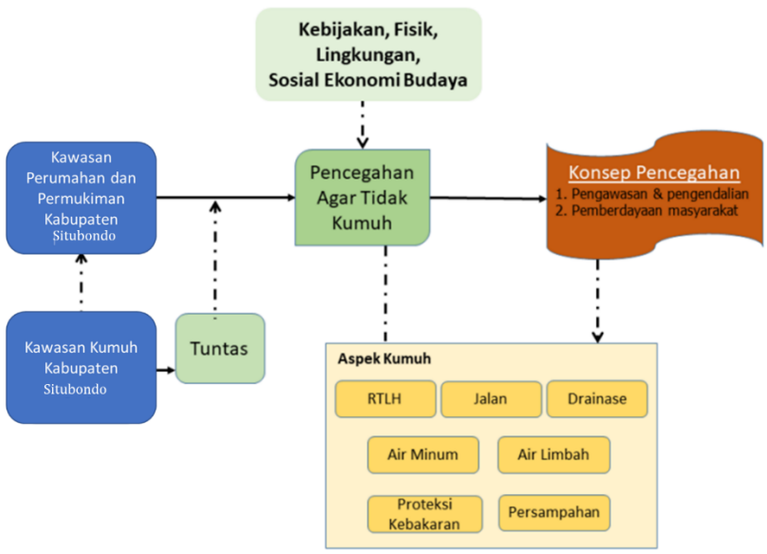

Gambar 6. 1 Pola Pencegahan Pertumbuhan Kawasan Permukiman Kumuh
Sumber : Hasil Analisa, 2021

Berdasarkan bagan diatas, pencegahan agar tidak kumuh kembali dapat dilakukan dengan beragam aspek, mulai dari kebijakan, fisik, lingkungan maupun sosial ekonomi budaya setempat. Adapun program dan kegiatan penanganan dirumuskan berdasarkan kajian kebijakan, profil permukiman kumuh, isu permasalahan, kebutuhan penanganan, konsep dan strategi penanganan pada bab sebelumnya. Dengan perumusan program dan kegiatan penanganan ini diharapkan dapat memberikan gambaran realisasi atau aplikasi penanganan baik pencegahan maupun peningkatan kualitas untuk kawasan permukiman kumuh perkotaan dan terukur sesuai dengan kebutuhan kawasan permukiman kumuh prioritas.

Program dan kegiatan pencegahan kumuh yang komprehensif dalam pembangunan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dalam mencegah timbulnya permukiman kumuh harus terintegrasi dengan susunan organisasi tata kelola pemerintah daerah, sehingga program pengentasan perumahan kumuh tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan tercapai. Program dan kegiatan tersebut harus terikat dalam nomenklatur program dan kegiatan di masing-masing satuan kerja pemerintah kota sesuai dengan tupoksi satuan kerja pemerintah kota masing-masing.

Adapun program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut.

Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan Pencegahan Kumuh

KONSEP PENCEGAHAN	STRATEGI PENCEGAHAN	PROGRAM	KEGIATAN
• Pengawasan & Pengendalian • Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis	Pengaturan dan pembinaan pengembangan permukiman	• Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lngkungan (RTBL)
			• Penyusunan masterplan kawasan
			• Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh (DED)
			• Kajian dan perencanaan sistem drainase perkotaan
			• Kajian dan perencanaan sistem sanitasi & limbah perkotaan
			• Kajian pengelolaan persampahan
			• Kajian Resiko dan Mitigasi Bencana
			• Penerapan isentif dan disinsentif terhadap pelaksanaan program
	Memantau setiap tahap pembangunan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	• Memantau setiap tahap pembangunan/ perbaikan infrastruktur dasar permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis
			• Menyusun standar air minum aman
			• Penertiban peraturan pendirian bangunan hunian (IMB & SHM)
			• Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

KONSEP PENCEGAHAN	STRATEGI PENCEGAHAN	PROGRAM	KEGIATAN
			• Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan, pengelolaan, & pemeliharaan lingkungan serta infrastruktur dasar	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	• Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai
			• Pemeliharaan rutin jalan
			• Pemeliharaan rutin drainase
			• Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran
			• Pemeliharaan bangunan rumah
			• Kerjabakti minggu-an untuk meningkatkan kebersihan lingkungan
	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam perilaku hidup bersih & sehat	Program Lingkungan Sehat	• Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan
			• Gerakan Kab. Situbondo Bersih dan Hijau
			• Pengolahan sampah melalui konsep 3R
			• Sosialisasi tatanan kawasan sehat
			• Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat
			• Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran
	Meningkatkan kepekaan terhadap kesejahteraan sosial	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	• Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
			• Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
			• Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin
			• Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
			• Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
	Meningkatkan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	• Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan

KONSEP PENCEGAHAN	STRATEGI PENCEGAHAN	PROGRAM	KEGIATAN
	Peningkatan perekonomian lokal	Program OVOP/one village one product	• Identifikasi Potensi Desa
			• Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran,, dll daya tawar

Sumber : Hasil Analisa, 2022

6.2 RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu diklasifikasikan berdasarkan skala kabupaten/kota dan skala kawasan. Berikut rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diperinci masing-masing skala, baik skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan.

Tabel 6. 2 Rencana Aksi Program Pencegahan Skala Kota

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
Kabupaten Situbondo	Pengaturan dan pembinaan pengembangan permukiman	• Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lngkungan (RTBL)	7	paket
		• Penyusunan masterplan kawasan	7	paket
		• Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh (DED)	7	paket
		• Kajian dan perencanaan sistem drainase perkotaan	1	paket
		• Kajian dan perencanaan sistem sanitasi & limbah perkotaan	1	paket
		• Kajian pengelolaan persampahan	1	paket
		• Kajian Resiko dan Mitigasi Bencana	1	paket
	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	• Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur dasar permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	7	Kawasan kumuh
		• Menyusun standar air minum aman	1	paket
		• Penertiban peraturan pendirian bangunan hunian (IMB & SHM)	7	Kawasan kumuh
		• Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung	7	Kawasan kumuh

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
		• Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	7	Kawasan kumuh
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	• Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	7	Kawasan kumuh
		• Pemeliharaan rutin jalan	7	Kawasan kumuh
		• Pemeliharaan rutin drainase	7	Kawasan kumuh
		• Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	7	Kawasan kumuh
		• Pemeliharaan bangunan rumah	7	Kawasan kumuh
		• Kerjabakti minggu-an untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	7	Kawasan kumuh
	Program Lingkungan Sehat	• Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	7	Kawasan kumuh
		• Gerakan Kab. Situbondo Bersih dan Hijau	7	Kawasan kumuh
		• Pengolahan sampah melalui konsep 3R	7	Kawasan kumuh
		• Sosialisasi tatanan kawasan sehat	7	Kawasan kumuh
		• Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	7	Kawasan kumuh
		• Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	7	Kawasan kumuh
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	• Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	7	Kawasan kumuh
		• Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	7	Kawasan kumuh
		• Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	7	Kawasan kumuh
		• Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	7	Kawasan kumuh
		• Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	7	Kawasan kumuh
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam	• Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	7	Kawasan kumuh

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
	pembangunan			

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Tabel 6. 3 Rencana Aksi Program Pencegahan Skala Kawasan

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
Kawasan Permukiman kumuh Kilensari	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket
		Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
	infrastruktur dasar permukiman	Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	12	paket
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran,, dll daya tawar	3	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
Kawasan Permukiman kumuh Alasmalang	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket
		Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan sarana	12	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
		prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran		
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	3	paket
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran, dll daya tawar	3	paket
Kawasan Permukiman kumuh	Pengawasan pembangunan dan	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan	3	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
Olean	pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis		
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket
		Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	3	paket
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran, dll daya tawar	3	paket
Kawasan Permukiman kumuh Tanjung Pecinan	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau	3	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
	agar sesuai dengan persyaratan teknis	pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis		
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket
		Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket
		Kerjabakti untuk meningkatkan	12	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
		kebersihan lingkungan		
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	3	paket
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran, dll daya tawar	3	paket
Kawasan Permukiman kumuh Semiring	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan	3	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
		yang sesuai dengan persyaratan teknis		
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket
		Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket
		Gerakan kilensari Bersih	3	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
		dan Hijau		
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	3	paket
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran, dll daya tawar	3	paket
Kawasan Permukiman kumuh Perante	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/	3	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
		perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis		
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket
		Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	3	paket
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran, dll daya tawar	3	paket
Kawasan Permukiman kumuh Wringinanom	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket
		Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	3	paket
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran, dll daya tawar	3	paket

Sumber : Hasil Analisa, 2022

6.3 MEMORANDUM PROGRAM PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERKOTAAN KUMUH

Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders. Memorandum program ini diperinci sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan. Suatu memorandum program meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, serta pelaku penanganan. Memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh Kabupaten Situbondo, dalam kerangka pencegahan kumuh ditampilkan pada table-tabel berikut ini.

Tabel 6. 4 Memorandum Program Pencegahan Kumuh Skala Kota

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE-)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			VOLUME	SATUAN	1	2	3	4	5		
Permukiman Kumuh Kabupaten Situbondo	Pengaturan dan pembinaan pengembangan permukiman	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lngkungan (RTBL)	7	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Penyusunan masterplan kawasan	7	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh (DED)	7	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Kajian dan perencanaan sistem drainase perkotaan	1	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Kajian dan perencanaan sistem sanitasi & limbah perkotaan	1	paket						APBD Kabupaten	DLH
		Kajian pengelolaan persampahan	1	paket						APBD Kabupaten	DLH
		Kajian Resiko dan Mitigasi Bencana	1	paket						APBD Kabupaten	BPBD
	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar	Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur dasar permukiman yang	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE-)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			VOLUME	SATUAN	1	2	3	4	5		
	sesuai dengan persyaratan teknis	sesuai dengan persyaratan teknis									
		Menyusun standar air minum aman	1	paket						APBD Kabupaten	PDAM, DINAS KESEHATAN
		Penertiban peraturan pendirian bangunan hunian (IMB & SHM)	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	SATPOL PP
		Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	BAPPEDA
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	BAPPEDA
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin jalan	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin drainase	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan sarana prasarana	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	DPUPP PEMERINTAH DESA

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE-)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			VOLUME	SATUAN	1	2	3	4	5		
		penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran								SWADAYA	
		Pemeliharaan bangunan rumah	7	Kawasan kumuh						SWADAYA	MASYARAKAT
		Kerjabakti minggu-an untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	7	Kawasan kumuh						SWADAYA	MASYARAKAT
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Gerakan Kab. Situbondo Bersih dan Hijau	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Pelatihan Pengolahan sampah melalui konsep 3R	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	DLH, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	DPUPP, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	SATPOL PP, BPBD

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE-)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			VOLUME	SATUAN	1	2	3	4	5		
		kebakaran									
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	7	Kawasan kumuh						APBN	DINAS SOSIAL, DPUPP
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	7	Kawasan kumuh						APBN	DINAS SOSIAL
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	7	Kawasan kumuh						APBN	DINAS SOSIAL
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	7	Kawasan kumuh						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	7	Kawasan kumuh						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	7	Kawasan kumuh						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket						DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE-)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			VOLUME	SATUAN	1	2	3	4	5		
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran,, dll daya tawar	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Tabel 6. 5 Memorandum Program Pencegahan Kumuh Skala Kawasan

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
Kawasan Permukiman kumuh Kilensari	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	PDAM, DINAS KESEHATAN
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis									
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	BAPPEDA

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP, DLH PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket						APBD Kabupaten	DLH, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DINAS KESEHATAN

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP, BPBD
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DPUPP
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket						DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran,, dll daya tawar	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
Kawasan Permukiman kumuh Alasmalang	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	PDAM, DINAS KESEHATAN
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	BAPPEDA
	Peningkatan peran masyarakat	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP, DLH PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket						APBD Kabupaten	DLH, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP, BPBD
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DPUPP
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN
	Program OVOP/one village one	Identifikasi Potensi Desa	3	paket						DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	product										
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran,, dll daya tawar	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
Kawasan Permukiman kumuh Olean	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	PDAM, DINAS KESEHATAN
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	BAPPEDA
	Peningkatan peran masyarakat	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP, DLH PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket						APBD Kabupaten	DLH, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP, BPBD
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DPUPP
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN
	Program OVOP/one village one	Identifikasi Potensi Desa	3	paket						DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	product										
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran,, dll daya tawar	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
Kawasan Permukiman kumuh Tanjung Pecinan	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	PDAM, DINAS KESEHATAN
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	BAPPEDA
	Peningkatan peran masyarakat	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP, DLH PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket						APBD Kabupaten	DLH, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP, BPBD
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DPUPP
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN
	Program OVOP/one village one	Identifikasi Potensi Desa	3	paket						DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	product										
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran,, dll daya tawar	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
Kawasan Permukiman kumuh Semiring	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	PDAM, DINAS KESEHATAN
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	BAPPEDA
	Peningkatan peran masyarakat	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP, DLH PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket						APBD Kabupaten	DLH, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP, BPBD
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DPUPP
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN
	Program OVOP/one village one	Identifikasi Potensi Desa	3	paket						DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	product	Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran,, dll daya tawar	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
Kawasan Permukiman kumuh Perante	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	PDAM, DINAS KESEHATAN
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis									
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	BAPPEDA
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	infrastruktur dasar permukiman	Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP, DLH PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket						APBD Kabupaten	DLH, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP, BPBD

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DPUPP
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket						DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk,	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		pemasaran,, dll daya tawar									
Kawasan Permukiman kumuh Wringinanom	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Memantau pembangunan/ perbaikan jaringan jalan permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pelayanan air minum skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	PDAM, DINAS KESEHATAN
		Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur drainase skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan limbah skala kawasan yang sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Memantau pembangunan/ perbaikan sarana prasarana pengelolaan proteksi kebakaran skala kawasan sesuai dengan persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	3	paket						APBD Kabupaten	BAPPEDA
	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan & pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman	Gotong royong dalam pemeliharaan kebersihan sungai	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin jalan skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan rutin drainase skala kawasan & lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP PEMERINTAH DESA

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
		Pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah proteksi kebakaran	12	paket						APBD Kabupaten SWADAYA	DPUPP, DLH PEMERINTAH DESA
		Pemeliharaan bangunan rumah	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
		Kerjabakti untuk meningkatkan kebersihan lingkungan	12	paket						SWADAYA	MASYARAKAT
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Gerakan kilensari Bersih dan Hijau	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi Pengolahan sampah melalui konsep 3R	3	paket						APBD Kabupaten	DLH, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DPUPP, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	3	paket						APBD Kabupaten	SATPOL PP, BPBD
	Program Penanganan Penyandang	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DPUPP

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					1	2	3	4	5		
	Masalah Kesejahteraan Sosial	Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	3	paket						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	12	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket						DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran,, dll daya tawar	3	paket						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP

Sumber : Hasil Analisa, 2022

BAB VII
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Peningkatan kualitas permukiman kumuh diperlukan untuk menuntaskan 7 kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satu pola penanganan kawasan kumuh di perkotaan adalah dengan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Peningkatan kualitas tersebut didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Adapun pola peningkatan dilakukan melalui:

a) Pemugaran, dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni; dan
b) Peremajaan, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar

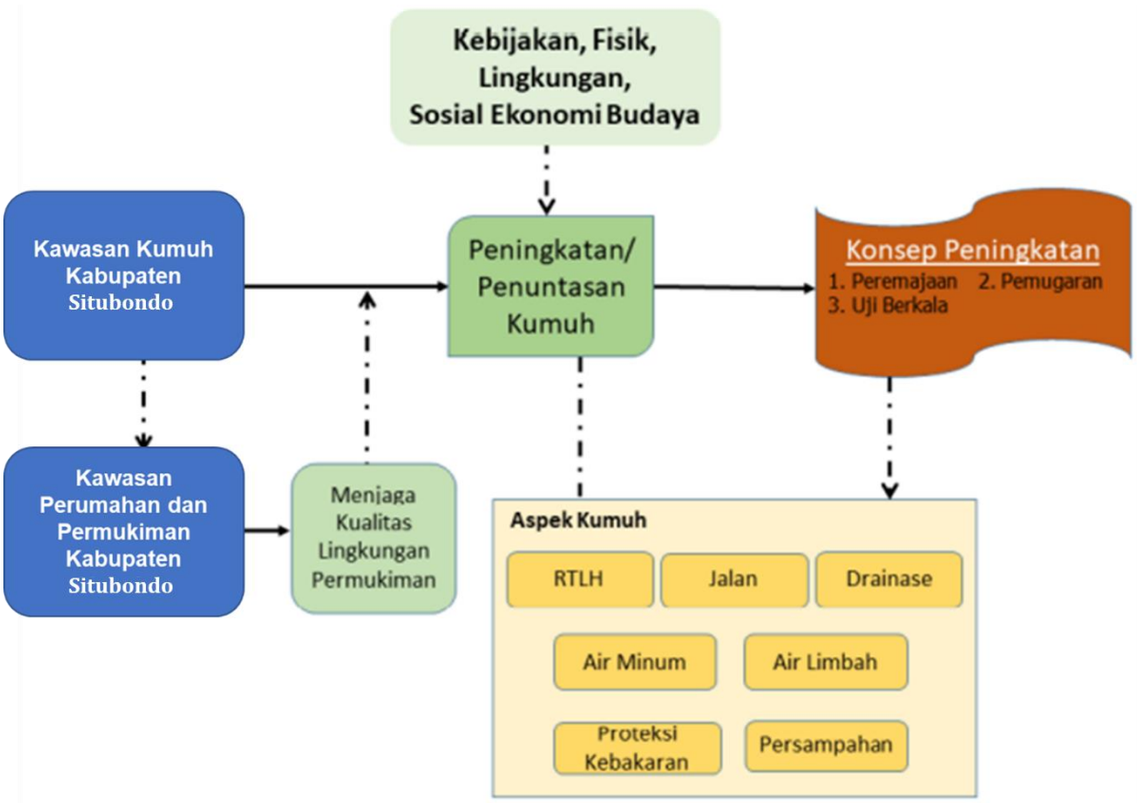

Gambar 7. 1 Pola Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Sumber : UU Nomor 11 Tahun 2011

Berdasarkan bagan diatas, peningkatan kualitas kumuh dapat di lakukan dengan beragam pendektan aspek, mulai dari kebijakan, fisik, lingkungan maupun sosial ekonomi budaya setempat. Program dan kegiatan peningkatan

kualitas kumuh yang komprehensif dalam pembangunan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus terintegrasi dengan susunan organisasi tata kelola pemerintah daerah, sehingga program pengentasan perumahan kumuh tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan tercapai. Program dan kegiatan tersebut harus terikat dalam nomenklatur program dan kegiatan di masing-masing satuan kerja pemerintah kabupaten sesuai dengan tupoksi satuan kerja pemerintah kabupaten masing-masing. Adapun program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

Tabel 7. 1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

KONSEP PENINGKATAN	STRATEGI PENINGKATAN	PROGRAM	KEGIATAN
Peremajaan Pemugaran Uji Berkala	Menerapkan kebijakan perumahan permukiman tingkat kota	Pengaturan dan pembinaan pengembangan permukiman	Melaksanakan pembangunan berdasarkan RTBL Kawasan Kumuh
			Penyusunan masterplan kawasan kumuh
			Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh (DED)
	Meningkatkan kepekaan terhadap kesejahteraan sosial	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
	Meningkatkan kapasitas, kualitas, & jangkauan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Meningkatkan pembangunan, perbaikan, penambahan kapasitas, kualitas, & jangkauan pelayanan jalan beserta sarananya
			Meningkatkan pembangunan, perbaikan kualitas dan keterhubungan drainase dan jaringan air limbah
			Meningkatkan penyediaan jaringan air bersih dan aman dikonsumsi
			Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman yang ramah lingkungan & berkelanjutan seperti IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), TPS 3R, TPST & lainnya
			Meningkatkan pembangunan, perbaikan, penambahan kapasitas, kualitas, & jangkauan pelayanan sarana prasarana proteksi kebakaran

KONSEP PENINGKATAN	STRATEGI PENINGKATAN	PROGRAM	KEGIATAN
			Meningkatkan pembangunan resapan air berupa biopori & sumur resapan
			Penyediaan ruang terbuka hijau
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan serta infrastruktur dasar	Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan serta infrastruktur dasar	Gotong royong dalam pembangunan jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya
	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam perilaku hidup bersih & sehat	Program Lingkungan Sehat	Menguji keamanan air minum berkala di Kab. Situbondo · Penanaman tanaman obat herbal
	Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dalam pembangunan/ perbaikan kualitas lingkungan

Sumber : Hasil Analisis, 2022

7.2 RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu diklasifikasikan berdasarkan skala kabupaten/kota dan skala kawasan. Berikut rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diperinci masing-masing skala, baik skala kabupaten/kota maupun skala kawasan

Tabel 7. 2 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			1	2	3	4	5		
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH SITUBONDO	Pengaturan dan pembinaan pengembangan permukiman	Melaksanakan pembangunan berdasarkan RTBL dan DED Kawasan Kumuh						APBD KAB. APBN	DPUPP

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			1	2	3	4	5		
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)						APBN	DPUPP DINSOS
	Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Meningkatkan pembangunan, perbaikan, penambahan kapasitas, kualitas, & jangkauan pelayanan jalan beserta sarananya						APBD KAB. APBN	DPUPP
		Meningkatkan pembangunan, perbaikan kualitas dan keterhubungan drainase dan jaringan air limbah						APBD KAB. APBN	DPUPP DLH
		Meningkatkan penyediaan jaringan air bersih dan aman dikonsumsi						APBD KAB. APBN	PDAM DPUPP DINKES
		Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman yang ramah lingkungan & berkelanjutan seperti IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), TPS 3R, TPST & lainnya						APBD KAB. APBN	DLH
		Meningkatkan pembangunan, perbaikan, penambahan kapasitas, kualitas, &						APBD KAB. APBN	BPBD SATPOL PP

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			1	2	3	4	5		
		jangkauan pelayanan sarana prasarana proteksi kebakaran							
		Meningkatkan pembangunan resapan air berupa biopori & sumur resapan						APBD KAB. APBN	DPUPP
		Penyediaan ruang terbuka hijau						APBD KAB. APBN	DLH
	Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan serta infrastruktur dasar	Gotong royong dalam pembangunan jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya						SWADAYA	PEMDES
	Program Lingkungan Sehat	Menguji keamanan air minum berkala di Kab. Situbondo · Penanaman tanaman obat herbal						APBD KAB	PDAM DINKES
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dalam pembangunan/ perbaikan kualitas lingkungan						APBD KAB	DINSOS
	Program *One Vilage One Product*	Pembangunan Kios dan Showroom produk UMKM Unggulan						APBD KAB	DISPERINDAG

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Tabel 7. 3 Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN	
			SATUAN	VOLUME
Kawasan Permukiman Kumuh Kilensari	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	1251	Unit
		Penataan dan reorientasi keteraturan bangunan	977	Unit
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	4125	Meter
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	100	Meter
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	2275	Meter
		Pembangunan Tangkis Laut	1200	Meter
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	1104	KK
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (1264 KK)	4	Unit
		Pembangunan MCK Komunal (1119 KK)	5	Unit
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	2	Unit
		Pengadaan Tempat Sampah	500	Unit
		Pembentukan satgas pengangkutan sampah	1	Paket
		Pembangunan TPS 3R	1	Unit
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket
		Apar	25	titik
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Ruang Publik	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket
		Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan koridor pintu masuk wisata bahari kilensari	1	Paket
		Pembangunan ruang publik dan amenitas (Kafetaria, mushola, kamar mandi, dll)	1	Paket
Kawasan Permukiman Kumuh Tanjung Pecinan	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	691	Unit
		Penataan dan reorientasi keteraturan bangunan	555	Unit
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	5057	Meter
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	5730	Meter
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1211	Meter
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	492	Unit

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN	
			SATUAN	VOLUME
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan ipal Komunal (691 KK)	2	Unit
		Pembangunan MCK Komunal (691 KK)	5	Unit
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit
		Pengadaan Tempat Sampah	54	Unit
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket
		Pembangunan TPS 3R	1	Unit
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket
		Apar	20	Unit
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket
		Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Peningkatan Kualitas Dermaga	1	Paket
		Pembangunan ruang publik dan amenitas (Kafetaria, mushola, kamar mandi, dll)	1	Paket
Kawasan Permukiman Kumuh Semiring	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	457	Unit
		Penataan Orientasi bangunan	500	Unit
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Pembangunan Jalan Baru	2248	Meter
		Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	5753	Meter
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Bar	2101	Meter
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	2681	Meter
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	347	Unit
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal 549 KK)	2	Unit
		Pembangunan MCK Komunal (402 KK)	4	Unit
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit
		Pengadaan Tempat Sampah	200	Unit
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket
		Apar	20	Unit
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan koridor pintu masuk kawasan KALBUT	1	Paket

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN	
			SATUAN	VOLUME
Kawasan Permukiman Kumuh Alasmalang	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	224	Unit
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Pembangunan Jalan Baru	877	Meter
		Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	1706	Meter
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	930	Meter
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1063	Meter
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	290	Unit
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (354 KK)	2	Unit
		Pembangunan MCK Komunal (84 KK)	2	Unit
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit
		Pengadaan Tempat Sampah	80	Unit
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket
		Pembangunan TPS 3R	1	Unit
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket
		Apar	15	Unit
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket
		Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan Koridor sebagai ruang publik kampung hijau	1	Paket
		Penataan akses dan shoroom BONKLA (bonsai Kelapa)	1	Paket
Kawasan Permukiman Kumuh Olean	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	706	Unit
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Pembangunan Jalan Baru	450	Meter
		Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	1151.5	Meter
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	755	Meter
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1465	Meter
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	168	KK
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan Septictank Komunal (806 kk)	2	Unit
		Pembangunan MCK Komunal	1	Unit
	Peningkatan kualitas	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN	
			SATUAN	VOLUME
Kawasan Permukiman Kumuh Perante	Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Tempat Sampah	50	Unit
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket
		Pembangunan TPS 3R	1	Unit
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket
		Apar	10	Unit
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket
		Pembangunan Jalur Hijau	1	Paket
		Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan koridor pintu masuk wisata edukasi olean	1	Paket
		Penataan kampung edukasi hidrponik	1	Paket
		penataan wisata edukasi musium PG Olean	1	Paket
	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	785	Unit
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	4432	Meter
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Bar	5099	Meter
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1062	Meter
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	535	Unit
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (326 KK)	1	Unit
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit
		Pengadaan Tempat Sampah	15	Unit
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket
		Pembangunan TPS 3R	1	Unit
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket
		Apar	10	Unit
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket
		Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan Kawasan Kuliner Alam Maste	1	Paket
Kawasan Permukiman Kumuh Wringinanom	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	386	Unit

KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN	
			SATUAN	VOLUME
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	6918	Meter
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Bar	7300	Meter
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	992	Meter
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	278	Unit
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (278 KK)	1	Unit
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit
		Pengadaan Tempat Sampah	30	Unit
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket
		TPS 3R	1	Unit
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket
		Apar	10	Unit
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket
		Pembangunan Jalur Hijau	1	Paket
		Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket

Sumber : Hasil Analisa, 2022

7.3 MEMORANDUM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Memorandum program penanganan dirumuskan dengan berisi rangkaian program dan kegiatan penananganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan akan menjadi bahan utama untuk melakukan pendetailan pada sub kawasan yang dipilih untuk penanganan tahap pertama. Dengan kata lain, memorandum program merupakan resume dari rencana aksi program dan kegiatan yang telah disepakati antar OPD di Kabupaten Situbondo. Berikut ini adalah memorandum program penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Situbondo yang diperinci berdasarkan skala kota dan skala kawasan.

Tabel 7. 4 Memorandum Program Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	1	2	3	4	5		
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH SITUBONDO	Pengaturan dan pembinaan pengembangan permukiman	Melaksanakan pendampingan pembangunan berdasarkan RTBL dan DED Kawasan Kumuh	7	Paket						APBD KAB. APBN	DPUPP
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	100	Unit						APBN	DPUPP DINSOS
	Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Melaksanakan pendampingan pembangunan, perbaikan, penambahan kapasitas, kualitas, & jangkauan pelayanan jalan beserta sarananya	7	Paket						APBD KAB. APBD PROV APBN	DPUPP
		Melaksanakan pendampingan pembangunan, perbaikan kualitas dan keterhubungan drainase dan jaringan air limbah	7	Paket						APBD KAB. APBD PROV APBN	DPUPP DLH

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	1	2	3	4	5		
		Melaksanakan pendampingan penyediaan jaringan air bersih dan aman dikonsumsi	7	Paket						APBD KAB. APBD PROV APBN	PDAM DPUPP DINKES
		Melaksanakan pendampingan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman yang ramah lingkungan & berkelanjutan seperti IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), TPS 3R, TPST & lainnya	7	Paket						APBD KAB. APBD PROV APBN	DLH
		Melaksanakan pendampingan pembangunan, perbaikan, penambahan kapasitas, kualitas, & jangkauan pelayanan sarana prasarana proteksi kebakaran	7	Paket						APBD KAB. APBD PROV APBN	BPBD SATPOL PP
		Melaksanakan pendampingan pembangunan resapan	7	Paket						APBD KAB. APBN	DPUPP

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	1	2	3	4	5		
		air berupa biopori & sumur resapan									
		Penyediaan ruang terbuka hijau	7	Paket						APBD KAB. APBD PROV APBN	DLH
	Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan serta infrastruktur dasar	Gotong royong dalam pembangunan jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya	7	Paket						SWADAYA	PEMDES
	Program Lingkungan Sehat	Menguji keamanan air minum berkala di Kab. Situbondo · Penanaman tanaman obat herbal	7	Paket						APBD KAB	PDAM DINKES
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dalam pembangunan/ perbaikan kualitas lingkungan	7	Paket						APBD KAB	DINSOS
	Program *One Vilage One Product*	Pembangunan Kios dan Showroom produk UMKM Unggulan	7	Paket						APBD KAB APBD PROV	DISPERINDAG

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Tabel 7. 5 Memorandum Program Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
Kawasan Permukiman Kumuh Kilensari	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	1251	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
		Penataan dan reorientasi keteraturan bangunan	977	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman BPN
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	4125	Meter						APBD Kab.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	100	Meter						APBD Kab.	
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	2275	Meter						APBD Kab.	
		Pembangunan Tangkis Laut	1200	Meter						APBN	
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	1104	KK						APBN	PDAM Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (1264 KK)	4	Unit						APBD Prov.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup
		Pembangunan MCK Komunal (1119 KK)	5	Unit						APBD Prov.	
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	2	Unit						APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan Tempat Sampah	500	Unit						APBD Kab.	
		Pembentukan satgas pengangkutan sampah	1	Paket						APBD Kab.	
		Pembangunan TPS 3R	1	Unit						APBN	
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket						APBN	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang BPBD
		Apar	25	titik						APBN	

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Ruang Publik	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket						APBD Prov.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Pariwisata Dinas Perdagangan dan Koperasi
		Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket						APBD Prov.	
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan koridor pintu masuk wisata bahari kilensari	1	Paket						APBD Kab.	
		Pembangunan ruang publik dan amenitas (Kafetaria, mushola, kamar mandi, dll)	1	Paket						APBD Kab.	
Kawasan Permukiman Kumuh Tanjung Pecinan	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	691	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman BPN
		Penataan dan reorientasi keteraturan bangunan	555	Unit						APBN	
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	5057	Meter						APBD Kab.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	5730	Meter						APBD Kab.	
		Peningkatan	1211	Meter						APBD Kab.	

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
		Kualitas/Rehab Saluran Drainase									
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	492	Unit						APBN	PDAM Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan ipal Komunal (691 KK)	2	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
		Pembangunan MCK Komunal (691 KK)	5	Unit						APBD Prov.	
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit						APBD Prov.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup
		Pengadaan Tempat Sampah	54	Unit						APBD Kab.	
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket						APBD Kab.	
		Pembangunan TPS 3R	1	Unit						APBD Kab.	
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket						APBN	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Apar	20	Unit						APBN	

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
											BPBD
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Pariwisata Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan dan Koperasi
		Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket						APBD Prov.	
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Peningkatan Kualitas Dermaga	1	Paket						APBD Prov.	
		Pembangunan ruang publik dan amenitas (Kafetaria, mushola, kamar mandi, dll)	1	Paket						APBD Kab.	
Kawasan Permukiman Kumuh Semiring	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	457	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman BPN
		Penataan Orientasi bangunan	500	Unit						APBN	
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Pembangunan Jalan Baru	2248	Meter						APBD Kab.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan
		Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	5753	Meter						APBD Kab.	
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan	Pembangunan Saluran Drainase Bar	2101	Meter						APBD Kab.	

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
	Drainase	Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	2681	Meter						APBN	Ruang
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	347	Unit						APBN	PDAM Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal 549 KK)	2	Unit						APBD Prov.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup
		Pembangunan MCK Komunal (402 KK)	4	Unit						APBD Prov.	
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit						APBD Kab.	
		Pengadaan Tempat Sampah	200	Unit						APBD Kab.	
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket						APBD Kab.	
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket						APBN	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang BPBD
		Apar	20	Unit						APBD Prov.	

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
Kawasan Permukiman Kumuh Alasmalang	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket						APBD Prov.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Pariwisata
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan koridor pintu masuk kawasan KALBUT	1	Paket						APBD Kab.	
	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	224	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Pembangunan Jalan Baru	877	Meter						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	1706	Meter						APBD Kab.	
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	930	Meter						APBD Kab.	
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1063	Meter						APBD Kab.	
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	290	Unit						APBN	PDAM Dinas Pekerjaan Umum &

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
											Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (354 KK)	2	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup
		Pembangunan MCK Komunal (84 KK)	2	Unit						APBD Prov.	
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit						APBD Prov.	
		Pengadaan Tempat Sampah	80	Unit						APBD Kab.	
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket						APBD Kab.	
		Pembangunan TPS 3R	1	Unit						APBD Kab.	
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket						APBN	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang BPBD
		Apar	15	Unit						APBD Prov.	
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket						APBD Prov.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas
		Pembangunan Landmark	1	Paket						APBD Kab.	

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
		Kawasan									Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Pariwisata Dinas Pertanian
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan Koridor sebagai ruang publik kampung hijau	1	Paket						APBD Kab.	
		Penataan akses dan shoroom BONKLA (bonsai Kelapa)	1	Paket						APBD Kab.	
Kawasan Permukiman Kumuh Olean	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	706	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Pembangunan Jalan Baru	450	Meter						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	1151.5	Meter						APBD Kab.	
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	755	Meter						APBD Kab.	
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1465	Meter						APBD Kab.	
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	168	KK						APBN	PDAM Dinas Pekerjaan Umum & Penataan

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
											Ruang
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan Septictank Komunal (806 kk)	2	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup
		Pembangunan MCK Komunal	1	Unit						APBD Prov.	
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit						APBD Prov.	
		Pengadaan Tempat Sampah	50	Unit						APBD Kab.	
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket						APBD Kab.	
		Pembangunan TPS 3R	1	Unit						APBD Kab.	
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket						APBN	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang BPBD
		Apar	10	Unit						APBD Prov.	
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket						APBD Prov.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan
		Pembangunan Jalur Hijau	1	Paket						APBD Kab.	
		Pembangunan	1	Paket						APBD Kab.	

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
Kawasan Permukiman Kumuh Perante		Landmark Kawasan									Umum & Penataan Ruang
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan koridor pintu masuk wisata edukasi olean	1	Paket						APBD Kab.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Pariwisata Dinas Pertanian
		Penataan kampung edukasi hidrponik	1	Paket						APBD Kab.	
		penataan wisata edukasi musium PG Olean	1	Paket						APBN	
	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	785	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	4432	Meter						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Bar	5099	Meter						APBD Kab.	
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1062	Meter						APBD Kab.	

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	535	Unit						APBD Kab.	PDAM Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (326 KK)	1	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit						APBN	
		Pengadaan Tempat Sampah	15	Unit						APBD Prov.	
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket						APBD Prov.	
		Pembangunan TPS 3R	1	Unit						APBD Kab.	
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket						APBD Kab.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang BPBD
		Apar	10	Unit						APBD Kab.	
	Peningkatan kesediaan fisik RTH &	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
	Jalur Hijau	Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket						APBD Prov.	Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Pariwisata Dinas Perdagangan dan Koperasi
	Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan Kawasan Kuliner Alam Maste	1	Paket						APBD Prov.	
Kawasan Permukiman Kumuh Wringinanom	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	386	Unit						APBD Kab.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	6918	Meter						APBD Kab.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Bar	7300	Meter						APBD Kab.	
		Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	992	Meter						APBD Kab.	
	Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	278	Unit						APBN	PDAM Dinas Pekerjaan Umum & Penataan

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
											Ruang
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (278 KK)	1	Unit						APBN	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit						APBN	
		Pengadaan Tempat Sampah	30	Unit						APBD Kab.	
		Pembentukan satgas sampah	1	Paket						APBD Kab.	
		TPS 3R	1	Unit						APBD Kab.	
	Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket						APBN	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang BPBD
		Apar	10	Unit						APBD Prov.	
	Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket						APBD Prov.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		Pembangunan Jalur Hijau	1	Paket						APBD Kab.	
		Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket						APBD Kab.	

kv	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME	2022	2023	2024	2025	2025		
											Dinas Pariwisata Dinas Perdagangan dan Koperasi

Sumber : Hasil Analisa, 2022

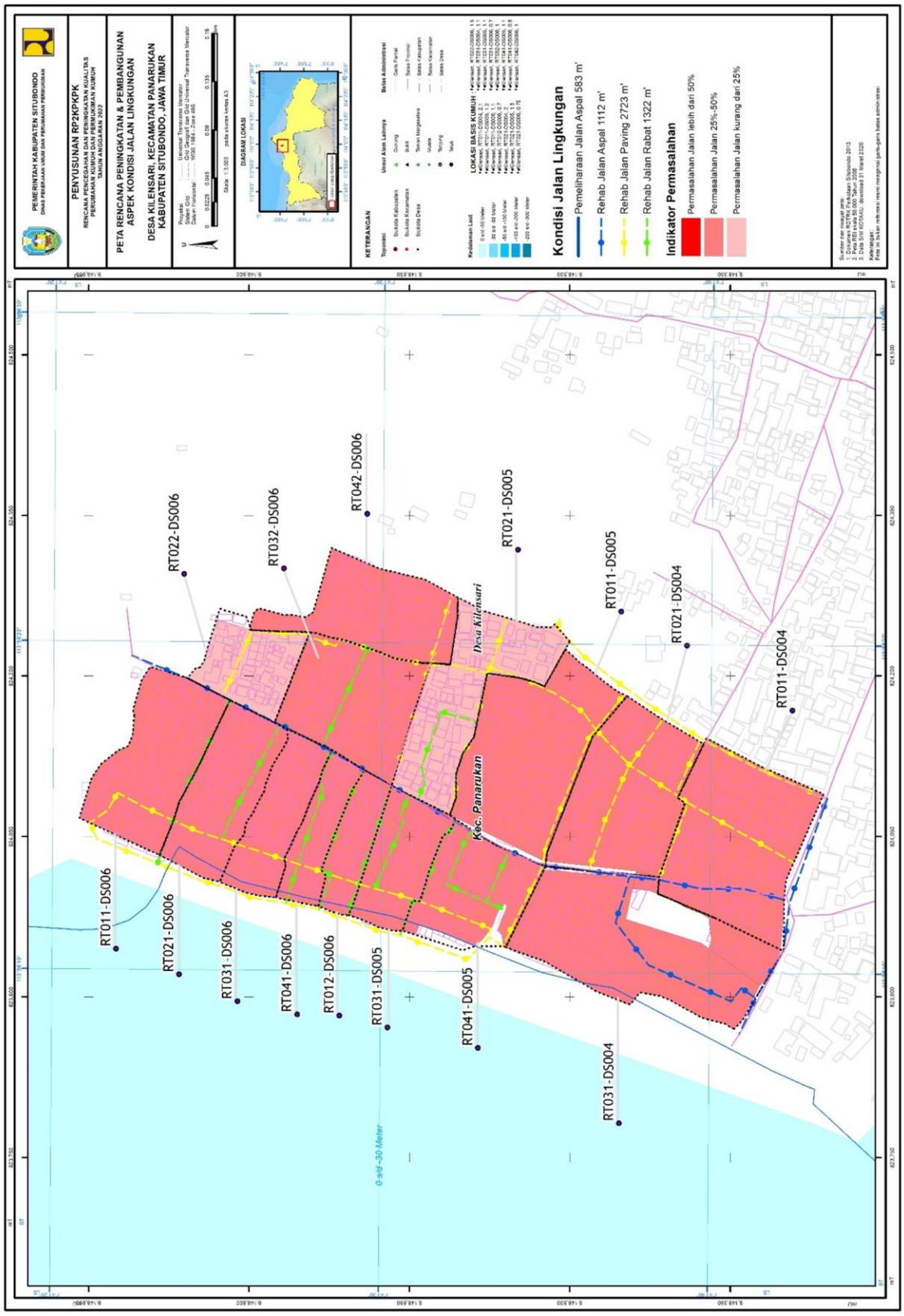

Peta 7. 1 Rencana Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan – Kilensari

Sumber : Hasil Analisa, 2022

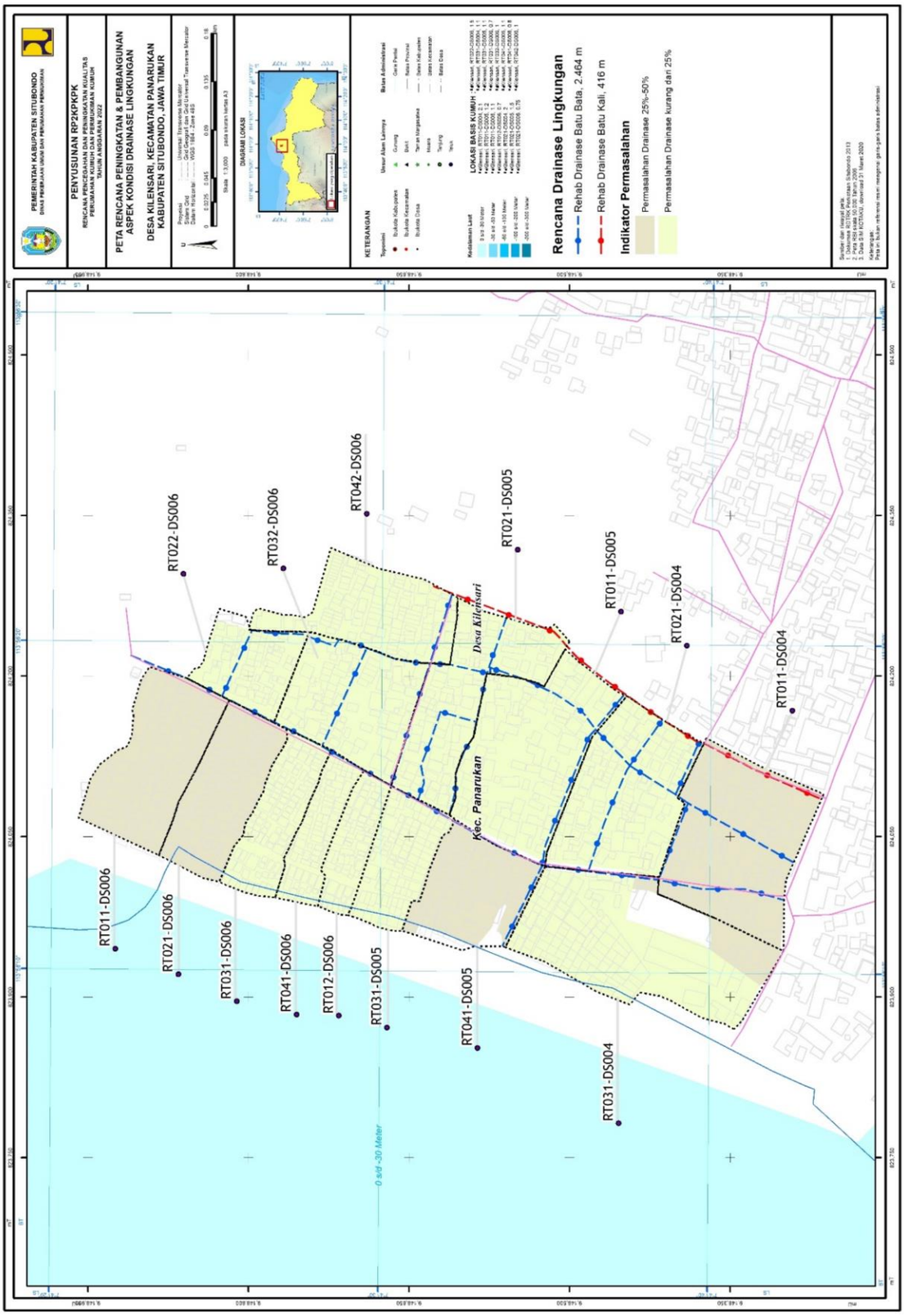

Peta 7. 2 Rencana Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan – Kilensari

Sumber : Hasil Analisa, 2022

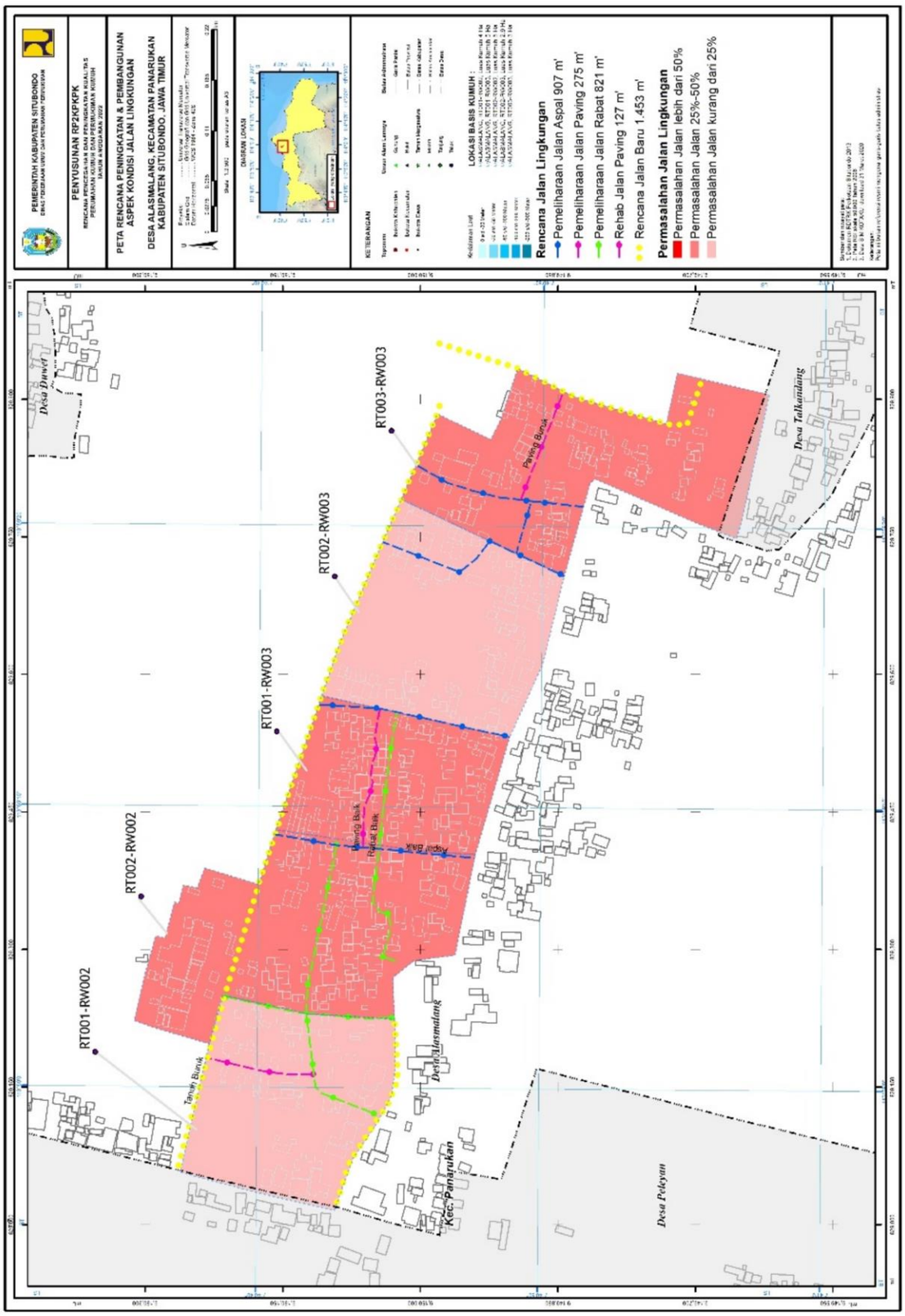

Peta 7. 3 Rencana Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan – Alasmalang

Sumber : Hasil Analisa, 2022

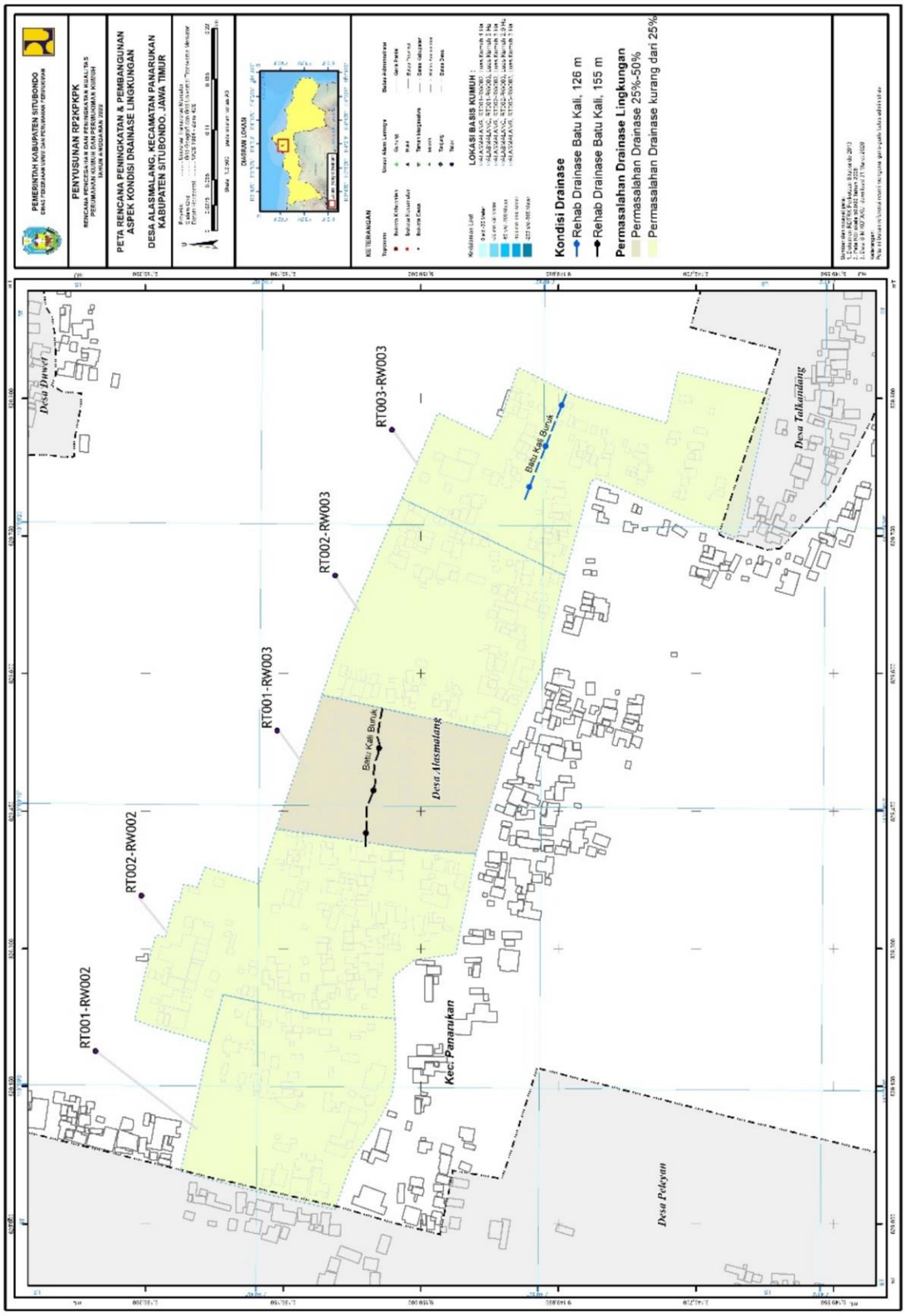

Peta 7. 4 Rencana Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan – Alasmalang

Sumber : Hasil Analisa, 2022

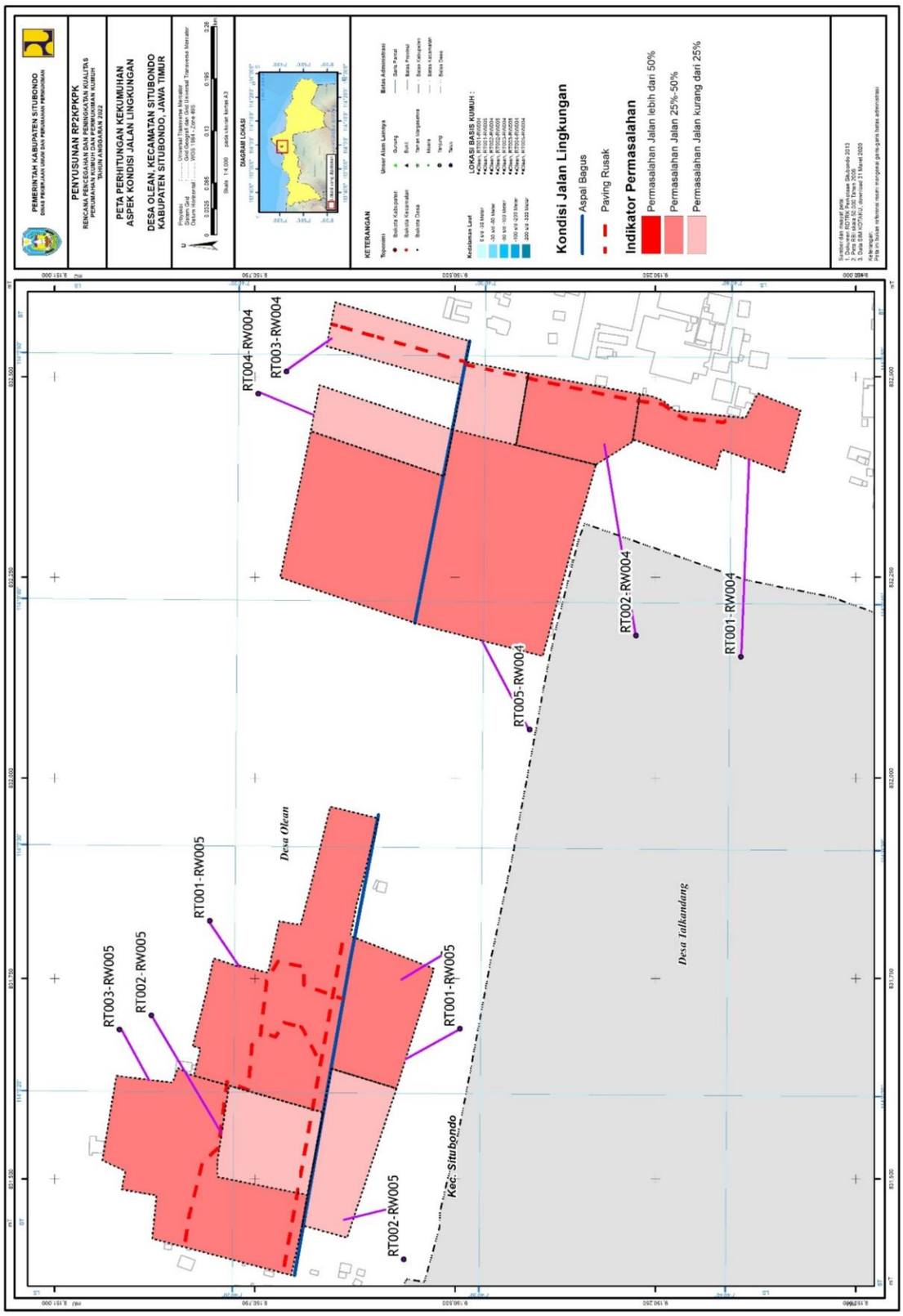

Peta 7. 5 Rencana Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan – Olean

Sumber : Hasil Analisa, 2022

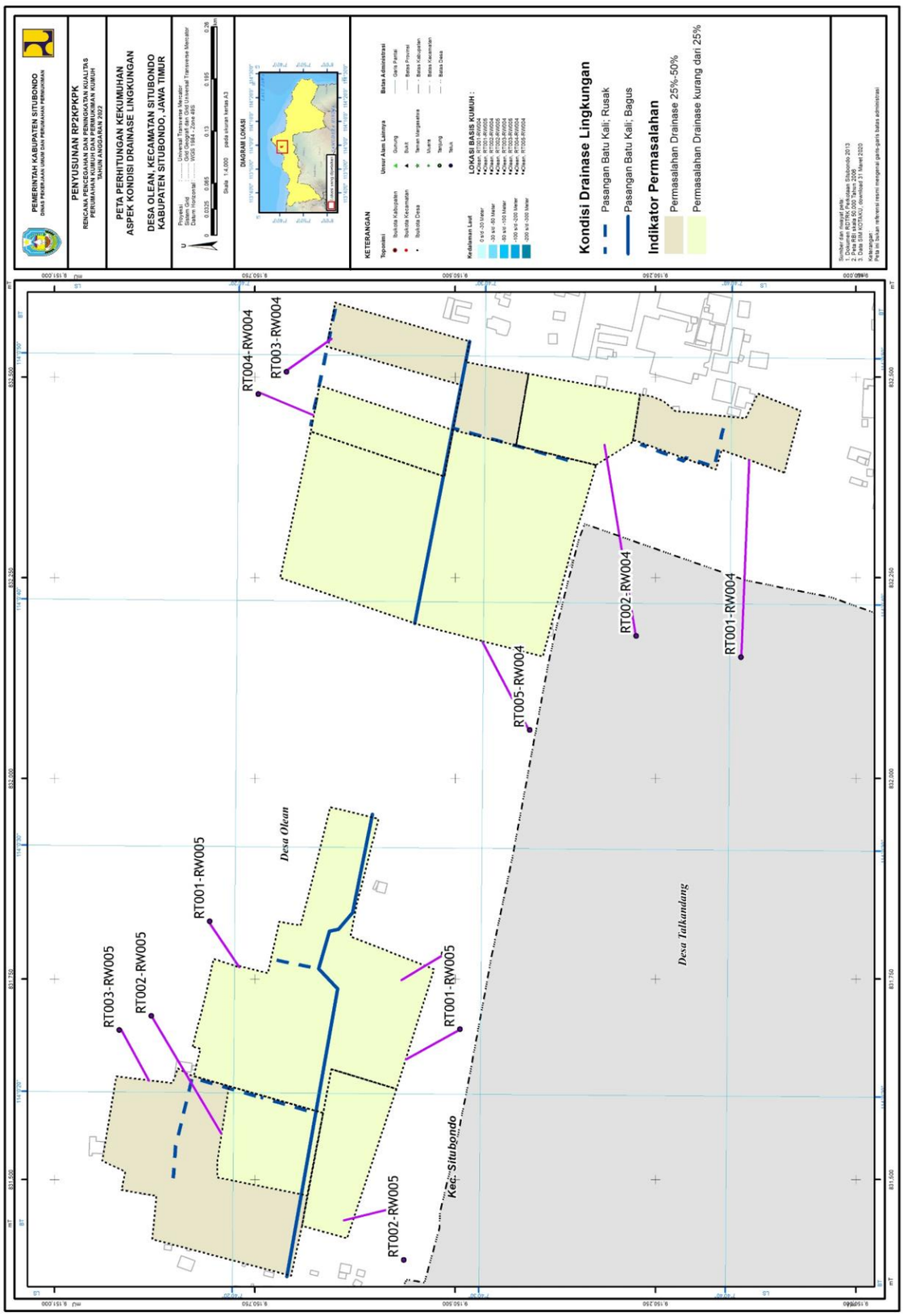

Peta 7. 6 Rencana Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan – Olean

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Peta 7. 7 Rencana Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan – Perante Selatan

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Peta 7. 8 Rencana Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan – Perante Selatan

Sumber : Hasil Analisa, 2022

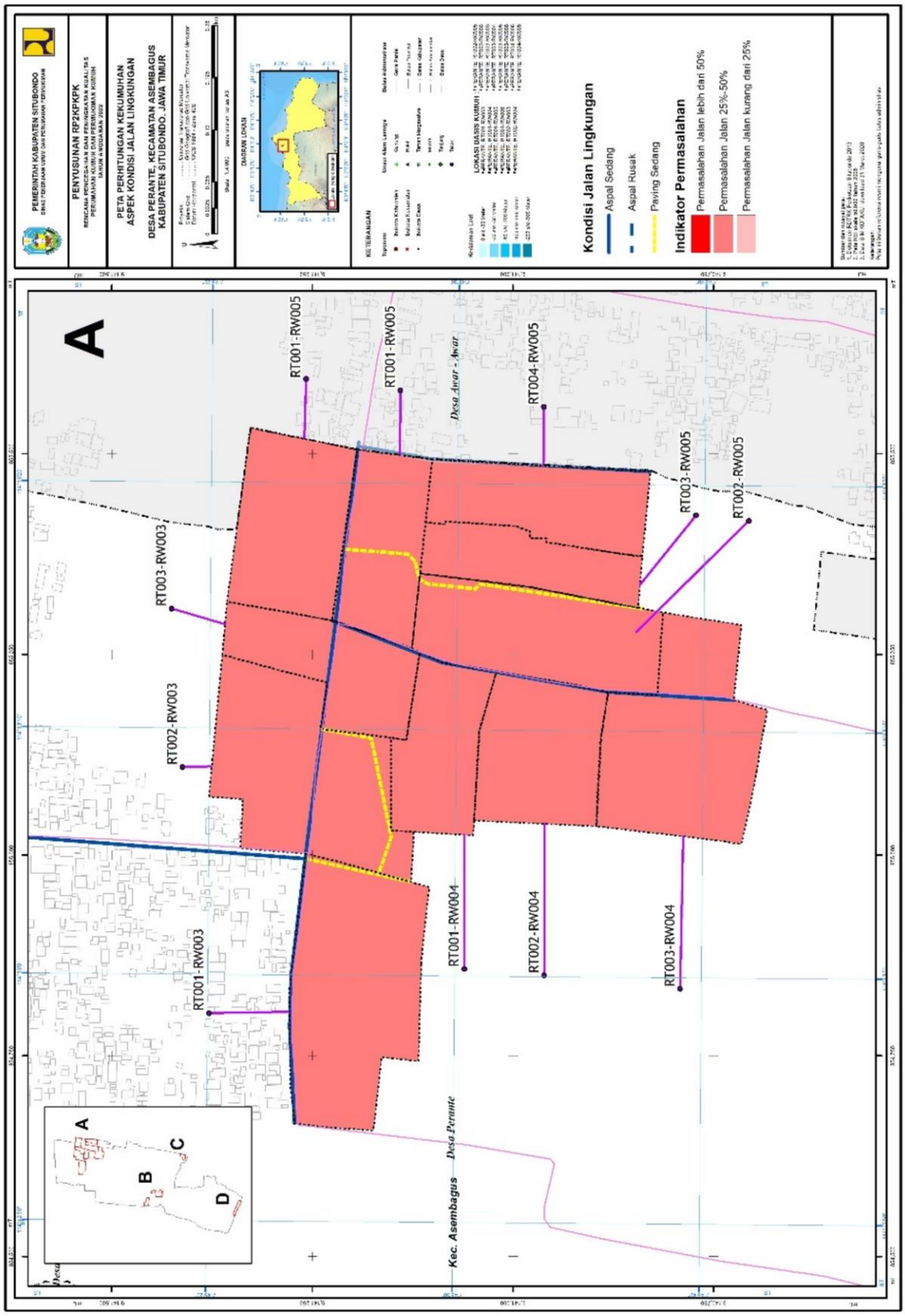

Peta 7. 9 Rencana Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan – Perante Utara

Sumber : Hasil Analisa, 2022

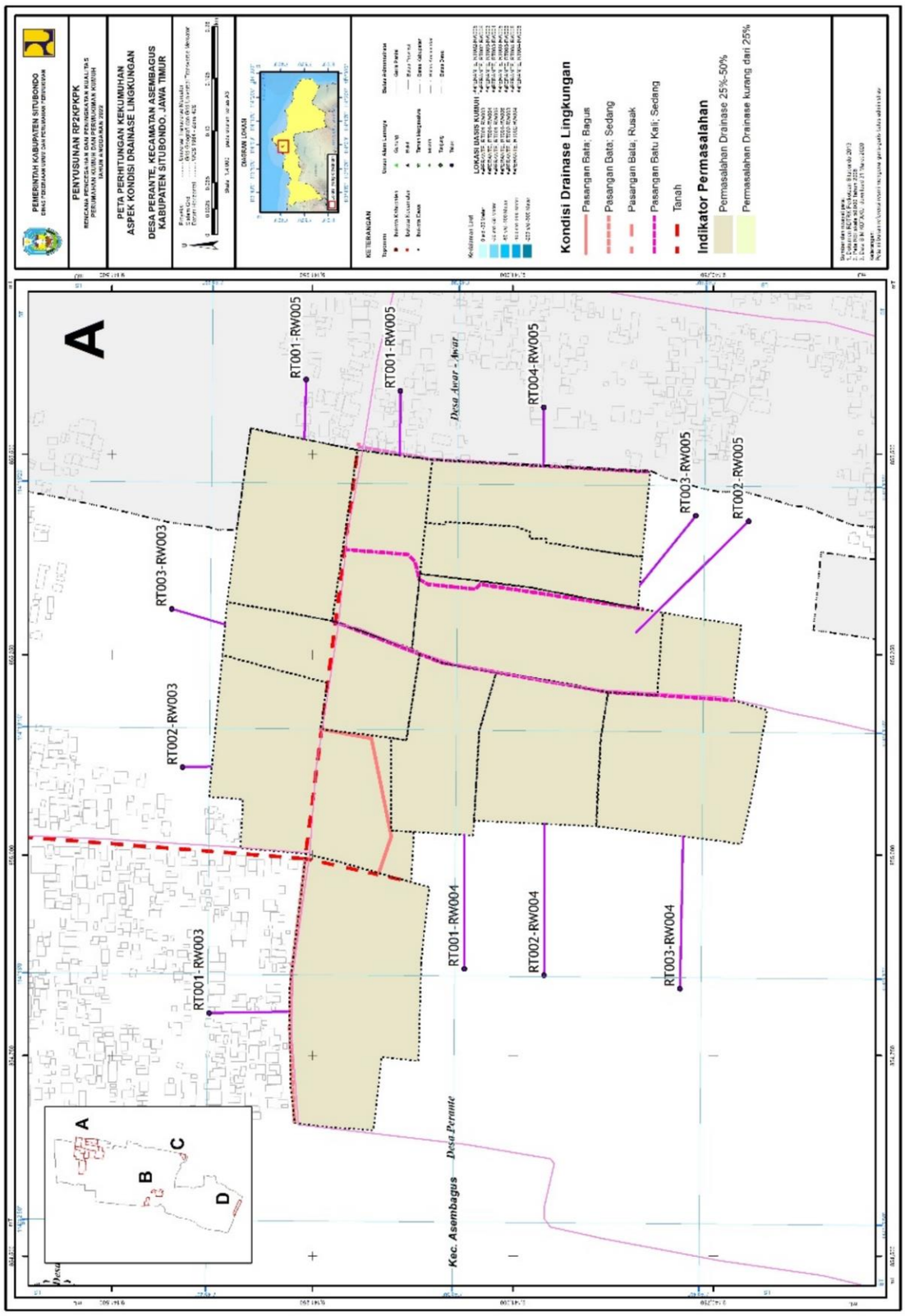

Peta 7. 10 Rencana Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan – Perante Utara

Sumber : Hasil Analisa, 2022

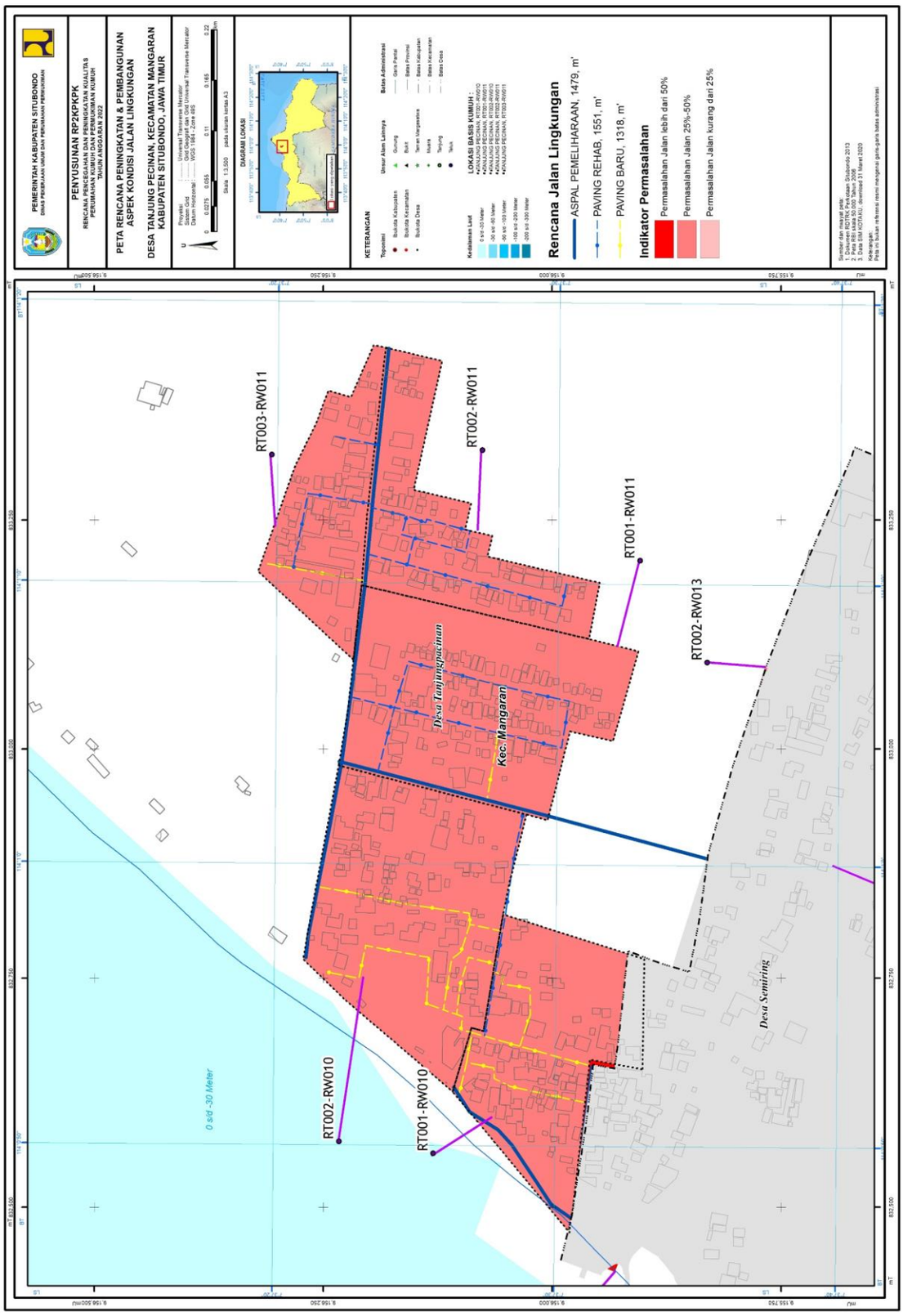

Peta 7. 11 Rencana Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan – Tanjung Pecinan

Sumber : Hasil Analisa, 2022

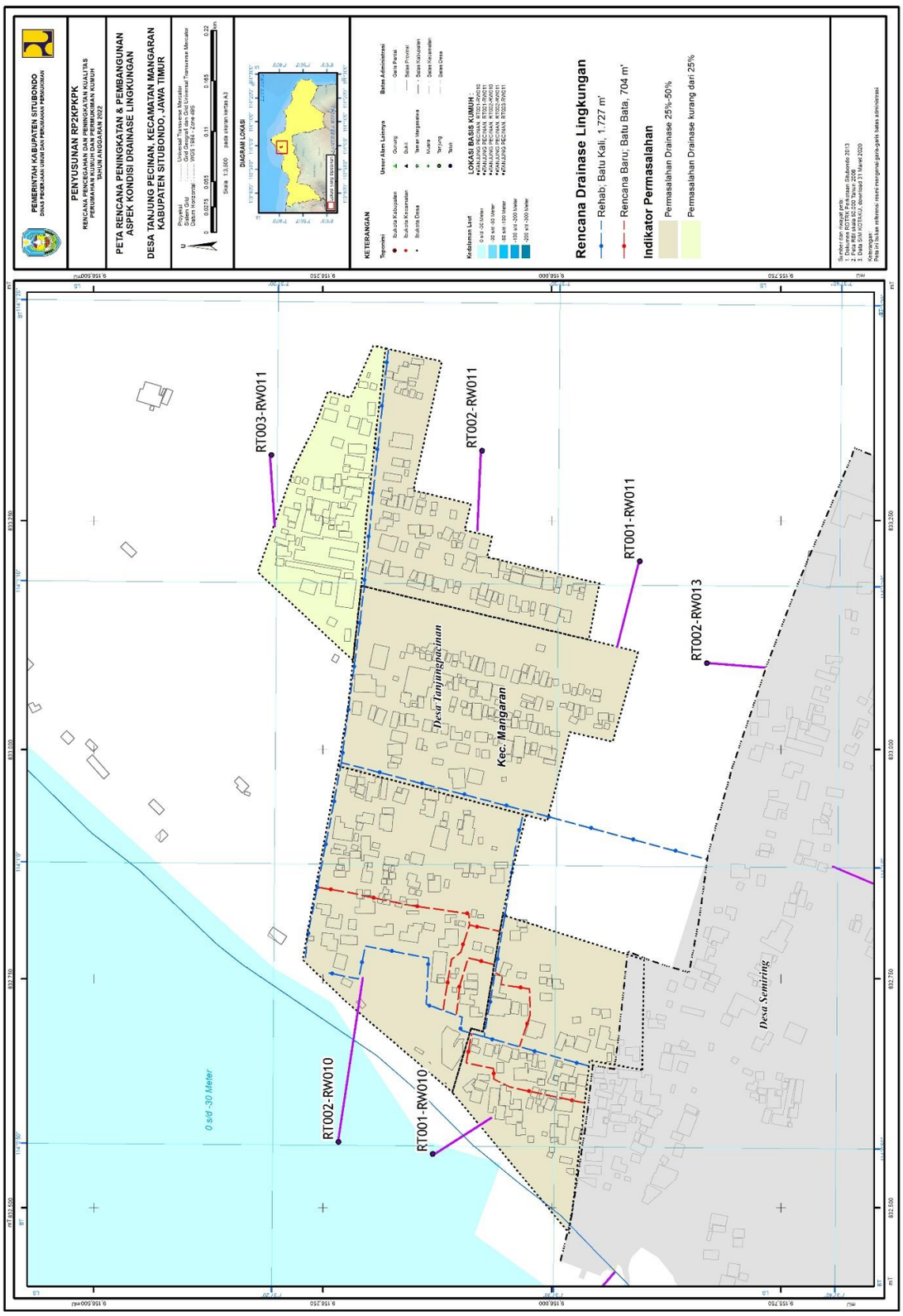

Peta 7. 12 Rencana Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan – Tanjung Pecinan

Sumber : Hasil Analisa, 2022

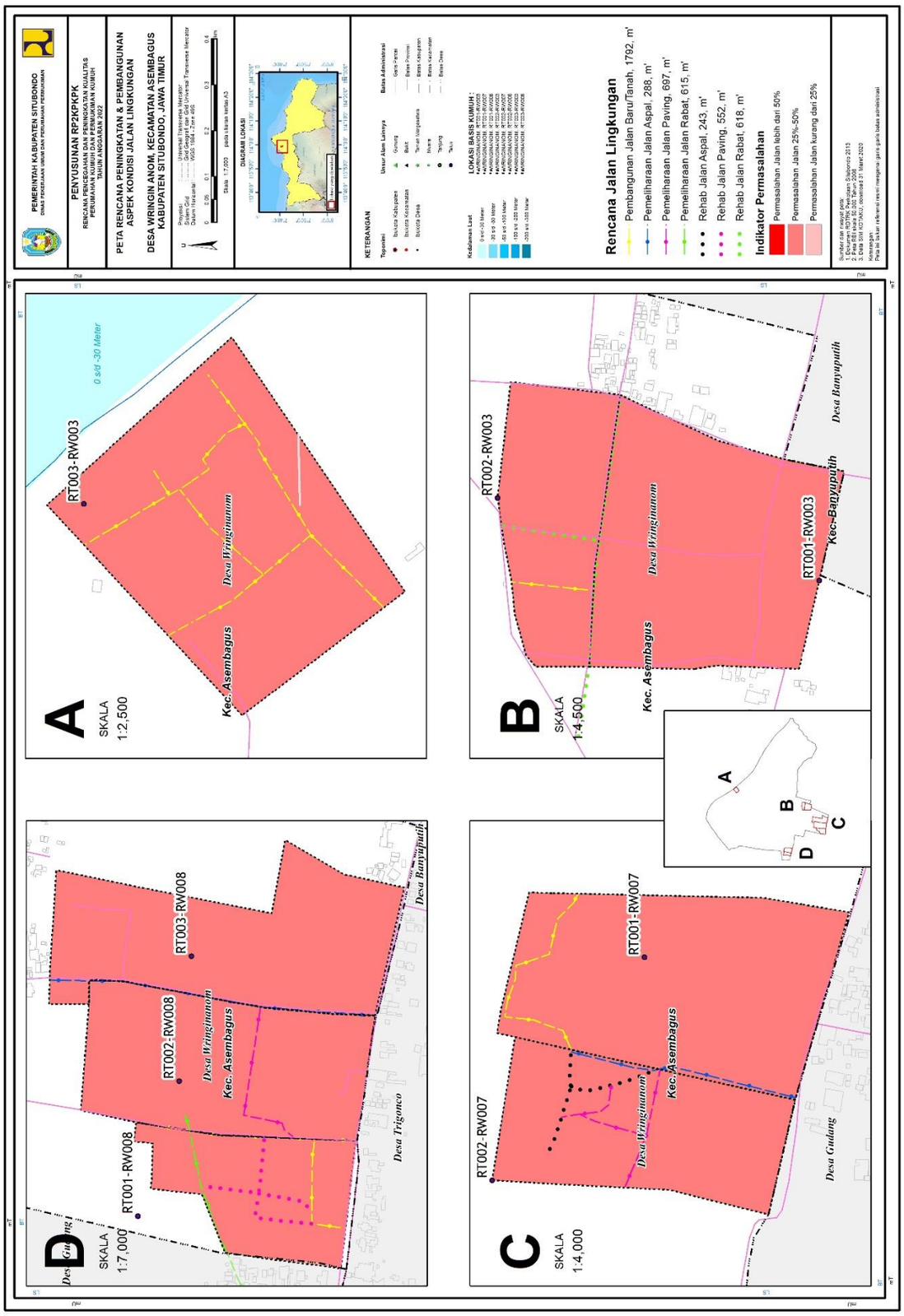

Peta 7. 13 Rencana Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan – Wringinanom
Sumber : Hasil Analisa, 2022

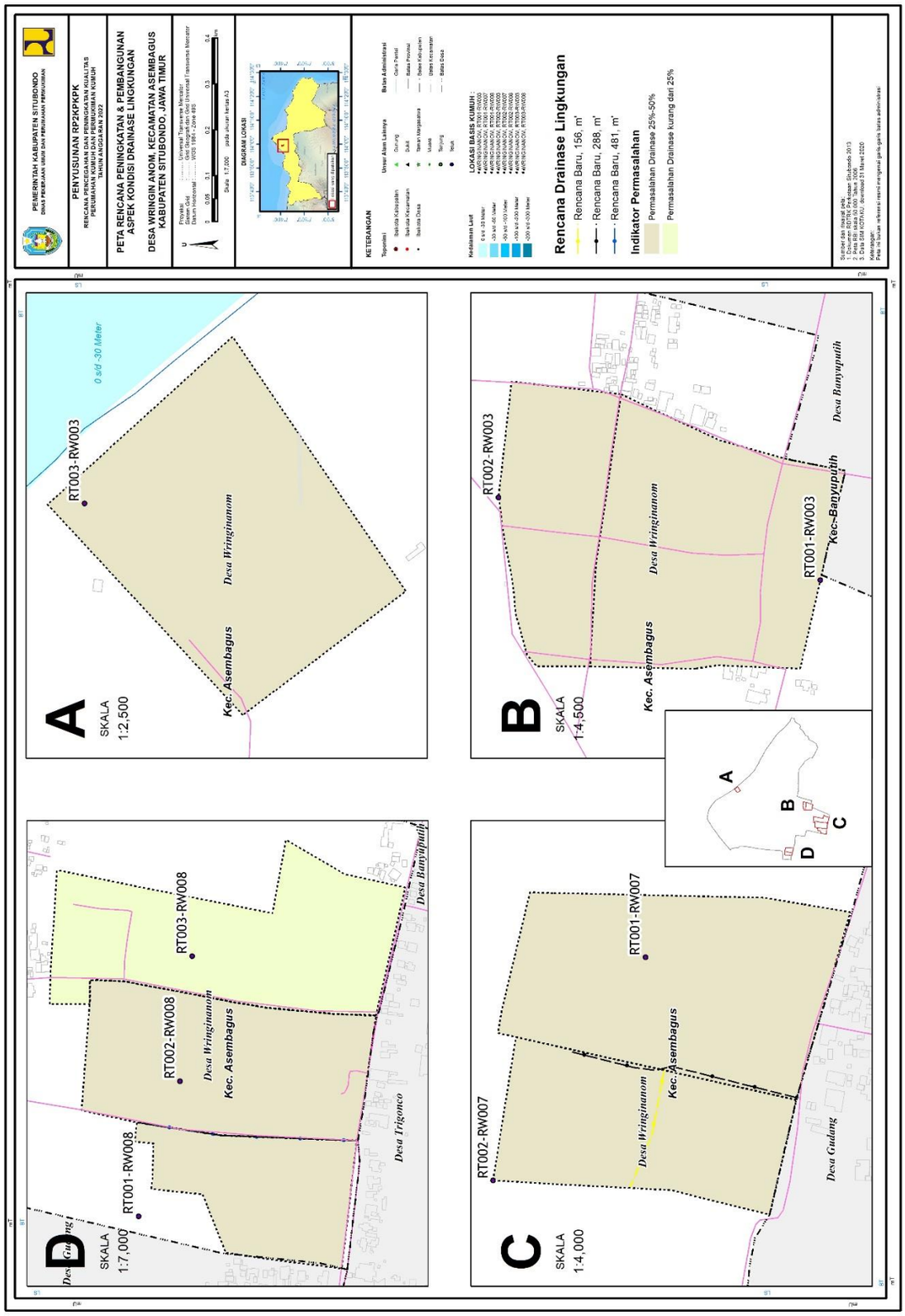

Peta 7. 14 Rencana Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan – Wringinanom
Sumber : Hasil Analisa, 2022

7.4 RENCANA AKSI MASYARAKAT (CAP)

Pada dasarnya, Rencana Aksi Masyarakat atau Community Action Plan (CAP) dapat diartikan sebagai salah satu metode perencanaan partisipatif masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan memadukan perencanaan topdown dan bottom-up. Dengan pelaksanaan

Community Action Plan (CAP) ini diharapkan proses perencanaan pembangunan dengan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utamanya. Dalam hal ini masyarakat diikutsertakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

CAP merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, khususnya yang terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kondisi tersebut terkait dengan peran masyarakat sebagai pelaku utama yang lebih mengenali permasalahan serta kebutuhan pembangunan dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman itu sendiri. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan memiliki peran penting dalam keseluruhan proses pembangunan.

Sedangkan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan merupakan bentuk andil dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan pada perumahan dan kawasan permukiman. Dengan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan diharapkan masyarakat sebagai pengguna juga dapat merasa memiliki, menjaga, dan mengawasi insfrastruktur yang telah dibangun.

Selain itu, dengan menerapkan metode CAP diharapkan terwujud penguatan masyarakat/ kelembangaan dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif serta sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penerapan CAP memiliki nilai penting dalam mewujudkan program pembangunan pemerintah yang terkait dengan kebutuhan masyarakat.

a) Proses Perencanaan

Dalam kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Blitar, masyarakat ikut berpatisipasi dalam proses perencanaan. Dalam hal ini, masyarakat yang dimaksud ialah perwakilan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan tokoh masyarakat (Ketua RT/RW, perwakilan masyarakat).

Hal tersebut dilakukan pada saat verifikasi lokasi kumuh, pendataan permasalahan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

b) Proses Pelaksanaan Pembangunan

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, masyarakat akan dilibatkan sesuai dengan rincian kegiatan program pembangunan yang telah disusun. Dalam proses pelaksanaan pembangunan, jenis kegiatan pembangunan yang dapat dikolaborasikan dengan masyarakat ialah kegiatan berisifat skala

lingkungan serta sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dapat turut serta dalam pelaksanaan pembangunan melalui; membantu kegiatan pembangunan baik dengan penyediaan prasarana dan sarana pendukung, tenaga, ataupun materi

c) Proses Pengawasan/ Monitoring

Agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program yang telah disusun maka diperlukan kegiatan pengawasan/ monitoring. Dalam hal ini, masyarakat khususnya melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) diharapkan dapat berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Khususnya yang terkait dengan program pembangunan dalam skala lingkungan serta yang dikolaborasikan dengan BKM. Perangkat pengawasan dapat berupa laporan yang disusun berdasarkan progress pelakasanaan pembangunan.

Proses pengawasan BKM dapat dilakukan dengan melalukan kerjasama dengan instransi Kabupaten Blitar yang terkait (seperti; Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum (Ciptakarya), Bappeda, Tim Kotaku, dll)

d) Penguatan Kelembagaan

Secara umum, penguatan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam proses pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan penanganan kawasan kumuh yang telah diindentifikasi. Kegiatan penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui;

❖ Pencegahan Kawasan Kumuh Baru

- Sosialisasi mengenai standar pelayanan minimal pada masing-masing infrastruktur perumahan, meliputi; bangunan, air minum, drainase, air limbah, persampahan, jalan lingkungan, serta proteksi kebakaran.
- Sosialisasi mengenai pemeliharaan pada masing-masing infrastruktur perumahan, meliputi; bangunan, air minum, drainase, air limbah, persampahan, jalan lingkungan, serta proteksi kebakaran - Sosialisasi mengenai pola hudup bersih dan sehat
- Sosialisasi mengenai kawasan yang tidak diarahkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman, seperti; kawasan sempadan sungai, sempadan rel kereta api, serta kawasan lindung lainnya.
- Pelatihan/ penyuluhan mengenai perencanaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan kawasan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait, seperti Tim Kotaku, Dinas Perkejaan Umum Cipta Karya, Bappeda, dll.

❖ Penanganan Kawasan Kumuh

- Pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan kawasan dan skala prioritas pelaksanaan
- Peningkatan capaian pelayanan dan kualitas infrastruktur perumahan
- Pelaksanaan dan monitoring pembangunan sesuai dengan indikasi program pembangunan yang telah ditetapkan
- Penyusunan aturan bersama tingkat kelurahan/ desa terkait dengan operasional dan pemeliharaan infrastruktur perumahan
- Pembentukan kelompok/ relawan pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional, pengawas, dan pemeiliharaan infrastruktur yang telah dibangun, seperti lembaga pengelola persampahan, pengelola drainase, pengelola air minum, dll.

7.5 PERUMUSAN KAWASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Kawasan prioritas adalah kawasan yang mendapat keutamaan di dalam penanganan dan pengembangannya dengan tetap memperhatikan kawasan kumuh lainnya. Kawasan prioritas ini memiliki nilai strategis kawasan yang mendesak untuk dikembangkan maupun ditangani agar memiliki kualitas lingkungan yang sehat dan sesuai dengan standar perumahan dan permukiman layak. Berikut adalah hasil penilaian penentuan priroirtas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo :

Gambar 7. 2 Prioritas Penanganan Kekumuhan di Kabupaten Situbondo
Sumber : Hasil Analisa, 2021

Berdasarkan hasil penilaian kategori kumuh di Kabupaten Situbondo, prioritas penanganan kumuh pertama adalah Cluster Prioritas Pesisir Kilensari yang terdiri Desa Kilensari (Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara) dengan total luas kumuh 17,65 Ha. Dengan kriteria kumuh sedang, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain tinggi sehingga termasuk di dalam kategori B1. Cluster Prioritas 1 Pesisir Kilensari menjadi kawasan prioritas dengan berbagai pertimbangan, yaitu:

1) Termasuk kawasan strategis kabupaten

2) Memiliki potensi ekonomi yang strategis
3) Merupakan kawasan perkotaan yang relatif cepat tumbuh dibanding kawasan lainnya sehingga perlu segera ditangani agar tidak menyebabkan degradasi sosial dan lingkungan

Dengan pertimbangan strategis tersebut, Cluster Prioritas 1 Pesisir Kilensari dinilai perlu segera dituntaskan. Selain itu, dalam penetapan kawasan permukiman kumuh perkotaan prioritas pertama ini merupakan proses identifikasi terhadap kawasan permukiman kumuh perkotaan yang dinilai memiliki kesiapan untuk implementasi pembangunan fisik pada tahun pertama dalam rencana pentahapan pembangunan kawasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati antar pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

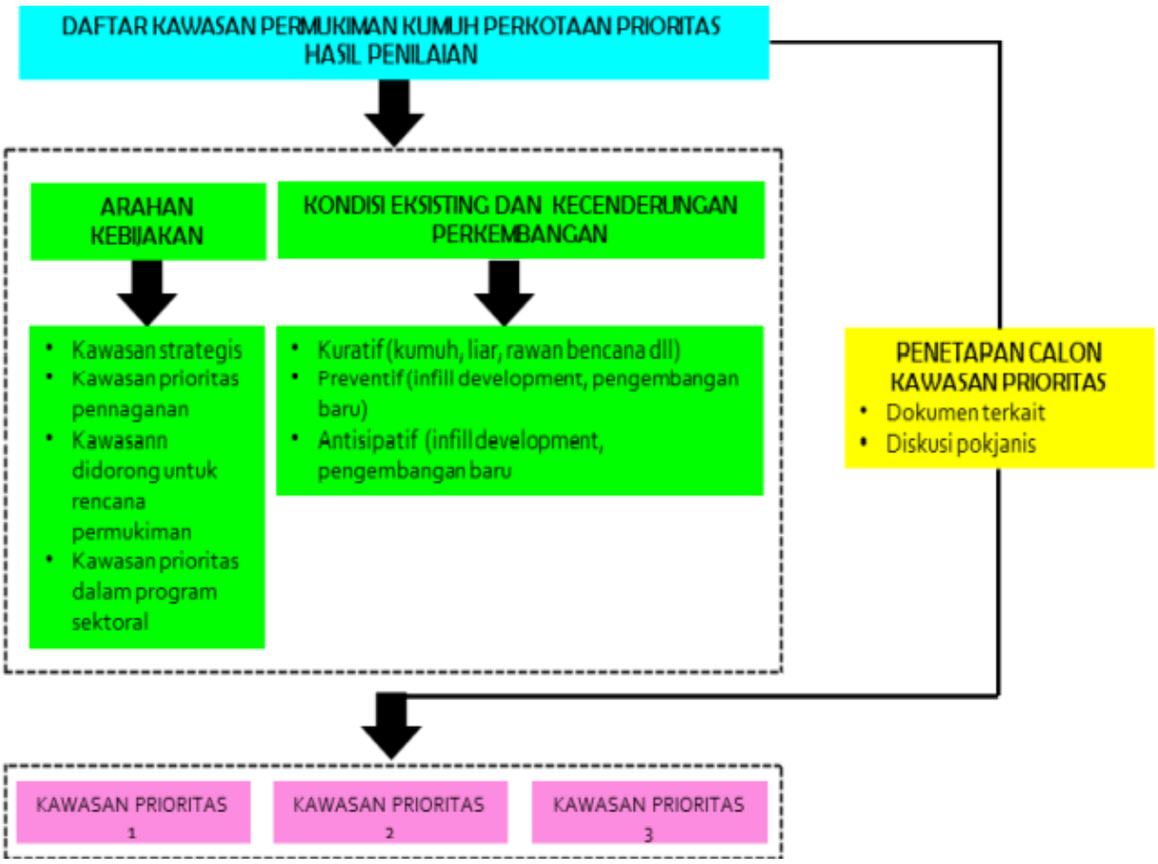

Gambar 7. 3 Skema Penetapan Kawasan Prioritas Penanganan Tahun Pertama

Sumber : Hasil Analisa, 2021

Sebagai tindak lanjut dari penetapan dengan melihat dasar pertimbangan komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap penanganan kawasan, respon dan kesiapan masyarakat terhadap program penanganan, keberadaan, dan aktifitas sistem/kelompok pengelola lingkungan, karaktersitik daerah, dan kebijakan daerah, serta kemampuan pembiayaan daerah, maka disepakati 4 (empat) kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Situbondo yaitu :

1) Cluster Prioritas 1 – Pesisir Kilensari

   Terdiri dari Desa Kilensari (Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara) dengan total luas kumuh 17,65 Ha. Dengan kriteria kumuh sedang, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain tinggi sehingga termasuk di dalam kategori B1.

2) Cluster Prioritas 2 – Pesisir Mangaran

   Terdiri dari Desa Semiring (Semiring Selatan, Semiring Utara, dan Semiring Barat) dan Desa Tanjungpecinan (Kaliasin dan Karanganyar) dengan total luas kumuh 50,74 Ha. Dengan kriteria kumuh sedang, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain tinggi sehingga termasuk di dalam kategori B1 .

3) Cluster Prioritas 3 – Situbondo

   Terdiri dari Desa Alasmalang (Karangpancor dan Karangrejo) dan Desa Olean (Krajan dan Kandang Selatan) dengan total luas kumuh 35,33 Ha. Dengan kriteria kumuh sedang, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain sedang sehingga termasuk di dalam Kategori B3.

4) Cluster Prioritas 4 – Asembagus

   Terdiri dari Desa Perante (Dusun Tengah, Dusun Selatan) dan Desa Wringinanom (Timur Sawah, Bataan dan Sok Parse) dengan total luas kumuh 76,46 Ha. Dengan kriteria kumuh ringan, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain sedang sehingga termasuk di dalam Kategori C3

7.6 ILUSTRASI KONSEP DESAIN KAWASAN PRIORITAS

Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, maka dapat diidentifikasi ilustrasi konsep desain yang diperlukan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan prioritas pertama. Hal ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan masterplan dan DED serta RAB pada kegiatan selanjutnya. Berikut ini adalah diidentifikasi ilustrasi konsep desain penanganan kawasan permukiman kumuh:

ILUSTRASI KONSEP DESAIN
KAWASAN LANDMARK
WISATA BAHARI
KILENSARI
DARLIM SUPER
PERTAMINA
PERTAMINA
PERTAMINA

Gambar 7. 5 Ilustrasi Konsep Desain Bangunan Hunian Kawasan Kilensari

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Gambar 7. 6 Ilustrasi Konsep Desain Penyediaan Ar Bersih Kawasan Kilensari

Sumber : Hasil Analisa, 2022

IPAL Komunal/ Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

- Merupakan pola penanganan air limbah skala lingkungan melalui pembangunan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat di daerah kumuh.
- Konsep Pengembangan IPAL Komunal/ Biofil :
  - ❑ IPAL Komunal/ Biofil dapat ditempatkan di jalan lingkungan/ gang
  - ❑ Pemanfaatan bangunan atas IPAL (seperti; taman, kolam, balai pertemuan, sarana olahraga, toliet umum, dll)
  - ❑ Hasil olahan IPAL digunakan sebagai pupuk cair/ organik
  - ❑ Pengelolaan gas methan sebagai sumber energi

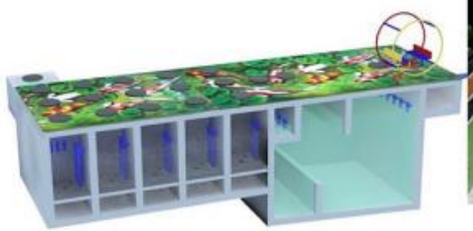

Drainase lingkungan untuk kawasan kumuh

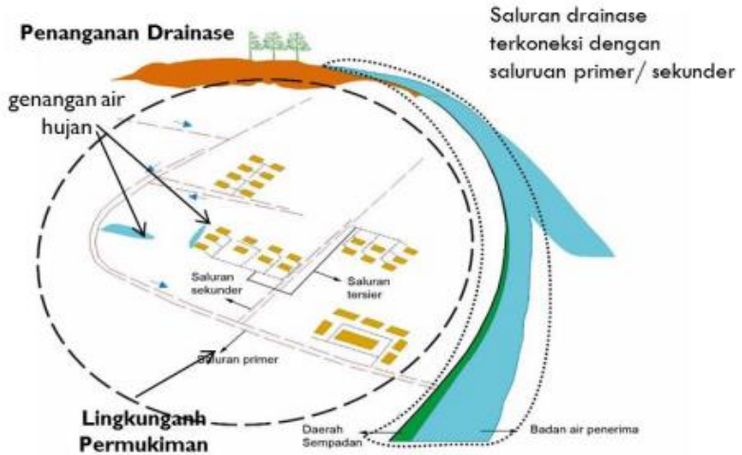

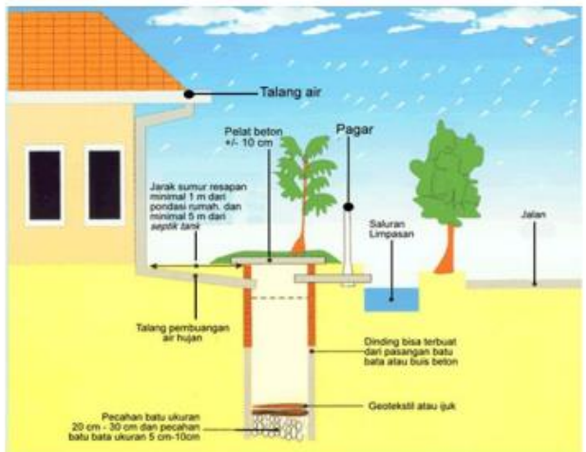

Konsep Drainase Vertikal

- Pembuatan kolam retensi yang berfungsi sebagai cadangan air dan perbaikan kualitas air tanah
- Pembuatan drainase vertikal, sumur resapan/ biopori

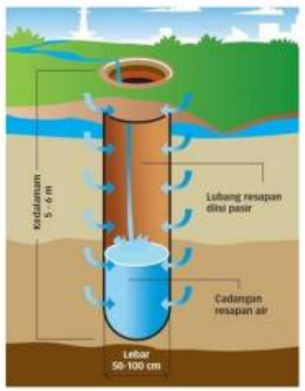

Gambar 7. 7 Ilustrasi Konsep Desain Pengelolaan Air Limbah Kawasan Kilensari

Sumber : Hasil Analisa, 2022

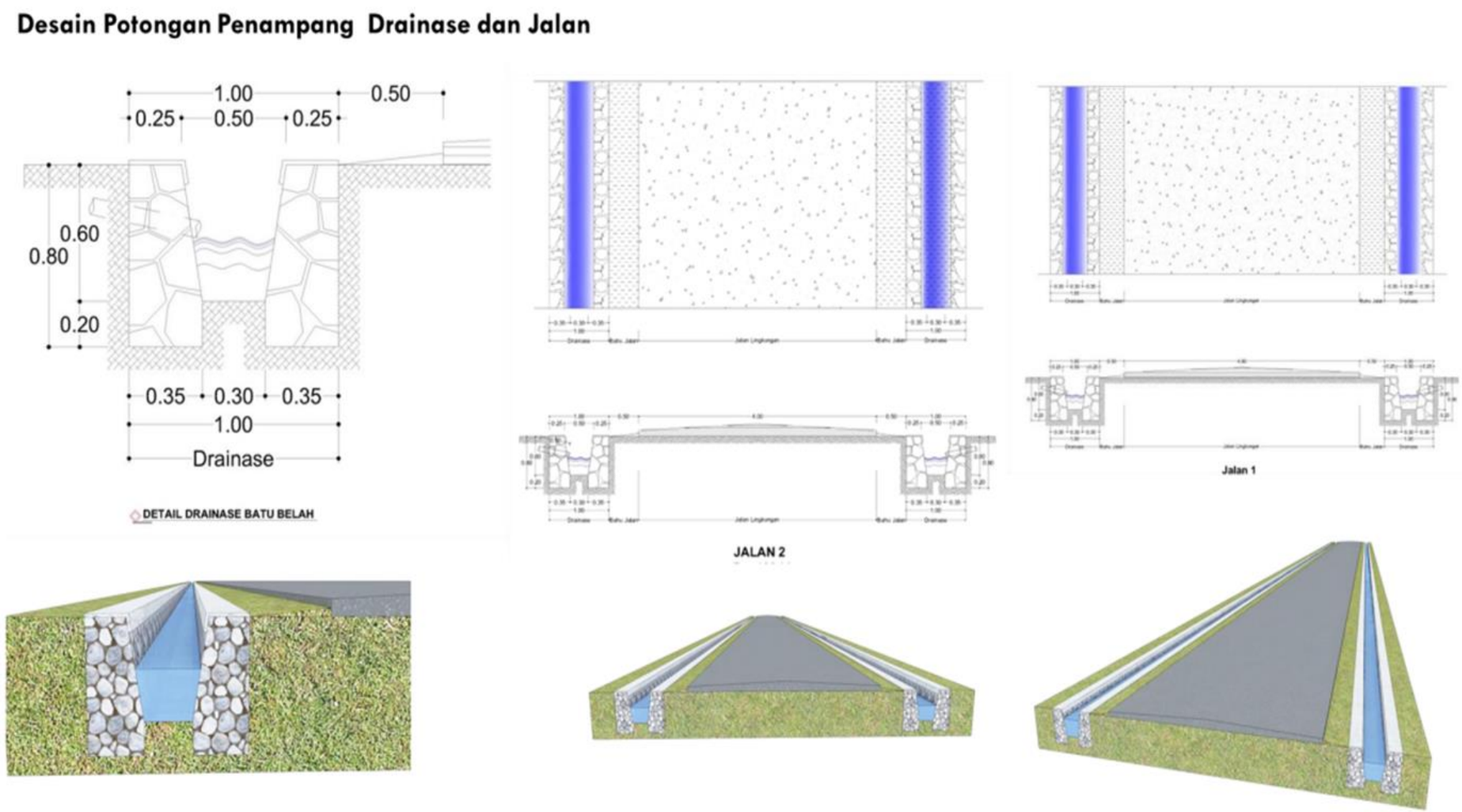

Gambar 7. 8 Ilustrasi Konsep Desain Jalan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kilensari

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Pengolahan Sampah Terpadu

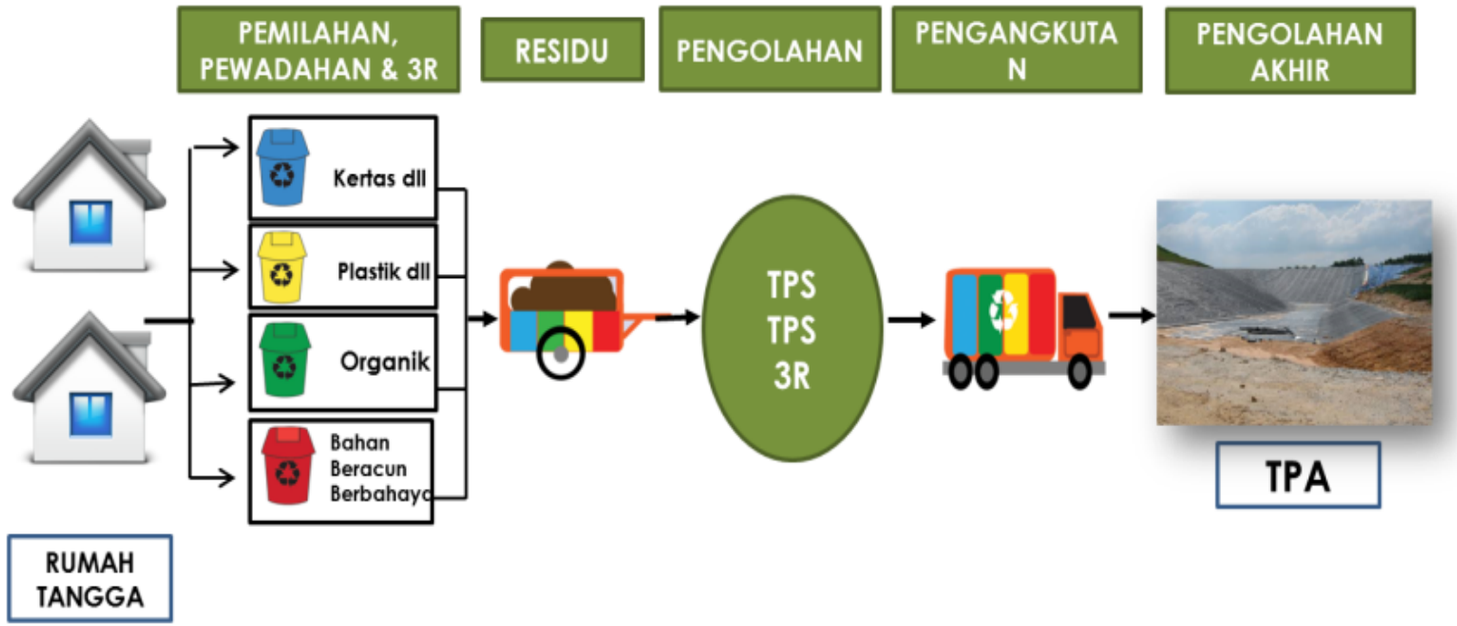

- Merupakan pola penanganan sampah skala lingkungan /kawasan dengan sistem 3R (*reuse, reduce, recycle*) berbasis masyarakat dengan
- Pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk kompos, makanan ternak serta beberapa produk lainnya
- Pemanfaatan sampah non organik sebagai barang daur ulang yang bernilai ekonomi
- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penerapan bank sampah

Gambar 7. 9 Ilustrasi Konsep Desain Pengelolaan Sampah Kawasan Kilensari

Sumber : Hasil Analisa, 2022

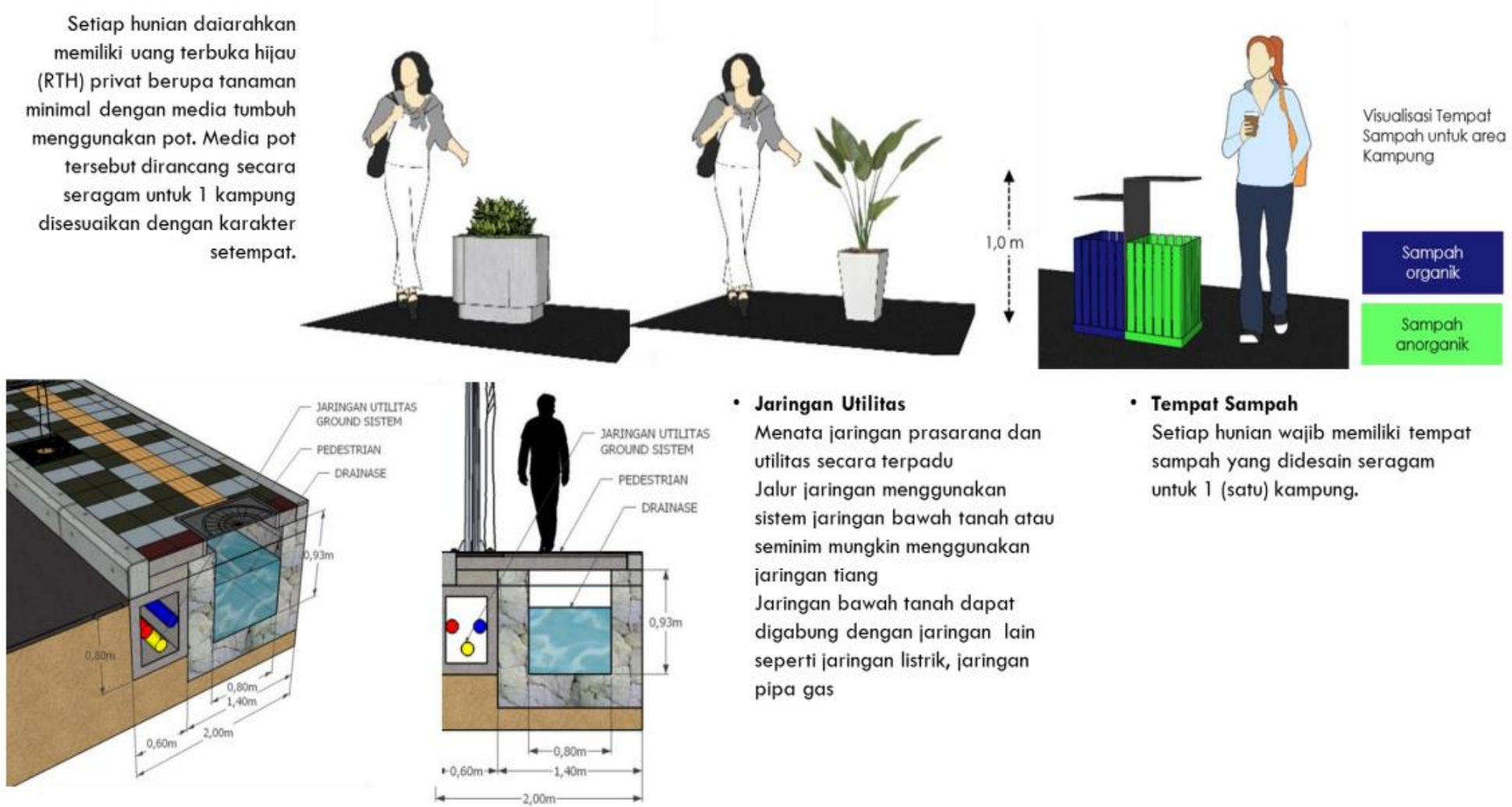

Gambar 7. 10 Ilustrasi Konsep Desain Jaringan Utilitas Kawasan Kilensari

Sumber : Hasil Analisa, 2022

BAB VIII
RENCANA PENEDIAAN TANAH

8.1 RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Rencana penyediaan tanah merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali, sedangakan pola penanganan kumuh di Kabupaten Situbondo adalah Pemugaran dan Peremajaan sehingga penyediaan tanah secara khusus masih belum krusial untuk di rencanakan namun perlu diketahui secara umum mengenai tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah didefinisikan sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam proses penyediaan tanah, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya. Proses penyediaan atau pengadaan tanah tersebut diselenggarakan dengan mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
c. Rencana Strategis; dan
d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Di Indonesia, dasar hukum pengadaan tanah mengacu pada aturan berikut:

- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan
- Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-4 atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum.

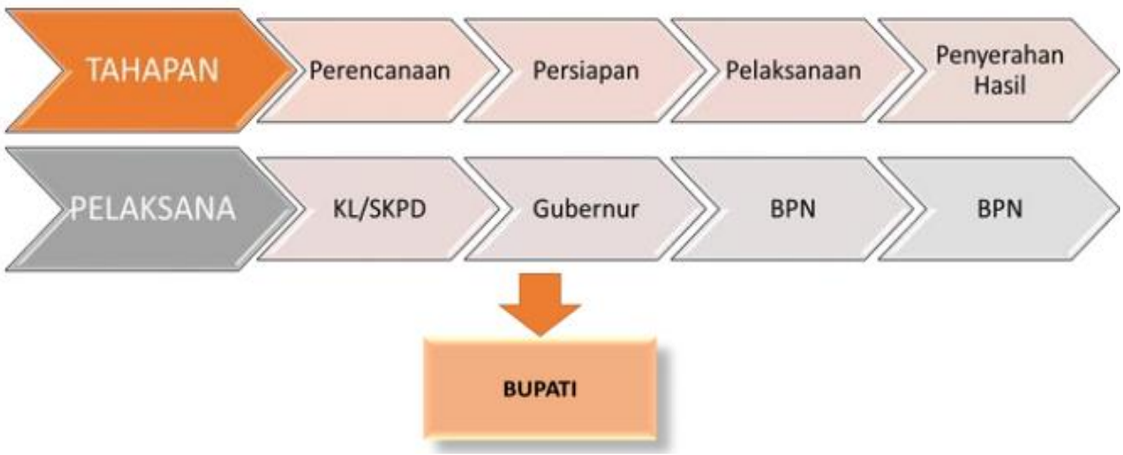

Gambar 8. 1 Tahapan dan Pelaksana Pengadaan Tanah

Sumber : UU No. 2 Tahun 2012

Adapun rincian kegiatan pada tiap tahapan disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 8. 1 Rincian Kegiatan Dalam Proses Pengadaan Tanah

NO	TAHAPAN	KEGIATAN
1	Perencanaan	• Penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tataruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah • Koordinasi dengan instansi teknis terkait • Melakukan kajian teknis dengan instansi terkait • Melakukan kajian oleh lembaga profesional • Merumuskan rencana pengadaan tanah • Melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan; • Melakukan analisis rencana pembangunan • Merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN
		• Mendata objek dan subjek atas rencana lokasi pengadaan tanah • Menentukan kepastian letak, status tanah dan luas tanah yang diperlukan • Memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah • Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan dampak yang akan terkena rencanapembangunan • Melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan • Melakukan studi budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian amdal • Melakukan analisa, waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah • Melakukan perhitungan ganti rugi ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah • Menyusun rencana kebutuhan biaya dan sumber • Melakukan perhitungan alokasi anggaran meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan,sosialisasi • Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan • Melakukan analisa dan manfaat pembangunan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN
		• Melakukan perhitungan dan analisis biaya yang diperlukan • Melakukan analisa dan manfaat pembangunan
	Persiapan	• Pemberitahuan rencana pembangunan • Pendataan awal lokas • Penetapan lokasi • Pengumuman penetapan lokasi • Menerima keberatan pihak yang berhak • Melakukan kajian atas keberatan pihak yang berhak • Konsultasi publik/konsultasi publik ulang • Menerima/menolak keberatan pihak yang berhak • Proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara atas keberatan dari pihak yang berhak • Proses beracara di Mahkamah Agung atas keberatan dari pihak yangberhak
	Pelaksanaan	• Penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah • Pemberitahuan kepada pihak yang berhak • Identifikasi aspek yuridis • Publikasi hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominative • Keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satuan tugas • Keberatan dari pihak yang berhak dilakukan verifikasi ulang oleh satuan tugas • Inventarisasi aspek fisik • Menilai dan membuat berita acara

NO	TAHAPAN	KEGIATAN
		penilaian • Musyawarah dengan masyarakat • Persetujuan dan pelepasan hak serta pembayaran • Proses beracara di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung • Pemberian ganti rugi atau penitipan uang

Sumber : UU No. 2 Tahun 2012

Sebagai catatan, dalam Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-4 atas Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, pada pasal 121 ayat 1 disebutkan bahwa dalam rangka efisinsi dan efektifitas pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 Hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak (Pemilik Tanah). Pembahasan lebih mendalam terkait rencana penyediaan tanah di Kabupaten Situbondo akan di pertajam pembahasannya pada dokumen di tahun penganggaran selanjutnya

BAB IX
RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

9.1 RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, investasi didefinisikan sebagai penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, investasi dalam hal ini ditekankan pada penggunaan aset, diperoleh melalui proses pengeluaran dana yang disebut belanja modal. Sedangkan dalam Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2008 tentang investasi pemerintah dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, yaitu dalam kerangka investasi dan penyediaan barang dan pelayanan publik..

Sejalan dengan peran pemerintah daerah tersebut dalam proses penanganan dan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo rencana investasi dan pembiayaan dipandang sebagai suatu hal pokok. Adapun sumber-sumber pembiayaan secara umum terdiri atas pembiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat, yang diilustrasikan sebagai berikut.

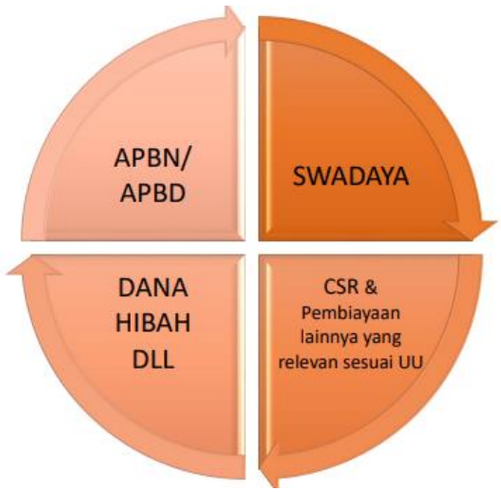

Gambar 9. 1 Sumber Pembiayaan Penanganan Kumuh

Dibawah ini merupakan rencana investasi dan pembiayaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo :

Tabel 9. 1 Rencana Investasi dan Pembiaayan Penanganan Kumuh Skala Kota Kabupaten Situbondo

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME		1	2	3	4	5		
PENINGKATAN												
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH SITUBONDO	Pengaturan dan pembinaan pengembangan permukiman	Melaksanakan pendampingan pembangunan berdasarkan RTBL dan DED Kawasan Kumuh	7	Paket	Rp 126,000,000.00						APBD KAB. APBN	DPUPP
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	100	Unit	Rp 3,000,000,000.00						APBN	DPUPP DINSOS
	Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	Melaksanakan pendampingan pembangunan, perbaikan, penambahan kapasitas, kualitas, & jangkauan pelayanan jalan beserta sarananya	7	Paket	Rp 420,000,000.00						APBD KAB. APBD PROV APBN	DPUPP
		Melaksanakan pendampingan pembangunan, perbaikan kualitas dan keterhubungan drainase dan jaringan air limbah	7	Paket	Rp 420,000,000.00						APBD KAB. APBD PROV APBN	DPUPP DLH
		Melaksanakan pendampingan penyediaan jaringan air bersih dan aman dikonsumsi	7	Paket	Rp 420,000,000.00						APBD KAB. APBD PROV	PDAM DPUPP DINKES

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME		1	2	3	4	5		
											APBN	
		Melaksanakan pendampingan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman yang ramah lingkungan & berkelanjutan seperti IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), TPS 3R, TPST & lainnya	7	Paket	Rp 420,000,000.00						APBD KAB. APBD PROV APBN	DLH
		Melaksanakan pendampingan pembangunan, perbaikan, penambahan kapasitas, kualitas, & jangkauan pelayanan sarana prasarana proteksi kebakaran	7	Paket	Rp 420,000,000.00						APBD KAB. APBD PROV APBN	BPBD SATPOL PP
		Melaksanakan pendampingan pembangunan resapan air berupa biopori & sumur resapan	7	Paket	Rp 420,000,000.00						APBD KAB. APBN	DPUPP
		Penyediaan ruang terbuka hijau	7	Paket	Rp 3,500,000,000.00						APBD KAB. APBD PROV APBN	DLH

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME		1	2	3	4	5		
	Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan serta infrastruktur dasar	Gotong royong dalam pembangunan jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya	7	Paket	Rp 70,000,000.00						SWADAYA	PEMDES
	Program Lingkungan Sehat	Menguji keamanan air minum berkala di Kab. Situbondo · Penanaman tanaman obat herbal	7	Paket	Rp 105,000,000.00						APBD KAB	PDAM DINKES
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dalam pembangunan/ perbaikan kualitas lingkungan	7	Paket	Rp 175,000,000.00						APBD KAB	DINSOS
	Program *One Vilage One Product*	Pembangunan Kios dan Showroom produk UMKM Unggulan	7	Paket	Rp 1,050,000,000.00						APBD KAB APBD PROV	DISPERINDAG
					Rp 10,546,000,000.00							
PENCEGAHAN												

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME		1	2	3	4	5		
Permukiman Kumuh Kabupaten Situbondo	Pengaturan dan pembinaan pengembangan permukiman	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lngkungan (RTBL)	7	paket	Rp 1,750,000,000.00						APBD Kabupaten	DPUPP
		Penyusunan masterplan kawasan	7	paket	Rp 1,400,000,000.00						APBD Kabupaten	DPUPP
		Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh (DED)	7	paket	Rp 1,400,000,000.00						APBD Kabupaten	DPUPP
		Kajian dan perencanaan sistem drainase perkotaan	1	paket	Rp 500,000,000.00						APBD Kabupaten	DPUPP
		Kajian dan perencanaan sistem sanitasi & limbah perkotaan	1	paket	Rp 500,000,000.00						APBD Kabupaten	DLH
		Kajian pengelolaan persampahan	1	paket	Rp 500,000,000.00						APBD Kabupaten	DLH
		Kajian Resiko dan Mitigasi Bencana	1	paket	Rp 500,000,000.00						APBD Kabupaten	BPBD
	Pengawasan pembangunan dan pengembangan infrastruktur	Memantau pembangunan/ perbaikan infrastruktur dasar permukiman yang sesuai dengan persyaratan teknis	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBD Kabupaten	DPUPP, DLH
		Menyusun standar air minum	1	paket	Rp						APBD	PDAM,

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME		1	2	3	4	5		
	dasar permukiman agar sesuai dengan persyaratan teknis	aman			250,000,000.00						Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Penertiban peraturan pendirian bangunan hunian (IMB & SHM)	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBD Kabupaten	SATPOL PP
		Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBD Kabupaten	BAPPEDA
		Sosilalisasi pembangunan bangunan (mandiri oleh masyarakat) yang sesuai persyaratan teknis	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBD Kabupaten	BAPPEDA
	Program Lingkungan Sehat	Sosialisasi dan Kampanye Kebersihan	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Gerakan Kab. Situbondo Bersih dan Hijau	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Pelatihan Pengolahan sampah melalui konsep 3R	7	Kawasan kumuh	Rp 350,000,000.00						APBD Kabupaten	DLH, DINAS KESEHATAN

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME		1	2	3	4	5		
		Sosialisasi tatanan kawasan sehat	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBD Kabupaten	DPUPP, DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBD Kabupaten	DINAS KESEHATAN
		Sosialisasi pemahaman masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBD Kabupaten	SATPOL PP, BPBD
	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	7	Kawasan kumuh	Rp 3,500,000,000.00						APBN	DINAS SOSIAL, DPUPP
		Bimbingan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBN	DINAS SOSIAL
		Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBN	DINAS SOSIAL
		Bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	7	Kawasan kumu	Rp 140,000,000.00						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERIN

LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN KE)					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
			SATUAN	VOLUME		1	2	3	4	5		
				h								DAGKOP
		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBN	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengikutsertaan perempuan dan kelompok rentan lainnya (lansia, anak-anak, difabel) dalam pemeliharaan lingkungan	7	Kawasan kumuh	Rp 140,000,000.00						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN
	Program OVOP/one village one product	Identifikasi Potensi Desa	3	paket	Rp 60,000,000.00						DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
		Penguatan kapasitas masyarakat terkait branding, mutu produk, pemasaran,, dll daya tawar	3	paket	Rp 60,000,000.00						APBD Kabupaten	DINAS SOSIAL, DISPERINDAGKOP
					Rp 12,730,000,000.00							
TOTAL PEMBIAYAAN					**Rp 23,276,000,000.00**							

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Tabel 9. 2 Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Kumuh Skala Kawasan Kabupaten Situbondo

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
PRIORITAS 1	**CLUSTER KUMUH PESISIR KILENSARI**	**Kawasan Permukiman Kumuh Kilensari**	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	1251	Unit	Rp 31,275,000,000.00						APBN	DPUPP
				Penataan dan reorientasi keteraturan bangunan	977	Unit	Rp 9,770,000,000.00						APBN	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	4125	Meter	Rp 1,031,250,000.00						APBD Kab.	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	100	Meter	Rp 40,000,000.00						APBD Kab.	DPUPP
				Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	2275	Meter	Rp 910,000,000.00						APBD Kab.	DPUPP
				Pembangunan Tangkis Laut	1200	Meter	Rp 1,200,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD
			Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	1104	KK	Rp 1,380,000,000.00						APBN	DPUPP, PDAM
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (1264 KK)	4	Unit	Rp 1,600,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH, DINKES

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
				Pembangunan MCK Komunal (1119 KK)	5	Unit	Rp 375,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH, DINKES
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	2	Unit	Rp 200,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pengadaan Tempat Sampah	500	Unit	Rp 125,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembentukan satgas pengangkutan sampah	1	Paket	Rp 5,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembangunan TPS 3R	1	Unit	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DLH
			Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket	Rp 1,500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Jalur Evakuasi Bencana	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Penanda & Titik Kumpul	1	Paket	Rp 250,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Apar	25	titik	Rp 75,000,000.00						APBN, APBD	DPUPP, BPBD,

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
													Prov.	SATPOL PP
			Peningkatan kesediaan fisik RTH & Ruang Publik	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH
				Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket	Rp 250,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR, DISHUB
			Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan koridor pintu masuk wisata bahari kilensari	1	Paket	Rp 2,500,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR
				Pembangunan ruang publik dan amenitas (Kafetaria, mushola, kamar mandi, dll)	1	Paket	Rp 5,000,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR
TOTAL ESTIMASI PENDANAAN PRIORITAS 1 PESISIR KILENSARI							**Rp 58,986,250,000.00**							
PRIORITAS 2	**CLUSTER KUMUH PESISIR MANGARAN**	**Kawasan Permukiman Kumuh Tanjung Pecinan**	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	691	Unit	Rp 17,275,000,000.00						APBN	DPUPP
				Penataan dan reorientasi keteraturan bangunan	555	Unit	Rp 5,550,000,000.00						APBN	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	5057	Meter	Rp 1,264,250,000.00						APBD Kab.	DPUPP

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
			Jalan											
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	5730	Meter	Rp 2,292,000,000.00						APBD Kab.	DPUPP
				Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1211	Meter	Rp 484,400,000.00						APBD Kab.	DPUPP
			Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	492	Unit	Rp 615,000,000.00						APBN	DPUPP, PDAM
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan ipal Komunal (691 KK)	2	Unit	Rp 800,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH, DINKES
				Pembangunan MCK Komunal (691 KK)	5	Unit	Rp 375,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH, DINKES
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit	Rp 100,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pengadaan Tempat Sampah	54	Unit	Rp 13,500,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembentukan satgas sampah	1	Paket	Rp 5,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembangunan TPS 3R	1	Unit	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD	DLH

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
													Prov.	
			Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket	Rp 1,500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Jalur Evakuasi Bencana	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Penanda & Titik Kumpul	1	Paket	Rp 250,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Apar	20	Unit	Rp 60,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
			Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH
				Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket	Rp 250,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR, DISHUB
			Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Peningkatan Kualitas Dermaga	1	Paket	Rp 10,000,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR
				Pembangunan ruang publik	1	Paket	Rp 5,000,000,000.00						APBD Prov,	DISPAR

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
				dan amenitas (Kafetaria, mushola, kamar mandi, dll)									APBD Kab	
		Kawasan Permukiman Kumuh Semiring	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	457	Unit	Rp 11,425,000,000.00						APBN	DPUPP
				Penataan Orientasi bangunan	500	Unit	Rp 5,000,000,000.00						APBN	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Pembangunan Jalan Baru	2248	Meter	Rp 562,000,000.00						APBD Kab.	DPUPP
				Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	5753	Meter	Rp 1,438,250,000.00						APBD Kab.	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Bar	2101	Meter	Rp 840,400,000.00						APBD Kab.	DPUPP
				Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	2681	Meter	Rp 1,072,400,000.00						APBD Kab.	DPUPP
			Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	347	Unit	Rp 433,750,000.00						APBN	DPUPP, PDAM
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal 549 KK)	2	Unit	Rp 800,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH, DINKES
				Pembangunan MCK Komunal	4	Unit	Rp 300,000,000.00						APBD Prov,	DPUPP, DLH,

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2026		
				(402 KK)									APBD Kab	DINKES
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit	Rp 100,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pengadaan Tempat Sampah	200	Unit	Rp 50,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembentukan satgas sampah	1	Paket	Rp 5,000,000.00						APBD Kab.	DLH
			Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Jalur Evakuasi Bencana	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Penanda & Titik Kumpul	1	Paket	Rp 250,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Apar	20	Unit	Rp 30,000,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
			Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket	Rp 3,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
			Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan koridor pintu masuk kawasan KALBUT	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DISPAR, DISHUB
TOTAL ESTIMASI PENDANAAN PRIORITAS 2 PESISIR MANGARAN							**Rp 101,113,950,000.00**							
PRIROITAS 3	**CLUSTER KUMUH SITUBONDO**	**Kawasan Permukiman Kumuh Alasmalang**	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	224	Unit	Rp 5,600,000,000.00						APBN	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Pembangunan Jalan Baru	877	Meter	Rp 219,250,000.00						APBD Kab.	DPUPP
				Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	1706	Meter	Rp 426,500,000.00						APBD Kab.	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	930	Meter	Rp 372,000,000.00						APBD Kab.	DPUPP
				Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1063	Meter	Rp 425,200,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD
			Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	290	Unit	Rp 362,500,000.00						APBN	DPUPP, PDAM
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (354 KK)	2	Unit	Rp 800,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH, DINKES
				Pembangunan	2	Unit	Rp						APBD	DPUPP,

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
				MCK Komunal (84 KK)			150,000,000.00						Prov, APBD Kab	DLH, DINKES
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit	Rp 100,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pengadaan Tempat Sampah	80	Unit	Rp 20,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembentukan satgas sampah	1	Paket	Rp 5,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembangunan TPS 3R	1	Unit	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DLH
			Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket	Rp 1,500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Jalur Evakuasi Bencana	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Penanda & Titik Kumpul	1	Paket	Rp 250,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Apar	15	Unit	Rp 45,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
			Peningkatan	Pembangunan	1	Paket	Rp						APBD	DPUPP,

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
			kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Ruang Publik/ RTH			30,000,000.00						Prov, APBD Kab	DLH
				Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket	Rp 30,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR, DISHUB
			Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan Koridor sebagai ruang publik kampung hijau	1	Paket	Rp 1,500,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR
				Penataan akses dan shoroom BONKLA (bonsai Kelapa)	1	Paket	Rp 1,500,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR
		Kawasan Permukiman Kumuh Olean	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	706	Unit	Rp 17,650,000,000.00						APBN	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Pembangunan Jalan Baru	450	Meter	Rp 112,500,000.00						APBD Kab.	DPUPP
				Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	1151.5	Meter	Rp 287,875,000.00						APBD Kab.	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Baru	755	Meter	Rp 302,000,000.00						APBD Kab.	DPUPP
				Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1465	Meter	Rp 586,000,000.00						APBD Kab.	DPUPP

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
			Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	168	KK	Rp 210,000,000.00						APBN	DPUPP, PDAM
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan Septictank Komunal (806 kk)	2	Unit	Rp 800,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH, DINKES
				Pembangunan MCK Komunal	1	Unit	Rp 75,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH, DINKES
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit	Rp 100,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pengadaan Tempat Sampah	50	Unit	Rp 12,500,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembentukan satgas sampah	1	Paket	Rp 5,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembangunan TPS 3R	1	Unit	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DLH
			Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket	Rp 1,500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Jalur Evakuasi Bencana	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
				Penanda & Titik Kumpul	1	Paket	Rp 250,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Apar	15	Unit	Rp 45,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
			Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket	Rp 50,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH
				Pembangunan Jalur Hijau	1	Paket	Rp 30,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH
				Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket	Rp 300,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR
			Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan koridor pintu masuk wisata edukasi olean	1	Paket	Rp 1,500,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR
				Penataan kampung edukasi hidrponik	1	Paket	Rp 1,500,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR
				penataan wisata edukasi musium PG Olean	1	Paket	Rp 10,000,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DISPAR

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2026		
TOTAL ESTIMASI PENDANAAN PRIORITAS 3 SITUBONDO							**Rp 50,651,325,000.00**							
PRIORITAS 4	**CLUSTER KUMUH ASEMBAGUS**	**Kawasan Permukiman Kumuh Perante**	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	785	Unit	Rp 19,625,000,000.00						APBN	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	4432	Meter	Rp 1,108,000,000.00						APBD Kab.	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Bar	5099	Meter	Rp 2,039,600,000.00						APBD Kab.	DPUPP
				Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	1062	Meter	Rp 424,800,000.00						APBD Kab.	DPUPP
			Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	535	Unit	Rp 668,750,000.00						APBN	DPUPP, PDAM
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (326 KK)	1	Unit	Rp 400,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, DLH, DINKES
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit	Rp 100,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pengadaan Tempat Sampah	15	Unit	Rp 3,750,000.00						APBD Kab.	DLH

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
				Pembentukan satgas sampah	1	Paket	Rp 5,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembangunan TPS 3R	1	Unit	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DLH
			Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket	Rp 1,500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Jalur Evakuasi Bencana	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Penanda & Titik Kumpul	1	Paket	Rp 250,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Apar	15	Unit	Rp 45,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
			Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket	Rp 50,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, DLH
				Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket	Rp 30,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DISPAR
			Peningkatan Sosial Ekonomi Kawasan	Penataan Kawasan Kuliner Alam Maste	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DISPAR

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
		Kawasan Permukiman Kumuh Wringinanom	Peningkatan kualitas fisik bangunan hunian	Rehab RTLH	386	Unit	Rp 9,650,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Jalan	Peningkatan Kualitas/Rehab Jalan	6918	Meter	Rp 1,729,500,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP
			Peningkatan kualitas fisik Jaringan Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Bar	7300	Meter	Rp 2,920,000,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP
				Peningkatan Kualitas/Rehab Saluran Drainase	992	Meter	Rp 396,800,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP
			Peningkatan kualitas Penyediaan Air Minum	Pemasangan Sambungan Rumah air PDAM	278	Unit	Rp 347,500,000.00						APBD Prov, APBD Kab	DPUPP, PDAM
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal (278 KK)	1	Unit	Rp 400,000,000.00						APBN	DPUPP, DLH, DINKES
			Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Armada pengangkutan sampah	1	Unit	Rp 100,000,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pengadaan Tempat Sampah	30	Unit	Rp 7,500,000.00						APBD Kab.	DLH
				Pembentukan	1	Paket	Rp						APBD	DLH

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
				satgas sampah			5,000,000.00						Kab.	
				TPS 3R	1	Unit	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DLH
			Peningkatan Jangkauan Proteksi Kebakaran	Sistem hidran	1	Paket	Rp 1,500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Jalur Evakuasi Bencana	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Penanda & Titik Kumpul	1	Paket	Rp 250,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
				Apar	15	Unit	Rp 45,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, BPBD, SATPOL PP
			Peningkatan kesediaan fisik RTH & Jalur Hijau	Pembangunan Ruang Publik/ RTH	1	Paket	Rp 50,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, DLH
				Pembangunan Jalur Hijau	1	Paket	Rp 30,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DPUPP, DLH
				Pembangunan Landmark Kawasan	1	Paket	Rp 500,000,000.00						APBN, APBD Prov.	DISPAR
TOTAL ESTIMASI PENDANAAN PRIORITAS 4 ASEMBAGUS							**Rp 46,681,200,000.00**							
TOTAL INVESTASI PENCEGAHAN KUMUH							**Rp 27,087,000,000.00**							

PRIORITAS	CLUSTER	KAWASAN	PROGRAM	KEGIATAN	BESARAN		ESTIMASI PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA
					SATUAN	VOLUME		2022	2023	2024	2025	2025		
TOTAL ESTIMASI PENDANAAN PRIORITAS 1 + 2 +3 +4							**Rp 284,519,725,000.00**							

Sumber : Hasil Analisa, 2022

9.2 SIMULASI PENGURANGAN KUMUH KABUPATEN SITUBONDO

Berdasarkan pada skenario penanganan kumuh Kabupaten Situbondo dari hasil penilaian sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, maka dihasilkan skenario penanganan dalam 4 (empat) prioritas. Berikut adalah skenario penanganan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo :

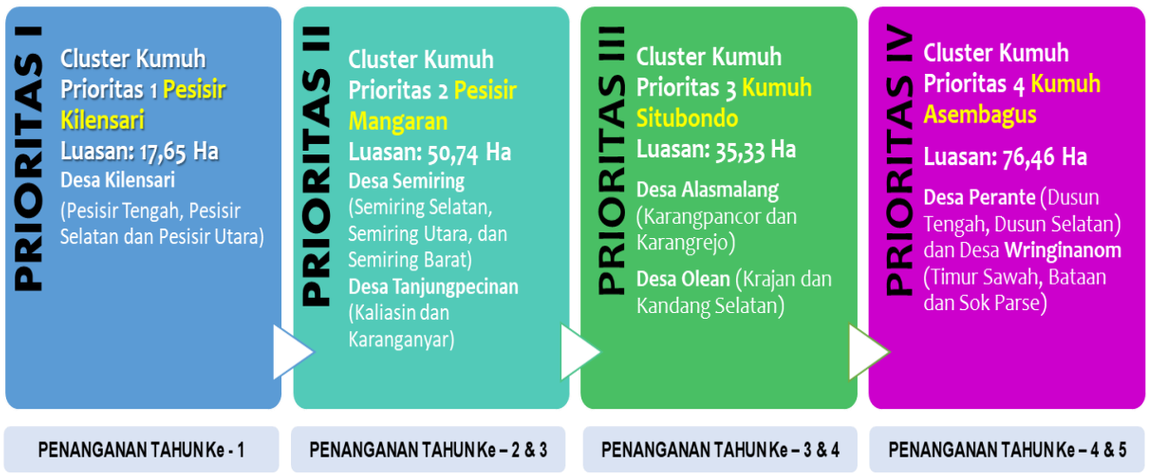

Gambar 9. 1 Skenario Penanganan Kekumuhan di Kabupaten Situbondo

Sumber : Hasil Analisa, 2022

Berdasarkan hasil penilaian kategori kumuh di Kabupaten Situbondo, prioritas penanganan kumuh pertama adalah Cluster Prioritas Pesisir Kilensari yang terdiri Desa Kilensari (Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara) dengan total luas kumuh 17,65 Ha. Dengan kriteria kumuh sedang, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain tinggi sehingga termasuk di dalam kategori B1. Cluster Prioritas 1 Pesisir Kilensari menjadi kawasan prioritas dengan berbagai pertimbangan, yaitu:

1) Termasuk kawasan strategis kabupaten
2) Memiliki potensi ekonomi yang strategis
3) Merupakan kawasan perkotaan yang relatif cepat tumbuh dibanding kawasan lainnya sehingga perlu segera ditangani agar tidak menyebabkan degradasi sosial dan lingkungan

Dengan pertimbangan strategis tersebut, Cluster Prioritas 1 Pesisir Kilensari dinilai perlu segera dituntaskan. Selain itu, dalam penetapan kawasan permukiman kumuh perkotaan prioritas pertama ini merupakan proses identifikasi terhadap kawasan permukiman kumuh perkotaan yang dinilai memiliki kesiapan untuk implementasi pembangunan fisik pada tahun pertama dalam rencana pentahapan pembangunan kawasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati antar pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan dengan melihat dasar pertimbangan komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap penanganan kawasan, respon dan kesiapan masyarakat terhadap program penanganan, keberadaan, dan aktifitas sistem/kelompok pengelola lingkungan, karaktersitik daerah, dan kebijakan daerah, serta kemampuan pembiayaan daerah, maka disepakati 4 (empat) kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Situbondo yaitu :

1) Prioritas 1 – Cluster Pesisir Kilensari

   Terdiri dari Desa Kilensari (Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara) dengan total luas kumuh 17,65 Ha. Dengan kriteria kumuh sedang, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain tinggi sehingga termasuk di dalam kategori B1.

2) Prioritas 2 – Cluster Pesisir Mangaran

   Terdiri dari Desa Semiring (Semiring Selatan, Semiring Utara, dan Semiring Barat) dan Desa Tanjungpecinan (Kaliasin dan Karanganyar) dengan total luas kumuh 50,74 Ha. Dengan kriteria kumuh sedang, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain tinggi sehingga termasuk di dalam kategori B1 .

3) Prioritas 3 – Cluster Situbondo

   Terdiri dari Desa Alasmalang (Karangpancor dan Karangrejo) dan Desa Olean (Krajan dan Kandang Selatan) dengan total luas kumuh 35,33 Ha. Dengan kriteria kumuh sedang, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain sedang sehingga termasuk di dalam Kategori B3.

4) Prioritas 4 – Cluster Asembagus

   Terdiri dari Desa Perante (Dusun Tengah, Dusun Selatan) dan Desa Wringinanom (Timur Sawah, Bataan dan Sok Parse) dengan total luas kumuh 76,46 Ha. Dengan kriteria kumuh ringan, legalitas lahan/ status lahan legal dan pertimbangan lain sedang sehingga termasuk di dalam Kategori C3

Berdasarkan pembagian prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatas maka dihasilkan simulasi pengurangan kumuh kabupaten Situbondo Tahun 2023 – 2027 adalah sebagai berikut :

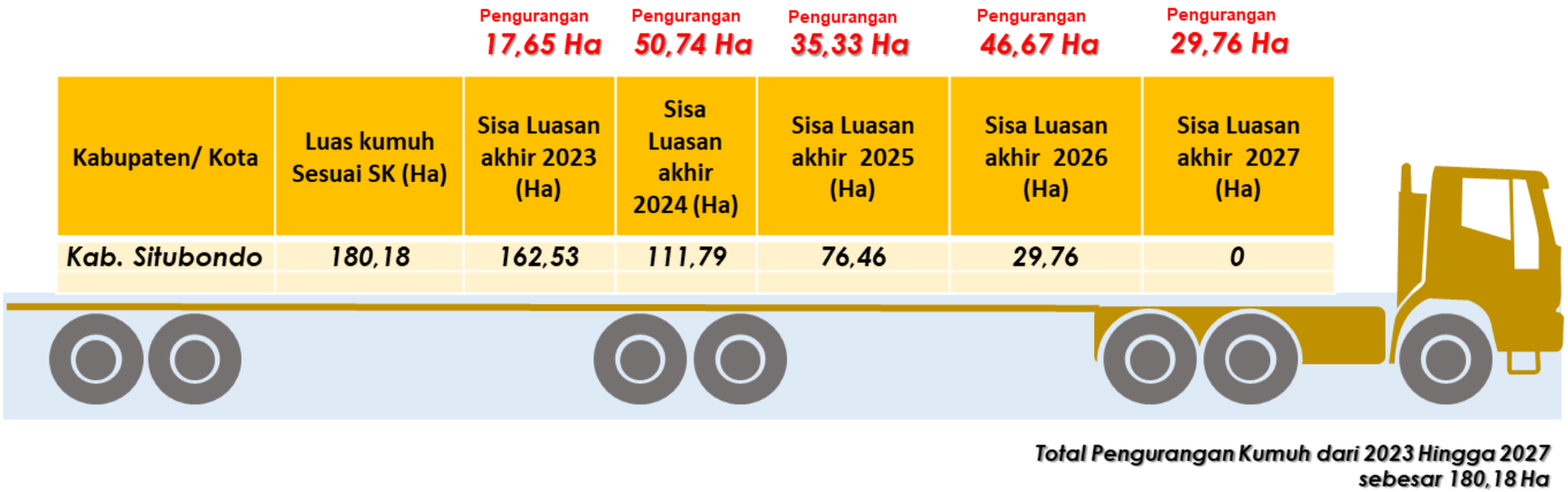

Gambar 9. 2 Simulasi Pengurangan Kumuh Kabupaten Situbondo Tahun 2023 – 2027

Sumber : Hasil Analisa, 2022

BAB X
RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Secara umum peran pemangku kepentingan yang diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah berupa partisipasi masyarakat, peran dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selain itu, meskipun tidak diamanatkan secara tersurat tentang peran swasta/dunia usaha, pada beberapa bagian tercantum dengan jelas peluang keterlibatan swasta. Maka, dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo, pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi Pemerintah, Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, masyarakat juga pihak swasta. Keempat elemen ini diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.

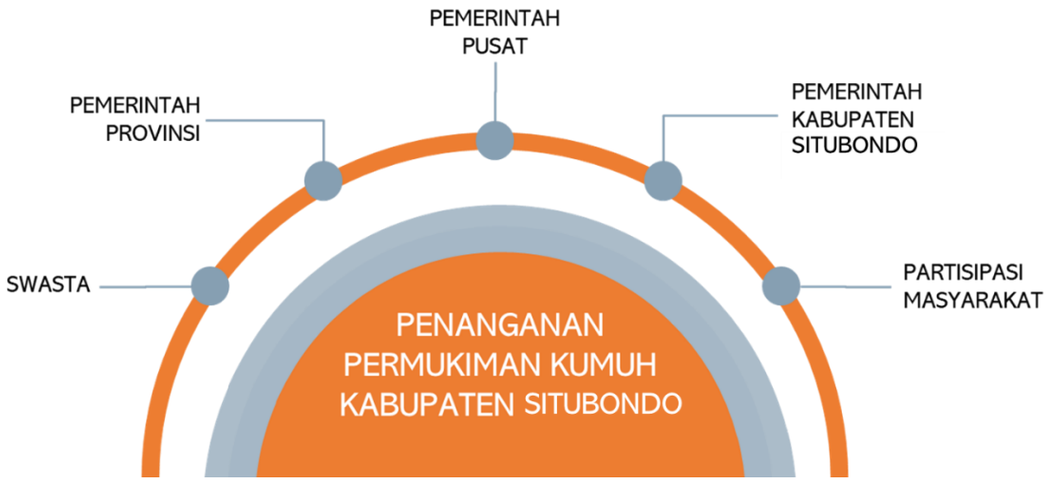

Gambar 10. 1 Elemen Penanganan Kumuh Kabupaten Situbondo

Sumber : Hasil Ilustrasi UU No. 1 Tahun 2011

Dalam amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, paradigma masyarakat sebagai subyek lebih dikedepankan dengan membuka pintu keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan perumahan. Hal ini menjadi jembatan peluang terjadinya kolaborasi antara Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Ketiga pihak tersebut memiliki kepentingan berbeda yang berdampak pada perbedaan cara pandang terhadap penanganan permukiman kumuh. Adapun keterlibatan masing-masing elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut :

10.1 Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 mengamanatkan pembinaan penyelenggaraan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Kegiatan perencanaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas di antaranya

mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR. Sementara Pemerintah daerah secara tegas juga mempunyai tugas memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan perumahan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kab. Situbondo dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang, meliputi:

(a) menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman;
(b) menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
(c) menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
(d) memberdayakan pemangku kepentingan; dan
(e) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim

Kewajiban lainnya dari Pemerintah adalah memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Untuk itu, Pemerintah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR, kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa:

(a) subsidi perolehan rumah;
(b) stimulan rumah swadaya;
(c) insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan;
(d) perizinan;
(e) asuransi dan penjaminan;
(f) penyediaan tanah;
(g) sertifikasi tanah; dan/atau
(h) prasarana, sarana, dan utilitas umum

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara tegas juga disebutkan melibatkan masyarakat atau dengan memasilitasi masyarakat, meliputi:

(a) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
(b) peremajaan;
(c) penetapan lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali;
(d) memasilitasi pengelolaan yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya; dan
(e) memberikan pendampingan bagi perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Pemerintah kabupaten memiliki peran dan fungsi yang sangat penting terkait dengan proses penanganan dan pencegahan kumuh di Kabupaten Situbondo. Dalam mengatasi kumuh, Pemerintah Kabupaten Situbondo ini diklasifikasikan berdasarkan tugas dan fungsinya yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD serta pemerintah tingkat kecamatan dan desa. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memiliki forum dalam bentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman atau disebut POKJA PKP.

Selain itu terdapat pula program-program penanganan permukiman kumuh yang diinisiasi oleh Pemerintah dengan dana dari APBN, lembaga hibah, CSR, dan kerjasama lainnya. Program penanganan permukiman kumuh tersebut meliputi:

1) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

   BSPS diinisiasi oleh Kementerian PUPR. Pemberian BSPS didasarkan pada readiness criteria yang diusulkan Bupati dan Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). BSPS di Kabupaten Situbondo dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Program peningkatan perumahan swadaya ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah

2) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan

3) Program PAMSIMAS

PAMSIMAS merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis mayarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Program ini telah dilaksanakan dari Tahun 2008, dan tahun ini disebut PAMSIMAS III. Indikator capaian Program PAMSIMAS III yang ditargetkan hingga tahun 2020, adalah :

- Akses air minum aman bagi 22,1 juta jiwa
- Akses sanitasi layak bagi 14,9 juta jiwa
- Minimal 60% masyarakat dusun sasaran mengadopsi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
- Minimal 70% masyarakat dusun sasaran mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
- Minimal 70% Pemerintah Daerah memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi
- Minimal 60% Pemerintah Daerah mempunyai peningkatan belanja di bidang air minum dan sanitasi

10.2 Peran Masyarakat

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011, peran masyarakat tidak hanya pada upaya pemenuhan rumah secara fisik, tetapi meliputi seluruh proses, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Sebagaimana didefinisikan, perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Maka peran masyarakat menjadi hal penting dalam penyelenggaraan permukiman, termasuk permukiman kumuh

Hak masyarakat diamanatkan secara jelas pada UU Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 129, bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak:

(a) menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
(b) melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
(c) memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
(d) memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
(e) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
(f) mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat

Sementara kewajiban masyarakat diatur dalam pasal 130 yaitu mewajibkan masyarakat ikut terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dalam bentuk:

(a) menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman;
(b) turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
(c) menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman; dan
(d) mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Secara tegas keterlibatan masyarakat disebutkan pada beberapa kegiatan, meliputi:

(a) kegiatan perencanaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
(b) konsolidasi tanah, dalam banyak literatur dikatakan bahwa kendala terbesar pembangunan perumahan adalah keterbatasan tanah yang diakibatkan oleh mahalnya harga tanah, bukti kepemilikan tanah yang

belum teradministrasi dengan baik, ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang

Di Kabupaten Situbondo, partisipasi masyarakat telah diinisiasi dengan membentuk Badan/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) pada masing-masing kawasan kumuh. Menurut website resmi program KOTAKU (kotaku.pu.go.id), Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) adalah wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, amanah dalam mengoordinir penanganan kumuh, dan memiliki empati terhadap warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BKM/LKM adalah nama "generik", dan dalam perjalanannya masyarakat boleh membentuk baru atau meneruskan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada, sesuai dengan prinsip dan nilai yang diusung, yakni "terpercaya". BKM/LKM merupakan lembaga pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga yang terdiri atas pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan. Keputusan dalam lembaga ini dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM/LKM, dengan musyawarah menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan

BKM/LKM mempunyai misi membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama, yang diharapkan kelak memperkuat kemandirian masyarakat untuk menuju tatanan masyarakat madani. Sedangkan modal sosial BKM adalah, pertama, menumbuhkan kerja sama dan kepercayaan antaranggota BKM/LKM sendiri. Kedua, menumbuhkan kerja sama dan kepercayaan antara BKM, dengan warga masyarakat, Pemerintah Daerah dan kelompok peduli. Ketiga, menumbuhkan kerja sama dan kepercayaan antarkelompok masyarakat. Keempat, menumbuhkan kerja sama dan kepercayaan antara BKM, masyarakat, dan pihak luar.

Selain BKM, terdapat pula Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di setiap kelurahan/desa. KPP ini berperan sebagaimana namanya yaitu sebagai pemanfaat dan pemelihatan infrastruktur yang telah dibangun di tingkat lingkungan. Melalui organisasi ini, diharapkan infrastruktur dapat dirawat dan dijaga sehingga masa pakainya jauh lebih lama. Anggotanya pun adalah masyarakat setempat, sehingga sense of belonging pada lingkungan sekitar lebih tercipta.

10.3 Peran Swasta

Secara umum keterlibatan swasta dalam penanganan permukiman kumuh sangat beragam. Mulai dari pengembangan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Selain itu, ketika menjadi developer, diwajibkan mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.

Selain itu, pihak swasta juga dapat berkontribusi terhadap pananganan permukiman kumuh seperti penanganan sampah, penyediaan air minum, peningkatan ekonomi masyarakat dan program lain. Umumnya swasta berkontribusi melalui dana CSR perusahaan.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI